

**STRATEGI PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
HALAL BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM
PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT
(KABUPATEN ACEH TENGAH)**

DISERTASI

OLEH

**SYARIPUDDIN
NIM: 4005183007**

**PROGRAM STUDI
S-3 EKONOMI SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Disertasi Berjudul

**STRATEGI PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA HALAL
BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT (ACEH TENGAH)**

Oleh:

Syaripuddin

NIM : 4005183007

Dapat disetujui dan disahkan pada ujian Sidang Terbuka

Program Studi Ekonomi Syari'ah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Medan, 6 April 2021

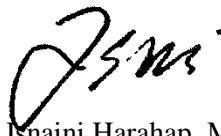
Promotor

Promotor I



Prof. Dr. Amur Nuruddin, M.A

Promotor II



Dr. Isnaini Harahap, M.A

PERSETUJUAN

Disertasi berjudul : **”STRATEGI PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA HALAL BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT (ACEH TENGAH)”** atas nama **Syaripuddin**, NIM.4005183007 Program Studi Ekonomi Syariah telah diujikan dalam Sidang Ujian Tertutup Program Doktor (S3), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021.


Disertasi ini telah diterima untuk memenuhi gelar Doktor (Dr.) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Medan 6 April 2021.

Panitia Sidang Ujian Tertutup Disertasi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan



Ketua


Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIDN. 2023047602


Sekretaris

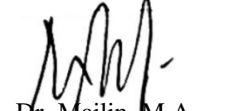
Dr. Marliyah, M.Ag
NIDN. 2026017602


Anggota



Prof. Dr. Amur Nuruddin, MA
NIDN. 2018055001


Dr. Isnaini Harahap, M.A
NIDN. 2020077503


Dr. Chuzaimah Batubara, M.A
NIDN. 2006077002


Dr. Mailin, M.A
NIDN. 2007097701


H. Hendri Tanjung, MM., M.Ag., M.Phil., Ph.D
NIDN. 0430057101


Mengetahui,
Dekan,
Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIDN. 2023047602

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syaripuddin
Nim : 4005183007
Tempat/Tgl.Lahir : Paya Pelu, 15 April 1983
Pekerjaan : Petani
Alamat : Takengon Timur, Dusun Boom, Kecamatan Lut Tawar,
Kabupaten Aceh Tengah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang berjudul “Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Berbasis Kearifan Lokal Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Aceh Tengah)” adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan itu menjadi tanggung jawab saya.

Demikian Surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Takengon, 18 Februari 2021

Yang membuat pernyataan



SYARIPUDDIN

ABSTRAK



Nama : Syaripuddin
NIM : 4005183007
Judul : Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Berbasis Kearifan Lokal Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Kabupaten Aceh Tengah)

Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Berbasis Kearifan Lokal Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat : Kabupaten Aceh Tengah. Menganalisis permasalahan tersebut peneliti menggunakan pendekatan *Analytic Network Process* (ANP) dengan bantuan *software Super Decision*, dengan melakukan analisis sintesis terhadap masalah, solusi, dan strategi. ANP merupakan salah satu metode pengambilan keputusan dengan skala prioritas. Hasil jawaban responden bahwa masalah prioritas adalah aspek eksternal yang menjadi prioritas yaitu masalah infrastruktur yaitu lemahnya infrastruktur dan kurang tersedianya transportasi. Sedangkan Solusi yang paling prioritas adalah solusi eksternal yaitu infrastruktur tersedianya infrastruktur yang memadai dan adanya transportasi atau travel. Dan strategi yang paling prioritas adalah peningkatan fasilitas, infrastruktur dan sinergisitas antara pemerintah dan pelaku usaha, sosialisasi dan promosi, peningkatan investasi di bidang pariwisata halal, pengembangan produk khas masyarakat Gayo, pengembangan produk pariwisata, dan sertifikasi pelaku usaha.

Kata Kunci : Pariwisata Halal, Kearifan Lokal, Perekonomian Masyarakat, ANP.

ABSTRACT



Name : Syaripuddin
NIM : 4005183007
Title : Halal Tourism Destination Development Strategy Based on Local Wisdom in Improving Community Economy (Central Aceh Regency Case Study)

Halal Tourism Destination Development Strategy Based on Local Wisdom in Improving Community Economy: Central Aceh Regency. Analyzing the problem, researchers used Analytic Network Process (ANP) approach with the help of Super Decision software, by analyzing synthesis of problems, solutions, and strategies. ANP is one of the decision making methods with priority scale. Respondents responded that priority issues are external aspects that are priorities, namely infrastructure problems, namely weak infrastructure and lack of transportation. While the most priority solution is external solutions, namely the availability of adequate infrastructure and the presence of transportation or travel. And the most priority strategies are the improvement of facilities, infrastructure and synergistic between the government and businesses, socialization and promotion, increased investment in halal tourism, development of typical products of the Gayo community, development of tourism products, and certification of businesses.

Keyword : Halal Tourism, Local Wisdom, Community Economy, ANP.

ملخص

الاسم : شريف الدن
رقم الطلاب معرف : ٤٠٠٥١٨٣٠٠٧
موضوع البحث : استراتيجية تنمية وجهة سياحية حلال تعتمد
على الحكمة في تحسين الاقتصاد
المجتمعي دراسة حالة لمنطقة أتشيه الوسط



لتحليل هذه المشكلات استخدم الباحث نهج عملية الشبكة التحليلية بمساعدة برنامج *Analytic Network Process (ANP)*، من خلال إجراء تحليل توليفي للمشكلات والحلول والاستراتيجيات ANP هي طريقة لاتخاذ القرار مع مقياس الأولوية. وكانت نتائج إجابة المستفتى أن المشكلة ذات الأولوية هي الجانب الخارجي الذي يصبح أولوية ، أي مشاكل البنية التحتية ، في حين أن المشكلة الأكثر أولوية التي تواجهها المتعلقة بالبنية التحتية هي مشكلة إصدار شهادات الحلال. أولوية الحل خارجية ، أي. الحل الحكومي الأكثر أولوية هو دعم الحكومة المحلية المحلية. والأولويات الاستراتيجية في تطوير وجهات السياحة الحلال المحلية القائمة على الحكمة في تحسين اقتصاد المجتمع هي تطوير منتجات غايو النموذجية ، والتنشئة الاجتماعية والترويج ، وإصدار الشهادات للفاعلين التجاريين ، وتحسين المرافق واللوائح والحوافز

الكلمات المفتاحية: السياحة الحلال ، الحكمة المحلية ، الاقتصاد المجتمعي ، الوكالة

الوطنية للموانع. ANP

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil'alamin,

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia serta izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan disertasi ini, kepada-Nya penulis memohonkan agar kita senantiasa mendapat hidayah, lindungan, berkah dan ridha-Nya. Salawat beriring salam kepada yang mulia Rasulullah Muhammad SAW, semoga kita semua termasuk umat yang dapat meneladani beliau untuk dapat beramal saleh dan mencapai derajat taqwa.

Penelitian ini disusun penulis melengkapi tugas untuk memperoleh gelar Doktor (Dr) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan, dengan judul disertasi : Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Berbasis Kearifan Lokal Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Aceh Tengah).

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan disertasi ini bukan hasil jerih payah sendiri, akan tetapi banyak pihak yang membantu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung hingga selesainya disertasi ini. Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara UINSU Medan
2. Dr. Muhammad Yafiz, MA, Dr. Marliyah Suryadi, MA Dr. Fauzi Arif Lubis, MA dan Dr. Mustafa Kamal Rokan, MH selaku Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam FEBI UINSU Medan
3. Dr. Andri Soemitra, MA dan Dr. Sugianto, MA, selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah (S3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU. Yang telah banyak membantu kami para mahasiswa dalam kelancaran proses administrasi dan sidang-sidang disertasi serta banyak

lainnya yang mempermudah kelancaran setiap mahasiswa dalam menempuh studi di program ini

4. Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution, MA, selaku promotor terimakasih banyak atas peran dan jasa Bapak dalam membantu kami, baik ilmu, bimbingan dan arahan dalam proses penyelesaian disertasi, dorongan pemikiran serta kesabaran dalam penyelesaian disertasi ini, Kesahajaan dan panutan keteladanan Bapak dalam setiap kesempatan semoga dapat kami ikuti
5. Dr. Isnaini Harahap, MA, selaku co-promotor yang sangat bersahaja dan sabar dalam membimbing saya berkenan memberikan waktu dan segala kemudahan serta arahan dan bimbingan dalam penyelesaian disertasi ini hingga selesai.
6. Bapak H. Hendri Tanjung, Ph.D, Dr. Chuzaimah Batubara, MA, Dr. Mailin, MA selaku penguji, terimakasih atas ilmunya ,segala masukan-masukannya yang bermanfaat, saran dan kritikan yang diberikan untuk perbaikan dan kesempurnaan disertasi ini.
7. Teristimewa ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua saya Ayahnda Ralin, Ibunda Kasminah yang telah merawat, membesarkan, membimbing dan senantiasa memberikan semangat, motivasi dan doa kepada penulis dengan penuh kasih sayang yang belimpah. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya.
8. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada keluarga penulis isteri tercinta yang selalu memotivasi penulis dalam menyelesaikan disertasi ini Septia Wahyuni, M.Pd dan anak-anakku tersayang, Ariyandy Athaillah dan Gania Zaniha Alfatunisa. Terima kasih atas semua doa dan dukungan yang kuat serta motivasinya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT, Amiin
9. Seluruh dosen S-3 dan tenaga kependidikan Ekonomi Syariah UINSU
10. Sahabat-sahabat kelas A dan B angkatan 2018 yang hebat yang telah memberikan bantuan, motivasi selama perkuliahan dan penyelesaian disertasi

Semoga seluruh kerja keras dan bantuan dari seluruh pihak tersebut diberikan imbalan pahala yang besar disisi Allah SWT. Karya besar ini tidak akan bisa terwujud tanpa bantuan dari seluruh pihak dan tentunya kemudahan yang diberikan Allah SWT dalam menyelesaikan disertasi ini. Semoga disertasi ini

bermanfaat bagi seluruh masyarakat, khususnya kepada para stakeholder yang bergelut dalam dunia pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini terdapat kekurangan- kekurangan dan kelemahan-kelemahan karena itu dengan kerendahan hati mohon kritikan dan saran dari pembaca untuk melengkapi penelitian ini. Dan kekurangan- kekurangan itu juga bisa disempurnakan oleh peneliti selanjutnya. Kepada Allah SWT penulis memohon ampun dan kepada seluruh stakeholder penulis minta maaf, semoga kita semua dalam keberkahan-Nya.

Takengon, Februari 2021
Penulis

SYARIPUDDIN

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan disertasi ini adalah pedoman transliterasi Arab-Latin Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543/b/u/1987. Di dalam naskah disertasi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Tentang pembakuan pedoman transliterasi Arab - Latin, sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	N a m a
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fatah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Damah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	
يَـ	Fatah dan Ya	Ai	a dan i
وَـ	Fatah dan Waw	Au	a dan u

Contoh:

<i>Kataba:</i>	كتب
<i>Fa'ala:</i>	فعل
<i>Žukira:</i>	ذكر
<i>Yazhabu:</i>	يذهب
<i>Su'ila:</i>	سئل
<i>Kaifa:</i>	كيف
<i>Haula:</i>	هول

3. Madah

Madahatau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dantanda	Nama
أَـ	Fatah dan Alif atau Ya	Ā	A dan garis di atas
إِـ	Kasrah dan Ya	Ī	I dan garis di atas
ؤُـ	Damah dan Wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

<i>Qāla:</i>	قال
<i>Ramā:</i>	رما
<i>Qīla:</i>	قيل
<i>Yaqūlu:</i>	يقول

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua:

- a. *Ta Marbutah* hidup. *TaMarbutah* hidup atau mendapat harkat fatah, kasrah dan damah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta Marbutah* mati. *TaMarbutah* yang mati atau mendapat harkat fatah sukun, transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan *TaMarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *TaMarbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (ha).

Contoh:

<i>Raudah al-Aifāl:</i>	روضة الأطفال
<i>Al-Madīnah al-Munawwarah:</i>	المدينة المنورة
<i>Al-Madīnatul Munawwarah:</i>	المدينة المنورة
<i>Talḥah:</i>	طلحة

5. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

<i>Rabbanā:</i>	ربنا
<i>Nazzala:</i>	نزل
<i>Al-Birr:</i>	البر
<i>Al-Hajj:</i>	الحج
<i>Nu'ima:</i>	نعم

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariah*.

a. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamaraiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

<i>Ar-Rajulu:</i>	الرجل
<i>As-Sayyidatu:</i>	السيدة
<i>Asy-Syamsu:</i>	الشمس
<i>Al-Qalām:</i>	القلام
<i>Al-Badī‘u:</i>	البدیع

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

<i>Ta'khuzūna:</i>	تأخذون
<i>An-Nau':</i>	النوء
<i>Syai'un:</i>	شيع
<i>Inna:</i>	ان
<i>Umirtu:</i>	امرت

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun *harf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innallāha lahua khair ar-rāziqīn: وان الله هو خير الرازقين

Wa innallāha lahua khairurāziqīn: وان الله هو خير الرازقين

Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna: فاوفوا الكيل و الميزان

Fa aufūl-kaila wal-mīzāna: فاوفوا الكيل و الميزان

Ibrāhīm al-Khalīl: ابرا هيم الخليل

Ibrāhīmūl-Khalīl: ابرا هيم الخليل

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf kata sandangnya.

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qur'ānu

Syahru Ramadānal-lazī unzila fīhil Qur'ānu

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Nasrun minallāhi wa fathun qarīb.

Lillāhi al-amru jamī'an.

Lillāhil-amru jamī'an.

10. Tajwid

Bagimerekadang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

11. Singkatan- singkatan

SINGKATAN-SINGKATAN

Singkatan	Kepanjangan
Swt.	سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
saw.	صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ra.	رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (untuk laki-laki) رَضِيَ اللهُ عَنْهَا (untuk perempuan)
Qs.	al-Qur`an surat
Ibid	Ibidem
terj.	Terjemahan
Ttp	Tanpa tempat penerbit
Tt	tanpa tahun
H	Hijriyah
M	Masehi
Cet.	Cetakan
h.	Halaman
No.	Nomor

DAFTAR ISI

LEMBAR PESETUJUAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Batasan Istilah	16
E. Kegunaan Penelitian.....	17
F. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Pariwisata Halal	19
1. Pengertian Pariwisata Halal	19
2. Pariwisata Dalam Al-Qur'an.....	33
3. Pariwisata Halal dan Pengembangan Ekonomi Islam.....	37
4. Pariwisata Dalam Perspektif Maqashid Syariah	40
5. Fatwa DSN-MUI Tentang Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah	53
6. Kriteria utama pariwisata halal	54
7. Produk wisata halal	58
8. Potensi Wisata Dalam Pemberdayaan Ekonomi	60
9. Pariwisata Halal Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	64

10. Sumber Daya Manusia dalam pariwisata Halal	65
11. Accessibility (Aksesibilitas).....	67
12. Strategi Pengembangan Pariwisata Halal.....	75
13. Peran Pariwisata Dalam Kesejahteraan Masyarakat	78
14. Destinasi Pariwisata	79
B. Perkembangan Pariwisata Halal.....	83
1. Indonesia	83
2. Dunia.....	87
C. Kearifan lokal dan pengembangan pariwisata halal.....	92
1. Pengertian Kearifan Lokal	92
2. Kearifan Lokal Dalam Perspektif Islam.....	94
3. Islam Dan Kearifan Lokal Masyarakat Gayo.....	95
4. Dampak Desa Wisata Terhadap Perekonomian Masyarakat	99
D. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	103
F. Kerangka Konseptual	110

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 116

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	116
B. lokasi Penelitian	116
C. Populasi dan Sampel.....	117
D. Sumber Data Penelitian.....	117
1. Data Primer	117
2. Data Skunder	118
E. Teknik Pengumpulan Data	118
1. Wawancara (<i>interview</i>)	118
2. Kuesioner	119
F. Teknik Analisa Data.....	120
G. Tahapan Penelitian	123
1. Kontruksi Model	124
2. Kuantifikasi Model.....	124
3. Sintensis dan Analisis Data.....	125

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	129
A. Gambaran Umum Penelitian	129
1. Geografi.....	129
2. Kependudukan.....	130
3. Kekayaan Ekologi Sebagai Potensi Pariwisata	131
4. Kondisi Sosial Budaya Sebagai Potensi Pariwisata	132
5. Kondisi Perekonomian Masyarakat Aceh Tengah.....	133
B. Perkembangan Pariwisata di kabupaten Aceh Tengah	134
C. Temuan Penelitian.....	151
D. Analisis Hasil Sintesis Penelitian.....	159
1. Hasil Analisis Hasil Sintesis Masalah.....	168
2. Analisis Hasil Sintesis Solusi.....	193
3. Analisis Hasil Sintesis Strategi	217
E. Pembahasan Hasil Penelitian	219
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	238
DAFTAR PUSTAKA	240

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan utama pariwisata halal dengan pariwisata konvensional.....	25
Tabel 2.2 Perbandingan Pariwisata halal (Syariah) dengan lainnya	31
Tabel 2.3 Paradigma Bisnis Syariah dan Konvensional	32
Tabel 2.4 Populasi dan Daya Beli Masyarakat Muslim.....	88
Tabel 2.5 Sepuluh besar negara tujuan OIC (Organization of Islamic Cooperation) dan Non-OIC Global Muslim Travel Index (GMTI)	88
Tabel 3.1 Daftar Informan/Responden Penelitian.....	119
Tabel 3.2 Definisi Skala Penilaian Dan Skala Numerik	121
Tabel 3.3 Tahapan Dan Waktu Penelitian.....	128
Tabel 4.1 Jumlah Kecamatan Yang Ada Di Aceh Tengah	130
Tabel 4.2 Rincian Jumlah Penduduk Setiap Kecamatan di Kabupaten Aceh tengah.....	131
Tabel 4.3 Hasil Sintesis Prioritas responden.....	159
Tabel 4.4 Hasil Geometric Mean Responden	166
Tabel 4.5 Hasil Rater Agreement Responden.....	168

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Perkembangan Wisata Syariah.....	85
Gambar 2.2	Perkembangan Destinasi Pariwisata Halal Unggulan	86
Gambar 2.3	Sistem Nilai Budaya Gayo	98
Gambar 2.4	kerangka kerja Identifikasi	111
Gambar 3.1	Tahapan Penelitian Pada Metode ANP	123
Gambar 3.2	Contoh Grafik Hasil <i>Geometric Mean</i>	128
Gambar 4.1	Danau Lut Tawar.....	135
Gambar 4.2	Pantan Terong	136
Gambar 4.3	Pante Menye.....	137
Gambar 4.4	Air Terjun Mengaya	138
Gambar 4.5	Bur Telege	139
Gambar 4.6	Ujung Paking.....	139
Gambar 4.7	Galeri Kopi Indonesia	140
Gambar 4.8	Agrowisata Nenas	140
Gambar 4.9	Umah Pitu Ruang	141
Gambar 4.10	Loyang/Ceruk Mendale.....	142
Gambar 4.11	Gua Puteri Pukes	143
Gambar 4.12	Gua Loyang Datu	144
Gambar 4.13	Atu Belah.....	144
Gambar 4.14	Gua Loyang Koro.....	145
Gambar 4.15	Masjid Tue Kebayakan.....	146
Gambar 4.16	Rumah Adat Batulantara	147
Gambar 4.17	Dermaga Wisata Lukup Penalan	148
Gambar 4.18	Arung Jeram Lukup Badak	148
Gambar 4.19	Kawasan Kuliner Teluk One-One	149
Gambar 4.20	Kopi Gayo	149

Gambar 4.21 Cendra Mata	150
Gambar 4.22 Kerangka Kerja Identifikasi	153
Gambar 4.23 Gambar Kerangka Model ANP	159
Gambar 4.24 Hasil Sintesis Prioritas Masalah Berdasarkan Nilai Rata-Rata	169
Gambar 4.25 Hasil Sintesis Prioritas Masalah Internal Berdasarkan Nilai Setiap Responden.....	170
Gambar 4.26 Hasil Sintesis Prioritas Masalah Internal Berdasarkan Nilai Rata-Rata	171
Gambar 4.27 Hasil Sintesis Prioritas Masalah Internal Berdasarkan Nilai Setiap Responden.....	172
Gambar 4.28 Hasil Sintesis Prioritas Masalah Internal pariwisata Berdasarkan Nilai Rata-Rata	174
Gambar 4.29 Hasil Sintesis Prioritas Masalah Internal Pariwisata Berdasarkan Nilai Rata-Rata	175
Gambar 4.30 Hasil Sintesis Prioritas Masalah Sumber Daya Manusia/Lokal Berdasarkan Nilai Rata-Rata	177
Gambar 4.31 Hasil Sintesis Prioritas Masalah Sumber Daya Manusia/Lokal Berdasarkan Nilai Setiap Responden	178
Gambar 4.32 Hasil Sintesis Prioritas Masalah Promosi Berdasarkan Nilai Rata-Rata	180
Gambar 4.33 Hasil Sintesis Prioritas Masalah Promosi Berdasarkan Nilai Setiap Responden.....	181
Gambar 4.34 Hasil Sintesis Prioritas Masalah Eksternal Berdasarkan Nilai Rata-Rata	183
Gambar 4.35 Hasil Sintesis Prioritas Masalah Eksternal Berdasarkan Nilai Setiap Responden.....	184
Gambar 4.36 Hasil Sintesis Prioritas Masalah Pemerintah Berdasarkan Nilai Rata-Rata	185
Gambar 4.37 Hasil Sintesis Prioritas Masalah pemerintah Berdasarkan Nilai Setiap Responden.....	186
Gambar 4.38 Hasil Sintesis Prioritas Masalah Otoritas Berdasarkan Nilai Rata-Rata	188
Gambar 4.39 Hasil Sintesis Prioritas Masalah Standar Hukum Berdasarkan Nilai Setiap Responden.....	189
Gambar 4.40 Hasil Sintesis Prioritas Masalah Infrastruktur Berdasarkan Nilai Rata-Rata	191
Gambar 4.41 Hasil Sintesis Prioritas Masalah Infrastruktur Berdasarkan Nilai Setiap Responden.....	192
Gambar 4.42 Hasil Sintesis Prioritas Solusi Internal Berdasarkan Nilai	

	Rata-Rata	194
Gambar 4.43	Hasil Sintesis Prioritas Solusi Internal dan Solusi Eksternal Berdasarkan Nilai Setiap Responden.....	195
Gambar 4.44	Hasil Sintesis Prioritas Solusi Internal Berdasarkan Nilai Rata-Rata	196
Gambar 4.45	Hasil Sintesis Prioritas Solusi Internal Pariwisata Berdasarkan Nilai Setiap Responden	197
Gambar 4.46	Hasil Sintesis Prioritas Solusi Pariwisata Berdasarkan Nilai Rata-Rata	198
Gambar 4.47	Hasil Sintesis Prioritas Solusi Internal Pariwisata Berdasarkan Nilai Setiap Responden.....	199
Gambar 4.48	Hasil sintesis prioritas solusi sumber daya manusia/ lokal berdasarkan nilai rata-rata.....	200
Gambar 4.49	Hasil Sintesis Prioritas Solusi Sumber Daya Manusia/ Lokal Berdasarkan Nilai Rata-Rata	201
Gambar 4.50	Hasil Sintesis Analisis prioritas Solusi Promosi berdasarkan nilai Rata-Rata	203
gambar 4.51	Hasil Sintesis Prioritas Solusi Promosi Berdasarkan Nilai Setiap Responden.....	204
Gambar 4.52	Hasil Sintesis Analisis prioritas Solusi Eksternal berdasarkan nilai Rata-Rata	206
gambar 4.53	Hasil Sintesis Prioritas Solusi Eksternal Berdasarkan Nilai Setiap Responden.....	207
Gambar 4.54	Hasil Sintesis Analisis prioritas Solusi Pemerintah berdasarkan nilai Rata-Rata	208
gambar 4.55	Hasil Sintesis Prioritas Solusi pemerintah Berdasarkan Nilai Setiap Responden.....	209
Gambar 4.56	Hasil Sintesis Analisis prioritas Solusi Standar Hukum Berdasarkan Nilai Rata-Rata	211
Gambar 4.57	Hasil Sintesis Prioritas Solusi Standar Hukum Berdasarkan Nilai Setiap Responden.....	212
Gambar 4.58	Hasil Sintesis Analisis prioritas Solusi Infrastruktur Berdasarkan Nilai Rata-Rata	215
Gambar 4.59	Hasil Sintesis Prioritas Solusi infrastruktur Berdasarkan Nilai Setiap Responden.....	216
Gambar 4.60	Hasil Sintesis Prioritas Solusi Strategi Berdasarkan Nilai Rata-Rata	217
Gambar 4.61	Hasil Sintesis Prioritas Strategi Berdasarkan Nilai Rata-Rata	218

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi Islam pada saat sekarang ini telah merambah kepada produk-produk yang dibutuhkan oleh umat muslim tidak hanya terbatas pada sektor keuangan syariah atau lembaga keuangan lainnya akan tetapi ekonomi Islam telah berkembang ke berbagai sektor lain, seperti kuliner, industri asuransi, fashion, komestik, farmasi, bahkan pada saat sekarang ekonomi Islam telah berkembang pada sektor industri pariwisata halal.

Potensi alam, budaya, dan buatan yang dimiliki oleh setiap negara dapat menjadi modal utama dalam pengembangan pariwisata sehingga dapat menjadi penggerak roda perekonomian. Peranan sektor pariwisata nasional semakin menunjukkan sentimen positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia salah satunya adalah kontribusinya terhadap penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja serta pengembangan usaha masyarakat yang tersebar di berbagai pelosok wilayah di Indonesia.

Salah satu keunggulan sektor pariwisata adalah kemampuannya dalam mendongkrak pertumbuhan sektor lain yang berkaitan dengan kegiatan wisata antara lain : jasa akomodasi, jasa makanan, minuman, jasa transportasi (baik darat, laut, udara), jasa penyewaan alat alat transportasi, jasa agen travel dan reservasi lainnya, jasa budaya, jasa olah raga dan rekreasi, produksi barang yang menjadi ciri wisata khas suatu Negara/daerah.¹

Hal ini dapat kita lihat dari data kementerian pariwisata pada tahun 2016, peran industri pariwisata kepada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun 2014 telah mencapai 9 % atau sebesar Rp 946,09 triliun. Sementara devisa dari sektor pariwisata pada tahun 2014 telah mencapai Rp 120 triliun dan kontribusi terhadap kesempatan kerja sebesar 11 juta orang. Dengan mekanisme dan dukungan

¹Hefriansyah, Analisis Problematika Pengembangan Potensi Pariwisata Halal Kota Pematang Siantar Sebagai Penyangga Destinasi Prioritas Danau Toba', 2020.

pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan sektor pariwisata, antara lain tersedianya hotel, restoran, angkutan, industri kerajinan dan lain-lain dengan adanya *multiplier effect*, akan berdampak kepada pergerakan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan akan mengurangi tingkat kemiskinan.²

Pada, rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) pada tahun 2015-2019 pertumbuhan pariwisata menjadi salah satu strategi dari akselerasi dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah membuat program pembangunan pariwisata yang dilaksanakan dengan berbagai kebijakan dengan strategi dengan pengembangan pasar wisatawan, pengembangan ciri khas pariwisata, pengembangan kerjasama pemasaran pariwisata, dan juga pengembangan promosi pariwisata. Semua strategi tersebut dilakukan dengan tujuan pertumbuhan pariwisata akan tercapai. Tujuan pengembangan sektor pariwisata adalah untuk meningkatnya usaha lokal dalam industri pariwisata dan dapat merekrutmen tenaga kerja lokal yang dibutuhkan dengan tujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan pada suatu daerah tersebut.³

Kalau kita merujuk kepada UU no 10 Tahun 2009; tentang kepariwisataan menyebutkan bahwa wisata merupakan suatu aktivitas kegiatan perjalanan yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mendatangi objek-objek tertentu dengan tujuan untuk rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.⁴ Industri kepariwisataan mempunyai beberapa tujuan diantaranya untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat guna untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

² LPEM, *Kajian Dampak Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Indonesia*, Laporan Akhir, Jakarta: Universitas Indonesia, 2018.

³ LPEM, *Kajian Dampak Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Indonesia*, Laporan Akhir, Jakarta: Universitas Indonesia, 2018.

⁴ Undang-Undang Nomor, 10 'Tahun 2009', *Tentang Kepariwisata*, 16 (10AD).

Pengembangan pariwisata halal menjadi alternatif bagi industri pariwisata di Indonesia seiring dengan tren pariwisata halal yang menjadi bagian dari industri ekonomi Islam global.⁵ Pariwisata halal di Indonesia memiliki prospek ekonomi yang baik, sebagai bagian dari industri pariwisata nasional. Industri pariwisata ini bertujuan bukan hanya memberikan aspek material dan psikologis bagi wisatawan itu sendiri, melainkan juga memiliki kontribusi dalam peningkatan pendapatan pemerintah. Wisata halal ini tidak bersifat eksklusif, namun inklusif bagi semua wisatawan (Muslim dan Non-Muslim). Inti dari wisata halal menekankan prinsip-prinsip syari'ah dalam pengelolaan pariwisata dan pelayanan yang santun dan ramah bagi seluruh wisatawan dan lingkungan sekitarnya. Karena itu, untuk mewujudkan Indonesia sebagai kiblat wisata halal dunia, maka strategi pengembangannya diarahkan pada pemenuhan indeks daya saing pariwisata sebagai indikator-indikator utamanya, antara lain melakukan pembenahan infrastruktur, promosi, penyiapan sumber daya manusia, khususnya peningkatan kapasitas pelaku usaha pariwisata.⁶

Menurut Patwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) wisata halal atau wisata syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah.⁷ Destinasi wisata halal adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip Syariah.⁸ Dari definisi diatas bahwa destinasi pariwisata halal tersedianya sarana dan prasarana untuk umat muslim dengan tujuan bagaimana kita tetap menjalankan kewajiban kita sebagai

⁵ Zakiah Samori, Nor Zafir Md Salleh, and Mohammad Mahyuddin Khalid, 'Current Trends on Halal Tourism: Cases on Selected Asian Countries', *Tourism Management Perspectives*, 19 (2016), 131–36.

⁶ Aan Jaelani, 'Industri Wisata Halal Di Indonesia: Potensi Dan Prospek (Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects)', *MPRA Paper*, 429.27 (2017), 884–921.

⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 1 08/Dsn-Mui{x12} 1 6 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah', 2016.

⁸ 'Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 1 08/Dsn-Mui{x12} 1 6 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah'.

umat muslim untuk melaksanakan shalat, dengan itulah perlunya hadir pariwisata halal untuk memenuhi kebutuhan umat muslim dalam wisata halal.

Menurut *Committe for Commercial and Economic Corporation (Comcec)* yang berasal dari Turki, ada tiga komponen penting dalam pengembangan pariwisata halal; Kebutuhan dasar yang terkait dengan peningkatan keimanan wisatawan, permintaan dan penawaran pariwisata halal. ada 6 (Enam) kebutuhan dasar yang harus dipenuhi meliputi makanan dan minuman halal, tempat shalat, penggunaan toilet berbasis air, pelayanan dan pemenuhan fasilitas ramadhan, fasilitas yang terbebas dari unsur non halal, fasilitas rekreasi yang bersifat privasi.

Permasalahan berkaitan dengan komponen pertama ini adalah masih banyaknya destinasi pariwisata halal yang tidak konsisten dalam pemenuhan ketersediaan restoran halal. Begitu juga dengan pemenuhan fasilitas tempat shalat dan ketersediaan toilet. Permasalahannya terletak pada kebersihan tempat, ketersediaan fasilitas untuk perempuan, dan pemeliharannya. Pelayanan dan pemenuhan fasilitas ramadhan, fasilitas yang terbebas dari unsur non halal, fasilitas rekreasi yang bersifat privasi juga masih belum maksimal terpenuhi di destinasi pariwisata halal. Untuk pengembangannya, Fasilitas-fasilitas dasar ini harus terpenuhi di tempat-tempat strategis wisatawan.⁹

Wisata halal adalah wisata yang diperuntukkan bagi wisatawan muslim yang dalam menjalankannya sangat perpegang teguh dengan aturan-aturan atau norma syariah. Wisata halal tidak hanya berkunjung ke lokasi-lokasi atau bangunan yang bernuansa religi saja, akan tetapi lebih dari itu, saat sekarang ini perkembangan pariwisata halal telah berkembang pada sektor lain seperti wisata alam, wisata atraksi dan wisata buatan yang pada prinsipnya bagaimana memprioritaskan pelayanan yang berbasis standar halal umat muslim. Antara lain menyediakan sajian yang halal, seperti makanan dan minuman yang halal tersedianya sarana dan prasarana ibadah, dan tersedianya toilet yang terpisah antara

⁹ Muslim Friendly Tourism, 'Understanding the Demand and Supply Sides in the OIC Member Countries', Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of The Organization of Islamic Cooperation (COMCEC) Coordination Office, 28 (2016).

laki-laki dan perempuan dan melarang hiburan yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Wisata halal salah satu industri pariwisata yang pelaksanaannya menuntut para pengunjung dan para pengelola objek wisata untuk memenuhi segala aturan-aturan syariah di dalam segala aktivitasnya, dalam wisata halal lebih memprioritaskan penyajian berdasarkan standar halal bagi umat muslim. Dalam model dan konsep wisata halal menerapkan dan pengintegrasian nilai-nilai Islam ke dalam seluruh aspek kegiatan wisata. Dalam wisata halal memperhatikan nilai-nilai dasar umat muslim dalam pelaksanaannya mulai dari akomodasi, restoran, tempat penginapan sampai aktivitas wisata yang berpedoman kepada aturan-aturan keislaman dan menjahui segala aspek yang dilarang di dalam ajaran agama Islam.

Sedangkan komponen penawaran pariwisata halal berkaitan dengan layanan rumah sakit, dan fasilitas pendukung lainnya seperti ketersediaan terminal transportasi, layanan transportasi, layanan akomodasi, operator biro perjalanan, ketersediaan sumber daya manusia yang profesional, dan destinasi wisata yang menarik. Dalam banyak kasus, target promosi biro perjalanan wisata hanya fokus kepada wisatawan *outbound* (*outbound traveler*), bukan kepada wisatawan *inbound* (*inbound traveler*).

Permasalahan intinya terletak pada ketidaktersediaan promosi paket wisata ke wisatawan. Dengan demikian, diharapkan adanya pelatihan dan pendidikan kepada biro-biro perjalanan untuk bisa memaksimalkan potensi pariwisata yang ada. Begitu juga dengan sumber daya manusia yang tersedia, harus dapat diberdayakan dan menjadi perhatian utama dalam pengembangan pariwisata halal.¹⁰ Sedangkan penekanan pengembangan pariwisata halal terletak pada faktor-faktor tempat, produk (akomodasi, makanan dan minuman), faktor penting dimensi (seperti ekonomi, budaya dan agama), dan manajemen pelayanan (marketing, dan aspek-aspek etika).

Perjalanan wisata di dalam Islam, sebagaimana halnya kegiatan lain, harus terikat pada ketentuan syariah. Di dalam Al-Quran dan Hadist terdapat banyak

¹⁰ Ibid

penjelasan dalam kegiatan perjalanan baik dari sisi tujuan, motif, cara, dan bentuk bentuk perjalanan, Didalam Al-Qur'an misalnya, Allah Subhana Wata'ala berfirman dalam surah Al-An'am Ayat 11.

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿١١﴾

Artinya: "Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu."¹¹

Begitu pentingnya melakukan perjalanan di muka bumi ini dengan tujuan untuk mencari pelajaran dan hikmah, Allah SWT. Mengulangi ayat yang nyaris sama terdapat dalam Alqur'an surah An-Naml ayat 69.

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٦٩﴾

Artinya : "Berjalanlah kamu (di muka) bumi, lalu perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang berdosa".¹²

Pada ayat diatas sangat jelas bahwa, Allah SWT menganjurkan manusia agar melakukan perjalanan di muka bumi ini guna menemukan jawaban dan bukti bahwa orang-orang yang mendustakan kebenaran Tuhan ditimpa azab yang pedih, Allah menganjurkan manusia untuk melakukan perjalanan guna menemukan jawaban dan bukti bahwa hidup orang-orang yang berdosa berkahir dengan malang. Intinya, melancong atau berwisata memiliki tujuan spiritual, yakni untuk meningkatkan keimanan kepada Tuhan dan mengakui kebesarannya.¹³ Dalam ayat lain yang terdapat dalam Al Qur'an surah Al-Ankabut 20 :

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ

الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

¹¹ QS. surah Al-An'am Ayat 11

¹² QS. Surah An-Naml : 69

¹³ Ibid h 49

Artinya : "Berjalanlah di (muka) bumi, Maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.¹⁴

Sudah banyak penjelasan yang dikemukakan melalui ayat-ayat yang lalu guna membuktikan kekuasaan Allah dan keniscayaan hari kiamat. Kaum musyrikin belum juga menyambut baik penjelasan-penjelasan itu. Karena itu ayat di atas memerintahkan Nabi Muhammad SAW bahwa : katakanlah kepada mereka: kalau kamu belum juga memercayai keterangan-keterangan diatas, antara lain yang disampaikan oleh leluhur kamu dan bapak para Nabi, yakni Nabi Ibrahim, maka berjalanlah di muka bumi ke mana saja kaki kamu membawa kamu, lalu dengan segera walau baru beberapa langkah kamu melangkah. Perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk yang beraneka ragam manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Kemudian Allah menjadikannya di kali lain setelah penciptaan pertama kali itu. *Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*¹⁵ Selanjutnya di dalam QS. Surah Al-Mulk :15 dijelaskan :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ

النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya : Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.¹⁶

Ibnu Asyur dalam *al-Tahrir wa al-Tanwir* menjelaskan bahwa Allah SWT menjadikan bumi dan segala kenikmatannya bukan hanya sekadar dijelajahi, melainkan untuk dikenali dan disadari manusia bahwa bumi dan segala isinya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan cara ditanam, dipupuk, diolah dan ditunai dari, oleh dan untuk manusia. Untuk itu, redaksi *famsyu fi manakibiha* memiliki maksud *lithalabir rizqi wal makasib* (mencari rezeki yang

¹⁴ QS Al-Ankabut 20

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

¹⁶ QS. Al-Mulk.15

halal dan mencari nafkah). Selanjutnya setelah memakan sebagian dari rezeki-Nya, hendaknya manusia kembali mengorientasikan dirinya kepada Allah SWT sebagai bekal menuju kehidupan akhirat kelak.

Penegasan dalam Alqur'an pada ayat diatas menjadi bukti bahwa Allah memerintahkan umatnya untuk menjelajahi Bumi dan mendorong kita untuk berusaha semaksimal mungkin dalam bekerja, sebab Allah tidak akan membatasi kita dalam mencari penghasilan. *Traveling* tidak hanya terbatas pada pengertian sempit seperti tamasya atau kunjungan kerja, namun juga meliputi segala gerak atau langkah kita dari satu tempat ke tempat lain yang dibarengi dengan niat ibadah.

Perkembangan pariwisata halal dunia dimulai sejak tahun 2000 dari pembahasan pertemuan Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Pariwisata halal merupakan pariwisata yang fleksibel, rasional, sederhana dan seimbang. Wisata halal atau *halal tourism* adalah salah satu sistem pariwisata yang diperuntukan bagi wisatawan, baik untuk wisatawan muslim maupun non-muslim yang pelaksanaannya mematuhi aturan syariah. Di Indonesia wisata halal diperkenalkan mulai sejak tahun 2012. Dari sisi industri, wisata halal merupakan suatu produk pelengkap dan tidak menghilangkan jenis pariwisata konvensional.

Pemerintah Indonesia melalui Kemenpar menarik traveler muslim lewat wisata halal. Ada 11 destinasi wisata halal dalam negeri yang jadi unggulan yakni; Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Lombok. ujar Ketua Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal.

Dengan ditetapkannya Aceh sebagai daerah destinasi wisata halal maka ini merupakan pintu masuk untuk mengembangkan pariwisata halal yang ada di Aceh, terutama Aceh Tengah. Dari sisi pariwisata Aceh telah banyak menerima penghargaan yang diberikan kepada pemerintah Aceh sebagai pariwisata halal seperti *World Halal Tourism Award* pada tahun 2016 di Dubai Aceh memenangkan dua kategori yaitu *World's Best Airport for Halal Travelers* dan *World's Best Halal Cultural Destination* keduanya masuk dalam daftar lima besar terbaik di kategorinya masing-masing, untuk kategori budaya halal Aceh bersaing dengan

Mekkah, Malaysia, Palestina, dan Arab Saudi. Sedangkan untuk kategori Bandar udara, bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) bersaing dengan Doha Hamid Internasional Airport, Dubai Airport, King Abdul Azeez Internasional Airport, dan Kuala Lumpur Internasional Airport.

Pada tahun 2016 dari segi wisata, Aceh meraih tiga kategori dalam kompetisi pariwisata halal nasional, yaitu Aceh sebagai destinasi budaya ramah wisatawan muslim terbaik. Bandara sultan Iskandar muda sebagai bandara ramah wisatawan muslim terbaik dan masjid raya baiturrahman sebagai daya tarik wisata terbaik. Pada tahun 2019 Aceh berhasil meraih peringkat kedua sebagai destinasi wisata halal Indonesia dari 5 provinsi di Indonesia melalui standar Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2019 yang mengacu pada standar Global Muslim Travel Index (GMTI). Standar IMTI mengadopsi 4 kriteria GMTI yang meliputi (1) akses 2. komunikasi, 3 lingkungan hidup, dan 4, pelayanan, dimana masing-masing kriteria tersebut memiliki 3 komponen penting lainnya yang akan menentukan sebuah daerah terpilih sebagai destinasi wisata halal nasional dan internasional.

Aceh sebagai daerah destinasi wisata, sesungguhnya mempunyai potensi yang dapat dikembangkan destinasi pariwisata halal. Ada empat alasan untuk pernyataan tersebut, *pertama*, Aceh merupakan salah satu daerah dengan mayoritas penduduk Islam dan telah menerapkan syariat Islam di Indonesia, kalau digali dan dikembangkan akan mempunyai peluang yang sangat potensial dengan hanya mengandalkan wisatawan domestik.

Kedua, Aceh memiliki banyak sejarah tentang penyiaran Agama Islam dan memiliki peninggalan bersejarah yang bernuansa Islam, tentu saja hal ini merupakan potensi yang besar untuk pengembangan pariwisata halal. Aceh merupakan daerah dengan mayoritas penduduk muslim, tentu saja sangat berpengaruh dalam budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakatnya, sehingga tidak sulit bagi wisatawan atau turis Muslim untuk berbaur dengan masyarakat setempat atau dengan kata lain masyarakat Aceh merupakan masyarakat yang ramah terhadap wisatawan dan sangat menghargai tamu.

Ketiga, jumlah wisatawan yang datang ke Aceh mengalami peningkatan. Kunjungan wisman dari masing-masing wilayah negara asal cenderung mengalami fluktuasi dari tahun 2013 – 2017. Wisman yang mendominasi berasal dari wilayah ASEAN yang cenderung mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2013 berjumlah 11.473 orang, meningkat di tahun 2014 menjadi 20.258 orang, kemudian meningkat lagi pada 2015 menjadi sebanyak 21.813 orang, dan terus meningkat hingga tahun 2016 yang berjumlah 29.753 orang, namun menurun di tahun 2017 menjadi 26.373 orang. Jumlah wisman yang berasal dari wilayah ASEAN di tahun 2017 menurun sebesar 11,36 persen dibandingkan tahun 2016, namun mengalami peningkatan sebesar 129,87 persen dibandingkan 5 tahun yang lalu.¹⁷ *Keempat*, Aceh memiliki banyak destinasi pariwisata . namun ke empat potensi diatas belum dimanfaatkan secara optimal.

Sektor pariwisata mempunyai arti penting bagi perekonomian daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, di daerah Aceh Tengah misalnya sektor pariwisata tidak berdampak terhadap perekonomian daerah bila dibandingkan dengan sektor lain. Pada hal daerah ini terdapat banyak objek wisata yang indah seperti wisata alam, antara lain (1) Pantan Terong yang terletak di daerah Desa Bahgie, Kecamatan Bebesen, (2) Bur Telege yang terletak di kampung Bale, (3) Gua Loyang koro terletak di kampung Toweren, Kecamatan Lut Tawar, (4) Air Terjun Mengaya Desa Mengaya, Kecamatan Bintang, (5) Pantai Menye Bintang Desa Genuren Kecamatan Bintang (6) Ujung Paking Kecamatan Bintang, (7) Gua Putri Pukes Desa Mendale Kecamatan Kebayakan, (8) Wih Pesam Kecamatan Silih Nara, (9) Galeri Kopi Indonesia Desa Kayu Kul, Kecamatan Pegasing, (10) Agrowisata Nanas Desa Kayukul, Kecamatan Pegasing, (11) Danau Laut Tawar Takengon ; Potensi Daya Tarik Wisata Sejarah dan Budaya, antara lain (1) Loyang Mendale Desa Mendale Kecamatan Kebayakan, (2) Peninggalan Rumah Safruddin Prawiranegara Kecamatan Silih Nara, (3) Arena Pacuan Blang Babangka Kuda Kecamatan Pegasing, (4) Gua Loyang Ujung Karang Kecamatan Lut Tawar, (5) Umah Pitu Ruang Linge Kampung Buntul, Kecamatan Linge, (6) Kuburan Raja

¹⁷ Badan Pusat Statistika (aceh tengah, 2019).

Linge Kecamatan Linge, (7) Rumah Raja Baluntara Desa Toweren, (8) Istana Reje Uyem Reje Bukit ; potensi daya tarik wisata buatan antara lain (1) Water Park Mimi Nawa, Pademun, (2) Dermaga Wisata Lukup Penalan, (3) Atu Tamon Resort Mendale, Kecamatan Kebayakan, (4) Water Park Pegasing Pegasing, Kecamatan Pegasing, (5) Dermaga wisata pante menyee Kecamatan Bintang (6) dermaga wisata Kecamatan Kebayakan (7) dermaga Dedalu kecamatan lut tawar dan potensi daya Tarik Wisata Kuliner antara lain (1) Kawasan Kuliner Teluk One-one Desa One-one, Kecamatan Lut Tawar , (2) Galeri Kopi Gayo Indonesia (3) Kerajinan Kerawang Gayo Kecamatan Bebesen.¹⁸

Potensi wisata yang besar ini belum diikuti dengan jumlah jumlah wisatawan yang berkunjung. Hal ini disebabkan karena minimnya promosi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan belum tersedianya fasilitas yang dibutuhkan oleh wisatawan, seperti sarana hotel, transportasi dan infrastruktur lainnya serta aksesibilitas transportasi yang terbatas.¹⁹

Selain minimnya fasilitas, pariwisata sebagai industri yang sedang berkembang pesat saat ini, diharapkan dapat berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat lokal (Aceh Tengah) membuka lapangan pekerjaan, mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat juga dihadapkan pada tantangan lain yaitu pandangan masyarakat. Pada umumnya banyak masyarakat yang berpandangan bahwa pariwisata merupakan tempat berbuat maksiat, perjudian dan lainnya, maka untuk menjawab keraguan masyarakat tersebut maka perlu dikembangkan suatu destinasi pariwisata yang sesuai dengan ajaran Islam.

Untuk mendukung berkembangnya destinasi pariwisata halal, dan menghilangkan pemahaman yang salah tentang pariwisata, maka pemerintah daerah perlu membuat regulasi dalam bentuk qanun tentang pariwisata halal. dengan qanun ini para pelaku usaha dapat mengacu kepada aturan yang jelas tentang konsep dasar dan standarisasi halal yang digunakan untuk mengembangkan

¹⁸ Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Aceh Tengah Takengon, 2017.

¹⁹ Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Aceh Tengah. 2017

sarana dan prasarana yang sesuai dengan konsep wisata halal. Sebagai contoh keberhasilan NTB menerapkan pariwisata halal karena telah dibuat aturan oleh pemerintah daerah tersebut dengan membuat perda tentang pariwisata halal.²⁰

Selain qanun keberadaan infrastruktur atau fasilitas sangat penting dalam pengembangan industri pariwisata halal. Kabupaten Aceh Tengah sebagai kabupaten daratan tinggi masih ditemukan beberapa hambatan pada aspek aksesibilitas (ketersediaan moda transportasi darat dan udara) serta konektivitas antar wilayah kecamatan dan desa masih sangat terbatas. Pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan dimaksudkan untuk meningkatkan aksesibilitas perhubungan serta mengurangi tingkat keterisolasian dan kesenjangan antar wilayah. Pembangunan infrastruktur wilayah yang memadai pada gilirannya akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Di luar Kota Takengon, ketersediaan fasilitas infrastruktur belum cukup banyak, seperti listrik, air bersih (PDAM), telekomunikasi, jalan umum, jaringan informasi umum radio dan televisi.

Selain infrastruktur dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang mengerti dan memahami tentang pariwisata halal, untuk mewujudkannya diperlukan Pelatihan dan bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh dinas terkait yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam bagi pemandu wisata dan para pengelola destinasi pariwisata yang ada di Aceh Tengah. Selain itu perlu dilakukan promosi kepada khalayak bahwa pariwisata yang ada di Aceh Tengah memiliki brand halal yang menjadi daya tarik tersendiri, menjadi pembeda bila dibandingkan dengan daerah lain. Selain halalnya tetap mempromosikan budaya dan kearifan lokal masyarakat Gayo.

Salah satu hal penting lainnya bagaimana menjaga berbagai tradisi yang ada pada masyarakat Aceh Tengah, yang kemudian dikemas secara baik, lalu dijadikan sebagai objek pariwisata halal. Pada masyarakat Gayo, agama dengan adat seperti zat dengan fisik, dalam bahasa Gayo berbunyi : *Edet mengenal hukum mubeza kuet*

²⁰ Rahmat saleh and nur anisah, 'pariwisata halal di aceh: gagasan dan realitas di lapangan', sahafa journal of islamic communication, 1.2 (2018), 79–92 <<https://doi.org/10.21111/sjic.v1i2.2849>>.

edet muperala agama rengang edet benasa nama Maknanya bahwa “adat mencari hukum dijadikan neraca bila kuat adat dipeliharalah agama Renggang adat rusak nama”. *Edet munukum musifet ujud ukum munukum musifet kalam edet sifetni resam, resam itinya edete* Maknanya bahwa “adat menghukum bersifat wujud hukum menghukum bersifat pasti adat sifatnya resam, ditinjau adat” *Edet atan astana, hukum atan agama dewe hadist ulaken ku ferman dewe edet ulaken ku empue* Maknanya bahwa “sumber edet dari istana, hukum dalam agama berselisih pendapat tentang hadist kembalikan ke firman berselisih pendapat tentang adat kembalikan kepada empunya” *Edet turah berujud fiil turah berupe semi turah bertubuh* Maknanya adalah “adat harus dibuktikan fiil harus mempunyai rupa semi harus bertubuh”.²¹

Dari pendapat diatas sangat jelas bahwa adat Gayo sebagai kearifan lokal (*lokal wisdom*) sangat melekat dengan agama, bahkan tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifatnya sebagai mana yang dijelaskan diatas. Adat Gayo sebagai bagian dari budaya Gayo diyakini mempunyai nilai-nilai yang mengatur masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan termasuk menunjang pelaksanaan aspek keislaman yang sudah terpadu dengan nilai dan norma adat Gayo sejak lama, karena nilai dan norma adat Gayo tidak bertentangan dengan nilai-nilai dalam ajaran agama tauhid. Lebih lanjut dijelaskan bahwa nilai-nilai adat Gayo merupakan nilai adat yang dipengaruhi oleh Alqur’an dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW, sehingga secara sosial dan kultural masyarakat Gayo diikat oleh dua kelompok nilai dan norma yang saling terkait dengan hubungan satu dengan lainnya, yaitu nilai ajaran Islam dan nilai adat Gayo itu sendiri. Adat Gayo merupakan suatu perilaku yang mengikat masyarakat Gayo secara luas dengan berbagai nilai dan norma, termasuk di dalamnya pola kehidupan kehidupan masyarakat pada umumnya.²²

²¹ Abidah, Kerontruksi Transferable Skill Mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) STAIN GAJAH PUTIH TAKENGON Berkearifan Lokal Gayo, Disertasi Tidak Dipublikasikan, 2019.

²² Abidah, Kerontruksi Transferable Skill Mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) STAIN GAJAH PUTIH TAKENGON Berkearifan Lokal Gayo, Disertasi Tidak Dipublikasikan, 2019.

Salah satu yang paling menonjol dari suatu budaya kearifan lokal masyarakat Gayo adalah ukiran kerawang Gayo yang mempunyai makna dan falsafah yang sangat kuat. kerawang Gayo merupakan hasil perwujudan dari imajinasi tercipta secara spontanitas dan perpaduan antara fenomena keindahan alam serta isinya dengan karakter dan status sosial manusia disesuaikan dengan filosofi dan makna yang tersirat dari alam luas,²³ kerawang Gayo adalah salah satu ragam atau motif dalam menghias kain.²⁴ Kerawang Gayo merupakan simbol kemegahan masyarakat Gayo, Kain kerawang Gayo bagi masyarakat dataran tinggi Gayo provinsi Aceh memiliki kebanggaan tersendiri, Kain tersebut memiliki simbol agama, adat istiadat, sosial budaya dan kemegahan.²⁵ Dengan semakin berkembangnya dunia bisnis saat ini kerawang Gayo telah memiliki nilai ekonomi, hal ini dapat kita lihat bahwa kerawang Gayo telah menjadi industri kerajinan bagi masyarakat lokal seperti membuat souvenir, baju batik yang bermotif desain kerawang Gayo yang menjadi produk unggulan baru saat ini,²⁶ bahkan pemerintah daerah sudah mewajibkan bagi pegawai yang bekerja di lingkungan pemerintah daerah untuk memakai baju yang bermotif kerawang Gayo pada satu hari kerja.

Selain kerawang Gayo budaya dan kearifan lokal masyarakat Gayo adalah Pacuan kuda itu telah menjadi tradisi warga yang telah turun temurun dan telah menjadi even tahunan pesta rakyat Gayo yang menyatukan masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, meliputi Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues. Pada pelaksanaan even tahunan pacuan kuda banyak kegiatan bisnis yang dilakukan oleh masyarakat salah satunya adalah banyaknya masyarakat yang berjualan di areal macuan kuda dengan bermacam-macam yang diperdagangkan oleh produsen seperti menjual baju, celana jeket dan sebagainya dan bahkan banyak bermuculan

²³ Joni, Kerawang Gayo ; Tingkis Ulak Ku Bide, Sesat Ulak Ku Dene, Tangerang ; Mahara Publishing', 2017.

²⁴ Umami Sakinah, Rosmala Dewi, and Irsanti, Kajian Visual Kerawang Gayo Pada Upah Ulen-Ulen, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, 1.1 (2016), 74–82.

²⁵ Joni, Kerawang Gayo ; Tingkis Ulak Ku Bide, Sesat Ulak Ku Dene, Tangerang ; Mahara Publishing. 2017.

²⁶ Irfa Ina Rohana Salma, Edi Eskak, Ukiran Kerawang Aceh Gayo Sebagai Inspirasi Penciptaan Motif Batik Khas Aceh Gayo. *Dinamika Kerajinan Dan Batik*, Vol. 33, No. 2 Desember 2016, 121-132, Hal 122. 2016.

aneka permainan untuk anak-anak dan untuk orang dewasa. Selain pacuan kuda Aceh Tengah memiliki daya tarik untuk wisata yaitu kopi Gayo, citra rasa kopinya yang telah mendunia, bahkan kopi Gayo menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Aceh Tengah.

Dengan banyak potensi wisata alam, potensi sejarah dan Budaya, potensi daya tarik buatan, dan potensi daya tarik kuliner, serta kearifan lokalnya yang sangat kaya yang ada di Aceh Tengah akan tetapi belum didukung secara baik oleh pemerintah sebagai wilayah dan objek pariwisata halal unggulan oleh karena itu penulis merasa menarik untuk meneliti secara lebih mendalam yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah disertai dengan judul **Strategi Pengembangan Destinasi Wisata Halal Berbasis Kearifan Lokal Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat (Aceh Tengah)**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana masalah yang dihadapi dalam strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh Tengah
2. Bagaimana solusi yang dapat digunakan dalam strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh Tengah
3. Bagaimana strategi yang tepat dalam pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh Tengah

C. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis masalah strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh Tengah
2. Untuk menganalisis solusi yang dapat digunakan dalam strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh Tengah
3. Untuk menganalisis strategi yang tepat dalam pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh Tengah

D. Batasan istilah

1. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.²⁷ Dalam hal ini strategi yang digunakan adalah cara atau perencanaan yang digunakan dalam pengembangan potensi pariwisata halal berbasis kearifan lokal masyarakat Gayo dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh Tengah
2. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan.²⁸ Yang dimaksud dengan pengembangan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengembangan pariwisata halal di kabupaten Aceh Tengah
3. Destinasi adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas

²⁷ John A. Pearce II. dan Richard B. Robinson. Manajemen Strategis edisi 12 buku 2008

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional Indonesia, 2014), hal. 201.

umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.²⁹

4. Pariwisata halal adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang dimaksud pariwisata halal dalam penelitian ini tersedianya sarana ibadah yang layak untuk dipakai, tersedianya toilet laki-laki dan perempuan, kebersihan dan terhindar dari maksiat, zina, minuman keras dan sejenisnya.³⁰
5. Kearifan lokal adalah keseluruhan ciri-ciri kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Aceh Tengah sebagai hasil pengalaman mereka di masa lalu.³¹
6. Peningkatan perekonomian masyarakat adalah cara atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengatur perekonomian rumah tangga untuk menjadi lebih baik dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan hidup.³²
7. Aceh Tengah adalah salah satu kabupaten yang tertetak di tengah-tengah provinsi Aceh.

E. Kegunaan Penelitian

1. Untuk menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah (Aceh Tengah) dalam pengembangan pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, dimana tercapai kesejahteraan ekonomi, dan sosial bagi masyarakat.
2. Bagi Pelaku usaha Bisnis, yang berkaitan dengan pariwisata dapat menjadi referensi untuk meningkatkan usahanya dalam bisnis wisata halal.
3. Masyarakat umum dapat menjadi acuan bagaimana menciptakan iklim yang kondusif untuk meningkatkan pariwisata khususnya wisata halal di Aceh

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 2009 Tentang kepariwisataan

³⁰ Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI menerbitkan Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah

³¹ A.R. Hakim Aman Pinan, Daur Hidup Masyarakat Gayo (Takengon: ICMI Orsat Aceh. 1998

³² [Kompas.com](https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/19/194500969/jenis-jenis-kegiatan-ekonomi-masyarakat?page=all) dengan judul "Jenis-jenis Kegiatan Ekonomi Masyarakat", Klik untuk baca: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/19/194500969/jenis-jenis-kegiatan-ekonomi-masyarakat?page=all>

Tengah dengan tetap menjaga nilai-nilai Islam dan mensejahterakan masyarakat lokal.

4. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya, untuk memasarkan kearifan lokal karena kalau dikembangkan dengan baik akan mempunyai nilai ekonomi dalam dibidang wisata.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang dimaksud oleh penulis adalah urutan pembahasan yang diterangkan dalam bentuk tulisan untuk membahas rencana penyusunan disertasi (laporan penelitian) secara komprehensif, mulai dari permulaan hingga akhir guna menghindari pembahasan yang tidak terarah. Secara umum sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bagian yaitu pendahuluan, Landasan teori, metodologi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta yang terakhir penutup yaitu kesimpulan dan saran. Untuk itu penyusun membuatnya dalam beberapa bab dan sub bab yang saling berkorelasi.

Pada bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini, perumusan masalah sebagai batasan dalam pembahasan serta dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian sebagai titik pencapaian penelitian ini, tujuan penelitian, Batasan istilah, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bab kedua, membahas tentang landasan teori sebagai bahan teori yang menjadi rujukan dalam penelitian ini. Maka dalam bab kedua ini menjelaskan secara rinci mengenai teori yang relevan dengan penelitian ini.

Pada bab ketiga akan membahas tentang metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini. Pada Bab ini akan menjelaskan prosedur penelitian yang telah dilakukan diantaranya adalah jenis dan Ukuran penelitian. Selanjutnya menentukan populasi dan sampel yang menjadi objek dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini, kemudian menjelaskan variabel penelitian dan instrument penelitian, samapai pada teknik analisa data. Pada bab 4 akan membahas tentang temuan penelitian, hasil analisis, hasil sintesis penelitian, hasil

analisis, hasil sintesis penelitian, hasil analisis sintesis masalah, hasil sintesis solusi, analisis sintesis strategi, dan pembahasan hasil penelitian. Dan Bab V Penutup, kesimpulan dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pariwisata Halal

1. Pengertian Pariwisata Halal

Di dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 wisata merupakan suatu aktivitas kegiatan perjalanan yang dijalankan seseorang dan sekelompok orang atas motif untuk mendatangi tempat-tempat tertentu dengan maksud buat rekreasi, peningkatan individu, maupun mengamati keunikan pesona wisata suatu daerah yang didatangi di dalam kurun waktu sesaat. Sedangkan Pariwisata merupakan berbagai kegiatan aktivitas wisata serta didukung oleh beragam sarana dan prasarana dengan layanan yang di pasilitasi oleh penduduk setempat, interprenersif, pemerintah pusat, dan Pemerintah daerah. Kepariwisataan merupakan keseluruhan aktivitas yang berhubungan dengan wisata serta bersifat multidimensi dan multidisiplin yang datang sebagai wujud kebutuhan individu setiap orang dan negara hubungan antara pelancong dengan penduduk setempat, serta sesama pengunjung, negara, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.³³

Sedangkan daya Tarik wisata yakni segala objek yang mempunyai kelebihan, keelokan dengan kualitas yang bercorak keragaman kekayaan bumi, adat, serta hasil ciptaan manusia sebagai objek ataupun sasaran lawatan wisatawan.³⁴ Destinasi pariwisata ialah daerah geografis yang terletak dalam satu maupun beberapa daerah manajemen dimana terkandung magnet pesona rekreasi, prasarana umum, layanan wisata, akseibilitas, dengan rakyat yang saling terikat untuk memenuhi terwujudnya turisme.³⁵

Pelancongan ialah salah satu peralihan tempat tinggal selama seseorang di luar tempat tinggalnya dengan alasan tidak akan mengerjakan aktivitas yang menciptakan imbalan. Dengan begitu akan dikatakan bahwa pelancongan yang

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tentang Kepariwisataan, 2009.

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tentang Kepariwisataan, 2009.

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tentang Kepariwisataan, 2009.

dilaksanakan oleh seseorang atau lebih orang dengan motif untuk menikmati keindahan daya Tarik wisata seperti keindahan alamnya, budaya dan buatan dengan tujuan untuk menikmati.³⁶ Dari pendapat diatas maka pariwisata yaitu suatu kegiatan pariwisata terdapat berbagai sumber daya alam, budaya lokal dan buatan untuk dinikmati oleh setiap pengunjung serta keinginan untuk rekreasi dan dapat mengerakkan perekonomian masyarakat.

Pariwisata merupakan suatu objek dan produk yang disuguhkan kepada para pengunjung yang mempunyai daya tarik yang menarik dan memiliki perbedaan agar mampu bersaing dengan komoditas yang pasarkan oleh para pengembang.³⁷ ada lima perbedaan produk yaitu perbedaan atribut fisik, perbedaan pelayanan, perbedaan karyawan, perbedaan lokasi, dan perbedaan citra. Wisatawan yang melakukan kunjungan wisata digerakkan karena beberapa dorongan antara lain:

1. Keinginan dan keperluan buat berpiknik dan tamasya.
2. Keinginan untuk kebutuhan riset.
3. Anjuran kepentingan keimanan.
4. Keinginan keperluan kebugaran.
5. Keinginan untuk mengetahui pada kebudayaan dan kesenian.
6. Dorongan kepentingan keamanan.
7. Dorongan kepentingan hubungan keluarga.
8. Dorongan kepentingan politik.³⁸

Semakin meningkat kunjungan ke daerah tujuan wisata, maka daerah tersebut akan semakin mensejahterakan masyarakat sekitarnya karena akan membuka lapangan pekerjaan. pariwisata merupakan perjalanan manusia sesaat yang dilaksanakan dengan motif keluar dari aktivitas-aktivitas rutinitas, keluar

³⁶ Ali Hasan, 'Green Tourism Marketing Model', Jurnal Media Wisata, 13.2 2015, 267–94.

³⁷ Kotler, Philip. R. , Jhon T. Bowen, James Makens. *Marketing for Hospitality and Tourism Sixth Edition*. International Edition. Pearson ., 2009.

³⁸ Siswantonono, *Pengertian Produk Wisata*, Gramedia Pustaka Utama, 2007

dari Kawasan domisili karena tujuan untuk berkreasi.³⁹ Kegiatan pariwisata adalah aktivitas multidimensi, bukan hanya berhubungan dengan teknologi, akan tetapi ada kaitan dengan sosial, agama, kultur, seni, keindahan, budaya dan lingkungan hidup, sehingga dalam kegiatan pariwisata tidak hanya dibutuhkan human capital yang tinggi ilmu pengetahuannya dan selalu mengikuti perkembangan teknologi dengan cepat, namun sentuhan kebutuhan dan pelestariannya perlu diperhatikan. Pariwisata suatu aktivitas kegiatan yang ada dalam masyarakat yang berkaitan dengan wisatawan, sedangkan wisatawan merupakan orang yang melakukan kunjungan dari tempat kediamannya ke tempat yang didatanginya.⁴⁰ Pada dasarnya pembangunan pariwisata memiliki tiga dimensi, yakni:

1. Dimensi ekonomi, memandang pengembangan pariwisata menguntungkan dari segi ekonomi dalam hal meningkatkan pendapatan dan mensejahterakan masyarakat, pemerintah daerah, maupun pihak swasta. Keuntungan ekonomi yang dihasilkan dari pembangunan pariwisata seyogyanya dapat dirasakan terutama oleh masyarakat daerah. Pemerintah berfungsi sebagai penyedia bagi masyarakat dan fasilitator bagi pengusaha, yang mengarahkan pembangunan pariwisata agar kegiatan ekonomi dan bisnis dapat berjalan dengan lancar.
2. Dimensi pengembangan daerah, berarti bahwa perencanaan pariwisata harus mendukung dan saling menunjang bagi kemajuan daerah-daerah yang ada secara keseluruhan. Pariwisata menjadi alat promosi suatu daerah, sebagai penggerak kegiatan perekonomian daerah, dan memberi kontribusi terhadap pemecahan permasalahan kedaerahan, termasuk ketimpangan dan kemajuan daerah.
3. Dimensi budaya, bagian dari pembangunan budaya masyarakat, dimensi ini melihat keterkaitan sejarah dan budaya masyarakat sebagai pengikat

³⁹ Happy Marpaung, *Pengetahuan Kepariwisataaan*, Penerbit Alpeno Raya, 2002.

⁴⁰ Soekadijo. R. G, *Anatomi Pariwisata, Memahami Pariwisata Sebagai Sistematis Linkage*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2000.

dalam pengembangan pariwisata karena pariwisata merupakan salah satu alat dalam usaha melestarikan budaya.

Ketiga dimensi tersebut merupakan suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan, dan memiliki tingkat kepentingan yang sama. Dalam UU No. 32 Tahun 2004, dinyatakan bahwa Pemerintah daerah Provinsi dalam sektor pariwisata hanya mempunyai kewenangan terbatas pada promosi pariwisata saja. Sedangkan pada, pengelolaan tempat objek wisata merupakan kewenangan daerah kota atau kabupaten masing-masing.

Pariwisata merupakan kunjungan ke lokasi-lokasi yang mempunyai daya tarik, untuk tujuan rekreasi, dan mengali ilmu pengetahuan yang ada disekitarnya, atau melaksanakan pekerjaan. Wisatawan yang datang dari dalam suatu negara disebut wisatawan domestik atau wisatawan Nusantara, sedangkan yang berkunjung dari luar suatu negara disebut wisatawan mancanegara. Objek lokasi wisata dapat diklasifikasi menjadi tiga jenis diantaranya.

1. Objek wisata alam, yang menyuguhkan keindahan alamnya seperti panorama alam perbukitan, suaka alam, danau, pesisir laut, kawah gunung api, sumber air panas, flora, dan fauna.
2. Objek wisata buatan, seperti kolam luncur, kolam renang, waduk, dan taman rekreasi.
3. Objek wisata budaya, diantaranya benteng kuno, masjid kuno, museum, keraton, monumen, candi, kesenian daerah, rumah adat, dan upacara adat.

Pariwisata halal adalah peminatan wisata yang berdasarkan kepada model berjiwa wisatawan muslim sewaktu berekreasi. Pariwisata halal dengan maksud agar wisatawan termotivasi dalam menemukan kesenangan dan berkat dari Allah. Pariwisata halal merupakan seluruh kegiatan wisata yang tersebut, akan tetapi tanpa meninggalkan nilai-nilai syariah Islam.⁴¹

⁴¹ Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah* (Jakarta: Republika, 2002).

Pariwisata halal ialah salah satu bentuk pariwisata yang di khususkan pada wisatawan muslim yang implementasinya melaksanakan ketentuan atau prinsip Islam. Setiap kegiatan acara dan pengalaman dilaksanakan pada kondisi perjalanan yang cocok dengan Islam. Definisi lain dari pariwisata halal merupakan aktivitas yang didukung oleh beragam sarana dan layanan yang dipasilitasi oleh penduduk setempat, wiraswasta, pemerintah, dan pemerintah daerah yang menunaikan aturan Syariah.⁴²

Pariwisata halal dipergunakan bagi banyak orang karena khususan penerapan karena jasanya yang berciri umum. Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata halal adalah sama dengan produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata pada umumnya asalkan tidak berbenturan dengan nilai-nilai serta etika syariah. maka pariwisata halal bukan eksklusif sekedar di wisata religi semata-mata.⁴³

Pasar pariwisata halal merupakan salah satu bagian aktual yang lagi tumbuh dengan cepat pada pasar pariwisata, bagaimana menjelajahi keindahan alam yang telah diberikan oleh yang pencipta adalah Allah SWT. Bagaimana keindahan alam yang diberikan untuk dapat memetik nikmat dari keindahan alam tersebut untuk terus meningkatkan keimanan.

Pariwisata halal merupakan aktivitas kegiatan wisata dengan bermacam aktivitas dan didukung oleh sarana dan melaksanakan yang perlu sinkron harus sesuai ajaran Syariah. Ada beberapa prinsip syariah yang harus di penuhi salah satunya yaitu prinsip hukum Islam yang berhubungan pada aktivitas pariwisata berlandaskan fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pariwisata halal adalah berbagai aktivitas wisata yang didukung berbagai prasarana serta layanan yang dipasilitasi oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah yang berlandaskan kepada ketentuan syariah.⁴⁴

⁴² Kemenparekraf, Renstra Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, 2012.

⁴³ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2012

⁴⁴ Sofyan, Prospek Bisnis Pariwisata Syariah (Jakarta: Republika, 2002).

Destinasi wisata halal ialah daerah geografis yang tersedia pada suatu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya tersedia daya tarik wisata berupa, sarana ibadah dan umum, prasarana pariwisata, aksesibilitas, dan penduduk yang saling berhubungan dan mengikuti terwujudnya kepariwisataan yang sesuai pada aturan syariah. Pariwisata halal adalah salah satu model pariwisata yang di khususkan untuk wisatawan muslim yang implementasinya mematuhi aturan Islam. Setiap kegiatan, acara dan pengalaman dilaksanakan pada kondisi perjalanan yang cocok dengan Islam.

Pariwisata halal dapat bermanfaat bagi orang banyak karena ciri-ciri produk dan jasanya yang berjiwa menyeluruh. Produk dan pelayanan wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata halal adalah sama dengan dengan produk dan jasa yang ditawarkan, seperti objek dan tujuan pariwisata pada umumnya akan tetapi tidak berseberangan dengan nilai-nilai serta etika Syariah.⁴⁵

Sebelumnya produk halal yang dikenal oleh masyarakat hanya produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang tidak mengandung alkohol, pengawet, atau bahan kimia lainnya yang berbahaya. Akan tetapi saat ini telah terjadi perubahan tidak hanya pada produk makanan akan tetapi telah merambah pada produk keuangan (lembaga keuangan dan lembaga non keuangan hingga ke produk *lifestyle* (travel, hospitalitas, rekreasi, dan perawatan kesehatan). ekonomi Islam telah menunjukkan perkembangan yang mengembirakan pada sektor pariwisata halal yang dibungkus dalam bingkai-bingkai prinsip syariah. Perkembangan pariwisata halal pada saat sekarang ini menunjukkan tren yang sangat mengembirakan dari yang berkarakter konvensional (massal, hiburan) menjadi mengarah pada pemuasan gaya hidup (*lifestyle*) tetapi tidak lari dari ajaran Islam.

⁴⁵ Kemenparekraf, Renstra Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, 2012.

Perkembangan wisata halal telah menjadi pasar baru dunia telah menunjukkan perkembangan yang pesat. Ada sebagian Negara menggunakan beberapa istilah yang cukup beragam seperti *Islamic Tourism*, *Halal Friendly Tourism Destination*, *Halal Travel*, *Muslim-Friendly Travel Destinations*, *halal lifestyle*, dan lain-lain. Pariwisata halal merupakan model baru dalam memperkenalkan pariwisata di Indonesia yang menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai Islami. Selama ini wisata syariah dipersepsikan sebagai suatu wisata ke kuburan (ziarah) ataupun ke masjid. Padahal, wisata halal tidak diartikan seperti itu, melainkan wisata yang di dalamnya berasal dari alam, budaya, ataupun buatan yang dibingkai dengan nilai-nilai Islam.⁴⁶ Adapun pembeda utama pariwisata halal dengan pariwisata konvensional dari beberapa aspek antara lain:

Tabel 2.1
Pembeda utama pariwisata halal dengan pariwisata konvensional

No	Pariwisata Halal	Pariwisata Konvensional
1	Dari aspek objek (tujuan-destinasi) misalnya : selama ini tempat-tempat wisata belum menyediakan fasilitas yang utuh atau maksimal. Katakan saja yang berkaitan dengan sarana ibadah, tidaklah semua destinasi menyediakan mushalla (apalagi masjid). Kendati telah tersedia, tidaklah sedikit yang sangat kurang memadai, sehingga terjadi kesenjangan performa fasilitas antara objek wisatanya yang sedemikian megah (spektakuler) dengan performa sarana ibadahnya yang tidak jarang sangat memprihatinkan	Tidak terlalu memperhatikan hal-hal tersebut
2	Dari aspek sarana akomodasi, katakan saja hotel, guest house, villa, rumah singgah, dan sebagainya, belum sepenuhnya memberlakukan	Tidak terlalu ketat dengan aturan Islam

⁴⁶ Kemenparekraf, Renstra Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, 2012.

	kelainan muhrim sehingga bisa jadi tanpa surat nikah pun mereka bebas tidur sekamar dengan rasa aman. Terlebih lagi jika sekiranya secara sengaja menyiapkan wanita panggilan bagi pengunjung hidung belang	
3	Adanya spa dan kafe yang menyediakan minuman yang memabukkan sampai dewasa ini masih lekat dengan tempat menginap para pengunjung wisata di berbagai destinasi. Karena jika tidak tersedia minuman keras dengan segala macamnya, hotel sebagai tempat menginap (beristirat) mereka dianggap kurang modern dan bahkan dianggap ketinggalan zaman. Ini menunjukkan ketersediaan spa dan kafe lengkap dengan berbagai macam minuman yang memabukkan, saat ini seakanakan dianggap sebagai ikon kemodernan dan daya tarik oleh sebagian masyarakat pengunjung wisata	Hotel sebagai tempat menginap (beristirat) modern, dengan menyiapkan minuman keras, diskotik dll
4	Dalam kaitan dengan masalah kuliner seperti ketersediaan fasilitas rumah makan (restoran), belum sepenuhnya menunjukkan keterbukaan (fairness) kepada pembeli yang datang. Indikator ketidakterbukaan (unfairness) antara lain terlihat dari belum banyak restoran yang memasang tarif setiap menu yang disediakan. Nampaknya ketidakjujuran ini tidak hanya terjadi dari kalangan rumah makan skala menengah atau papan atas dalam bentuk restoran, namun banyak terjadi pula dari kalangan pedagang kecil (kaki lima), sehingga tidak jarang banyak pengunjung yang kecewa karena merasa dirugikan secara materi	Kuliner bersifat umum

5	Masalah lain yang tidak kalah krusialnya, adalah pengeterapan sertifikasi halal yang menjadi salah satu indikasi bahwa semua produk dalam bentuk makanan, minuman, kosmetika dan lain sebagainya belum nampak terimplementasi untuk meyakinkan pengunjung bahwa apa yang mereka konsumsi benar-benar halal secara syar'i	Tidak terlalu berfokus kepada sertifikasi halal
6	Biro perjalanan (travel), transportasi maupun pemandu wisata apakah mereka benar-benar telah menunjukkan kejujuran dan keterbukaan yang tidak berpotensi merugikan pengunjung secara financial	Tidak berfokus kepada kejujuran dan keterbukaan
7	Masalah sumber daya manusia tidak kalah krusialnya dalam menunjang suksesnya pengembangan wisata, di manapun dan kapanpun saja, baik dalam level pelaksana, penguasa, maupun masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat di sini dimaksudkan adalah penduduk lokal, agar mereka mampu menempatkan diri sebagai warga yang mampu turut memelihara keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan yang tidak jarang justru merekalah yang tidak jarang menimbulkan hal yang tidak diinginkan	Sumber daya manusia dalam tugas tidak berfokus ke syariah
8	Faktor kebersihan bukanlah tidak mungkin dan tidak jarang seringkali menjadikan suasana destinasi wisata yang kurang nyaman yang tidak jarang pula banyak ditemukan di berbagai daerah wisata, mulai dari destinasi yang telah dikenal luas, terlebih lagi bagi yang belum dikenal. Padahal sejatinya, masalah kebersihan atau memelihara ekosistem sangatlah ditekankan di dalam Islam	Bersifat umum dalam memperhatikan kebersihan destinasi

Sumber: Hamzah, M. & Yudiana, Yi. (2015). Analisis komparatif potensi industri halal dalam wisata syariah dengan konvensional.

Wisata halal merupakan salah satu sistem pariwisata yang di prioritaskan untuk wisatawan Muslim dimana dalam tataran perakteknya harus mematuhi aturan Syariah. Hotel atau tempat penginapan lainnya harus berlandaskan prinsip syariah tidak dibolehkan menyediakan minuman atau pun makanan yang melanggar syariat Islam dan memiliki tempat-tempat lain seperti kolam renang dan sarana spa harus ada jarak diantara pria dan perempuan. Wisata halal menyediakan produk-produk atau makanan halal dan aman dikonsumsi turis Muslim.

Bagi wisatawan Muslim, wisata halal merupakan bagian dari syiar dakwah. Sebab pada dasarnya bagaimana, menerapkan prinsip syariah yang berarti menyisihkan apa-apa yang dapat mengganggu untuk kemanusiaan dan iklim, pemandangan maupun jasa yang dialokasikan, dan akan berdampak kepada kemaslahatan secara umum, sesuai dengan misi Risalah Islamiyah yang bersifat *Rahmatan Lil- Alamin*. Sistem syariah, mengajarkan manusia hidup tenang, aman dan sehat, tidak memperjual belikan minuman atau makanan dan hiburan yang menjauhkan dari perbuatan kemaksiatan dan keamanan.

Ada beberapa faktor standar yang diberikan untuk pengukuran pariwisata halal dilihat dari segi administrasi dan pengelolaannya yaitu: 1) Pelayanan yang diberikan kepada wisatawan mesti sinkron dengan ajaran Islam sebagai keseluruhan, 2) bagi para guide dan staf harus mempunyai disiplin dan memahami prinsip-prinsip Islam, 3) Menyelenggarakan seluruh aktivitas agar tidak melanggar ajaran prinsip Islam, 4) gedung-gedung harus sejalan dengan ajaran Islam, 5) Restoran harus mengikuti standar internasional pelayanan halal, 6) ada transportasi harus mempunyai ketenteraman sistem keamanan, 7) Tersedia kawasan yang sedia untuk

seluruh wisatawan muslim melaksanakan aktivitas keagamaan. 8) berangkat ke objek-objek wisata yang tidak berseberangan dengan prinsip Islam.⁴⁷

Dari paktor-faktor yang dibahas diatas ciri-ciri pariwisata halal yang telah di paparkan diatas ada 4 aspek yang mesti diperhitungkan untuk pariwisata halal, diantaranya apek yang pertama adalah tempat atau lokasi, dimana implementasi sistem Islami di daerah pariwisata, tempat pariwisata yang dipilih merupakan yang dianjurkan oleh kaidah Islam dan dapat menaikkan nilai-nilai spiritual wisatawan.⁴⁸

Aspek yang kedua adalah transportasi, implementasi cara ini seperti adanya merelokasikan area berteduh jarak laki-laki dan perempuan yang tidak muhrimnya sehingga akan teguh berlangsung syariat Islam dan terjaganya kedamaian wisatawan untuk menjahui hal-hal yang tidak diinginkan. Aspek yang ketiga adalah konsumsi, dalam Islam soal konsumsi sangat selektif memilih kehalalan makanan yang akan konsumsi, segi kehalalan disini baik dari dari sifatnya, perolehannya maupun pengolahannya. Aspek yang keempat adalah hotel, dimana segala prosedur kerja dan sarana yang disediakan berlangsung sesuai dengan prinsip Syariah.⁴⁹ Pelayanan dalam hal ini tidak hanya sebatas dalam makanan dan minuman, akan tetapi dalam sarana dan prasarana yang ditawarkan antara lain spa, gym, kolam renang, ruang tamu dan fungsional untuk laki-laki dan perempuan sepatutnya tersendiri.

Bagian lain yang cukup dominan dari pariwisata halal ini adalah (SDM) sumber daya manusia yang bekerja atau diistilahkan dengan para pemandu wisata yang juga harus menyesuaikan diri dengan para wisatawan muslim. Misalnya dengan menjaga adab berkomunikasi, memakai busana

⁴⁷ Chookawes, Chainin, O, Charatarawat, J Sriprasert, p & Nimpaya,S, *Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in*. Journal of Economics, Business and management, 3 (70 277-279 2015

⁴⁹ Yudhi Martha Nugraha, *Analisis Potensi Promosi Pariwisata Halal Melalui E-Marketing Di Kepulauan Riau, Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 3.2 2018, 63 <<https://doi.org/10.25105/pdk.v3i2.2990>>.

yang beradap sesuai standard muslim serta tak lupa menganjurkan waktu beribadah kepada para wisatawan. Sistem halal mengajarkan manusia hidup tenang, aman dan sehat, dan tidak memfasilitasi minuman beralkohol, hiburan yang jauh dari kemaksiatan serta keamanan dalam sistem keuangan.⁵⁰

Jika wisata religi lebih mengutamakan dimensi sejarah dan lokasi atau objek tempat wisata, maka wisata halal lebih luas lagi menampilkan bagian pelaksana maupun pengunjung. Wisata halal mempunyai makna bahwa seluruh objek atau tindakan yang diperbolehkan menurut ajaran Islam untuk digunakan atau dilibati oleh orang muslim dalam industri pariwisata.⁵¹

Peluang pariwisata halal di Indonesia berdasarkan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif serta MUI sangatlah besar mengingat penduduk Indonesia mayoritas muslim, pariwisata halal memiliki kriteria sebagai berikut : berorientasi pada kemashlahatan umum, mengarah pada pencerahan, penyegaran dan ketenangan, menghindari maksiat, diantaranya zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi, menjaga perilaku, etika dan nilai luhur kemanusiaan seperti tidak bersikap hedonis dan asusila, menjaga amanah, keamanan dan kenyamanan, bersifat universal dan inklusif, menjaga kelestarian lingkungan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal. Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia, jelas tidak sesuai apabila rancangan pariwisatanya menyesuaikan pada tradisi barat, bahkan perkembangan wisata pada saat ini sangat berubah-ubah.

⁵⁰ Kemenparekraf.

⁵¹ Eka Dewi Satriana and Hayuun Durrotul Faridah, Halal Tourism: Development, Chance and Challenge, *Journal of Halal Product and Research*, 1.2 (2018), 32 <<https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.1-issue.2.32-43>>.

Tabel 2.2
Perbandingan Pariwisata Halal Dengan Pariwisata Lainnya

No	Item Perbandingan	Konvensional	Religi	Halal
1	Objek	Alam, budaya, Heritage, Kuliner	Tempat ibadah, peninggalan sejarah	Semuanya
2	Tujuan	Menghibur	Meningkatkan spirilualitas	Meningkatkan spirilualitas dengan cara menghibur
3	Target	Menyentuh kepuasan dan kesenangan yang berdimensi nafsu, semata-mata hanya untuk hiburan	Aspek spiritual yang bisa menenangkan jiwa guna mencari ketenangan batin	Memenuhi keinginan dan kesenangan serta meumbuhkan kesadaran beragam
4	Guide	Memahami dan menguasai informasi sehingga bisa menarik wisatawan terhadap obyek wisata	Menguasai sejarah tokoh dan lokasi yang menjadi obyek wisata	Membuat turis tertarik pada obyek sekaligus membangkitkan spirit religiusitas wisatawan. Mampu menjelaskan fungsi dan peran halal dalam bentuk kebahagiaan dan kepuasan batin dalam kehidupan manusia
5	Fasilitas Ibadah	Sekedar pelengkap	Sekedar pelengkap	Menjadi bagian yang menyatu dengan obyek pariwisata, ritual ibadah menjadi

				bagian paket hiburan
6	Kuliner	Umum	Umum	Spesifik yang hala
7	Relasi dengan Masyarakat dilingkungan ObyekWisata	Komplementar dan Hanya untuk keuntungan materi	Komplementar dan Hanya untuk keuntungan materi	Integrated Interaksi berdasar pada prinsip Syariah
8	Agenda Perjalanan	Setiap waktu	Waktu-waktu tertentu	Memperhatikan waktu

Sumber: Ngatawi Al Zaztrow dalam Hamzah dan Yudiana, 2015

Distingsi mendasar antara usaha halal dengan konvensional merupakan yang terletak pada visi dan misinya. Pada bisnis halal visinya ditekankan pada keiman Sedangkan misinya adalah berupa ibadah, jadi setiap aktivitasnya akan selalu bernilai ibadah. Sementara bisnis konvensional ideologinya adalah komersial dengan misi melakukan profesionalisme dalam produksi. sederhananya, bisnis syariah untuk mengejar profit diperlukan metode yang sesuai dengan syariah.

Wisata halal bisa bergandengan dengan yang lain. Sifatnya bisa berupa komplementer, bisa berupa produk sendiri. Misalnya ada hotel halal, berarti membuat orang yang mencari hotel yang menjamin kehalalan produknya akan mendapatkan opsi yang lebih luas.

Tabel 2.3
Paradigma Bisnis Syariah dan Konvensional

	Syariah	Konvensional
Visi	Iman	Ideologi komersial
Misi	Amal /Ibadah	Profesionalisme Dalam Produks
Metodologi	Syariah	Common Management Practice

Sumber: Sofyan. 2013

Inti diagram visi sebagai perwujudan nilai keimanan dalam ideologi komersial tersebut. Jadi menjalankan bisnis dengan nilai etika tertentu, misalnya sekarang yang juga sedang berkembang adalah green business,

bisnis yang ramah lingkungan. Demikian pula bisnis halal dijalankan dengan sangat memperhatikan nilai etika dan keimanan dalam Islam.

2. Pariwisata Halal Dalam Al-Qur'an

Sungguh-sungguh pada ajaran Islam, pertama, perjalanan dianggap sebagai ibadah, sebab diperintahkan akan melaksanakan satu keharusan dari rukun Islam, seperti haji pada bulan tertentu dan umrah yang dilakukan sepanjang tahun ke baitullah. Kedua, dalam pandangan dunia Islam, wisata juga terhubung dengan konsep pengetahuan dan pembelajaran. Hal ini menjadi perjalanan terbesar yang dilakukan pada awal Islam dengan tujuan mencari dan menyebarkan pengetahuan seperti yang terdapat dalam (Q.S. surah, al-Taubah: 112).

التَّائِبُونَ الْعَبِدُونَ الْحَمِيدُونَ
السَّائِحُونَ الرَّكْعُونَ
السَّجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ
وَدَثِرَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji, yang melawat, yang ruku', yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat Munkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah. dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu. (Q.S. al-Taubah: 112).⁵²

Ketiga, tujuan wisata dalam Islam adalah untuk belajar ilmu pengetahuan dan berpikir. Perintah untuk berwisata di muka bumi muncul pada beberapa tempat dalam Al-Qur'an surah. al-An'am: 11-12

⁵² Q.S. al-Taubah: 112

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿١١﴾
 قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ
 لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ
 فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾

Artinya Katakanlah: "Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu." Katakanlah: "Kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi." Katakanlah: "Kepunyaan Allah." Dia telah menetapkan atas Diri-Nya kasih sayang. Dia sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. orang-orang yang meragukan dirinya mereka itu tidak beriman. (Q.S. al-An'am: 11-12) dan al-Naml: 69-70.⁵³

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ
 النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. Q.S. Al-Mulk (67) : 15.⁵⁴

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿١٩﴾ لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿٢٠﴾

Artinya Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan. supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu. Q.S. Nuh (71) : 19-20.⁵⁵

⁵³ Q.S. al-An'am: 11-12) dan al-Naml: 69-70

⁵⁴ Q.S. Al-Mulk (67) : 15

⁵⁵ Q.S. Nuh (71) : 19-20

أَوْ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ
 مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ
 فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾

Artinya Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebihkuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri. Q.S. AL-Rum (30) :9.⁵⁶

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ
 اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

Artinya Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Q.S.AL-Ankabut (29) : 20.⁵⁷

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
 لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٢﴾

Artinya Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Q.S. AL-Jumu'ah (62) :10.⁵⁸

Dari ketujuh ayat diatas tujuan terbesar dari perjalanan dalam wisata halal adalah untuk mengajak orang lain kepada Allah dan untuk menyampaikan kepada umat manusia ajaran Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad

⁵⁶ Q.S. AL-Rum (30) :9

⁵⁷ Q.S.AL-Ankabut (29) : 20

⁵⁸ Q.S. AL-Jumu'ah (62) : 10

SAW. Hal ini adalah misi Rasul dan para sahabat beliau. Para sahabat Nabi Muhammad menyebar ke seluruh dunia, mengajarkan kebaikan dan mengajak mereka untuk menjalankan kebenaran. Konsep wisata dikembangkan untuk mencapai tujuan tersebut. Akhirnya, wisata halal juga termasuk kegiatan perjalanan untuk merenungkan keajaiban penciptaan Allah dan menikmati keindahan alam semesta ini, sehingga akan membuat jiwa manusia mengembangkan keimanan yang kuat dalam keesaan Allah dan akan membantu seseorang untuk memenuhi kewajiban hidup.⁵⁹

Tidak hanya untuk keuntungan spiritual, tapi aktivitas perjalanan juga penting untuk keuntungan fisik. Pada sisi lain, promosi wisata atas dasar tujuan agama dan tempat bersejarah untuk wisatawan internasional bisa memperoleh tambahan pendapatan ke negara Muslim. Selain itu, Organisasi Konferensi Islam (OKI) telah menekankan untuk mengembangkan kegiatan wisata bagi negara-negara anggotanya. Semakin banyak wisatawan muslim dalam dunia Islam dapat menyebabkan pemahaman yang lebih baik, merangsang kolaborasi dan melayani kepentingan umum.

Gagasan tentang wisata halal itu sendiri muncul cukup kontroversial, tidak hanya dari sudut pandang otoritas keagamaan, tetapi juga dari sisi akademik dalam studi pariwisata. Dalam setiap kasus, keadaan ini tidak harus menggunakan pendekatan ilmiah dalam menjawab persoalan ini dengan beberapa cabang ilmu-ilmu sosial, di antaranya pengetahuan geografis dapat memberikan kontribusi yang spesifik, khususnya melalui dua perspektif berupa geografi agama dan geografi pariwisata. Sebaliknya, menjadi subjek dalam evolusi konstan karena pola perilaku baru dan sikap terhadap agama, menjadi hampir wajib untuk memperjelas beberapa poin melalui upaya penelitian interdisipliner.

⁵⁹ Aan Jaelani, 'Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects', SSRN Electronic Journal, 76237, 2017 <<https://doi.org/10.2139/ssrn.2899864>>.

3. Pariwisata Halal dan Pengembangan Ekonomi Islam

Sebagaimana kita ketahui bahwa ekonomi dalam sistematika ajaran Islam masuk ke dalam kajian muamalah yang membicarakan hubungan antar manusia dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Termasuk di dalamnya industri wisata sebagai salah satu aktivitas sektor riil yang turut menentukan kemajuan ekonomi sebuah negara. Secara sederhana ilmu ekonomi adalah ilmu yang membicarakan bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup yang tak terbatas dengan cara mengelola sumber daya yang terbatas. Pengertian ini bertolak belakang dengan batasan menurut ekonomi Islam, yakni untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terbatas dengan cara mengelola sumber daya yang tak terbatas.

Islam memandang bagaimanapun kebutuhan manusia adalah terbatas dan terukur, sedangkan yang tidak terbatas adalah keinginan yang tidak terukur. Jika manusia dikendalikan oleh keinginan hawa nafsunya, maka berpotensi mencari harta sebanyak - banyaknya yang tidak mengenal batas, dengan mengorbankan nilai- nilai kemanusiaan, norma etika dan hukum yang sejatinya wajib dijunjung tinggi oleh siapa pun. Industri pariwisata halal yang pada dasarnya berpijak pada prinsip-prinsip syariah, para pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya, seyogianya tidak terjebak kepada kepentingan yang justru kontraproduksi dengan misi suci yang tersirat dalam makna halal dalam arti luas.

Sebab itu bagaimanakah sebaiknya mengelola destinasi wisata halal yang baik dan berkeadaban menurut perspektif ekonomi Islam. Predikat kata “Islam” dalam istilah ekonomi Islam, tentu akan membawa konsekuensi atau makna yang berbeda dengan pengertian ekonomi konvensional pada umumnya. Islam sebagai agama bersumber pokok pada wahyu, yakni al-Qur’an dan Hadits Rasulullah saw. Sebab itu antar keduanya secara prinsip memiliki karakter yang berbeda antara yang satu dengan yang lain.

Dalam hal ini, Yusuf Qardhawi menyatakan, pada dasarnya karakter ekonomi Islam meliputi empat nilai, yakni uluhiyyah, insaniyyah, akhlaqiyyah,

dan washatiyyah.⁶⁰ Sedangkan menurut Syed Nawab Haider Naqvi, ciri ekonomi Islam, meliputi kesatuan (*tawhid*), keseimbangan (*al-'adl wa al-ihsan*), kehendak bebas (*ikhtiyar*), dan tanggung jawab (*fardh-responsibility*). Bahkan Adiwarmman A. Karim melengkapi karakter tersebut, antara lain *tawhid*, 'adl, khilafah, nubuwwah, dan ma'ad (*return*).⁶¹

Bertolak dari ketiga pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa paling tidak ekonomi Islam memiliki ciri, yakni ketuhanan (*uluhiyyah-rububiyyah*), kemanusiaan (*insaniyyah*), norma etika (*akhlaqiyyah*), keseimbangan (*washatiyyah*), kehendak bebas (*ikhtiyar*), dan tanggung jawab (*masuliyyah*) bagi pelakunya. Nilai-nilai inilah sejatinya yang wajib dipatuhi oleh pemangku kepentingan wisata halal agar tidak terjebak ke dalam praktik wisata sekuler yang teralienasi dari nilai-nilai transenden. Karena bagaimanapun apa yang diperbuat kelak akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT.

Bukankah manusia pada saatnya akan kembali kepada Tuhan selaku Pencipta, sekaligus Pemilik kehidupan. Agar manusia dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selama di dunia, maka secara teologis mereka wajib mengacu pada apa yang telah diajarkan dan dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Tanpa kecuali tanggung jawab dalam urusan bisnis dalam bentuk apa pun. Industri pariwisata halal pada dasarnya adalah merupakan salah satu bentuk aplikasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam dunia riil. Tentu saja bagi siapapun yang dapat memper tanggung jawabkan segala perbuatannya, niscaya ia akan dapat meraih falah di akhirat karena di dunia ia telah mampu menata kehidupan sesuai prinsip syariah. Inilah sejatinya yang menjadi tujuan dari pada ekonomi Islam yang perlu dipahami dan diimplementasikan oleh para

⁶⁰ H Husain, Metode Ijtihad Kontemporer Menurut Yusuf Al-Qaradawi, Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman, 13 2020.

⁶¹ Adiwarmman Karim, Ekonomi Mikro Islami (Jakarta: International Institute of Islamic Thought Indonesia, 2002).

pelaku bisnis.⁶² Termasuk di dalamnya dalam upaya pengembangan industri pariwisata halal, di mana pun dan kapan pun saja secara universal.

4. Pariwisata Dalam Perspektif Maqashid Syariah

Ajaran Agama Islam menekankan pada adanya keseimbangan (*tawazun-balance*) di kalangan umatnya.⁶³ Tujuan syariat adalah untuk kemaslahatan dalam arti holistik atau utuh yang meliputi baik lahir maupun batin, dunia maupun akhirat, untuk kepentingan diri maupun sosial lain dan sebagainya. Karakter seorang Muslim tidaklah dapat dibenarkan jika dalam hidupnya hanyalah mengejar kepentingan keduniawian, sementara kepentingan akhiratnya diabaikan, atau bahkan ditinggalkan. Padahal dalam Islam keduanya haruslah sama-sama mendapatkan perhatian secara berkeseimbangan. Bukankah kehidupan dunia hanyalah sesaat, karena kehidupan akhiratlah yang kekal dan abadi sebagai tempat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selama di dunia. Sebab itu Islam mengajarkan pula agar seorang muslim selama hidup dunia banyak melakukan amal shaleh sebagai bekal di dalam menghadapi hidup setelah mati.

Demikian pula seorang muslim tidaklah dibenarkan hanya mementingkan dirinya sendiri (*egoistic-ananiyyah*) tanpa mempedulikan kepentingan orang lain. Sama halnya dengan jika seorang pengusaha yang hanya mementingkan korporat, sementara di sisi lain kepentingan stakeholder justru dikorbankan.⁶⁴ Sikap semacam ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan sikap tolong-menolong, menebar kasih sayang kepada siapa pun dan mengedepankan keadilan dalam bermuamalah. Sebagai

⁶² P3EI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerjasama Dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, h. 54.

⁶³ Muhammad Djakfar, *Revitalisasi Dan Aktualisasi Nilai-Nilai Religiusitas Untuk Mewujudkan Ekonomi Wasathiyah Yang Berkeadaban*, 1–17.

⁶⁴ Djakfar, Muhammad, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi : Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal Di Indonesia*. UIN-Maliki Press, Malang. Editors : UNSPECIFIED, 2017.

ekspresi dari ajaran dalam Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*).

Itulah sekadar ilustrasi yang mencoba menggambarkan, bagaimanakah seyogianya destinasi wisata halal menyambut dan melayani para turis yang datang agar mereka merasa mendapat kepuasan. Atau, mereka merasa ada kesan dan daya tarik tersendiri yang pada akhirnya ada keinginan untuk menjadi pelanggan yang setia. Praktik semacam itu sejatinya sama halnya dengan apa yang diajarkan dalam Islam yang mewajibkan setiap muslim agar memuliakan tamunya sebagai ekspresi rasa keimanan mereka diaplikasikan ke dalam dunia wisata dalam perspektif maqashid al-syariah yang pada dasarnya mengajarkan untuk melindungi kepentingan wisatawan yang meliputi aspek: agama, jiwa, akal, keturunan, harta milik, dan bahkan juga lingkungan sekitarnya.

1. Maqashid al-Syariah : Hifdz al-Din (Melindungi Akidah)

Pariwisata halal jelas beda dengan pariwisata konvensional yang selama ini telah banyak berkembang di berbagai belahan bumi. Perbedaan itu dapat dipahami dari karakteristik antar keduanya karena berangkat dari paradigma yang berbeda pula. Pariwisata konvensional bersumbu pada paradigma materialistik yang dapat dikatakan steril dari nuansa nilai-nilai spiritualistik yang transenden.

Sebaliknya, pariwisata halal yang sangat bertumpu pada paradigma rabhaniyyah yang transenden spiritualistik, sebagaimana tercermin dari perekatan predikat halal di belakang kata pariwisata. Sebab itu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama (DSN-MUI) Indonesia dalam fatwanya menyatakan pariwisata halal adalah pariwisata yang berdasarkan pada prinsip syariah. Penggunaan kata “Prinsip Syariah,” atau “halal” mengandung konsekuensi terhadap segala aktivitas yang dilakukan, tanpa kecuali aktivitas pariwisata, yakni harus mengikuti ketentuan-ketentuan Tuhan sebagaimana yang tersirat dan tersurat di dalam sumber ajarannya, yakni al-Qur'an dan Sunnah. Artinya, jika sekiranya pariwisata halal, lepas kendali dari sumber

pokok ajaran ini, maka samahalnya dengan lepas dari prinsip syariah yang sejatinya wajib ditaati oleh setiap muslim di manapun mereka berada.

Karena itu kehadiran ajaran maqashid al-syariah pada dasarnya dapat memperkuat makna halal dalam aktivitas pariwisata agar para wisatawan dalam melakukan wisata sesuai tuntunan syariah. Sekaligus ingin melindungi keyakinan mereka agar terjauh dari kemusyrikan, khurafat, kemaksiatan, dan lain sebagainya yang saat ini banyak terjadi dan berkembang di tengah masyarakat yang tentu saja kontraproduksi dengan yang diajarkan di dalam Islam. Sebab itu untuk menjauhkan wisatawan muslim dari kemaksiatan itu dalam konsep wisata halal antara lain perlu dihadirkan hotel-hotel yang bersertifikasi halal, pantai halal yang menyediakan pembatas permanen untuk turis perempuan dan laki-laki.⁶⁵ Termasuk pula restoran-restoran yang berlabel halal agar para turis muslim tidak merasa ragu lagi mengkonsumsi setiap produk makanan, minuman, dan lain sebagainya sebagaimana yang digalakkan oleh Negeri Ginseng, Korea Selatan dalam upaya menarik wisatawan muslim yang sebanyak-banyaknya.⁶⁶

Dengan demikian menurut perspektif ajaran maqashid al-syariah pengembangan industri pariwisata halal saat ini adalah merupakan antitesis atas praktik pariwisata konvensional yang terjauh dari norma spiritualitas yang sejatinya merupakan kebutuhan asasi bagi wisatawan muslim serta universal. Bukankah pariwisata halal itu sejatinya merupakan sarana dakwah di ruang publik untuk membumikan Islam sebagai *rahmatan lil alamin*. Di satu sisi wisatawan dapat terpenuhi kebutuhannya untuk refreshing dan berhibur,⁶⁷ namun di sisi lain kebutuhan ibadah (*spiritual*) sebagai kewajiban

⁶⁵ Djakfar, Muhammad, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi : Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal Di Indonesia*. UIN-Maliki Press, Malang. Editors : UNSPECIFIED,2017.

⁶⁶ Djakfar, Muhammad, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi : Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal Di Indonesia*. UIN-Maliki Press, Malang. Editors : UNSPECIFIED,2017

⁶⁷ Hengki Hermanto, *Creative-Based Tourism Dari Wisata Rekreatif Menuju Wisata Kreatif* (Depok: Penerbit Adtri, 2011), h. 53-69.

mereka tetap terpenuhi pula. Dalam hal ini posisi pariwisata halal dalam perpektif maqashid al-syariah melakukan peran sebagai pengawal akidah wisatawan. Salah satu cirinya antara lain adanya fasilitas ibadah baik dalam bentuk masjid atau mushalla agar para turis muslim tidak mengalami kesulitan dalam menunaikan kewajiban ibadahnya kepada Tuhan kendati mereka sedang melakukan wisata.

Tentu saja hal itu sangat tergantung kepada para pemangku kepentingan. Di satu sisi mereka dapat mengembangkan usaha di sektor pariwisata yang dipandang prospektif ke depan namun di sisi lain mereka berkomitmen untuk memfasilitasi kebutuhan wisatawan untuk tidak meninggalkan kewajibannya beribadah kepada Tuhan dan mengabaikan ajaran-ajarannya. Inilah sekadar gambaran yang akan menunjukkan bahwa untuk membangun industri pariwisata halal bagaimanapun harus mengedepankan karakter spesifiknya yang paling asasi, antara lain memberi perlindungan terhadap agama wisatawan sebagaimana yang diajarkan dalam maqashid al-syariah yang akan diulas lebih jauh dalam kajian berikutnya.

2. Maqashid al-Syariah: Pandangan Para Pakar.

Dalam dunia Islam tidaklah sedikit para pakar (*ulama*) yang membahas tentang ajaran maqashid al-syariah yang menuntut manusia untuk memperoleh kemaslahatan dalam kehidupan. Baik secara khusus dalam satu bentuk kajian tersendiri atau pun dikaitkan dengan berbagai disiplin yang lain sesuai tujuan dan kebutuhan. Khusus untuk yang terakhir ini sebagaimana yang dilakukan oleh M. Umer Chapra dalam berbagai wacananya yang seringkali mengaitkan wacana ekonomi dengan ajaran maqashid al-syariah.

Dalam kaitan dengan maqashid al-syariah, Ahmad Al-Mursi Husaian Jauhar, dalam sebuah kitabnya “Maqashid al-Syariah fi al- Islam” mengutip pendapat Asy-Syatibi yang membagi kemaslahatan menjadi dua kategori, baik yang pencapaiannya dengan menarik kemanfaatan atau pun menolak

kemudharatan, yakni kemaslahatan dharuriyyah dan kemaslahatan ghairu dharuriyyah.⁶⁸

Kemaslahatan kategori pertama, yakni *dharuriyyah* adalah merupakan yang inti (pokok) sebagai dasar dan tujuan umum syariat yang mencakup lima aspek yang harus dilindungi yang dikenal dengan istilah al-kulliyat al-khums. Sedangkan kategori yang kedua, yang bukan pokok (bukan inti) dibagi lagi menjadi dua kategori, yakni hajji (berdasar kebutuhan) merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk dapat melakukan pekerjaan dan memperbaiki kehidupan mereka, seperti sewa-menyewa, bagi hasil dan lain sebagainya. Adapun yang kedua, yakni tahsiniyah yakni kemaslahatan yang merujuk kepada moral dan etika yang bisa mengantarkan seseorang menuju muru'ah.

Pakar lain seperti Muhammad Tahir Ibnu 'Ashur (W. 1973M) membagi maqashid al-syariah menjadi dua kategori, yakni maqashid al-tasyri' al-ammah dan maqashid al-khashshah. Yang pertama, meliputi seluruh aspek kehidupan, sedangkan yang kedua berkaitan dengan aspek-aspek khusus, seperti bidang ekonomi, hukum keluarga dan lain sebagainya. Atau maqashid al-syariah al-juz'iyah yang meliputi setiap hukum syara' seperti kewajiban melaksanakan shalat, larangan berbuat zina dan sebagainya.⁶⁹ Itu semua dimaksudkan untuk merealisasikan tujuan akhir dengan diaplikasikannya syariat melalui ajaran maqashid al-syariah. Untuk itu dalam kaitan dengan ajaran maqashid al-syariah ini Ibnu 'Ashur mendefinisikan masalah sebagai suatu perbuatan yang dapat merealisasikan kebaikan atau kemanfaatan selamanya, baik secara umum maupun khusus.⁷⁰

⁶⁸ Ahmad Al-Musri Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Ter. Khikmawati (Jakarta: Amzah, 2010), h. XIV-XV.

⁶⁹ Moh. Triple Helixoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif (Prespektif Maqashid Syariah Ibn 'ATriple Helixur* (Malang: UIN-Pess, 2015). h. 45

⁷⁰ Ika Yunia Fauzia Dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqashid Syariah* (Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 203.

Kemaslahatan umum (*mashlahah 'ammah*) adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan umum, sedangkan kemaslahatan khusus (*mashlahah khashshah*) adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan diri sendiri (individu). Betapa stategisnya posisi ajaran maqashid al-syariah ini dalam penetapan masalah hukum, sehingga dengan demikian Ibnu 'Ashur menekankan betapa pentingnya seorang fukaha' menguasai ajaran ini.⁷¹ Pendapat Ibnu 'Ashur tersebut ada titik persamaannya dengan pendapat Wahbah Zuhayli (L. 1932M) yang membagi maqashid al-syariah ke dalam dua bagian,⁷² yakni pertama, yang berhubungan dengan kepentingan publik (*almashlahah al-kulliyah*) dan kepentingan individu (*al-mashlahah al-juz'iyah al-khashshah*). Sedangkan yang kedua pembagian menurut kepentingan pemenuhannya dan penghindaran terhadap kerusakannya, yakni al-mashlahah (kemaslahatan yang sudah pasti), al-mashlahah aldzanniyah (kemaslahatan yang tingkat kesalahannya sedikit), dan al-mashlahah al-wahmiyyah (kemaslahatan yang tingkat kesalahannya dominan).

Selanjutnya Zuhayli membedakan antara pengertian darurat (dlarurah) dan kemaslahatan (mashlahah).⁷³ Darurat adalah kondisi di mana kebutuhan manusia sampai kepada situasi yang mengancam jiwa atau pun harta benda mereka (katakan saja yang berhubungan dengan kebutuhan makan, minum, pengobatan dan papan). Sedangkan kemaslahatan yakni penjagaan terhadap tujuan syariah dengan menghindari kerusakan pada penciptaan. Selanjutnya Zuhayli menegaskan bahwa maqashid al-syariah merupakan dasar keadilan dan menjadi acuan para fukaha dan kaum Muslimin dalam pengembangan dan pelaksanaan hukum Islam. Karena

⁷¹ Ika Yunia Fauzia Dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqashid Syariah (Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 203.

⁷² Ika Yunia Fauzia Dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqashid Syariah (Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 203.

⁷³ Ika Yunia Fauzia Dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqashid Syariah (Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 203.

menurutnya, banyak ulama yang salah menempatkan maqashid al-syariah dengan beranggapan bahwa ajaran ini berasal dari luar syariah itu sendiri.

Dalam kaitan dengan kemaslahatan, pakar lain, dalam hal ini Yusuf Qardhawi mempertegas jika terjadi pertentangan antara mashlahah dengan nash maka yang harus dimenangkan adalah nash terlebih dulu, terlebih lagi jika kemaslahatan itu masih diragukan. Karena bagaimanapun tujuan nash itu sendiri adalah untuk memelihara kemaslahatan.⁷⁴ Tidak demikian jika sekiranya ada pertentangan antara al- mashlahah al-mu'tabarah dengan nash yang memungkinkan untuk ditakwilkan, maka menurut Qardhawi, diharuskan mentakwilkan nash yang ada agar sesuai dengan al-mashlahah al-mu'tabarah.⁷⁵

Selanjutnya Qardhawi menekankan betapa urgennya mempelajari dan memahami maqashid al-syariah (termasuk juga illah), bagi siapa pun yang ingin memperdalam syariah guna mengetahui realitas dan rahasia yang terkandung di dalamnya agar tidak menimbulkan kesalahan yang fatal. Atau, bahkan akan mengingkari dan akan menimbulkan prasangka bahwa maqashid al- syariah merupakan dalil yang diada-adakan oleh manusia di dalam berijtihad. Secara substansial pendapat Qardhawi ini sejalan dengan pendapat Ibnu 'Ashur dan Zuhayli sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Lebih jauh, dalam kaitan dengan mashlahah ini, Muhammad Sa'id Ramadhan (1929 M-2013 M) menyatakan bahwa mashlahah identik dengan manfaat. Mashlahah adalah manfaat yang menjadi tujuan Tuhan terhadap hamba-Nya dalam hal melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda miliknya.⁷⁶ Hal ini sesuai dengan pendapat Asy-Syatibi yang menyatakan bahwa mashlahah merupakan dasar bagi kehidupan manusia yang terdiri dari lima hal, yakni dyn, nafs, 'aql, nasl, dan maal.⁷⁷

⁷⁴ Ibid., 106.

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Ibid., 111.

⁷⁷ P3EI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerjasama Dengan BankIndonesia, Ekonomi Islam (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), h. 5-6.

Selanjutnya, dampak mashlahah dan mafsadah tidak hanya di dunia, bahkan juga di akhirat kelak.⁷⁸ Setiap amal yang diyakini akan menghasilkan kebaikan di masa kini dan akan datang adalah termasuk mashlahah. Selain itu, mashlahah tidak saja dinilai dari aspek materi saja, namun juga segala sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh, jiwa, dan roh manusia.⁷⁹ Maksudnya, dalam menilai mashlahah hendaknya secara holistik dan seimbang, baik secara materi maupun nonmateri.⁸⁰ Menurutny lagi, mashlahah agama merupakan dasar bagi mashlahah yang lain dan harus diprioritaskan. Atau, dengan kata lain, untuk jelasnya, mashlahah agama posisinya sebagai kausa prima dari masalah yang lain, sehingga perlu didahulukan dalam implementasinya dalam kehidupan, tanpa kecuali dalam dunia pariwisata halal.

Bertolak dari uraian di atas dapat dipahami bahwa meraih mashlahah adalah merupakan tujuan mendasar syariah untuk mendapatkan kebahagiaan tidak saja di dunia, namun juga kelak di kemudian hari setelah mati. Mashlahah di dunia baru akan dicapai, apabila telah dilakukan perlindungan terhadap lima aspek sebagaimana tertuang dalam maqashid al-syariah yang pada prinsipnya merupakan prakondisi untuk meraih mashlahah di akhirat. Inilah sejatinya yang disajikan oleh para pakar di atas yang perlu diperhatikan dan diacu oleh para pemangku kepentingan pariwisata halal yang benar-benar memiliki komitmen terhadap ajaran syariah.

3. Mewujudkan Mashlahah : Tujuan Mendasar Syariah

Sebagaimana kita pahami bersama bahwasanya tujuan syariat Islam (Hukum Islam) adalah meraih kemaslahatan hidup, tidak saja di dunia, namun juga di akhirat. Inilah sejatinya tujuan yang hakiki karena yang perlu diraih dalam hidup tidak saja kehidupan dunia fana yang sesaat, namun juga untuk jangka waktu yang kekal dan abadi yang dikenal dengan kehidupan setelah

⁷⁸ Pendapat ini, dibandingkan dengan P3EI Univeristas Islam Yogyakarta, Ekonomi Islam, h. 6.

⁷⁹ Fauzia dan Riyadi, Prinsip Dasar ekonomi Islam persfektif maqasid Syariah Penerbit Penerbit Kencana 2014.

⁸⁰ Ibid

mati. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam al-Syatibi bahwa syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.⁸¹

Dalam kaitan ini, agar mashlahah itu dapat dicapai, Abu Ishaq al-Syatibi (wafat 1388 M) mempertegas lima aspek yang perlu mendapat perlindungan yang diajarkan dalam maqashid al-syariah sebagaimana yang telah banyak disinggung pada bagian topik kajian ini.⁸² Tujuan syariah sebagaimana di atas, dapat dilihat dari dua sisi, yakni a). Dari sisi Pembuat Syariah itu sendiri, yaitu Allah dan Rasul-Nya dan b) sisi manusia sebagai pelaku (eksekutor) hukum itu sendiri. Jika dilihat dari sisi Pembuat Hukum, pertama, adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang bersifat primer (*daruriyyat*), sekunder (*hajiyyat*) dan tersier (*tahsiniyyat*).

Daruriyat yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan manusia. Kemaslahatan daruriat meliputi lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Kelima hal tersebut menjadi tujuan utama dari semua agama.⁸³ Untuk melihat agama Tuhan memerintahkan agar menegakkan syiar-syiar Islam, seperti shalat, puasa, zakat, haji, memerangi (jihad) orang yang menghambat dakwah Islam, dan lain sebagainya.

Untuk memelihara jiwa, Tuhan melarang segala perbuatan yang akan merusak jiwa, seperti pembunuhan terhadap orang lain atau diri sendiri, disyariatkan qishas bagi pelaku pembunuhan dan tidak makar, sebaliknya dituntut melakukan sesuatu yang mengarah pada terpeliharannya jiwa, seperti makan, minum, memelihara Kesehatan dan lain-lain.

Untuk memelihara keturunan Tuhan melarang berbuat dan menjatuhkan hukuman berat bagi orang yang menuduh seseorang berbuat zina dan tidak dapat menunjukkan bukti yang sah. Sebaliknya Tuhan

⁸¹ Ibid., h. 44.

⁸² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 61.

⁸³ Al-Syathibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'at*, Beirut-Lebanon : Dar AL-Ma' arifat,tt

memerintahkan untuk melakukan pernikahan secara sah. Dalam kaitannya dengan memelihara harta, tuhan menetapkan hukum potong tangan bagi pencuri dan melarang berjudi, sebaliknya disyariatkan untuk memiliki dan mengembangkan harta. Untuk memelihara akal Allah melarang untuk meminum khamar dan semua perbuatan yang dapat merusak akal, sebaliknya mensyariatkan untuk menggunakan akal sehat untuk memikirkan ciptaan Tuhan dan menuntut ilmu pengetahuan.

Hajiyat yaitu segala kebutuhan manusia dalam memperoleh kelapangan hidup dan menghindarkan diri dari kesulitan (*musyaqqat*). Jika kedua kebutuhan ini tidak terpenuhi, manusia pasti akan mengalami kesulitan dalam hidupnya meskipun kemaslahatan umum tidak menjadi rusak.⁸⁴ Artinya, ketiadaan aspek *Hajiyat* tidak sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kerusakan saja. Aspek *Hajiyat* ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban *taklif* dan memudahkan urusan manusia. Untuk maksud ini, Islam menetapkan sejumlah ketentuan beberapa bidang. Ibadah, mu'amalah dan ugubat (pidana). Sebagai contoh adanya dispensasi (*rukhsah*). Sebagai contoh adanya dispensasi (*rukhsah*) dan keinginan bagi mukallaf yang tidak dapat berpuasa pada bulan Ramadhan karena sakit, diperbolehkan suami menceraikan istrinya apabila rumah tangga mereka tidak mungkin dipertahankan lagi, dan menetapkan kewajiban membayar denda (*diyat*) bagi orang yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja.

Tahsiniyat Adalah segala yang pantas dan layak mengikut akal dan adat kebiasaan serta menjauhi segala yang tercela mengikut akal sehat. Tegasnya *tahsiniyat* ialah segala hal yang bernilai etis yang baik (*makarim al-akhlaq*).⁸⁵ Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan

⁸⁴ Al-Syathibi, Abu Ishaq, Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'at, Beirut-Lebanon : Dar AL-Ma' arifat,tt

⁸⁵ Al-Syathibi, Abu Ishaq, Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'at, Beirut-Lebanon : Dar AL-Ma' arifat,tt

manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti kalau tidak terwujud aspek *dharuriyat* dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek *Hajiyat*. Namun, ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.

Aspek *tahsiniyah* dalam bidang ibadah, misalnya kewajiban membersihkan diri dari najis, menutup aurat, berhias bila hendak ke masjid, melakukan amalan-amalan sunnat, bershadaqah, berlaku sopan santun dalam makanan dan minum atau dalam pergaulan sehari-hari, mejauhi hal-hal yang berlebihan, menghindari makan makanan kotor dan lain sebagainya adalah contoh aspek *tahsiniyah* dalam perspektif hukum islam dibidang adat atau kebiasaan yang positif. Selanjutnya, keharaman melakukan jual-beli dengan cara memperdaya dan menimbun barang dengan maksud menaikkan harga perdagang, spekulasi dan lain-lain sebagainya adalah contoh aspek *tahsiniyat* tidak kurang pentingnya sebab berkaitan dengan etika hidup yang baik (*makarim al-akhlaq*).

Perlu ditegaskan bahwa ketiga jenis kebutuhan manusia (*dharuriyat Hajiyat dan tahsiniyat*). Diatas dalam mencapai kesempurnaan kemaslahatan yang diinginkan syariat sulit untuk dipisahkan satu sama lain. Sekalipun aspek-aspek dharuriyat merupakan kebutuhan yang paling esensial, tapi kesempurnaan diperlukan aspek-aspek Hajiyat dan tahsiniyat. Hajiyat merupakan penyempurnaan bagi *dharuriyat* dan *tahsiniyat*. Namun aspek dharuriyat adalah dasar dari kemaslahatan manusia.

Sekalipun dikatakan dharuriyat merupakan dasar bentuk bagi adanya *Hajiyat dan tahsiniyat*, itu tidak berarti bahwa tidak terpenuhinya dua kebutuhan yang disebut terakhir akan membawa kepada hilangnya eksistensi *dharuriyat*. Atau ketiadaan dua aspek itu tidaklah mengganggu eksistensi *dharuriyat* secara keseluruhan. Namun, untuk kesempurnaan tercapainya tujuan syariah dalam mensyariatkan hukum islam, ketiga jenis tersebut harus

terpenuhi. Dan inilah yang dimaksud bahwa ketiga kebutuhan tersebut merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan.

Kedua, tujuan syariat adalah untuk ditaati dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dan ketiga, agar dapat ditaati dan dilaksanakan dengan benar oleh manusia, maka mereka perlu meningkatkan kemampuannya untuk memahami syariah itu sendiri. Itulah sejatinya prasyarat untuk meraih kemaslahatan hidup dalam arti luas dari aspek Tuhan sebagai Pembuat Hukum yang bersifat Raman dan Rahim terhadap makhluk ciptaan-Nya. Sedangkan jika dilihat dari sisi manusia sebagai pelaku hukum (subjek), yakni mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera dengan syarat mereka mampu menangkap yang bermanfaat. Sebaliknya, mereka juga mampu mencegah yang mudarat dalam kehidupan. Prasyarat semacam ini sangatlah tergantung pada sikap dan komitmen manusia itu sendiri dalam kapasitasnya sebagai makhluk mukallaf yang dibebani tanggung jawab oleh Tuhan selaku Pembuat Hukum.

Sebab itu inilah sejatinya yang perlu menjadi bahan renungan bagi para pemangku kepentingan industri pariwisata halal dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan yang datang berkunjung. Yakni mengedepankan kebutuhan untuk berwisata, sehingga mereka merasakan kepuasan dan kebahagiaan dalam berwisata. Bukankah syariah itu diturunkan untuk dilaksanakan sesuai dengan maqashid-nya agar kehidupan yang adil dapat ditegakkan, kebahagiaan sosial dapat diwujudkan, dan ketenangan dalam bermasyarakat dapat dipertahankan.⁸⁶

Atau dengan kata lain, para pengusaha memiliki komitmen dan selalu berupaya agar para wisatawan memperoleh mashlahah dan terhindar dari segala hal yang membahayakan atau merugikan bagi diri dan keluarganya dalam arti luas sesuai tujuan syariat itu sendiri. Bukankah pariwisata halal itu merupakan salah satu media di era kehidupan modern saat ini dalam

⁸⁶ Fauzia dan Riyadi, Prinsip Dasar ekonomi Islam perspektif maqasid Syariah Penerbit Penerbit Kencana 2014

mewujudkan kemaslahatan sesuai prinsip syariah di tengah maraknya pariwisata sekuler yang hanya mengejar gemerlap duniawi yang materialistik semata.

Terkait dengan pariwisata halal dihubungkan dengan *Maqashid al-Syari'ah*, bahwa para wisatawan yang berkunjung pada daerah wisata dapat merasakan kenyamanan dan pada saat mereka tinggal di daerah wisata yang mereka kunjungi. seperti, pada aspek makanan seharusnya dijamin halal sekaligus *thoyyib*, karenanya semua makanan minuman yang disediakan harus senantiasa steril dari makanan dan minuman yang diharamkan. Pada saat yang sama penyediaan peralatan ibadah harus terisi, seperti penyediaan alat shalat, arah kiblat untuk memenuhi nilai elemen *maqashid al-Syari'ah* berupa *hifzh al-Din* (pemeliharaan agama). Tapi yang paling penting bagaimana para tamu berinvestasi dalam bentuk apa saja, sehingga mereka tidak hanya datang tetapi mereka akan selalu datang untuk menjadi tamu dan pemilik. Bahkan dengan adanya investasi itu, lapangan kerja semakin terbuka bagi masyarakat dan akan mengurangi pengangguran”.

Pariwisata halal yang berhubungan dengan *Maqashid al-Syari'ah* mesti meliputi 5 bagian diantaranya pertama *hifzh al-Din* merupakan bagaimana cara pengelola serta masyarakat dapat melepaskan kenyamanan dari aspek penerapan ibadah. Kedua, *hifzh al-Nasal* yaitu pada penduduk leluasa berfaedah bagi penyedia hotel pengunjung serta masyarakat menjadi penduduk area wisata dapat mempersembahkan ketenangan bagi pamili dan privasi dapat merasakan dengan terpelihara kemuliaan mereka pada saat berpariwisata. Ketika berada pada objek wisata pada umumnya menyampaikan keleluasaan jarak pria dan wanita yang tidak *mahram*, bahwa terang maksud serta dan pendirian pariwisata perspektif halal melarang hal itu, dengan tujuan untuk menjaga kehormatan antara pria dan wanita yang sedang melancong datang untuk bertandang.

Ketiga, *hifzh al-Mal*, maknanya bagaimana usaha rakyat, baik para pengelola dan sebagainya bisa membagikan keternteraman dengan tidak

berjual beli yang dapat memicu kemudharatan yang abnormal, seperti menjual barang-barang yang diharamkan dan sebagainya. Keempat, *hifz al-Nafs*, artinya bagaimana upaya pengelola dan masyarakat luas dapat menjaga situasi dan kondisi sehingga dapat terjaga keamanan dan kenyamanan dalam menghabiskan waktu dalam berpariwisata.

Kelima *al-Aql*, adalah bagaimana upaya masyarakat luas, baik pengelola dan lainnya dapat menjaga kondisi dan situasi dengan menjauhi segala bentuk yang merusak akal, seperti penyalahgunaan narkoba, minuman keras dan sebagaimana ketentuan-ketentuan pariwisata halal yang dibingkai dengan konsep *maqashid al-syari'ah*, khususnya *Maqasid Al-Dharuriyyat* (tujuan-tujuan niscaya/primer) wajib terpenuhi, sehingga disebut dengan istilah pariwisata halal.

Dalam dunia pariwisata halal ada *Maqasid Al-Hajiyyat* (tujuan-tujuan sekunder) dapat dijelaskan umpama, sungguh dalam rencana melindungi agama (*hifz al-din*) maka para pelancong harus menjalankan anjuran agama diantaranya sholat, bahwa kelompok penyelenggara wisata halal bertanggung jawab mempersiapkan mushalla. Tanpa tersedianya mushalla, para pengunjung sebenarnya dapat hanya sholat di samping tepi laut, di kerikil batu, dan lain-lain, akan namun keberadaan mushalla kemudian menjadi penting dan diperlukan (arti dari *hajiyyat*) akan memperlancar para pengunjung untuk melindungi amanat agama dalam melaksanakan kewajipan umat muslim yaitu ibadah sholat.

Persis Sama situasi ketika dalam melindungi nyawa serta jiwa (*hifz al-nafs*), para penyelenggara objek wisata halal bisa saja cuma mempersiapkan santapan halal ala kadarnya serta apa adanya diantaranya beras serta sayur-sayuran hijau. Akan tetapi, kehadiran konsumsi yang halal juga tak memadai, melainkan mesti thoyyib, yakni enak, nikmat, sedap, bergizi akan tetapi simpel juga tidak merepotkan sehingga kehadiran cafe dan kedai santap menjadi berarti ataupun dibutuhkan. Selanjutnya dalam rencana melindungi kemuliaan/keturunan (*hifz al-hurmah/al-nasal*), pada kawasan wisata dapat

pula dilaksanakan karena tidak silih memperhatikan serta berhubungan karena orang yang tidak mahram, pemisahan diantara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya sangat penting dibutuhkan untuk menjaga penglihatan karena diperlukan (*hajiyyat*) untuk memperlancar memelihara penglihatan serta aurat. Persis sama, dalam rencana memelihara kekayaan (*hifz al-maal*), pengelola wisata halal dapat memfasilitasi loker atau *safety box* untuk para pelancong, akan tapi kehadiran loker khusus dan *safety box* jelas benar-benar sangat perlu serta diperlukan untuk menjaga harta dari perbuatan-perbuatan manusia yang tak bertanggung jawab.

5. Fatwa DSN-MUI Tentang Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Kalau kita lihat dari regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah, pada tahun 2016 regulasi yang berhubungan dengan peningkatan sektor wisata halal yang ada di Indonesia hampir tidak ada pasca dicabutnya regulasi masalah Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah Nomor 2 Tahun 2014 yang diterbitkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui terbitnya karena regulasi Menteri Nomor 11 Tahun 2016. Pengembangan kawasan wisata halal tidak akan berkembang dengan baik apabila tidak adanya aturan yang mengaturnya. Akan tetapi, sangat banyak sekali unsur-unsur yang terlibat dalam pariwisata halal. Diantara unsur yang harus diatur ialah mengenai ketentuan destinasi wisata halal, jasa atau biro perjalanan wisata halal, pemandu wisata halal, jenis rekreasi yang ditawarkan pada wisata halal, makanan halal, dan lain sebagainya.⁸⁷

Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI juga menerbitkan Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016103 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah yang menjadi landasan standardisasi aspek-aspek wisata halal. Di Fatwa tersebut, aspek pariwisata yang ada di dalamnya adalah

⁸⁷ Fahadil Amin Al Hasan, Penyelenggaraan Parawisata Halal Di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah), *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2.1 (2017), 59–78.

hotel, spa, sauna, dan massage, objek wisata, dan biro perjalanan. Dalam Fatwa DSN Nomor 108 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah ini, beberapa ketentuan telah diatur berkaitan dengan standardisasi dan SDM seperti pada hotel syariah yang mewajibkan bagi pengelola dan karyawan hotel untuk mengenakan pakaian sesuai syariah dan diwajibkan juga untuk memiliki Standard Operasional Prosedur untuk menjamin pelayanan sesuai syariah.⁸⁸

Ada dua hal yang melatar belakangi lahirnya fatwa DSN-MUI ini yaitu; Pertama, semakin berkembangnya sektor pariwisata halal di dunia termasuk di Indonesia, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah; Dan kedua, belum adanya ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI. Alasan pertama yang disampaikan DSN-MUI pada fatwa ini tidaklah tanpa alasan, karena saat ini terdapat tujuh sektor ekonomi Islam yang tengah meningkat secara signifikan, diantara tujuh sektor tersebut yang banyak mengalami pertumbuhan dan menjadi perhatian banyak kalangan adalah pariwisata halal. Dalam hal ini pariwisata halal terus mengalami perkembangan yang signifikan dibandingkan dengan pariwisata konvensional yang ada.⁸⁹

6. Kriteria Utama Pariwisata Halal

Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Badan Pengurus Harian DSN MUI, pariwisata halal mempunyai kriteria umum sebagai berikut:

⁸⁸ Pernyataan Sekretaris Bidang Bisnis Dan Wisata DSN MUI Moch. Bukhori Muslim Dalam *Republika Online* Selasa 23 Mei 2017.

⁸⁹ Fahadil Amin Al Hasan, *Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)* *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* Vol. 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017

- a. Mengarah kepada kemaslahatan publik. Maksudnya adalah dalam wisata untuk menjaga dan memelihara agama, akal, harta, jiwa, dan keturunan/kehormatan.
- b. Berorientasi pada pembauran, penyegaran, dan ketenangan. Maksudnya tujuan wisata untuk mencari ketenangan, karena untuk menghilangkan kejenuhan dalam aktivitas sehari-hari.
- c. Menghindari kemusrikan dan khufarat.
- d. Menghindari maksiat, seperti zina, ponografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi, tidak boleh mengarah kepada maksiat, pornografi, dan tindak asusila. Dengan adanya ketentuan ini maka pihak hotel harus memastikan bahwa tidak ada pengunjung hotel yang sekamar kecuali dengan muhrimnya, apakah itu melalui penunjukan surat nikah atau melalui cara lain, termasuk menyediakan fasilitas umum hotel yang sesuai dengan muhrimnya
- e. Menjaga perilaku, etika dan nilai-nilai luhur kemanusiaan seperti menghindari perilaku hedonis dan asusila.
- f. Menjaga amanah, keamanan dan kenyamanan. Faktor kenyamanan dan keamanan pada suatu kawasan pariwisata merupakan nilai tambah dan peluang untuk dikunjungi oleh wisatawan
- g. Bersifat universal dan inklusif.
- h. Menjaga kelestarian lingkungan. Seperti mengurangi penggunaan sampah plastik, tidak mengganggu keseimbangan ekosistem, dan tidak melakukan perusakan tempat-tempat tertentu karena tujuan sesaat seperti berpoto
- i. Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal. Sehingga, pengembangan pariwisata halal merupakan cara baru untuk mengembangkan pariwisata yang menjunjung tinggi budaya dan nilai-

nilai Islami tanpa menghilangkan keunikan dan orisinalitas daerah-daerah yang menjadi destinasi wisata.⁹⁰

Apabila standar umum yang dijelaskan di atas dapat diterapkan kepada bagian usaha, keahlian serta pesona wisata sampai dari pedoman umum berdasarkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan BPH DSN MUI, dapat dirincikan berikut ini:

a. Daya Tarik Objek Wisata Halal

Kalau kita lihat Dari sisi tujuan wisata, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan diantaranya:

1. Tujuan wisata terdiri dari wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan. Daya tarik wisata alam yang berbasis daya Tarik keanekaragaman serta keistimewaan Kawasan alam pada geografis daratan, diantaranya (a) gunung serta hutan alam/taman nasional/taman wisata alam/taman hutan raya, diantaranya Pantan Terong Bur Gayo, dan sebagainya; (b) perairan sungai dan danau, seperti danau lut tawar, dan sungai peusangan (c) perkebunan, seperti agro wisata Pantan Terong perkebunan kopi, dan perkebunan nenas (d) pertanian, seperti area persawahan. Daya Tarik Wisata budaya berupa daya tarik wisata berbentuk hasil olah cipta, rasa serta karsa manusia sebagai makhluk budaya. Daya tarik wisata budaya dapat diklasifikasikan atas daya tarik yang bersifat berwujud (*tangible*) dan tidak berwujud (*intangible*). Dan objek wisata hasil cipta karya manusia diklasifikasikan menjadi daya tarik wisata khusus yang membentuk kreasi artifisial (*artificially created*) dan aktivitas-aktivitas manusia lainnya di luar wewenang wisata alam serta wisata budaya. Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia/khusus,

⁹⁰ Sofyan, Prospek Bsinis Pariwisata Syariah, (Jakarta : Buku Republika, 2012), h.57, 2012.

2. Tersuguh sarana ibadah yang memadai dan bersih. Dikatakan kebutuhan mendasar karena bagi seorang Muslim kewajiban beribadah dilakukan setiap hari. Dalam kondisi normal (menetap dan tidak berpergian) seorang Muslim wajib melaksanakan ibadah shalat 5 kali sehari. Dan untuk shalat perlu tempat dan sarana berwudhu. Bila sebelum berwudhu Muslim tadi melakukan buang air kecil atau besar maka dia wajib bersuci dengan air. Bila dia tidak bersuci shalatnya tidak akan sah walaupun dia sudah berwudhu.
3. Tersaji menu untuk makanan dan minuman halal. karena kewajiban Muslim lainnya adalah mengkonsumsi makanan yang halal. Untuk kondisi sekarang maka makanan halal tidak hanya sebatas menu yang bebas dari babi. Tapi sekarang dengan adanya teknologi pangan banyak bahan-bahan makanan yang dihasilkan dari bahan babi karena dari sisi ketersediaannya yang banyak dan murah. Maka untuk memastikan apakah makanan dan bahannya halal adalah melalui sertifikat halal.
4. Pertunjukkan seni, budaya dan atraksi yang tidak berseberangan dengan standar umum pariwisata halal. aktifitas wisata adalah tersedianya objek wisata dan aktifitas wisata yang bebas dari kemaksiatan atau kemunkaran. Dalam hal ini tidak ada unsur muatan pornografi dan pornoaksi atau kemunkaran lainnya. Lebih baik lagi kalau aktifitas wisata tersebut bisa memberikan pencerahan, membangkitkan semangat dan kegairahan hidup secara fisik, pemikiran dan jiwa. Kebutuhan ini didasarkan pada kewajiban seorang Muslim untuk menjaga mata dan penglihatannya dari yang diharamkan seperti hal-hal yang berbau pornografi dan pornoaksi yang dapat membangkitkan nafsu syahwat serta kemunkaran lainnya.
5. Terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan. Memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan bagi wisatawan melalui

interaksi yang lebih bermakna dengan masyarakat lokal, dan pemahaman yang lebih besar tentang isu / masalah budaya, sosial, dan lingkungan.

b. Akomodasi Pariwisata Halal

Objek wisata halal harus memiliki akomodasi penginapan yang sesuai dengan standar syariah. Seharusnya bilamana telah ada hotel serta penginapan syariah yang telah memperoleh sertifikat dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Akan tetapi mengingat pada sekarang ini lagi terbatas sekali hotel atau penginapan yang memperoleh sertifikat syariah dari DSN-MUI maka paling tidak hotel serta penginapan yang ada harus memenuhi hal-hal berikut:

1. Terhidang sarana yang pantas dalam bersuci.
2. Tersedia fasilitas yang mempermudah dalam beribadah.
3. Tersaji konsumsi makanan dan minuman halal
4. Fasilitas dan kondisi yang aman, nyaman, serta mendukung bagi keluarga serta bisnis.
5. Terjaga kebersihan makanan dan minuman.

7. Produk Wisata Halal

Produk wisata adalah rentetan dari beragam jasa yang saling berhubungan dapat dilihat dari berbagai sudut antara lain dari sisi ekonomi, dari sisi sosial atau masyarakat, dan dari sisi alam. Pada dasarnya definisi dari produk wisata merupakan keseluruhan pelayanan yang dapat dimanfaatkan keindahan alamnya dan menikmati pelancong sejak bergerak dari lokasi tempat tinggalnya dengan ke lokasi tujuan wisata yang dipilihnya dan sampai kembali kerumah dimana ia berangkat semula. Produk wisata ialah salah satu daya tarik obyek wisata yang dapat menawarkan dalam bentuk pemasaran pariwisata dengan memiliki ciri-ciri yang utama terdiri dari 3 bagian antara lain.

1. Daya tarik daerah tujuan wisata, yang terdapat di dalamnya citra dan memiliki keunikan tersendiri di dalam objek wisata yang dibayangkan oleh wisatawan
2. Daerah tujuan mempunyai fasilitas wisata, seperti tersedianya akomodasi seperti, rumah makan, parkir, transportasi, rekreasi dan lain-lain.
3. Tersedianya infrastruktur yang memadai guna untuk memudahkan mencapai daerah tujuan wisata tersebut.⁹¹

Demikian pula dalam kaitan dengan masalah sumber daya manusia dalam fungsinya sebagai khalifatullah, tidaklah sedikit peran yang dimainkan di muka bumi ini. Antara lain sebagai subjek pelaku dalam aktivitas wisata dalam arti luas, sehingga dengan demikian, dalam memainkan perannya, mereka harus mengedepankan nilai-nilai hukum dan etika yang berlaku.⁹² Bimbingan Pendidikan kepariwisataan ialah salah satu kunci dalam pengembangan daya tarik kepariwisataan (kawasan wisata), lantaran bagian ini membutuhkan kemampuan aktivitas skill yang selalu berjalan menerus harus ditingkatkan. Salah satu problem pada mengembangkan pariwisata ialah tidak adanya sarana dan prasarana yang memadai dalam menggerakkan pendidikan pariwisata.

Tenaga kerja yang mampu muncul mempunyai skill yang memumpuni dan pengabdian dalam profesinya (professional) selalu menjadi keperluan penuh bersaing pada pasaran global. Produk industri pariwisata menawarkan jasa, oleh karena itu penekanannya harus dari sisi servis yang diselaraskan dengan keinginan pelancong wisata. pada industri pariwisata, kapasitas pelayanan membentuk indikator utama yang membuktikan tingkat kompetennya.

⁹¹ Yoeti, Oka, Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung: Angkasa. 2006

⁹² Djakfar, Muhammad, Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi : Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal Di Indonesia. UIN-Maliki Press, Malang. Editors : UNSPECIFIED,2017.

Pengembangan keterampilan tenaga kerja ditekankan pada 3 hal pokok (1) Pengembangan pengetahuan tentang tata cara pelayanan yang berhubungan dengan bertingkatnya aktivitas pariwisata, seperti pelayanan di hotel, pada pelayanan pada lokasi rekreasi atau pada perjalanan wisata. 2) Pengembangan skill tentang perlengkapan dan perlengkapan yang dibutuhkan pada bidang pelayanan. 3) Pengembangan SDM yang berkorelasi pada pengembangan perilaku, sopan santun, dan lain yang berkaitan. Dari ketiga poin di atas setiap saat senantiasa berpluktuasi dan bergerak pada kemajuan, maka ketiganya harus selalu dimajukan khususnya melalui pendidikan, yang juga akan mempengaruhi daya serap industri.

8. Potensi Wisata Dalam Pemberdayaan Ekonomi

Suatu tempat dapat menjadi suatu obyek wisata harus mempunyai suatu potensi ekologis yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Potensi tersebut dapat berupa kenampakan alam alami yang dimiliki oleh tempat tersebut, dalam hal ini stakeholder yang bertanggung jawab terhadap obyek wisata tersebut.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi potensi wisata tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Kondisi fisis, Aspek fisis yang berpengaruh terhadap wisata berupa iklim, tanah, batuan dan morfologi, hidrosfer, flora dan fauna. 2. Atraksi dan obyek wisata, Atraksi wisata adalah segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi orang untuk mengunjungi suatu daerah, misal adalah tarian, nyayian, kesenian daerah, upacara adat dan lain-lain. 3. Aksesibilitas, Aksesibilitas berkaitan dengan usaha pencapaian tempat wisata. Semakin mudah tempat tersebut dicapai maka akan menambah minat wisatawan untuk berkunjung. 4. Pemilikan dan penggunaan lahan, Variasi pemilikan dan penguasaan lahan dapat mempengaruhi lokasi tempat wisata, bentuk pengembangannya, serta juga bisa mempengaruhi arah pengembangannya. Bentuk penguasaan lahan antara lain lahan negara atau pemerintah, lahan masyarakat dan lahan pribadi. 5. Sarana dan prasarana

wisata. Sarana wisata berupa transportasi, biro perjalanan wisata, hotel atau penginapan dan rumah makan. Prasarana wisata berupa prasarana perhubungan, komunikasi, instalasi listrik, persediaan air minum, sistem irigasi, sistem perbankan dan pelayanan Kesehatan.⁹³ 6. Masyarakat. Pemerintah melalui instansi-instansi terkait telah menyelenggarakan penyuluhan kepada masyarakat dalam bentuk bina masyarakat sadar wisata.⁹⁴

Menurut Majdi Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, daya. Intinya, secara sederhana, potensi adalah sesuatu yang bisa kita kembangkan. Sementara itu Potensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan.⁹⁵

Di dalam pengembangan pariwisata halal, pengembangan berencana harus dilakukan secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial dan cultural. Perencanaan tersebut harus mengintegrasikan pengembangan pariwisata kedalam suatu program pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial dari suatu negara. Dalam Undang- Undang R1 No 10 Tahun 2009 Pasal 6 dan 7, tentang pembangunan pariwisata disebutkan bahwa pembangunan pariwisata haruslah memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam serta kebutuhan manusia untuk berwisata (Pasal 6). Pembangunan pariwisata meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata (Pasal 7).

Pengembangan pariwisata memerlukan teknik perencanaan yang baik dan tepat. Teknik perencanaan itu harus menggabungkan beberapa aspek penunjang kesuksesan pariwisata. Aspek-aspek tersebut terdiri dari aspek aksesibilitas (transportasi dan saluran pemasaran), karakteristik infrastruktur

⁹³ Yoeti, Oka, Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung: Angkasa. 2006

⁹⁴ Gamal, Suwantoro. 1997. Dasar-Dasar Pariwisata. Yogyakarta: ANDI

⁹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1989, cet. 2 hlm. 697.

pariwisata, tingkat interaksi sosial, keterkaitan/ kompatibilitas dengan sektor lain, daya tahan akan dampak pariwisata, tingkat resistensi komunitas lokal, dan seterusnya. Joyosuharto mengatakan, pengembangan pariwisata memiliki 3 fungsi yaitu:⁹⁶

- a. Menggalakkan ekonomi
- b. Memelihara kepribadian bangsa dan kelestarian fungsi serta mutu lingkungan hidup
- c. Memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa

Dalam pengembangan wisata halal, paradigma utama yang perlu dipahami bersama adalah wisata halal tidak bertujuan untuk mengasingkan wisatawan muslim dari kegiatan pariwisata umum atau untuk membatasi wisatawan non muslim di tujuan wisata tertentu. Namun, pengembangan wisata halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan muslim dalam melaksanakan ibadah sesuai syariat agama pada saat bepergian. Bagi wisatawan non-muslim wisata halal diharapkan dapat memberikan layanan wisata yang aman dan sehat sekaligus untuk memperkenalkan ajaran islam sebagai nilai yang universal.⁹⁷

Pembangunan kepariwisataan di Indonesia mencakup 4 pilar pembangunan kepariwisataan yakni: (1) Destinasi (2) Pemasaran (3) Industri dan (4) Kelembagaan. Keempat pilar tersebut merupakan upaya perwujudan azas pembangunan dengan memerhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Pengembangan pariwisata harus dilihat dalam satu kesatuan upaya untuk memajukan pariwisata. Keempat pilar tak dapat berdiri sendiri-sendiri karena satu dan lainnya saling berpengaruh. Aspek kelembagaan dapat mempengaruhi semua aspek lain.

⁹⁶ Joyosuharto, S, Aspek Ketersediaan dan Tututan Kebutuhan dalam Pariwisata, dalam Dasar-dasar Manajemen Kepariwisata Alam, Editor : Ch. Fandeli, Liberty, Yogyakarta, 2000.

⁹⁷ Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Dody Budi Waluyo, pada acara Indonesia Halal Tourism Summit di Jakarta, dalam bisnis wisata.co.id (Nov 16, 2019) BI: Wisata Halal, Mesin Pendorong Industri Halal Indonesia, s Endy Poerwanto

Dalam hal ini pembangunan pariwisata Indonesia diharapkan dapat: 1. Menjadikannya sebagai destinasi wisata nasional/internasional yang berkelanjutan 2. Meningkatkan posisi Indonesia di pasar internasional maupun nasional sehingga jumlah kunjungan akan meningkat 3. Memberikan kesempatan bagi industri kepariwisataan sebagai penopang aktivitas wisata untuk berkembang menjadi industri yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi pengusaha/pemilik usaha. 4. Menumbuh kembangkan suatu sistem kelembagaan yang ditopang oleh sumber daya manusia yang kompeten melalui regulasi yang ditegakkan secara efektif.

Keempat pilar tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lain yang tak terpisahkan. Pada tingkat nasional, pemerintah masih memakai jumlah kunjungan sebagai sasaran untuk mewakili tolak ukur keberhasilan. Meskipun demikian jumlah kunjungan tersebut tergantung kepada bukan hanya keberhasilan pemasaran (promosi) melainkan juga keberhasilan upaya pengembangan destinasi, industri, serta kelembagaannya (manusia, aturan, dan organisasinya).

Potensi dapat diartikan perubahan bentuk permukaan bumi yang ditimbulkan oleh proses alam yaitu tenaga endogen, misalnya pegunungan, danau, sungai atau bentuk lain. Potensi obyek wisata juga terjadi karena suatu proses yang dapat disebabkan budidaya manusia.⁹⁸ Tempat wisata harus mempunyai suatu potensi ekologis yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Potensi dapat berasal dari alam yang alami dari tempat tersebut, dalam hal ini stakeholder yang bertanggung jawab atas obyek wisata tersebut. Faktor pendorong pengembangan potensi obyek wisata adalah kondisi fisik, aksesibilitas, pemilikan, dan penggunaan lahan, hambatan dan dukungan serta

⁹⁸ Sujali, Geografi Pariwisata dan Kepariwisata, (Yogyakarta: Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada, 1989), h. 19

faktor-faktor lain seperti upah tenaga kerja dan stabilitas politik. Di bawah ini akan disebutkan faktor-faktor pendorong potensi wisata, diantaranya.⁹⁹

1. Kondisi fisik berupa iklim, tanah, batuan dan morfologi, hidrosfer, flora, dan fauna.
2. Atraksi dan obyek wisata yang menjadi daya tarik bagi orang untuk mengunjungi suatu daerah tertentu, seperti tari-tarian, nyanyian, kesenian daerah, upacara adat, dan lain sebagainya.
3. Aksesibilitas berkaitan dengan usaha pencapaian tempat wisata. Semakin mudah tempat tersebut dicapai maka semakin banyak pengunjung yang berminat datang.
4. Pemilikan dan penggunaan lahan dapat mempengaruhi lokasi tempat wisata antara lain lahan negara, lahan masyarakat dan lahan pribadi.
5. Sarana dan prasarana wisata seperti transportasi, biro perjalanan wisata, hotel atau penginapan dan rumah makan. Sedangkan prasarana wisata adalah segala fasilitas yang memungkinkan agar sarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang serta dapat memberikan pelayanan kepada wisatawan yang beraneka ragam.
6. Kesadaran masyarakat.

9. Pariwisata Halal Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa mengembangkan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat bahwa pariwisata berbasis masyarakat mempunyai peluang yang besar untuk mengembangkan event-event pariwisata berskala kecil yang dapat dikelola sendiri oleh masyarakat sekitar. Karena dikelola langsung oleh masyarakat, maka mereka terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang mana keputusan tersebut sesuai dengan keadaan yang ada disana.

⁹⁹ Gamal Suwanto, Dasar-Dasar Pariwisata, (Yogyakarta: Andi Publishing, 1997), h. 19.

Pariwisata berbasis masyarakat juga didukung oleh Kementerian Pariwisata RI, yang mana salah satu hasil penelitian mereka menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan daerah tujuan wisata (DTW) di Indonesia masih rendah. Hal ini antara lain disebabkan karena tidak adanya ketentuan yang jelas dan rinci tentang pelibatan masyarakat dalam pengembangan DTW. Adapun faktor-faktor keberhasilan suatu program pelibatan masyarakat dalam pengembangan DTW adalah dialog dengan umpan balik dari masyarakat, kejujuran dan keterbukaan, pelibatan dari awal dan komitmen terhadap masyarakat.¹⁰⁰

10. Sumber Daya Manusia Dalam Pariwisata Halal

Sebagaimana kita ketahui bahwasanya saat ini sektor pariwisata merupakan sebuah industri yang harus dikelola secara profesional sehingga dibutuhkan kehadiran sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. Khusus untuk industri pariwisata halal, keberadaan SDM sangat dibutuhkan untuk mengawal segala aktivitas programnya agar bersesuaian dengan semangat ajaran maqashid al- syariah dalam Islam. Semakin kapabel SDM yang tersedia, maka berkecenderungan akan semakin cepat perkembangan pariwisata yang dikelolanya.

Adapun yang dimaksud sumber daya manusia (SDM) pariwisata di sini adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi alam untuk mencapai kesejahteraan yang seimbang dan berkelanjutan di bidang kepariwisataan. Atau dengan kata lain, yakni semua orang yang berkecimpung dan atau menyumbangkan tenaga dan pikirannya pada seluruh potensi yang terkandung di dalam usaha pariwisata demi tercapainya kesejahteraan dalam tatanan yang berkeeseimbangan dan berkelanjutan.

¹⁰⁰ Ratna Suranti, *Pariwisata Budaya dan Peran serta Masyarakat*; 2008. melalui [http. Kompas.co.id](http://Kompas.co.id). Tanggal 12 Mei 2019.

Selanjutnya, menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, SDM Pariwisata jika dikategorikan berdasarkan lembaganya dapat dipetakan sebagai berikut, yakni, 1). Institusi Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah; 2). Institusi Swasta/Industri; dan 3). Masyarakat.¹⁰¹ Tentu saja ketiganya memiliki SDM dan kompetensinya sendiri-sendiri sesuai kapasitas masing-masing. SDM Pemerintah dari kalangan perguruan tinggi negeri misalnya, memiliki kompetensi sebagai akademisi atau peneliti.¹⁰² Sedangkan dari kalangan institusi swasta/industri seperti dari masyarakat perguruan tinggi negeri atau lembaga swasta dan lembaga swadaya masyarakat memiliki kompetensi sebagai akademisi atau peneliti dan teknokrat.¹⁰³

Adapun dari kalangan masyarakat, seperti pengusaha pariwisata, pengelola dari top hingga low management dan craft level selain juga harus profesional, juga sejatinya juga harus memiliki kompetensi berupa skill untuk melaksanakan tugas-tugas yang bersifat teknis dalam pariwisata.¹⁰⁴ Khusus untuk SDM industri pariwisata halal, selain memiliki kompetensi tersebut, juga diharapkan memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip syariah Islam.¹⁰⁵

Untuk selanjutnya agar mereka mampu mengimplementasikan ajaran maqashid al-syariah ke dalam dunia pariwisata. Karena itu dari kalangan mereka dituntut agar memiliki komitmen dan integritas dalam turut mengawal pbumian maqashid al-syariah di kancah pariwisata sehingga pariwisata halal benar-benar mampu mengekspresikan ajaran syariah kapan pun dan di mana pun juga.

¹⁰¹ Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

¹⁰² Bambang Sunaryo, Kebijakan pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia (Yogyakarta: Penerbit Gava Media 2013), h. 201.

¹⁰³ Ibid

¹⁰⁴ Ibid 202

¹⁰⁵ Lihat kembali Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No, 108/DSN- MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Itulah kiranya gambaran moslem friendly tourism yang harus menjadi ikon wisata halal sebagai wujud ekspresi bahwasanya kehadiran syariat Islam adalah merupakan *rahmatan lil 'alamin* yang menjunjung tinggi nilai-nilai etis serta menghargai eksistensi manusia. Hal ini sejalan dengan karakter ekonomi syariah yang *uluhiyyah, insaniyyah, akhlaqiyyah dan washatiyyah*.¹⁰⁶ Tentunya, karakter ini, secara universal harus terimplementasi ke dalam atmosfer dunia wisata halal yang mengedepankan terciptanya kedamaian, keamanan, kenyamanan, kemaslahatan dan sebagainya sehingga para wisatawan akan mendapat kepuasan secara total. Inilah sejatinya fitrah ajaran Islam yang selalu mendorong tercapainya mashlahah di dalam kehidupan.

11. Accessibility (Aksesibilitas)

Pengertian Access/akses adalah: kemampuan untuk mendapatkan manfaat dari sesuatu atau hak untuk memperoleh sesuatu kekuasaan.¹⁰⁷ Sedangkan definisi akses adalah hak untuk memasuki, memakai dan memanfaatkan kawasan atau zona zona tertentu.¹⁰⁸ Kata akses merupakan kosa kata dalam Bahasa Indonesia yang diserap dari Bahasa Inggris yaitu access yang berarti jalan masuk. Akses berarti jalan atau izin masuk dari suatu tempat / wilayah baik yang dapat dilihat dengan mata ataupun tidak dimana kita dapat berhubungan dengan sumber daya yang ada didalam wilayah tersebut sesuai dengan izin yang dimiliki.

Salah satu komponen infrastruktur yang penting dalam destinasi adalah aksesibilitas. Aksesibilitas yang baik merupakan aspek yang penting bagi tumbuh dan berkembangnya sebuah pariwisata. Akses yang bersifat fisik maupun non fisik untuk menuju destinasi wisata merupakan hal penting dalam pengembangan pariwisata. Aktivitas kepariwisataan banyak tergantung pada

¹⁰⁶ Yusuf Qordhowi. *Daar al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995).

¹⁰⁷ Ribot, J.C and Peluso, N.L. *A Theory of Access*. *Rural Sociology*. 2003

¹⁰⁸ Schlager E, Ostrom E. *Property-rights regimes and natural resources: A conceptual analysis*. *Land Economics* 68(3):249-262. 1992`

transportasi dan komunikasi karena faktor jarak dan waktu yang mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan perjalanan wisata. Selain transportasi yang berkaitan dengan aksesibilitas adalah prasarana meliputi jalan, jembatan, terminal, stasiun dan bandara. Prasarana berfungsi untuk menghubungkan tempat satu ke tempat yang lain. Aspek fisik dalam aksesibilitas menyangkut jalan, kelengkapan fasilitas dalam radius tertentu dan frekuensi transportasi umum. Jaringan jalan memiliki dua peran penting dalam kegiatan pariwisata, yaitu:¹⁰⁹

1. Sebagai alat akses, transport, komunikasi wisatawan dengan atraksi rekreasi dan fasilitas.
2. Sebagai cara untuk melihat-lihat (*sightseeing*) dan menemukan tempat, jadi perencanaan dan penentuan pemandangan yang dilihat selama perjalanan berperan cukup penting untuk memberi kualitas aksesibilitas yang menunjang wisata.

Selain aspek fisik diatas, aspek non fisik berperan penting dalam mendukung kualitas aksesibilitas yang mendukung wisata. Aspek non fisik ini mencakup keamanan sepanjang jalan dan waktu tempuh dari tempat asal menuju ke destinasi. Accessibility merupakan hal yang paling penting dalam kegiatan pariwisata. Segala macam transportasi ataupun jasa transportasi menjadi akses penting dalam pariwisata. Di sisi lain akses ini diidentikkan dengan transferabilitas, yaitu kemudahan untuk bergerak dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Jika suatu daerah tidak tersedia aksesibilitas yang baik seperti bandara, pelabuhan dan jalan raya, maka tidak akan ada wisatawan yang mempengaruhi perkembangan aksesibilitas di daerah tersebut. Jika suatu daerah memiliki potensi pariwisata, maka harus disediakan aksesibilitas yang memadai sehingga daerah tersebut dapat dikunjungi.

Dalam melaksanakan pembangunan prasarana wisata perlu disesuaikan dan mempertimbangkan kondisi dan lokasi yang akan meningkatkan

¹⁰⁹ Ibid.

aksesibilitas suatu objek wisata yang pada waktunya dapat meningkatkan daya tarik objek wisata itu sendiri, selain itu juga diperlukan koordinasi dan dukungan antar instansi terkait. Sedangkan Mill menyatakan “*accessibilities of the tourist destination*”, sebagai semua yang dapat memberi kemudahan kepada wisatawan untuk datang berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata (DTW).¹¹⁰

Jika suatu obyek tidak di dukung aksesibilitas yang memadai maka obyek yang memiliki atraksi tersebut sangat susah untuk menjadi industri pariwisata, aktivitas kepariwisataan banyak tergantung pada transportasi dan komunikasi karena faktor jarak dan waktu yang sangat mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan perjalanan wisata. Yang membuat suatu kawasan lebih banyak di kunjungi adalah sarana akses seperti infrastruktur jalan, obyek dekat dengan bandara dan ada transportasi untuk menuju DTW (daerah tujuan wisata). Oleh karena itu, tingkat kemudahan pencapaian ke daerah wisata tersebut akan mempengaruhi perkembangan suatu daerah wisata.¹¹¹

Persyaratan aksesibilitas terdiri dari akses informasi dimana fasilitas harus mudah ditemukan dan mudah dicapai, harus memiliki akses kondisi jalan yang dapat dilalui dan sampai ke tempat objek wisata serta harus ada akhir tempat suatu perjalanan. Oleh karena itu harus selalu ada:¹¹² 1. Akses informasi 2. Akses kondisi jalan menuju objek wisata 3. Terminal.

Aksesibilitas pariwisata dimaksudkan sebagai segenap sarana yang memberikan kemudahan kepada wisatawan untuk mencapai suatu destinasi maupun tujuan wisata terkait¹¹³. Faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya transferabilitas adalah konektivitas antar daerah yang satu dengan daerah yang lain tidak adanya penghalang yang merintanginya adanya tranferabilitas antar daerah, tersedianya sarana angkutan antar daerah.

¹¹⁰ Mill, Robert Christie. *Tourism, The International Business*: Terjemahan Tri Budi Satrio. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo. 2000

¹¹¹ A. Yoeti, Oka. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*.

¹¹² Soekadijo, *Anatomi Pariwisata*. h., 306

¹¹³ Sunaryo, Bambang. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media, 2013

Aksesibilitas merupakan cara untuk menyediakan sarana transportasi publik bagi wisatawan yang berpengaruh terhadap biaya, waktu dan jarak tempuh serta kenyamanan ketika berwisata. Aksesibilitas terdiri berbagai infrastruktur dan sarana transportasi publik yaitu, tempat parkir, terminal bus, bandara, stasiun kereta api, pelabuhan, dermaga, bus wisata, taksi, pesawat terbang, kereta api, kendaraan pribadi, kapal samudra, kapal ferry, kapal pesiar, jalan raya, jalan tol dan lain-lain.

Dalam pariwisata, para wisatawan harus datang ke daerah dimana terdapat produk wisata untuk mengkonsumsi produk-produk wisata tersebut terutama objek dan daya tarik wisata. Jarak dan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi ke daerah wisata merupakan hal terpenting. Jenis, volume, tarif dan frekuensi moda angkutan ke dan dari daerah wisata akan berpengaruh kepada jumlah kedatangan wisatawan. Kenyamanan selama perjalanan menuju daerah wisata dan kawasan wisata harus diperhatikan.

a. Kesediaan Bandara

Bandar udara atau bandara memiliki pengertian yang berasal dari kata Bandar udara adalah area tertentu di daratan atau perairan (termasuk bangunan, instalasi dan peralatan) yang diperuntukkan baik secara keseluruhan atau sebagian untuk kedatangan, keberangkatan dan pergerakan pesawat.¹¹⁴ Maka arsitektur bandara dapat diartikan sebagai suatu wadah yang berfungsi menampung perpindahan orang atau barang dari suatu mode angkutan ke kendaraan udara atau sebaliknya. Di dalamnya menyangkut bangunan terminal (terminal building), tempat parkir pesawat terbang (apron), parkir kendaraan darat, jalan, jalur hijau. Melalui bandara itulah para wisatawan mancanegara akan melihat seberapa indah dan ramahnya Indonesia. Penerbangan merupakan moda transportasi yang sangat penting bagi perkembangan pasar wisata

¹¹⁴Aerodromes, Annex 14 to The Convention on International Civil Aviation, Vol 1: Aerodrome Design and Operations, International Civil Aviation Organization (ICAO), Montreal, Canada, 1990..

terutama untuk perjalanan jarak jauh dan melintas bumi (internasional), kemudian berkembang ke penerbangan jarak menengah bahkan jarak pendek. Pengembangan di sektor penerbangan mempunyai implikasi yang penting bagi perkembangan pasar wisata. Sehingga dipahami bahwa perjalanan untuk wisata mempunyai karakteristik yang berbeda dengan perjalanan bisnis maupun tipe perjalanan yang lain. Penerbangan juga membuka peluang bagi peningkatan sektor-sektor ekonomi yang berhubungan dengan kepariwisataan. Karena itulah pembenahan bandara adalah hal mendesak yang harus dilakukan bila kita ingin menyambut kedatangan wisatawan manca negara. Karena itu, pemerintah harus segera membenahi beberapa bandara yang menjadi pintu masuk wisatawan.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam penerimaan devisa negara untuk pembangunan nasional. Sebagai akibat dari meningkatnya potensi pariwisata, sektor pariwisata membutuhkan dukungan infrastruktur untuk aksesibilitasnya. Aksesibilitas wisatawan khususnya wisatawan mancanegara dapat dipermudah dengan mempertimbangkan penyediaan bandar udara internasional.

b. Kesediaan Terminal Bus

Terminal adalah salah satu komponen dari sistem transportasi yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang hingga sampai ke tujuan akhir suatu perjalanan, juga sebagai tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian sistem arus angkutan penumpang dan barang, disamping juga berfungsi untuk melancarkan arus angkutan penumpang atau barang. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Sedangkan Terminal Barang adalah prasarana

transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.¹¹⁵

Sesuai dengan fungsinya sebagai tempat pemberhentian sementara (transit) maka di dalam terminal akan terjadi perpindahan penumpang atau barang dari satu jenis angkutan ke jenis moda angkutan yang lainnya, sehingga tuntutan efisiensi dari suatu perjalanan bisa tercapai. Berdasarkan tuntutan tersebut maka suatu terminal harus mampu menampung, menata dan mengendalikan serta melayani semua kegiatan yang terjadi akibat adanya perpindahan kendaraan, penumpang maupun barang sehingga semua kegiatan yang ada pada terminal dapat berjalan lancar, tertib, teratur, aman dan nyaman. Agar terminal mampu memberikan pelayanan yang baik bagi penggunanya, maka perlu disediakan fasilitas-fasilitas yang diperuntukkan bagi pengguna jasa terminal. Fasilitas-fasilitas tersebut perlu disediakan dalam jumlah yang cukup dan harus dijaga agar tetap mampu memberikan pelayanan bagi pengguna jasa terminal sesuai dengan fungsinya.

Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan perjalanannya di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan dan lain sebagainya. Untuk kesiapan objek-objek wisata yang akan dikunjungi oleh wisatawan di daerah tujuan wisata, prasarana wisata tersebut perlu dibangun dengan disesuaikan lokasi dan kondisi objek wisata yang bersangkutan.¹¹⁶

c. Kelayakan Infrastruktur

Definisi infrastruktur dalam kamus besar bahasa Indonesia, dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana umum. Sarana secara umum diketahui sebagai fasilitas publik seperti jalan, jembatan, rumah sakit,

¹¹⁵ Menteri Perhubungan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 Tentang : Terminal Transportasi Jalan Bab I. Pasal 1,2

¹¹⁶ Suwanto, Gamal. 1997. Dasar-Dasar Pariwisata. Andi. Yogyakarta. h.12.

sanitasi, telepon, dan sebagainya. Dalam ilmu ekonomi infrastruktur merupakan wujud dari publik capital (modal publik) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah. Infrastruktur dalam penelitian ini meliputi jalan, jembatan, dan sistem saluran pembuangan.¹¹⁷

Infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung, dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Dalam hal ini hal-hal yang terkait dengan infrastruktur tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Sistem lingkungan dapat terhubung karena adanya infrastruktur yang menopang antara sistem sosial dan sistem ekonomi. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Maka infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar dalam mengambil kebijakan¹¹⁸. Pekerja akan lebih produktif jika mereka mempunyai alat-alat untuk bekerja. Peralatan dan infrastruktur yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa disebut modal fisik.¹¹⁹

Bahwa tingkat ketersediaan infrastruktur di suatu negara adalah faktor penting dan menentukan bagi tingkat kecepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Infrastruktur merupakan suatu wadah untuk menopang kegiatan-kegiatan dalam satu ruang. Ketersediaan infrastruktur memberikan akses mudah bagi masyarakat terhadap sumber daya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam melakukan kegiatan sosial maupun ekonomi. Dengan meningkatnya efisiensi otomatis secara tidak langsung meningkatkan perkembangan ekonomi dalam suatu wilayah. Sehingga menjadi sangat penting peran infrastruktur dalam perkembangan ekonomi.¹²⁰

¹¹⁷ Mankiw, Gregory N., 2003, Teori Makro ekonomi, Edisi Kelima, Alih Bahasa : Imam Nurmawan, SE., Erlangga, Jakarta

¹¹⁸ Kodoatie, Robert J. Pengantar Manajemen Infrastruktur. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2005

¹¹⁹ Mankiw, Gregory N. Teori Makro ekonomi, Edisi Kelima, Alih Bahasa : Imam Nurmawan, SE., Erlangga, Jakarta. 2003

¹²⁰ Todaro. Pembangunan Ekonomi Ed ke-9. (Terjemahan) Erlangga, Jakarta.

Infrastruktur mengacu pada fasilitas kapital fisik dan termasuk pula dalam kerangka kerja organisasional, pengetahuan dan teknologi yang penting untuk organisasi masyarakat dan pembangunan ekonomi mereka. Infrastruktur meliputi undang-undang, sistem pendidikan dan kesehatan publik, sistem distribusi dan perawatan air, pengumpulan sampah dan limbah, pengelolaan dan pembuangannya, sistem keselamatan publik, seperti pemadam kebakaran dan keamanan, sistem komunikasi, sistem transportasi, dan *utilitas public*.¹²¹

Penggunaan infrastruktur bagi pihak penggunanya tidak dikenakan biaya secara langsung atas penggunaannya, dikarenakan infrastruktur tersebut disediakan oleh pemerintah sebagai penunjang kegiatan sosial ekonomi. Infrastruktur memiliki sifat eksternalitas, sesuai dengan sifatnya dimana infrastruktur disediakan oleh pemerintah dan bagi setiap pihak yang menggunakan infrastruktur tidak memberikan bayaran langsung atas penggunaan infrastruktur. Infrastruktur seperti jalan, pendidikan, kesehatan, memiliki sifat eksternalitas positif. Dengan memberikan dukungan kepada fasilitas tersebut dapat meningkatkan produktivitas semua input dalam proses produksi.¹²²

Guna menunjang sektor pariwisata, sejumlah perbaikan dan pembangunan infrastruktur mutlak diperlukan. Infrastruktur udara diperlukan, guna memastikan konektivitas antar negara dan interregional Indonesia. Infrastruktur jalan perlu diperbaiki, karena banyak jalan menuju lokasi infrastruktur berkondisi buruk. Guna menunjang mobilitas di dalam suatu daerah/kota, maka diperlukan pula pembangunan transportasi publik, agar memudahkan mobilitas dan menjaga tingkat kelayakan infrastruktur dan meningkatkan kenyamanan para wisatawan.¹²³

¹²¹ Tatom, J.A . Paved with Good Intentions; the Mythical National Infrastructure Crisis Policy Analysis. Washington.D.C, Cato Institute. 1993

¹²² Canning, David and Peter Pedroni. 2004. "Infrastructure and Long Run Economic Growth." University of Belfast

¹²³ <http://www.wiratamainstitute.id/membangun-infrastruktur-pariwisata>

12. Strategi Pengembangan Pariwisata Halal

Strategi pada prinsipnya berkaitan dengan kebijakan pelaksanaan, penentuan tujuan yang hendak dicapai, penentuan cara-cara atau metode penggunaan sarana dan prasarana. Oleh karena itu strategi juga harus didukung oleh kemampuan untuk mengantisipasi kesempatan yang ada dalam melaksanakan fungsi dan peranannya dalam pengembangan pariwisata daerah, pemerintah daerah haruslah melakukan berbagai upaya dalam pengembangan sarana dan prasarana pariwisata.¹²⁴

Pengembangan wisata pada hakekatnya adalah suatu proses dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan sesuatu yang telah ada. Pengembangan wisata dapat berupa kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pelestarian tanaman, sarana dan prasarana maupun fasilitas lainnya. Pengembangan wisata juga merupakan kegiatan pengembangan masyarakat dan wilayah yang didasarkan pada memajukan tingkat hidup masyarakat sekaligus melestarikan identitas lokal Meningkatkan tingkat pendapatan secara ekonomis serta pendistribusikan merata kepada masyarakat.¹²⁵

Pengembangan wisata halal ialah pengembangan yang dapat menerapkan unsur pengembangan destinasi yang ramah keluarga, layanan dan fasilitas yang ramah Muslim, dan sadar Halal dan program pemasaran destinasi yang dapat distimulasikan dengan pemanfaatan konsep smart tourism dengan membangun unsur *informativeness, accessibility interactivity, personalization* untuk wisatawan Muslim.¹²⁶ Pada strategi pengembangan wisata halal ini menggunakan konsep *Tourism Opportunity Spectrum* (Spektrum Peluang Pariwisata) yakni :

¹²⁴ Primadany, Ryalita Sefira, Mardiyono, Riyanto. Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2013 Vol. 1, No. 4, h. 135.

¹²⁵ Gamal Suwanto, *Dasar-Dasar Pariwisata*, (Yogyakarta: Andi Publishing, 1997), 19

¹²⁶ Hendry Ferdiansyah, *Jurnal, Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia Melalui Konsep Smart Tourism* . Vol. 2, No. 1, Januari 2020, 34

a. Aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan cara untuk menyediakan sarana transportasi pulik bagi wisatawan yang berpengaruh terhadap biaya, waktu dan jarak. Dalam pariwisata, para wisatawan harus datang ke daerah terdapat produk wisata untuk mengkonsumsi produk-produk tersebut terutama objek dan daya tarik wisata.¹²⁷

b. Kompatibilitas

Tidak bisa dipungkiri, keberhasilan pengembangan destinasi pariwisata sangat ditentukan oleh kompatibilitasnya terhadap aktivitas lain di kawasan pengembangan. Yang perlu diperhatikan adalah sampai level mana sebuah pengembangan kawasan dapat memengaruhi kawasan lain dan kondisi yang bagaimana yang paling optimal dan baik untuk menunjang kawasan pengembangan. Dalam *Tourism Opportunity Spectrum* (Spektrum Peluang Pariwisata) disebutkan bahwa semakin tinggi derajat kompatibilitas destinasi pariwisata maka semakin besar peluang pengembangannya.¹²⁸

c. Karakteristik sarana pariwisata

Penyediaan sarana pariwisata memerlukan kelengkapan daerah tujuan wisatawan yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Pembangunan sarana wisata di daerah maupun di objek wisata tertentu harus sesuai dengan kebutuhan wisatawan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan wisata ialah biro perjalanan, hotel, transportasi, restoran dan tempat ibadah serta sarana pendukung lainnya. Pengadaan sarana wisata tersebut harus sesuai dengan kebutuhan wisatawan.¹²⁹

d. Interaksi sosial

Kedatangan wisatawan pada suatu destinasi wisata, apalagi destinasi yang mengandalkan sumber daya alam dan kehidupan ekosistem sebagai antraksi

¹²⁷ Yoeti Oka A. Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung. Angkasa. 1991, 103

¹²⁸ Pitana dan Diarta. Pengantar Ilmu Pariwisata. Jakarta. Andi, 2009. 145

¹²⁹ Suwanto. Dasar-dasar Pariwisata. Yogyakarta. Andi, 1997. 22

utamanya, mempunyai potensi merusak keseimbangan ekosistem tersebut. Interaksi ini dapat berupa adaptasi atau peningkatan kadar gangguan yang dirasakan oleh komunitas lokal seiring dalam peningkatan jumlah wisatawan yang melampaui ambang batas atau daya dukung sosial.¹³⁰

Pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata mengintegrasikan segala bentuk aspek di luar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung akan kelangsungan pengembangan pariwisata.

Dalam proses pengembangan daerah wisata ada komponen – komponen yang harus bersinergi dengan baik, dengan kata lain bahwa ada pihak-pihak yang harus bekerjasama yakni pemerintah, dalam hal ini Dinas pariwisata dan olahraga kabupaten Aceh Tengah serta pihak swasta sebagai investor, dan yang tidak kalah penting adalah masyarakat sendiri sebagai ujung tombak dalam pengembangan pariwisata. Menurut Cooper menjelaskan bahwa kerangka pengembangan destinasi pariwisata terdiri dari komponen-komponen utama sebagai berikut:

- a. Obyek daya tarik wisata (*Attraction*) yang mencakup keunikan dan daya tarik berbasis alam, budaya, maupun buatan/artificial.
- b. Aksesibilitas (*Accessibility*) yang mencakup kemudahan sarana dan sistem transportasi.
- c. Amenitas (*Amenities*) yang mencakup fasilitas penunjang dan pendukung wisata.
- d. Fasilitas umum (*Ancillary Service*) yang mendukung kegiatan pariwisata.
- e. Kelembagaan (*Institutions*) yang memiliki kewenangan, tanggung jawab dan peran dalam mendukung terlaksananya kegiatan pariwisata.¹³¹

¹³⁰ I Gde Pitana, Pengantar Ilmu Pariwisata.. (jakarta: andi, 2009). 147

¹³¹ Ida bagus & edriana, Pengaruh Pengemabngan Komponen Destinasi Wisata terhadap kepuasan Pengunjung. Jurnal Adminstrasi Bisnis (JAB) Vol. 55 No.3 februari 2017, 85-86

Menurut A. Yoeti, ada tiga faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan kepariwisataan yaitu objek dan daya tarik wisata, kemudian adanya fasilitas accessibility yaitu sarana dan prasarana sehingga memungkinkan wisatawan mengunjungi suatu daerah atau kawasan wisatanya, terjadinya fasilitas amenities yaitu sarana kepariwisataan yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.¹³²

Pembangunan di bidang pariwisata merupakan upaya untuk mengembangkan dan mengelola objek dan daya tarik wisata yang telah dimiliki oleh suatu daerah agar lebih baik lagi.¹³³ Beberapa prinsip pengembangan wisata berbasis halal.¹³⁴ :

1. Pengembangan fasilitas wisata berbasis syariah dalam skala besar atau kecil beserta pelayanan di luar dan di dalam atau dekat lokasi wisata
2. Fasilitas dan pelayanan berbasis syariah tersebut dimiliki dan dikerjakan oleh masyarakat setempat, yang dilakukan dengan bekerja sama atau dilakukan secara individual oleh yang memiliki

Pengembangan wisata berbasis halal didasarkan pada salah satu sifat budaya tradisional yang lekat pada suatu lingkungan religius atau sifat atraksi berbasis halal yang dekat dengan alam dimana pengembangan lingkungan sebagai pusat pelayanan berbasis syariah bagi wisatawan yang mengunjungi kedua atraksi tersebut.

13. Peran Pariwisata Dalam Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Athur Dunham kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai kegiatan yang terorganisir dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-

¹³² H. Oka. A. Yoeti, *Industri Pariwisata dan Peluang Kesempatan Kerja*, Jakarta, Pustaka, 1999, 66

¹³³ Oka. A Yoeti, *Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi, dan Implementasi*. Penerbit Kompas. Jakarta. 2008

¹³⁴ Priyadi, *Unggul, Pariwisata Syariah (prospek dan perkembangan)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2016

kebutuhan di dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga, anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan dan hubungan- hubungan sosial.¹³⁵

Ekonomi sebagaimana yang diketahui adalah kegiatan manusia dengan masyarakat untuk memanfaatkan dan mempergunakan unsur-unsur produksi dengan sebaik-baiknya guna memenuhi berbagai rupa kebutuhan. Pengertian umum tentang peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah pelaksanaan oleh masyarakat guna membuat perbaikan dalam kemakmuran yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat dalam menjalankan usahanya. Dimana usaha yang dilakukan masyarakat itu dapat berkembang dan dapat meningkatkan taraf kehidupannya dalam hal ekonomi.

Dampak pariwisata terhadap perekonomian muncul karena akibat dari adanya hubungan permintaan dan penawaran dalam industri, hal tersebut diakibatkan oleh munculnya pola pengeluaran dari pengunjung wisata, dan investasi yang dihasilkan oleh adanya transaksi pariwisata tersebut sehingga pada akhirnya memunculkan perubahan struktur ekonomi suatu negara. Dampak pariwisata ini dapat terlihat dari kontribusi yang dilakukan oleh wisatawan terhadap penjualan, keuntungan, pekerjaan, pendapatan pajak dan pendapatan disuatu daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dampak paling nampak oleh panca indera adalah peningkatan jumlah penginapan, restoran, transportasi, hiburan, perdagangan eceran, akan menimbulkan efek sekunder multiplier bagi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.

14. Destinasi Pariwisata

Prioritas pariwisata merupakan keutamaan kepentingan kepariwisataan guna untuk mengembangkan wisata. Berawal dari perjuangan menetapkan kata pariwisata di Indonesia Musyawarah Nasional Turisme II di

¹³⁵ T. Sumarnonugroho, *Sistem Investasi Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: Hanindita, 1987), h. 28-31.

gelar di Teretes JawaTimur (Surabaya) pada tanggal 14 Juni 1958.¹³⁶ Bahwa prioritas atau keutamaan perkembangan pariwisata sangatlah penting karena kemajuan pariwisata dapat membantu kehidupan sosial masyarakat. Potensi perkembangan pariwisata adalah sebuah usaha untuk memajukan pariwisata itu sendiri.

Sebuah destinasi wisata harus memiliki daya tarik tersendiri untuk mendatangkan wisatawan. Dengan adanya objek daya tarik wisata yang kuat maka menjadi magnet untuk menarik para wisatawan. Pengembangan kepariwisataan haruslah memiliki tiga aspek penting produk pariwisata, yaitu:¹³⁷

1. Atraksi Merupakan pusat dari industri pariwisata. Maksudnya atraksi mampu menarik wisatawan yang ingin mengunjunginya. Biasanya mereka tertarik pada Suatu lokasi karena ciri- ciri khas tertentu. Ciri-ciri khas yang menarik wisatawan adalah : a. Keindahan alam b. Iklim dan cuaca. c. Kebudayaan.
2. Amenitas Merupakan berbagai fasilitas penunjang para wisatawan untuk berwisata ke suatu daerah tujuan wisata dengan kenyamanan dan kepuasan tersendiri. Hal tersebut antara lain akomodasi yang nyaman, restoran, bar, layanan informasi, pramuwisata, sikap masyarakat setempat, keamanan dan lain-lain.
3. Aksesibilitas Berhubungan dengan segala jenis transportasi, jarak atau kemudahan pencapaian suatu objek wisata. Serta unsur pendukung lainnya (pelaku industri pariwisata, masyarakat dan institusi pengembangan) yang membentuk sistem yang sinergis dalam menciptakan motivasi kunjungan wisatawan

¹³⁶ Nadjamuddin Ramly, *Pesona Jakarta: Kota Wisata Ramah Lingkungan*, (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu Jakarta, 2007), h. 43

¹³⁷ A.J, Mulyadi, *Kepariwisata dan Perjalanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. h 89.2012

Terkait dengan upaya terhadap kemajuan pariwisata Indonesia, pemerintah kembali menargetkan jumlah kedatangan wisatawan mancanegara (Internasional) di tanah air pada tahun 2019 sebanyak 20 juta orang. Untuk mewujudkan target tersebut pemerintah Indonesia memprioritaskan 10 destinasi wisata yang akan disegerakan pembangunannya yaitu: Danau Toba (Sumatra Utara), TanjungKelayang (Belitung), Tanjung Lesung (Banten), Kepulauan Seribu (Jakarta), Candi Borobudur (Yogyakarta), Bromo Tengger Semeru (di Jawa Timur), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Taman NasionalWaka Tobi, dan Morotai (Maluku Utara).¹³⁸

Menurut Dadang Risky Ratman, bahwa pembentukan pariwisata prioritas harus memiliki sistematika dalam pembangunan destinasi pariwisata prioritas tahun 2016-2019, yaitu:¹³⁹ sebuah sistematika; Strategic Rationale, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Impelementasi Kebijakan dan Strategi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata tahun 2016, dan terakhir adalah Dukungan Lintas Sektor. Strategic Rationale merupakan pariwisata dunia sebagai kunci pembangunan, kesejahteraan dan kebahagiaan: sektor unggulan (*tourism aleading sektor*), harus meningkatnya destinasi dan investasi pariwisata, menjadikan pariwisata sebagai faktor kunci dalam pendapatan ekspor, penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha dan infratraktur. Pariwisata telah mengalami ekspansidan diversifikasi berkelanjutan, menjadi salah satu sektor ekonomi yang terbesar serta tercepat pertumbuhan didunia, meskipun krisis global terjadi beberapa kali, jumlah perjalanan wisatawan internasional tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif.

¹³⁸ Arif Yahya “Menteri pariwisata” <http://www.bkn.go.id/berita/menteri-pariwisata-2016-target-kunjungan-12-juta-wisatawan-mancanegara-dan-260-juta-wisatawan-nusantara> diakses Nop 2019

¹³⁹ Dadang Rizki Ratman, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Investasi Pariwisata Kementerian Pariwisata Disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Pariwisata “Äkselerasi Pembangunan Kepariwisataan Dalam Rangka Pencapaian Target 12 Juta Wisman dan 260 Juta Wisnus 2016”.

Impelementasi kebijakan dan strategi pengembangan destinasi merupakan pengembangan destinasi pariwisata melalui pendekatan pengembangan destinasi pariwisata produk, yaitu; atraksi yaitu berupa diversifikasi aktivitas wisata, manajemen pengunjung (*visitor management*), dan sadar wisata), menyediakan seluruh elemen sarana yang mendukung pariwisata; infrastruktur jalan, bandara, jalan kereta api, perlengkapan meliputi ukuran, kecepatan, jangkauan, dan sarana transportasi umum dan meliputi peraturan pemerintah terhadap pelaksanaan peraturan transportasi dan lain-lain. Semua elemen tersebut sering disebut dengan aksesibilitas yaitu sarana (modal tranpostasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, dan lian-lain), prasarana (pelabuhan laut, bandara, stasiun).¹⁴⁰

Pengembangan destinasi pariwisata berkaitan dengan keamanan, kenyamanan, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat. Dalam hal tersebut maka tujuan pengembangan destinasi pariwisata untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi (tempat) pariwisata. Beberapa peluang dalam pengembangan destanasi pariwisata. Seperti sumber daya alam, prioritas kepariwisataan, daya saing harga, sumber daya manusia, keselamatan dan keamanan.¹⁴¹

Dalam mengembangkan destinasi pariwisata mestinya memiliki kendala- kendala yang dapat menghambat perkembangan pariwisata, kendala pengembangan destinasi wisata: infrastruktur pariwisata, kebersihan

¹⁴⁰ Lia Afriza, Holili Abadi, Pengaruh Atraksi Pariwisata Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Cimaja Cikakak Sukabumi, dalam Jurnal Tourism Selenlifie Journal Vol. 1 Nomor 1 (Program Studi Manajemen Pariwisata, STIEPAR Yapari Aktripa Bandung, 2015), h. 94.

¹⁴¹ Dadang Rizki Ratman, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Investasi Pariwisata Kementerian Pariwisata Disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Pariwisata “Äkselerasi Pembangunan Kepariwisataan Dalam Rangka Pencapaian Target 12 Juta Wisman dan 260 Juta Wisnus 2016”. h. 15

dan kesehatan, aksesibilitas (*connectivity, seat capacity, dan direct flight*), regulasi (ijin masuk kapal layar/ yacht, visa bea cukai).¹⁴²

B. Perkembangan Pariwisata Halal

1. Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, bila dimanfaatkan dan dikembangkan dengan baik akan mempunyai potensi ini dimanfaatkan dalam pengembangan wisata halal (*halal tourism*) di Indonesia. Hal ini didukung oleh kondisi geografis yang sangat strategis, ditambah lagi dengan Iklim yang dimiliki Indonesia menjadikan negara ini memiliki berbagai kekayaan flora dan fauna. Indonesia memiliki potensi yang besar sebagai negara tujuan wisata. Ada beberapa Produk wisata yang paling menonjol yang dapat di pasarkan kepada masyarakat. Produk pariwisata yang ada Indonesia ada 3 produk utama yang ditawarkan, yaitu budaya, alam dan produk buatan manusia dengan komposisi sebagai berikut: 1. Wisata Alam yang meliputi wisata bahari, wisata petualangan, dan ekowisata 2. Wisata Budaya yang meliputi wisata warisan budaya dan sejarah, wisata belanja dan kuliner, wisata kota dan desa.¹⁴³

Sebagai upaya untuk mengembangkan wisata halal (*halal tourism*), Indonesai berusaha meningkatkan keberadaan hotel syariah. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia telah membuat pedoman penyelenggaraan hotel syariah. Syariah yang dimaksud disini adalah prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana yang diatur fatwa dan atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pada tahun 2013, terdapat 37 hotel syariah yang telah bersertifikat halal dan 150 hotel menuju

¹⁴² Dadang Rizki Ratman, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Investasi Pariwisata Kementerian Pariwisata Disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Pariwisata “Akselerasi Pembangunan Kepariwisataaan Dalam Rangka Pencapaian Target 12 Juta Wisman dan 260 Juta Wisnus 2016”.. h. 18

¹⁴³ Kurniawan Gilang Widagdyo, 2015. analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1 (2015): 73-80

operasional syariah. Terdapat sebanyak 2.916 restoran dan 303 diantaranya telah bersertifikasi halal, dan 1.800 sedang mempersiapkan untuk sertifikasi.¹⁴⁴

Pada umumnya, makanan dan minuman di Indonesia dilakukan sertifikasi halal oleh MUI ditandai dengan logo halal resmi pada kemasan makanan dan minuman, dan dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga makanan dan minuman yang tersedia di Indonesia terjamin kehalalannya bagi wisatawan muslim. Sedangkan wisatawan non-muslim dapat meyakini bahwa makanan dan minuman tersebut tidak mengandung zat berbahaya bagi tubuh, sehingga layak untuk dikonsumsi¹⁴⁵.

Indonesia melakukan sinergi dengan banyak pihak untuk mengembangkan wisata halal (*halal tourism*), contohnya Kementerian Pariwisata yang melakukan kerjasama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU). Wujud konkret kerjasama tersebut yaitu dengan cara mengembangkan pariwisata serta mengedepankan budaya serta nilai-nilai agama yang kemudian akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.¹⁴⁶ Selain itu juga dilakukan pelatihan sumber daya manusia, sosialisasi, dan capacity building. Pemerintah juga bekerja sama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk menyediakan penginapan halal dan tempat makan yang bisa menyajikan menu makanan halal, dan bekerjasama sama juga dengan *Association of the Indonesia Tours and Travel* (ASITA) untuk membuat paket wisata halal ke tempat wisata religi. Walaupun wisata halal (*halal tourism*) tidak hanya terbatas pada wisata religi saja¹⁴⁷. Kementerian Pariwisata (2015) dalam laporannya mencatat bahwa terdapat 13 provinsi yang siap untuk menjadi

¹⁴⁴ Renstra Kementerian Pariwisata 2015 - 2019

¹⁴⁵ Zailani, 2017. Industri Wisata Halal di Indonesia: Potensi dan Prospek. Online at <https://mpr.aub.uni-muenchen.de/76237/> MPRA Paper No. 76237, posted 17 January 2017 02:56 UTC

¹⁴⁶ Online at <https://mpr.aub.uni-muenchen.de/76237/> MPRA Paper No. 76237, posted 17 January 2017 02:56 UTC

¹⁴⁷ Renstra Kementerian Pariwisata 2015 – 2019

destinasi wisata halal (halal tourism) yaitu Aceh, Banten, Sumatera Barat, Riau, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Bali. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar berikut ini:

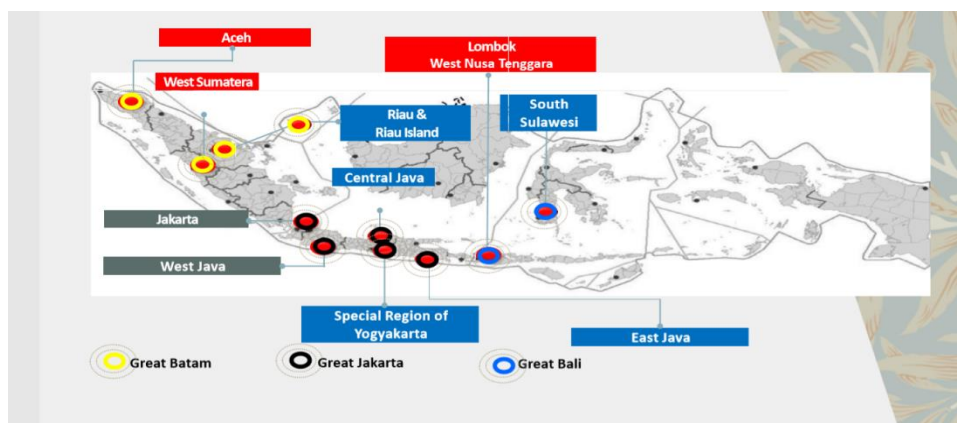
Gambar 2.1
Perkembangan Wisata Syariah



Sumber: Kemenkraf, Indonesia 2013, Indonesia as Moslem Friendly Destination, (Indonesia, Indonesia 2013, Indonesia as Moslem Friendly Destination, (BukuPanduanWisata).

Pada tahun 2016 Indonesia telah mengembangkan destinasi pariwisata halal unggulan di beberapa daerah seperti yang terlihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.2
Perkembangan Destinasi Pariwisata Halal Unggulan



Dengan ditetapkannya daerah unggulan untuk destinasi wisata halal di Indonesia, maka Indonesia mempunyai peluang untuk mengembangkan destinasi wisata halal di Indonesia hal telah terbukti dengan ditetapkan Indonesia sebagai destinasi wisata halal atau *halal tourism* terbaik dunia 2019 oleh *standard Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019* wilayah Indonesia mengguli 130 destinasi dari seluruh dunia. Lembaga pemeringkat standard GMTI menunjukkan bahwa sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia, Indonesia tercatat mengalami peningkatan secara berjenjang dari rangking 6 di tahun 2015, rangking 4 di tahun 2016, rangking 3 di tahun 2017, rangking 2 tahun 2018, akhirnya menduduki peringkat 1 GMTI pada tahun 2019. Dengan telah ditetapkannya 10 destinasi wisata halal unggulan pada IMTI pada tahun 2018-2019. Dengan naiknya peringkat Indonesia sebagai destinasi halal tourism terbaik dunia diharapkan akan berdampak kepada minat wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia. Dengan perkembangannya industri Pasar wisata halal di Indonesia diharapkan akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan akan tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

2. Dunia

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Asia dan MENA (Timur Tengah dan Afrika Utara), memberikan pengaruh terhadap daya beli wisatawan Muslim. Sedangkan di Eropa Barat, meskipun pertumbuhan ekonomi tidak tinggi, banyak kalangan kelas menengah Muslim dari belahan dunia lain ingin mengeksplorasi tempat-tempat wisata baru. Berikut tabel populasi dan daya beli masyarakat muslim:

Tabel 2.4
Populasi dan Daya Beli Masyarakat Muslim

Largest Muslim Population	Largest Muslim % of Total Populatio	Highest Purching Power of Muslim Populatio
Indonesia	Bahrain	Saudi Arabia
Pakistan	Kuwait	Turkey
India	Saudi Arabaia	Iran
Bangladesh	Algaria	Malaysia
Turkey	Iran	Qatar
Egypt	Oman	Rusia
Iran	Turkey	Frace
Nigeria	Yomen	Libya
China	Tunisia	UAE
Ethiopia	Irak	United States
Algeria	Libya	Algeria
Monaco	Pakistan	Singapore
Sudan	UAE	Indonesia
Afganistan	Qatar	Egypt
Irak	Egypt	The Natherlands

Sumber: A.T. Kearney dalam Sofyan (2012)

Berdasarkan data di atas, Malaysia mampu memanfaatkannya dalam meningkatkan wisatawan Muslim. Total estimasi wisatawan mancanegara Muslim ke Malaysia berdasarkan *Islamic Tourism* Malaysia tahun 2010 sebesar 5.817.571 atau 24 % dari total wisatawan mancanegara Malaysia sebesar 24.557.200.¹⁴⁸

¹⁴⁸ Sofyan, Prospek Bisnis Pariwisata Syariah (Jakarta : Republika, 2002

Tabel 2.5
Sepuluh Besar Negara Tujuan OIC (Organization of Islamic Cooperation) dan Non-OIC Global Muslim Travel Index (GMTI) 2015

Peringkat	Destinasi OIC	Skor	Destinasi Non-OIC	Skor
1	Malaysia (1)	83,3	Singapura (9)	65,1
2	Turki (2)	73,8	Thailand (20)	59,2
3	UEA (3)	72,1	Inggris (25)	55
4	Saudi Arabia (4)	71,3	Afrika Selatan (30)	51,1
5	Qatar (5)	68,2	Perancis (31)	48,2
6	Indonesia (6)	67,5	Belgia (32)	47,5
7	Oman (7)	66,7	Hongkong (33)	47,5
8	Jordania (8)	66,4	Amerika Serikat (34)	47,3
9	Maroko (9)	64,4	Spain (35)	46,5
10	Brunei (10)	64,3	Taiwan (36)	46,2

Sumber: CrescenRating, GMTI Report 2015

Dari tabel di atas dapat diketahui, Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, belum mampu menjadi negara tujuan wisata bagi muslim traveller. Berikut contoh dari negara-negara yang menjadi destinasi bagi muslim *traveller*, yaitu:

a. Turki

Meskipun Turki adalah negara sekuler, Islam adalah bagian penting dari kehidupan Turki. Menurut laporan *Pew Research Center* (Pusat Penelitian) tahun 2010 jumlah penduduk Turki 98% adalah muslim sehingga diasumsikan bahwa sebagian besar produk makanan koheren dengan konsep halal di Turki. Selain faktor jumlah penduduk muslim yang besar, meningkatnya pendidikan dan tingkat pendapatan kaum konservatif kelas menengah atas telah juga mempengaruhi permintaan untuk pasar halal terutama wisata halal.¹⁴⁹ Untuk memenuhi permintaan wisata halal, salah satunya dengan audit halal oleh World Association Halal. Hotel pertama yang menerima "sertifikat halal" di Turki

¹⁴⁹ Akyol, M. and Kilinc, O, Internet and Halal Tourism Marketing”, *Electronic Turkish Studies*; 2014 Volume 9/8.

adalah Adenya Hotel & Resort. Selain itu, standar bintang hotel "crescent standards (standar sabit)" menunjukkan kualitas di sektor perhotelan Islami.¹⁵⁰

Menurut catatan Himpunan Pemilik Hotel Mediteranian (AKTOB), tahun 2002 Turki hanya memiliki hotel 5 buah, saat ini setidaknya tercatat ada 75 hotel di Turki yang memasang label hotel Islami bersahabat dengan jilbab, liburan sesuai syariah, dan wisata halal. Hotel islami banyak dijumpai di destinasi misalnya di Canakkale Kas dan Kusadasi. Hotel-hotel tersebut tidak menghadirkan alkohol dan babi, memisahkan kolam renang untuk tamu pria dan wanita, serta mengharuskan pegawainya untuk berpakaian sopan. Tayangan televisi dan situs-situs internet dipilih sesuai dengan aturan Islam. Mushala yang disediakan juga dilengkapi peredam suara dari luar.

Muslim Traveler Index Europe 2014 memperkirakan nilai wisata halal Eropa mencapai 137 miliar dolar AS. Turki sendiri termasuk menjadi lima besar negara tujuan wisatawan pencari pariwisata syariah di Eropa. Nilainya bahkan mencari 103 miliar euro pada 2013 atau sekitar 13 persen dari total nilai pariwisata halal dunia. Turki diperkirakan akan meraih hingga 141 miliar euro dari sektor ini pada 2020.

b. Malaysia

Menurut laporan Pew Research Center tahun 2010 jumlah penduduk Malaysia sebesar 28.400.000, dengan komposisi pemeluk beragama sebagai berikut. Sedangkan pada tahun 2020 menurut Pew Research Center, diperkirakan jumlah penduduk Malaysia meningkat menjadi 33.360.000 terdiri dari Muslim sebesar 66,1 %, Budha menjadi 15,7 %, Nasrani sebesar 9,4 %, dan Hindu sebesar 5.8 %. berpendapat bahwa konsep *Islamic tourism* adalah salah satu yang berkembang pesat di beberapa negara di selatan Asia Timur seperti Malaysia dan Singapura.

¹⁵⁰ AKYOL, Mevlüt and Özgür KILINÇ. Introduction Religion Is an Important Cultural Element to Research . Because It Is One the Most Effective and Global Social Institution Which Has Impact s on People ’ s Attitudes , Values and Behaviours in Individual and Social Level (Mokhlis , 2014.” Internet and Halal Tourism Marketing* 9:171–86.

Wisata Islami di Malaysia bagus karena mereka memiliki sistem khusus pariwisata Muslim yang mempromosikan wisata Islam dalam agenda pariwisata nasional. Dari catatan Crescentrating, tahun lalu jumlah kunjungan wisatawan Muslim ke Malaysia mencapai 5,9 juta orang. Sementara yang datang ke Indonesia hanya sekitar dua juta orang saja dari total 10-11 juta wisatawan asing yang masuk.¹⁵¹

c. Thailand

Jumlah penduduk Thailand berdasarkan riset Pew Research Center tahun 2010 sebagian besar adalah 93,2% Budha, 5,5% Muslim, dan sisanya agama lainnya kurang dari 1%. Meskipun sebagian besar penduduknya beragama Budha, Thailand telah mendirikan *Halal Science Center* di Chulalongkorn University. Dalam usaha meningkatkan wisata halal Thailand mengumumkan *Muslim Friendly Thailand*, seperti dilansir dari *Deutsche Presse-Agentur*, Rabu (10/6), aplikasi ini akan diluncurkan pada tanggal 22 Juni mendatang dalam bahasa Inggris, Thailand, dan Arab. Piranti lunak ini dirancang untuk membantu wisatawan menemukan restoran halal, hotel, masjid, dan operator tour. Pariwisata Otoritas pariwisata Thailand menjelaskan, penerapan ini membuat Langkah dari usaha untuk perebut bertambah membludak tamu dari Timur Tengah, Malaysia, dan Indonesia, yang membantu tiga juta pelancong ke negara itu tahun silam.

d. Singapura

Negara singapura sebagai negara yang memprioritaskan sektor pariwisata, dianggap paling paham dalam melayani wisatawan termasuk wisatawan Muslim. Sebagai bentuk dukungan bagi pelaku usaha pariwisata diberikan halal award (Sofyan, 2012). Menurut Pew Research Center tahun 2010, penduduk Singapura terdiri dari beberapa umat beragama, yaitu: Buddhist

¹⁵¹ Pratiwi, Fuji., & Murdaningsih, Dwi. (2015, Juni 25). Wisata Halal Indonesia Kalah Dibanding Malaysia dan Thailand. Dipetik Agustus 5, 2015, dari [http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/15/06/25/nqhy7w-wisata-halal-indonesia-kalah-dibanding-malaysia-dan-thailand](http://www.republika.co.id/http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/15/06/25/nqhy7w-wisata-halal-indonesia-kalah-dibanding-malaysia-dan-thailand)

(34 persen), Christians (18 persen), Folk Religions (2 persen), Hindus (5 persen), Muslim (14 persen), Jews (<1 persen), Unaffiliated (16 persen), oher religions (10 persen).

Dari data di atas, mayoritas penduduk Singapura beragama Budha, populasi Islam berada di posisi keempat. Sebagai negara yang mayoritas beragama Budha, Singapura berhasil mencapai peringkat 9 menurut Mastercard Crescent Rating Global Muslim Travel Index (GMTI) 2015 untuk negara Non-OKI yang menjadi sasaran wisata muslim utama di dunia. Badan wisata yang ada di Singapura atau yang mengurus tentang pariwisata halal disebut dengan "*Singapore Tourism Board*" yang telah menerbitkan buku pedoman tentang wisata halal untuk wisatawan Muslim dari Indonesia.

Standar pada survei GMTI mencakup beraneka ragam diantaranya terdiri dari kesesuaian sebagai objek rekreasi bergandengan dengan keluarga untuk familiki Muslim, jenjang penyajian untuk pengunjung Muslim, tersuguh sarana dan prasarana untuk pelancong Muslim, pilihan akomodasi yang baik, jumlah kedatangan wisatawan Muslim, preferensi sajian serta konsumsi halal, dan sebagainya. Direktur Eksekutif STB Wilayah Asia Tenggara Edward Koh menyampaikan Singapura mempunyai banyak sarana konsumsi halal yang telah mempunyai disertifikasi oleh Badan Sertifikasi Halal yang dimiliki negara itu. Sebanyak 108 pelancong Muslim bertandang ke Singapura, dengan nilai 145 miliar dolar AS dan memaparkan 10 persen dari total perekonomian global.

e. Korea Selatan

Meskipun penduduk yang mendiami korea Selatan tidak didominasi oleh mayoritas memeluk agama Islam, sebagian objek wisata pada Korea Selatan telah menawarkan sarana dan prasarana yang mempermudah para pelancong Muslim. Tujuan wisata halal di Korea antara lain: Gyeonggi-do (banyak terdapat tempat-tempat hiburan yang menyediakan tempat ibadah dan makanan halal bagi umat Muslim meliputi Everland, Korea Folk Village di

Yongin, Petite France di Gapyeong, Skin Anniversary di Paju dengan Woongjin Playdoci dan Aiins World di Bucheon.¹⁵²

Selain Gyeonggi-do, terdapat juga destinasi wisata halal yaitu Gangwon. Pemerintah Korea Selatan aktif dalam mempromosikan paket wisata halal ke Indonesia. Strategi promosi yang dilakukannya adalah dengan menandatangani nota kesepahaman (MoU) antara perwakilan organisasi pariwisata Korea Selatan di Jakarta (KTO Jakarta) dengan Garuda Indonesia Holiday (GIH). Provinsi Gangwon mendukung kerja sama ini dengan menyediakan restoran yang ramah bagi Muslim dan Mushala. Saat ini produk wisata halal ke Korea yang telah dikembangkan oleh GIH adalah berupa produk 3M5H, 4M6H, dan produk 5M7H, yang menyertakan makanan halal di restoran ramah Muslim pada semua jadwalnya, serta kunjungan ke mushala untuk shalat.¹⁵³

C. Kearifan Lokal Dan Pengembangan Pariwisata Halal

1. Pengertian Kearifan Lokal

Kearifan lokal sering dikaitkan dengan masyarakat lokal.¹⁵⁴ Dalam bahasa asing dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat (*local wisdom*), pengetahuan setempat (*local knowledge*), atau kecerdasan setempat (*local genius*). Kearifan lokal dapat diartikan sebagai pandangan hidup dan pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka.¹⁵⁵ kearifan lokal sebagai pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas

¹⁵² Demeiati Nur Kusumaningrum dkk, Trend Pariwisata Halal Korea Selatan. Seminar Nasional dan Gelar Produk | Senaspro 2017

¹⁵³ Pratiwi, Fuji., & Murdaningsih, Dwi. Wisata Halal Indonesia Kalah Dibanding Malaysia dan Thailand. Dipetik Agustus 5, 2015, dari [http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/15/06/25/nqhy7w-wisata-halal-indonesia-kalah-dibanding-malaysia-dan-thailand](http://www.republika.co.id: http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/15/06/25/nqhy7w-wisata-halal-indonesia-kalah-dibanding-malaysia-dan-thailand)

¹⁵⁴ Cecep Permana. Kearifan Lokal Masyarakat Baduy dalam Mitigasi Bencana. Jakarta: Wedatama Widya Sastra. 2010

¹⁵⁵ Fajarini, U. Peranan Kearifan Lokal dalam Pendidikan Karakter. Sosio Didaktika. 20141(2): 123-130.

yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka.¹⁵⁶

Kearifan lokal atau yang dikenal dengan istilah *local genius/local wisdom*, merupakan pengetahuan lokal yang tercipta dari hasil adaptasi suatu komunitas yang berasal dari pengalaman hidup yang dikomunikasikan dari generasi ke generasi. Kearifan lokal dengan demikian merupakan pengetahuan lokal yang digunakan oleh masyarakat lokal untuk bertahan hidup dalam suatu lingkungannya yang menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, budaya dan diekspresikan di dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama. Secara ringkas dapat dikatakan, bahwa kearifan lokal merupakan sesuatu yang berkaitan secara spesifik dengan budaya lokal dan mencerminkan cara hidup suatu masyarakat tertentu.¹⁵⁷

Sebagai bagian dari kebudayaan tradisional, kearifan lokal merupakan warisan budaya. Kearifan lokal hidup dalam domain kognitif, afektif, dan motorik, serta tumbuh menjadi aspirasi dan apresiasi publik. kearifan lokal berorientasi pada (1) keseimbangan dan harmoni manusia, alam, dan budaya; (2) kelestarian dan keragaman alam dan kultur; (3) konservasi sumberdaya alam dan warisan budaya; (4) penghematan sumberdaya yang bernilai ekonomi; (5) moralitas dan spiritualitas.¹⁵⁸

Agama dapat menjadi sumber moral dan etika serta bersifat absolut, tetapi pada sisi lain juga menjadi sistem kebudayaan, yakni ketika wahyu itu direpson oleh manusia atau mengalami proses transformasi dalam kesadaran dan sistem kognisi manusia. Dalam konteks ini agama disebut sebagai gejala

¹⁵⁶ Agung Setiyawan. Budaya Lokal dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam. ESENSIA Vol. XIII No. 2 Juli 2012. Hlm 203-221

¹⁵⁷ Agung Setiyawan. Budaya Lokal dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam. ESENSIA Vol. XIII No. 2 Juli 2012. Hlm 203-221

¹⁵⁸ Cecep Permana. Kearifan Lokal Masyarakat Baduy dalam Mitigasi Bencana. Jakarta: Wedatama Widya Sastra. 2010

kebudayaan. Ketika agama (sebagai kebudayaan) difungsikan dalam masyarakat secara nyata maka akan melahirkan sebuah realitas.¹⁵⁹

Dalam kaitan ini, tersebarnya Islam ke seluruh dunia tentu melintasi beragam budaya lokal. Islam menjadi tidak “satu”, tetapi muncul dengan wajah yang berbeda-beda. Agama Islam membiarkan kearifan lokal dan produk-produk kebudayaan lokal yang produktif dan tidak mengotori aqidah untuk tetap eksis. Jika memang terjadi perbedaan yang mendasar, agama, sebagai sebuah narasi yang lebih besar, secara pelan-pelan menyelinap masuk ke dalam “dunia lokal” yang unik tersebut. Mungkin untuk sementara akan terjadi proses sinkretik sebagai suatu gejala yang sangat wajar, namun, seiring dengan perkembangan akal dan kecerdasan para pemeluk agama, gejala semacam itu akan hilang dengan sendirinya.

2. Kearifan Lokal dalam Perspektif Islam

Dalam syariat Islam yang dinamis dan elastis, terdapat landasan hukum yang dinamakan 'urf. Kata 'urf seakar dengan kata ma'ruf yang maknanya mengacu kepada kebiasaan dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan alkhair, yakni prinsip-prinsip ajaran Islam. Rincian dan penjabaran kebaikan dapat beragam sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat. Sehingga, sangat mungkin suatu masyarakat berbeda pandangan dengan masyarakat lain. Apabila rincian maupun penjabaran itu tidak bertentangan dengan prinsip ajaran agama, maka itulah yang dinamai 'urf atau ma'ruf.¹⁶⁰

Pemaknaan yang demikian dapat dilihat dari beberapa ayat al-Quran yang mengandung kata-kata tersebut, misalnya: *Hendaklah ada sekelompok di antara kamu yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar.*¹⁶¹ *Jadilah engkau pemaaf; titahkanlah yang 'urf (adat kebiasaan yang baik), dan berpalinglah dari orang yang jahil (QS Al-*

¹⁵⁹ Nur Achmad. *Pluralitas Agama: Kerukunan Dalam Keragaman*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2001

¹⁶⁰M. Quraish Shihab. *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan. 1996

¹⁶¹ *QS Ali 'Imran [3]: 104*

A'raf [7]: 199). Menurut Shihab, pakar-pakar hukum menetapkan bahwa adat kebiasaan dalam suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam, dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hukum (al-adat muhakkimah).

3. Islam Dan Kearifan Lokal Masyarakat Gayo

Adat Gayo merupakan suatu perilaku yang mengikat masyarakat Gayo.¹⁶² secara luas dengan berbagai nilai dan norma, termasuk di dalamnya pola kehidupan masyarakat pada umumnya. Istilah nilai dalam kehidupan sehari-hari sering diperbincangkan oleh masyarakat mengenai maksudnya, tujuan, penghayatan dan pelaksanaannya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan salah satu arti nilai adalah sipat-sipat yang penting atau hal-hal yang berguna bagi kemanusiaan, nilai tradisional yang dapat mendorong pembangunan, sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya.¹⁶³

Secara garis besar nilai dalam dua bagian yaitu nilai-nilai murni (*values of being*) dan nilai-nilai memberi (*values of giving*). Nilai-nilai murni adalah nilai yang ada dalam diri manusia, kemudian berkembang menjadi perilaku dan cara memperlakukan orang lain, termasuk dalam katagori nilai ini: kejujuran, keberanian, cinta damai, keandalan diri, potensi, disiplin, tahu batas, kemanusiaan dan kesesuaian. Sedang nilai-nilai memberi adalah nilai yang diperaktekkan atau diberikan dan diterima sebanyak yang diberikan, yang masuk dalam nilai kelompok ini ialah setia, dipercaya, hormat, cinta, kasih sayang, peka, tidak egois, baik hati, ramah, adil dan murah hati. Sehingga kebudayaan tidak terlepas dari nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat tertentu.

¹⁶² Masyarakat Gayo merupakan satu suku bangsa Indonesia yang mendiami dataran tinggi Gayo di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Luwes, sebagian Aceh Timur (Gayo Serbejadi), Aceh Tenggara (Gayo Alas) dan sebagian Aceh Temiang (Gayo Kalul), merupakan bagian dari Melayu Tua berasal dari Hindia Belakang

¹⁶³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. h.783 .

Sistem kemasyarakatan pada suku Gayo menjalani kehidupan diikat oleh nilai-nilai agama Islam dan nilai-nilai adat yang terintegrasi. Prinsip tersebut ditetapkan dalam 45 pasal adat masyarakat Gayo dalam wilayah kerajaan Linge (Lingga).¹⁶⁴ Nilai dan norma dalam 45 pasal adat Nenggeri Linge yang tertulis dalam bahasa Gayo dan Jawi, dikaji dan dituangkan melalui nilai adat Gayo, seperti:¹⁶⁵

1. Agama urum edet lagu zet urum sipet, agama Islam dan adat Gayo seperti zat dengan sifat, keduanya tidak dapat dipisahkan. Pelaksanaan ajaran Islam yang lebih baik dan efektif, apabila dipadukan dengan nilai dan norma adat Gayo, sebab adat Gayo menunjang pelaksanaan ajaran Islam, adat Gayo tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
2. Edet kin peger agama kin senuwen, adat Gayo jadi pagar, Islam sebagai tanaman, artinya adat Gayo berfungsi memelihara agama Islam sebagai tanaman. Bila nilai dan norma adat Gayo dihayati dan dilaksanakan, maka adat tersebut benar-benar berfungsi memelihara pelaksanaan ajaran Islam.
3. Turun edet ari Petuwe merhum, turun a gama ari Cik Serule, urusan adat wewenang merah (pemimpin pemerintahan), urusan agama wewenang imem (ulama), keduanya harus padu. Sebelum Belanda berkedudukan di wilayah Linge tahun 1901, Merah sebagai pemimpin pemerintahan Sarak Opat berkedudukan di Buntul Linge, sebuah lokasi di wilayah Kecamatan Linge Isak sekarang, bertugas pokok memimpin pelaksanaan adat. Sementara Imem (ulama) sebagai salah satu unsur pemerintahan Sarak Opat mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan ajaran Islam, berkedudukan di Seru le sebuah lokasi dalam wilayah Kecamatan Bintang. Mereka melaksanakan tugas secara padu, sehingga pelaksanaan ajaran Islam dan adat Gayo terlaksana secara padu pula.

¹⁶⁴ A.R. Hakim Aman Pinan, *Daur Hidup Masyarakat Gayo* (Takengon: ICMI Orsat Aceh Tengah, 2001), h. 65

¹⁶⁵ Mahmud Ibrahim, *Nilai - nilai Pendidikan dalam Adat Gayo*, (Banda Aceh: Al-Mumtaz Institute, 2013), h. 17

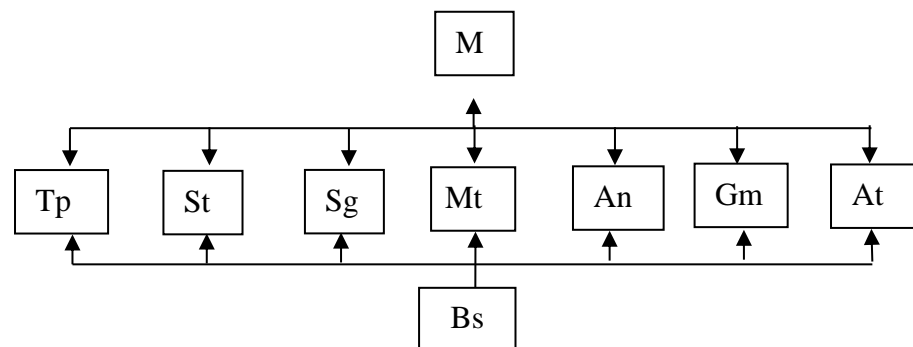
4. *Edet mu nukum besifet wujud urum munukum bersipet kalam*, adat menetapkan hukuman berdasar bukti, agama menetapkan hukuman berdasar al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Ketika *Sara kopat* semua tingkatan pemerintahan menyelenggarakan persidangan adat untuk mengadili suatu perkara atau menyelesaikan suatu masalah, mereka menggunakan dua dasar, yaitu dasar nash dan dasar bukti yang disebut: *Iamat mutubuh, ipangan murasa, ipanang nyata*, artinya, ada benda ketika dipegang, ada rasa ketika dimakan, merupakan suatu bukti yang jelas ketika menjatuhkan hukuman. Ungkapan adat ini menetapkan dasar dan bukti menyelesaikan masalah.
5. *Beras padi tungket imen*, kebutuhan pokok yang memadai atau kemajuan perekonomian, menunjang kemantapan iman. Manusia terdiri dari dua unsur pokok yaitu jasmani dan ruhani. Kebutuhan jasmani yang paling pokok adalah makanan yang halal dan baik, dalam ungkapan adat tersebut dilambangkan dengan kata beras padi. Sementara kebutuhan ruhani yang pokok adalah zikrullah yang dilambangkan dengan iman. Kebutuhan jasmani atau kemajuan perekonomian yang memadai harus dapat megokohkan iman seseorang, agar dia berbahagia.
6. *Kuwet edet mupelara agama, rengang edet benasa nahma*, kalau adat dilaksanakan dengan baik, maka ajaran agama Islam terlaksana dengan baik, sebaliknya bila adat tidak dilaksanakan sulit untuk melaksanakan ajaran Islam dan akan merusak harkat dan martabat manusia. Salah satu contoh, pergaulan bebas yang dalam norma adat Gayo disebut *sumang*, dilarang menurut adat Gayo, bila larangan itu ditegakkan dengan adat yang kuat, maka dengan sendirinya ajaran Islam untuk membina akhlak mulia akan terwujud.
7. *Dewe ukum ulaken kufirman, dewe edet ulaken ku empuye*, beda pendapat mengenai agama kembalikan kepada al-Qur'an, beda pendapat tentang adat diminta kepada pemerintah selaku penguasa adat. Bila terjadi perselisihan paham atau perpedaan pendapat dalam masyarakat tentang suatu masalah

diselesaikan berdasar al-Qur'an dan as-Sunnah, ditunjang dengan nilai dan norma adat.

8. *Kati makmur ukum kena kuwet edet*, syari'at terlaksana dengan baik karena adat kuat. Syari'at terlaksana dengan baik apabila nilai dan norma adat Gayo dilaksanakan dengan baik.

Delapan kalimat ungkapan adat Gayo sebagaimana diuraikan di atas, pada perinsipnya merupakan perpaduan antara nilai ajaran agama Islam dan nilai adat Gayo dipahami, dihayati dan dilaksanakan secara padu, supaya adat Gayo berfungsi menunjang pelaksanaan ajaran Islam. Selain norma adat atau nilai-nilai filosofis dalam adat Gayo, masyarakat Gayo juga memiliki sembilan sistem nilai yang menjadi ide, gagasan dan cara berfikir yang mempengaruhi masyarakat suku Gayo. Adapun sistem nilai tersebut sebagaimana digambarkan dalam skema berikut:

Gambar 2.3
Sistem Nilai Budaya Gayo (Junus Melala Toa)



Keterangan:¹⁶⁶

M : Mukem el (Harga Diri), nilai utama.

Tp : *tertip* (tartib), nilai penggerak

St : setie (setia), nilai penggerak

Sg : *Semayang/Gemasih* (kasih sayang), nilai penggerak

Mt : *mutentu* (kerja keras), nilai penggerak

¹⁶⁶ Junus Melala Toa, Sistem Budaya Indonesia, (Jakarta: UI Press, 1998), h.65

- An : *Amanah* (Amanah), nilai penggerak
 Gm : *Genap Mupakat* (musyawarah), nilai penggerak
 At : *Alang Tulung* (Tolong Menolong), nilai penggerak
 Bs : *Bersikekemelen* (Kompotitif), nilai penunjang

Nilai-nilai tersebut diajarkan di sekolah dan di rumah, karen dipandang penting menghayati dan melaksanakannya dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam bidang ekonomi. *Mukemel* (M) merupakan nilai utama karena menyangkut harga atau martabat diri yang menentukan kehidupan, sementara nilai penggerak nilai utama: tertip, teratur melakukan sesuatu perbuatan secara sistematis, *setie* (setia) kesetiaan individual dan sosial dalam melakukan kebaikan, semayang *gemasih* (kasih sayang) dalam hubungan keluarga, tetangga dan msyarakat terutama terhadap anak yatim dan fakir miskin, *mutentu* (kerja keras) bersungguh-sungguh melaksakan tugas dalam lapangan pekerjaan secara teratur, amanah terprcaya dan bertanggung jawab melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya, genap mupakat bermusyawarah dalam menetapkan sesuatu yang akan dikerjakan dan menyelesaikan masalah, alang tulung saling bantu melaksanakan kebaikan dan membantu orang lain, sementara nilai penunjang bersikekemelen yaitu musabakah atau kompetitif, merupakan nilai yang menumbuhkan sistem berlomba untuk melaksanakan perbuatan baik dan memperoleh hasil optimal dalam semua bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi.

4. Dampak Desa Wisata Terhadap Pendapatan Masyarakat

Dalam pengembangan desa wisata pada suatu Kawasan pasti berdampak pada penduduk lokal dari segi ekonomi, sosial-budaya dan suasana sekelilingnya. Kecil besarnya pergerakkan aktivitas ekonomi yang berlangsung pada Kawasan desa wisata terkait bagaimana perangkat desa serta penduduknya meramu objek wisatanya tersebut bagaimana memperkenalkan wisata yang ada di desa tersebut agar diketahui oleh masyarakat yang luas.

Para pengunjung yang berkunjung ke daerah destinasi wisata pada waktu sementara, akan memanfaatkan keindahan objek serta sarana dan

prasarana pasti akan mengeluarkan uang untuk kebutuhan tertentu, akhirnya akan melepaskan objek tersebut untuk pulang pada daerah atau Negeranya masing-masing. Jika wisatawan yang datang ke sebuah destinasi tersebut sangat banyak, pasti akan berimplikasi kepada pergerakan aktivitas perekonomian masyarakat setempat dan ekonomi daerah, baik berdampak spontan ataupun melambat.¹⁶⁷

Sependapat pada hal diatas pariwisata akan berdampak kepada perubahan aktivitas sosial dan ekonomi penduduk lokal tersebut. Hal ini dapat dikategorikan delapan kelompok besar, yaitu: (1) berdampak kepada pemasukkan devisa negara, (2) berimbas kepada penghasilan penduduk sekitarnya (3) akan berimplikasi pada peluang kerja (4) berimbas kepada harga-harga (5) akan berpengaruh kepada pendistribusian masyarakat dan profit (6) dampak pada hak dan control (7) dampak pada infrastruktur cukup umumnya dan (8) dampak terhadap pendapatan pemerintah daerah.¹⁶⁸

Sebagian besar merupakan masyarakat petani yang pada umumnya memiliki keadaan ekonomi yang rendah. Aspek lain yang dianggap penting dalam pengembangan pariwisata adalah kebijakan ekonomi yakni pengembangan secara regional melalui kepariwisataan dalam menghadapi masalah perekonomian. Semakin berkembangnya pariwisata di suatu daerah, maka secara otomatis akan mempengaruhi aktivitas penduduk yang dekat dengan obyek wisata tersebut. Oleh karena itu perlu dirumuskan suatu kebijakan pariwisata dan dirumuskan sebagai suatu tindakan instansi pemerintah dan badan organisasi masyarakat yang mempengaruhi kehidupan dalam bidang pariwisata itu sendiri.

Suatu daerah yang mengembangkan pariwisata sebagai suatu industri di daerahnya, maka lalu-lintas orang-orang (wisatawan) tersebut ternyata memberi

¹⁶⁷ Hari Hermawan. Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggaren Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal. Jurnal Pariwisata 2016 Vol III, No. 2. Pp. 105 -117

¹⁶⁸ Ashar Basyir. Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Online), (<http://asyharnotes.blogspot.com/2014/11/pengaruh-sektor-pariwisataterhadap.html>), Diakses 17 Juli 2019), 2014., h. 1

keuntungan dan memberi hasil yang bukan sedikit dan bahkan memberikan pendapatan (income) utama. Sebagai akibat lebih jauh, dengan adanya lalu-lintas orang-orang melakukan perjalanan wisata maka, yaitu mereka yang mencari kemakmuran lebih, ternyata memberi dampak terhadap perekonomian di daerah yang dikunjungi dan akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Dampak yang ditimbulkan dari perkembangnya destinasi wisata adalah:

1. Memberikan kesempatan kerja atau dapat memperkecil pengangguran.
2. Peningkatan penerimaan daerah dan retribusi daerah
3. Semakin meningkatnya jumlah uang beredar di masyarakat
4. Memberikan efek multiplier dalam perekonomian setempat.

Dunia pariwisata sudah pasti akrab dengan aktivitas bersenang senang, seakan-akan tak ada tujuan atau tanpa produktivitas sebagai prestasi bagi siapa pun yang melakukannya. Memang benar adanya, jika aktivitas berwisata dikatakan demikian, kendati sejatinya di balik itu banyak hikmah atau manfaat yang dapat dipetik, baik bagi orang yang melakukan maupun bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Sebab itu bertolak dari manfaat itulah tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa keberadaan pariwisata sangatlah urgen dalam kehidupan ini. Bahkan, tidaklah salah jika dikatakan pariwisata juga merupakan kebutuhan bagi banyak pihak, terutama di era modern saat ini sehingga perlu dikelola secara profesional.

Dengan melakukan wisata, pikiran seseorang bisa menjadi fresh kembali, sehingga dengan demikian pariwisata dikenal pula dengan dunia rekreasi. Dengan berwisata bisa jadi seseorang, yang sebelumnya merasa kalut pikirannya akibat banyak problem dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, pada akhirnya ia akan merasa berenergi (segar) kembali dan lebih produktif.¹⁶⁹ Bahkan lebih jauh lagi, ia akan lebih terbuka wawasannya,

¹⁶⁹ Dalam kaitan ini, lihat dan bandingkan dengan Hermantoro, *Creative –Based Tourism*, 53-54. Dalam buku ini dinyatakan bagaimana motivasi untuk melakukan suatu

sehingga di kemudian hari ia akan lebih kreatif dan lebih banyak melahirkan inovasi baru di bidang profesi masing-masing yang selama ini ditekuninya.¹⁷⁰

Demikian pula bagi penduduk setempat, terutama yang mempunyai naluri bisnis, dengan adanya pengembangan pariwisata akan membuka peluang bisnis baru yang dapat dikembangkan dengan menggali potensi setempat yang selama ini belum banyak dilakukan. Di antaranya adalah home stay, yakni semacam rumah singgah yang dapat disulap sebagai tempat penginapan wisatawan yang berkunjung ke arena wisata yang tengah dikembangkan di sebuah daerah. Atau memacu kreativitas baru dalam bidang industri dan kuliner yang beraroma lokal yang tidak ditemukan di daerah lain. Bahkan tidaklah mustahil, bisa jadi sebagian penduduk setempat berkesempatan sebagai guide yang akan menjadi sumber pendapatan baru bagi mereka.

Dan dengan adanya berbagai ladang bisnis atau pekerjaan baru bagi masyarakat setempat itulah pada akhirnya akan menimbulkan kesejahteraan baru bagi mereka. Akibatnya, daya beli masyarakat akan semakin meningkat yang pada akhirnya berujung pada kemajuan sektor riil. Kesemuanya ini bukanlah tidak mungkin akan berdampak secara lebih signifikan terhadap kekuatan ekonomi pemerintah setempat karena income per kapita dan kreativitas masyarakatnya yang semakin meningkat.¹⁷¹

D. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian pariwisata halal sudah banyak dilakukan oleh para peneliti maupun hasil penelitian maupun disertasi antara lain. Surya Elfitra Sari 2018 Analisis pemasaran pariwisata halal di Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk wisata, *brand image destination*, dan

perjalanan, "...the global integrating network of biological and cultural forces which gives value and direction to travel choices, behaviour and experience."

¹⁷¹ Dalam hal ini lihat kembali, Ibid., 87-93. Di dalamnya dikaji bagaimana pengaruh pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan sub tema Dari Pertumbuhan ke Pemerataan.

sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan. Disamping itu kepercayaan dan komunikasi pemasaran memoderasi hubungan produk wisata, brand image destination, sumber daya manusia dengan kunjungan berulang wisatawan di provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini juga menghasilkan pengaruh tidak langsung dari produk wisata halal, brand image destination, dan sumber daya manusia terhadap kunjungan berulang (loyalitas) wisatawan melalui kepercayaan dan komunikasi pemasaran.¹⁷²

Tety Yulianti Model Wisata Halal Sustainable di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Aspek regulasi sangat penting bagi penerapan wisata halal, walaupun daerah memiliki aspek regulasi sendiri tetapi aspek regulasi dari pusat tentang wisata halal paling utama dan aspek sertifikasi halal adalah aspek yang paling dominan dalam model wisata halal sustainable. Seluruh daerah memiliki kesamaan aspek dominan yakni regulasi tentang wisata halal yang saat ini masih belum dimiliki pemerintah, dengan nilai tertinggi 0,336, diikuti masyarakat 0,311 serta objek wisata sebesar 0,297. Selanjutnya aspek dominan lainnya yang adalah regulasi tentang sertifikasi halal, baik regulasi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan nilai 0,278 untuk sertifikasi yang dibuat regulasi pusat, dan 0,333 maupun regulasi atau kebijakan tentang wisata halal yang dibuat daerah. Penelitian ini juga menemukan 12 aspek penting yang menjadi prioritas dalam menuju wisata halal sustainable di Indonesia. Aspek-aspek tersebut antara lain. SDM, Daya Tarik Alam dan budaya, Sikap SDM, Kuliner, Infrastruktur, Media Sosial dan internet. Tokoh Masyarakat, Sadar wisata, Edukasi dan Informasi. Seluruh pihak termasuk para peneliti terdahulu berharap Sinergitas stakeholders diharapkan dapat dilakukan secara baik dalam penerapan wisata halal sehingga wisata halal sustainable di Indonesia dapat tercapai dan pertumbuhan ekonomi dapat

¹⁷² Surya Elfitra Desi, Analisis pemasaran pariwisata halal di Provinsi Sumatera Barat, 2018 disertasi USU

meningkat baik di daerah maupun di Indonesia yang akhirnya dapat memberikan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.¹⁷³

Hefriansyah Analisis Problematika Pengembangan Potensi Pariwisata Halal Kota Pematangsiantar Sebagai Penyangga Destinasi Prioritas Danau Toba. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengembangan pariwisata halal kota Pematangsiantar sebagai penyangga destinasi pariwisata prioritas Danau Toba yang paling prioritas adalah pengembangan ekosistem, lalu diikuti oleh penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan, pengembangan aksesibilitas dan konektivitas, pengembangan investasi pariwisata, pengembangan amenities, strategi dan pengembangan atraksi. Untuk memajukan pariwisata halal kota Pematangsiantar sebagai penyangga destinasi prioritas Danau Toba tidak hanya menjadi tugas utama bagi stakeholder yaitu pemerintah maupun para pengusaha dan akademisi namun masyarakat kota Pematangsiantar dapat berkontribusi dan berperan langsung dalam mewujudkan pariwisata halal di kota Pematangsiantar. Seperti menyediakan fasilitas penunjang, mengawasi pelaksanaan wisata halal, dan menyampaikan informasi dan memberikan masukan kepada pemerintah daerah terkait dengan penyelenggaraan wisata halal.¹⁷⁴

Muhammad Arif Budiman, Peluang dan Ancaman Pengembangan Pariwisata Halal: Kasus Banjarmasin, Indonesia. Menunjukkan bahwa Banjarmasin memiliki khazanah destinasi wisata religi, alam, sejarah, serta belanja dan kuliner. Religiusitas masyarakat yang tercermin dalam kehidupan budayanya juga menarik untuk disimak. Semua ini memberikan keuntungan besar kesempatan untuk menarik pengunjung domestik dan asing. Tetapi pada saat yang sama, kota ini masih menghadapi beberapa ancaman terutama di hal

¹⁷³ Tety Yulianti Model Wisata Halal Sustainable di Indonesia 2020. Disertasi UINSU

¹⁷⁴ Hefriansyah Analisis Problematika Pengembangan Potensi Pariwisata Halal Kota Pematangsiantar Sebagai Penyangga Destinasi Prioritas Danau Toba, 2020. Disertasi USU

kurangnya akses, komunikasi, dan layanan yang perlu ditangani secara serius oleh semua pemangku kepentingan terkait.¹⁷⁵

Lina Munirah Kamarudin dan Hairul Nizam Ismail, *Pariwisata Muslim: Kecenderungan Atribut Perjalanan Islami dari Perspektif Malaysia*. Hasilnya menunjukkan bahwa Wisata muslim cenderung memiliki unsur islami selama berwisata; melibatkan wisatawan dalam religi upacara, acara, dan festival; dan mengunjungi produk wisata muslim. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis perbandingan atribut perjalanan antara pariwisata Muslim dan pariwisata massal untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pariwisata Muslim.¹⁷⁶

Suesilowati, Rina Ekawati, *Analisis Hasil Penyelenggaraan Wisata Halal di Indonesia ditunjukkan pada kuadran II yaitu Diversification Strategy, yaitu Akibatnya strategi yang akan dikembangkan, termasuk mengembangkan program pendidikan publik yang baik tentang agama, budaya, pariwisata manajemen sumber daya manusia di Indonesia, serta program pendidikan individu tentang pengembangan Pariwisata Halal strategi sesuai dengan kebijakan pemerintah.*¹⁷⁷

Siti Daulah Khoiriati,dkk, *Perdebatan Wisata Halal Antar Nilai dan Branding: Studi Kasus Lombok, Indonesia*. menunjukkan bahwa Lombok cenderung untuk mengembangkan pariwisata halal berbasis branding dari pada pariwisata halal berbasis nilai. Temuan dari penelitian lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan Lombok diakui Destinasi wisata halal belum diikuti

¹⁷⁵ Mochammad Arif Budiman, Opportunity and Threat of Developing Halal Tourism Destinations: A Case of Banjarmasin, Indonesia. *International Journal of Economic Behavior and Organization*. 2019

¹⁷⁶ Lina Munirah Kamarudin and Hairul Nizam Ismail, "Muslim Tourism: The Tendency of Islamic Traveling Attributes from Malaysia Perspective. *Conference Paper* · April 2016

¹⁷⁷ Suesilowati, Rina Ekawati. Halal Tourism Development Strategy Program in Indonesia. 1st International Conference on Tourism Gastronomy and Tourist Destination (ICTGTD 2016)

dengan perkembangan kelembagaan pariwisata dan infrastruktur yang sepenuhnya berorientasi pada pariwisata halal menurut Islam nilai-nilai.¹⁷⁸

Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia Melalui Konsep Smart Tourism, Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki populasi penduduk Muslim terbesar di dunia. Indonesia juga telah meraih penghargaan “World’s Best Halal Travel Destination” versi GMTI 2019. Sedangkan destinasi regional Indonesia yang meraih penghargaan “Best Halal Travel Destination” dari 10 destinasi halal lainnya di Indonesia versi Indonesia Muslim Travel Index 2019 dimenangkan oleh Destinasi Lombok. Lalu untuk pengembangan wisata halal di Indonesia dapat menerapkan unsur pengembangan destinasi yang ramah keluarga, layanan dan fasilitas yang ramah Muslim, sadar halal dan program pemasaran destinasi yang dapat distimulasikan dengan pemanfaatan konsep smart tourism dengan membangun unsur informativeness, accessibility interactivity, personalization untuk wisatawan Muslim.¹⁷⁹

Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Di Propinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian untuk kota Medan sudah siap sebagai tujuan wisata Syariah untuk aspek atraksi (karena mereka telah mulai untuk menyimpan paket wisata Syariah dan acara), kenyamanan (kecuali Hotel dan spa yang sebagian tidak memiliki sertifikasi halal) dan lembaga. Optimasi kota Medan sebagai tujuan wisata Syariah memerlukan beberapa perbaikan, terutama dalam aspek kelembagaan, terutama kesiapan SDM. Dan jelas peraturan dari pemerintah kota Medan, untuk kota Parapat belum optimal untuk bekerja pada pariwisata Halal. Tapi masih perlu komitmen dan konsistensi dalam mengerjakan Halal pariwisata di kota Parapat.¹⁸⁰

¹⁷⁸ Siti Daulah Khoiriati, dkk Debating Halal Tourism Between Values and Branding: A Case Study of Lombok, Indonesia. The 1st International Conference on South East Asia Studies, 2016

¹⁷⁹ Hendry Ferdiansyah, Cipta Endyana, Heryadi Rachmat, Ute Lies Siti Khadijah, Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia Melalui Konsep Smart Tourism, Journal of Sustainable Tourism Research, Vol. 2, No. 1, Januari 2020: 30 - 34

¹⁸⁰ Sudirman Suparmin, Yusrizal, Tansiq, Vol. 1, No. 2, Juli – Desember 2018

Pariwisata Halal di Aceh : Gagasan dan Realita di lapangan Ada beberapa rekomendasi untuk implemetasi wisata halal antara lain ketersediaan payung hukum berupa penerbitan Qanun wisata halal, Penerbitan grand design wisata halal Aceh, inisiasi dan peran badan khsus semisal Aceh Halal Tourism Board, keberpihakan anggaran dan dukungan legislatif, road map dan grand design pariwisata halal, infrastruktur yang dapat diandalkan, sertifikasi dan standarisasi produk wisata halal, program pembekalan kapasitas SDM wisata halal yang terukur, dukungan masyarakat dan budaya, kesesuaian antara brand promise dan brand experience, dan program marketing brand wisata halal secara menyeluruh (integrated). Harapannya Pemerintah Aceh dapat bekerja lebih maksimal untuk mewujudkan Aceh sebagai destinasi wisata halal yang dapat menjadi model bagi provinsi lainnya.¹⁸¹

Implementasi Standarisasi Penyajian Pariwisata Halal Pada Pengembangan Pariwisata di NTB. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pelaksanaan standarisasi pelayanan pariwisata halal di NTB pada destinasi dilaksanakan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB melalui pemenuhan fasilitas umum sesuai pariwisata halal. Standarisasi pada industri pariwisata halal dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Kesehatan, serta MUI-NTB sebagai lembaga non-pemerintah berwenang mengeluarkan sertifikat halal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi standarisasi pelayanan pariwisata halal di NTB adalah faktor hukum (peraturan perundang-undangan), struktur hukum (penegak hukum), keadaan fasilitas pendukung, faktor penduduk dan faktor kebudayaan.¹⁸² Pariwisata halal berbasis kelebihan lokal untuk menambah penghasilan asli daerah (PAD) pada daerah lamongan (wisata sunan drajat). Hal ini menunjukkan diperoleh adalah sunan drajat merupakan wisata

¹⁸¹ Rahmat Saleh, Nur Anisah Pariwisata Halal di Aceh: Gagasan dan Realita di lapangan, 2018

¹⁸² Adrian Adi hamzana. Pelaksanaan standarisasi pelayanan pariwisata halal dalam pengembangan pariwisata di NTB

religi yang mempunyai potensi pariwisata halal, strategi yang dilakukan oleh pihak sunan drajat memberikan fasilitas sesuai kebutuhan wisatawan. Sunan darajat merupakan tempat wisata religi yang memberikan pendapatan asli daerah dengan jumlah yang cukup tinggi, tetapi jumlah tersebut belum dapat dikatakan tumbuh secara signifikan.¹⁸³

Strategi Pengembangan Wisata Syariah Di Sumatera Barat : Analisis Swot (Strength, Weakness, Opportunity, Threat). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa strategi pengembangan wisata syariah di Sumatera Barat adalah menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan, diimplementasikan melalui suatu Gerakan terpadu pengembangan kepariwisataan, Rapat-Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Stakeholder terkait, kesepakatan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota menjadikan Sumatera Barat sebagai Destinasi Wisata Halal, terpilihnya Sumbar sebagai Destinasi Halal Terbaik Nasional, terpilihnya Sumbar sebagai Destinasi Kuliner Halal Terbaik Nasional, terpilihnya Sumbar sebagai World's Best Halal Destination, terpilihnya Sumbar sebagai World's Best Halal Culinary Destination, Sosialisasi Wisata Halal bagi Stakeholder Pariwisata, memberikan subsidi untuk pengurusan Sertifikasi Halal untuk industri (rumah makan/restoran), menyusun Ranperda Pariwisata Halal.¹⁸⁴

Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal dalam pengembangan desa wisata agro di Kabupaten Pangandaran tertuang dalam prinsip-prinsip keorganisasian. Terdapat tiga prinsip pokok keorganisasian yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, dan kemandirian. Kriteria desa wisata meliputi daya tarik, aksesibilitas, fasilitas umum dan fasilitas wisata, pemberdayaan masyarakat, dan pemasaran atau promosi. Dari

¹⁸³ lady nur emilia sari, lady. Pariwisata halal berbasis keunggulan lokal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten lamongan (studi kasus wisata sunan drajat)

¹⁸⁴ Rimet, Strategi Pengembangan Wisata Syariah Di Sumatera Barat: Analisis Swot (Strength, Weakness, Opportunity, Threat). SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Vol. 2, No. 1, Juni 2019

kelima kriteria desa wisata di desa Paledah baru dua yang sudah berjalan maksimal yakni daya tarik wisata dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan ketiga kriteria lainnya masih memperoleh kendala.¹⁸⁵

Tantangan Pengembangan Wisata Halal Pada Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa salah satu usaha pemerintah daerah NTB dalam mengembangkan wisata halal adalah membuat peraturan daerah masalah Pariwisata Halal menjadi payung hukum untuk Pemda NTB, penggerak bisnis, serta penduduk setempat. Perda ini menata usaha pada wisata halal yang terdiri dari akomodasi, biro perjalanan, restoran, dan solus per aqua (SPA). Penyelenggaraan usaha pariwisata halal mesti menuruti ketetapan yang sudah diputuskan sama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. kendatipun sudah mendapatkan penghargaan menjadi World's Best Halal Tourism dan World's Best Halal Honeymoon Destination dan telah memiliki payung hukum untuk mengembangkan wisata halal, Pemda NTB masih menghadapi berbagai tantangan, di antara tantangannya adalah pertama, memastikan masyarakatnya mengenai urgensi pengembangan pariwisata halal pada Nusa Tenggara Barat, kedua, mempersiapkan (SDM) yang terlatih dan professional, ketiga, akselerasi sertifikasi halal pada penginapan serta restoran. Keempat, kerja sama sesama penyelenggara keinginan pada proses sertifikasi halal. Dan kelima, wisata halal perlu didukung oleh seperangkat peraturan perundangan yang dapat mensinergikan antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam prosedur serifikasi halal.¹⁸⁶ Implikasi pariwisata syariah terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat bahwa sebagai kelengkapan wisata syariah mempunyai penerapan yang baik pada

¹⁸⁵ Neneng Komariah, Encang Saepudin, Pawit M. Yusup, Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal. Jurnal Pariwisata Pesona. Volume 03 No 2, Desember 2018: p 158-174

¹⁸⁶ A. Muchad dan faham. Tantangan pengembangan wisata halal di nusa tenggara barat

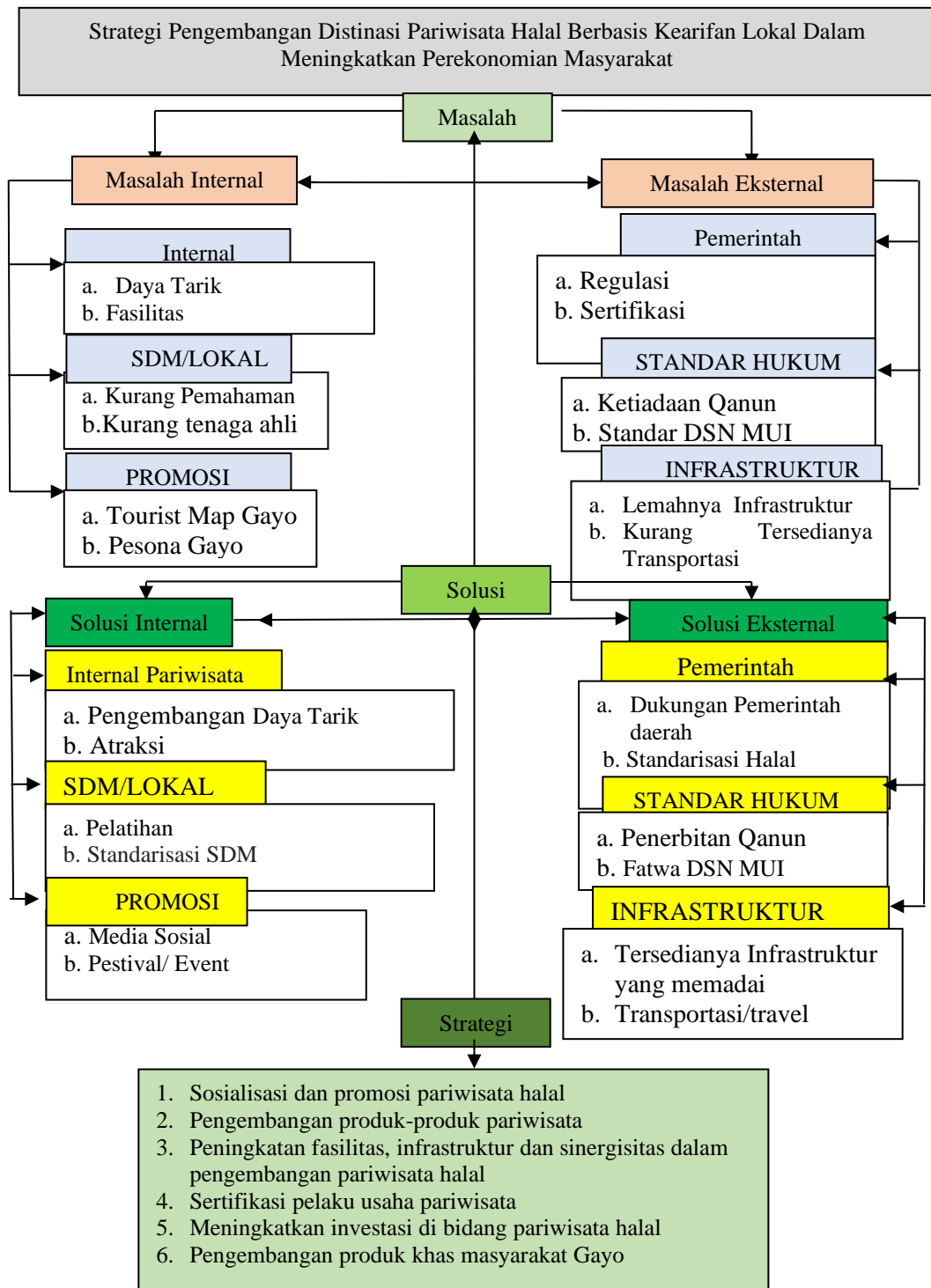
mengerakkan income masyarakat serta berdampak pada kemakmuran penduduk itu sendiri.¹⁸⁷

Model hasil penelitian dapat direplikasikan oleh pemerintah untuk penyusunan pedoman pengembangan kawasan wisata yang berkemampuan saing dan berkelanjutan di dalam sebuah kota. Model juga dapat digunakan oleh sektor swasta dalam menentukan kebijakan pengembangan bisnis, penyediaan ruang usaha kawasan pariwisata, dan formulasi strategi pengembangan kawasan pariwisata yang lebih kompetitif dan berkelanjutan. Model analytical network process (ANP) pada peningkatan pariwisata di Jember. Hasil pada riset ini menjelaskan ialah peningkatan wisata di jember masih di inplementasikan melalui kebijakan konvensional, masih kurangnya komunikasi dengan benar dan lebih mengantungkan satu even (aktraksi) pariwisata, yakni JFC salah satu lokomotif magnet pariwisata Jember. Model perluasan pariwisata di eksternal pelancong fashion, yaitu mengembangkan agrowisata pertanian kopi belum sebagai ketertarikan fokus oleh pemerintah kabupaten Jember

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka fikir sistematis untuk mengarahkan proses dari suatu penelitian. Untuk lebih lengkapnya, kerangka kerja identifikasi aspek, masalah, solusi, dan strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dapat dilihat pada bagan berikut ini

¹⁸⁷ Fitratun ramadhany ahmad ajib ridwan. Implikasi pariwisata syariah terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat



Gambar 2.4
Kerangka Kerja Identifikasi Masalah, Solusi, Dan Strategi Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Berbasis Kearifan Lokal Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Aceh Tengah)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian dengan pendekatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memahami beragam makna dari pengalaman individu atau kelompok sosial dan sejarah dengan maksud mengembangkan teori atau pola yang berorientasi pada masalah.¹⁸⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan *Analytic Network Process* (ANP) untuk menganalisis data yang terkait dengan strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah).

ANP merupakan suatu metode kualitatif untuk suatu proses pengambilan keputusan dengan kerangka kerja umum tanpa membuat asumsi-asumsi tentang independensi elemen-elemen pada level yang lebih tinggi dari elemen-elemen pada level rendah dan tentang idependensi elemen-elemen dalam suatu level.¹⁹⁰ Dengan menggunakan ANP kita mengetahui secara detail mana hal-hal lain yang proritas atau penting dari masalah, strategi dan solusi, karena terkadang banyak sekali kebijakan maka makin banyak keterbatasan-keterbatasan sumber daya sehingga kita perlu tau dan faham mana dahulu yang menjadi kunci/masalah utama atau strategi yang utama.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kabupaten Aceh Tengah, Karena Aceh Tengah memiliki potensi yang sangat potensial dalam pengembangan destinasi pariwisata halal karena Aceh Tengah mempunyai potensi daya tarik wisata, dari aspek alamnya yang indah budaya sejarahnya, dan wisata buatan serta kearifan lokal dan budaya yang unik

¹⁸⁹ John W, Creswell, *Research Design, Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, Second Edition ,tp,tt.h.20

¹⁹⁰ Arcarya, *Analytic network Process (ANP) : Pendekatan Baru Studi Kualitatif* (Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebangsentralan Bank Indonesia, 2005), hal 41

yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat di pasarkan baik tingkat regional maupun nasional bahkan untuk global guna untuk menarik wisatawan yang datang dengan harapan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat lokal.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.¹⁹¹ Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili (representatif) seluruh populasi.¹⁹²

Pemilihan responden pada penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan pemahaman responden terhadap pariwisata halal yang ada di Aceh Tengah. Jumlah informan dalam penelitian ini terdiri dari 9 (sembilan) orang karena dalam ANP syarat responden harus ganjil dalam *decision making* perlu ganjil, dengan pertimbangan bahwa mereka dianggap berkompeten di bidangnya dalam masalah yang menjadi fokus penelitian. Dalam analisis ANP, jumlah sampel/responden tidak digunakan sebagai patokan validitas. Syarat responden yang valid dalam ANP adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang ahli di bidangnya. Maka informan yang dipilih dalam survey ini adalah para pakar, akademisi, dan para pelaku usaha bergelut dalam bidang pariwisata.

D. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini diantaranya catatan hasil wawancara, hasil observasi

¹⁹¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &D, Cet.ke.23, (Bandung: Alfabeta, 2016), h.80

¹⁹² Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Satu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h.117 316

lapangan dan data-data mengenai informan¹⁹³. Data primer peneliti dapatkan melalui wawancara dan kuesioner terhadap para pakar/ahli yang mengerti dan paham tentang pariwisata, dan kearifan lokal 2 praktisi, 2 orang kademisi, dan 3 orang pelaku usaha yang berkaitan dengan pariwisata, 1 orang dari MPU Aceh Tengah, dan 1 orang dari anggota DPRK Aceh Tengah.

2. Data Skunder

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.¹⁹⁴

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi kegiatan penelitian, karena pengumpulan data akan menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian, sehingga dalam pemilihan teknik pengumpulan data harus cermat. Pada data primer teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban dicatat atau direkam.¹⁹⁵ Digunakan untuk menggali informasi yang berkaitan dengan model pengembangan pariwisata halal berbasis kearifan lokal terhadap perekonomian masyarakat.

¹⁹³ Hasan & M.Iqbal, pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Bogor : Ghalia Indonesia, 2002) Hal 82

¹⁹⁴ Hasan & M.Iqbal, pokok-pokokhal 58

¹⁹⁵ Hasan & M.Iqbal, pokok-pokokhal 58

2. Kuesioner

Kuesioner digunakan pada dua tahap yaitu kuesioner terbuka yang digunakan untuk menyusun kerangka ANP dan kuesioner tertutup yang disusun dalam bentuk *pairwise comparasion* untuk menentukan nilai prioritas dalam masalah, solusi, dan strategi dalam pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Kuesioner disebarkan kepada 2 orang praktisi, 2 orang pakar, 3 orang pelaku usaha, 1 orang MPU Aceh Tengah, dan 1 orang dari DPRK Aceh Tengah. Adapun responden yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini sebagaimana disebutkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Daftar Informan/Responden Penelitian

No	Inisial informan/ Responden	Pekerjaan	Keterangan
1	J E	Kepala Dinas Pariwisata Dan Olah Raga	03-Juni 2020
2	M M	Kabid Destinasi Pariwisata	7 Juni 2020
3	EK	Akademisi Dan Pemerhati Pariwisata (Dosen Almuslim)	15 Juni 2020
4	J	Akademisi Dan Pemerhati Budaya Kearifan Lokal Masyarakat Gayo (Dosen STIT Alwasliyah Aceh Tengah)	11 Juni 2020
5	T	Masyarakat Pelaku Usaha Kerawang Gayo	18 Juni 2020
6	D	Masyarakat Pelaku Usaha, Perhotelan	20-Juni 2020
7	S	Masyarakat (pelaku usaha wisata)	19 Juni 2020
8	M	DPRK Aceh Tengah	11-Des-2020
9	S	MUI Aceh Tengah	14-Des-2020

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.¹⁹⁶ Penelitian ini merupakan penelitian analisis kualitatif dimana bertujuan untuk memahami suatu nilai atau pandangan yang diwakili oleh para pakar dan praktisi yang berkaitan/berhubungan dengan pariwisata halal berbasis kearifan lokal. Analisis yang digunakan adalah metode ANP pendekatan jaringan model dan diolah dengan menggunakan *software* “*Super Decision 2.6.0*” serta MS Excel.

Analytic Network Process (ANP) adalah kerangka paling komprehensif untuk menganalisa suatu keputusan masyarakat, pemerintah, dan pengusaha yang tersedia pada saat ini saat membuat keputusan. Hal ini memungkinkan seseorang untuk memasukan semua faktor dan kriteria nyata dan tidak nyata yang harus diambil untuk membuat keputusan terbaik. ANP memungkinkan interaksi dan umpan balik dalam kelompok elemen (ketergantungan batin) dan antar kelompok (ketergantungan luar). Umpan balik semacam itu terbaik menangkap efek kompleks dari interaksi dalam masyarakat, terutama resiko dan ketidakpastian terlibat¹⁹⁷. ANP mempunyai tiga aksioma sederhana yang secara hati-hati membatasi cakupan suatu masalah yaitu :

1. **Resiprokal**; aksioma ini menyatakan bahwa jika PC (EA,EB) adalah nilai perbandingan pasangan dari elemen A dan B, dilihat dari elemen induknya C, yang menunjukkan berapa kali lebih banyak elemen A

¹⁹⁶ Sugiono, metode penelitian bisnis (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D (bandung : Alfabeta, 2009) Hal 244

¹⁹⁷ Rozan W Saalty, *The Analytical hierarchy process for Decision Making and The Analytical Network Process (ANP) for Decision making with dependence and feedback* (University of Pittsburgh : Creative Decision Foundation, 2003) hal 39

memiliki apa yang dimiliki elemen B, maka $PC(EB,EA) = 1/Pc(EA,EB)$. Misalkan, jika A lima kali lebih besar dari B, maka B besarnya 1/5 dari besar A.

2. **Homogenitas**; menyatakan bahwa elemen-elemen yang dibandingkan dalam struktur kerangka ANP sebaiknya tidak memiliki perbedaan terlalu besar, yang dapat menyebabkan lebih besarnya kesalahan dalam menentukan penilaian elemen pendukung yang mempengaruhi keputusan.

Tabel 3.2
Definisi Skala Penilaian dan Skala Numerik

Deskriptif	Tingkat Kepentingan	Penjelasan
Amat sangat besar pengaruhnya/tingkat kepentingan	9	Bukti-bukti yang memihak satu elemen lainnya
Diantara nilai 7-9	8	memiliki bukti yang tingkat kemungkinan afirmasinya tertinggi bukti yang tingkat kemungkinan afirmasinya tertinggi
Sangat lebih besar pengaruhnya/tingkat kepentingan	7	Satu elemen sangat lebih rendah dibandingkan dengan elemen lainnya dan dominan ditunjukkan dalam praktek
Diantara nilai 5-7	6	Dominan ditunjukkan dalam praktek
Lebih besar pengaruhnya	5	Pengalaman dan penilaian kuat mendukung satu elemen dibandingkan
	4	

		elemen yang lain
Sedikit lebih besar pengaruhnya/tingkat kepentingannya	3	Pengalaman dan penilaian sedikit mendukung satu elemen dibandingkan elemen yang lain
Diantara 1-3	2	Dua elemen yang dibandingkan
Sama besar pengaruhnya/tingkat pengaruhnya	1	memiliki kontribusi kepentingan yang sama terhadap tujuan

Sumber: Hendri Tanjung & Abrista Devi dalam Metodologi penelitian Ekonomi

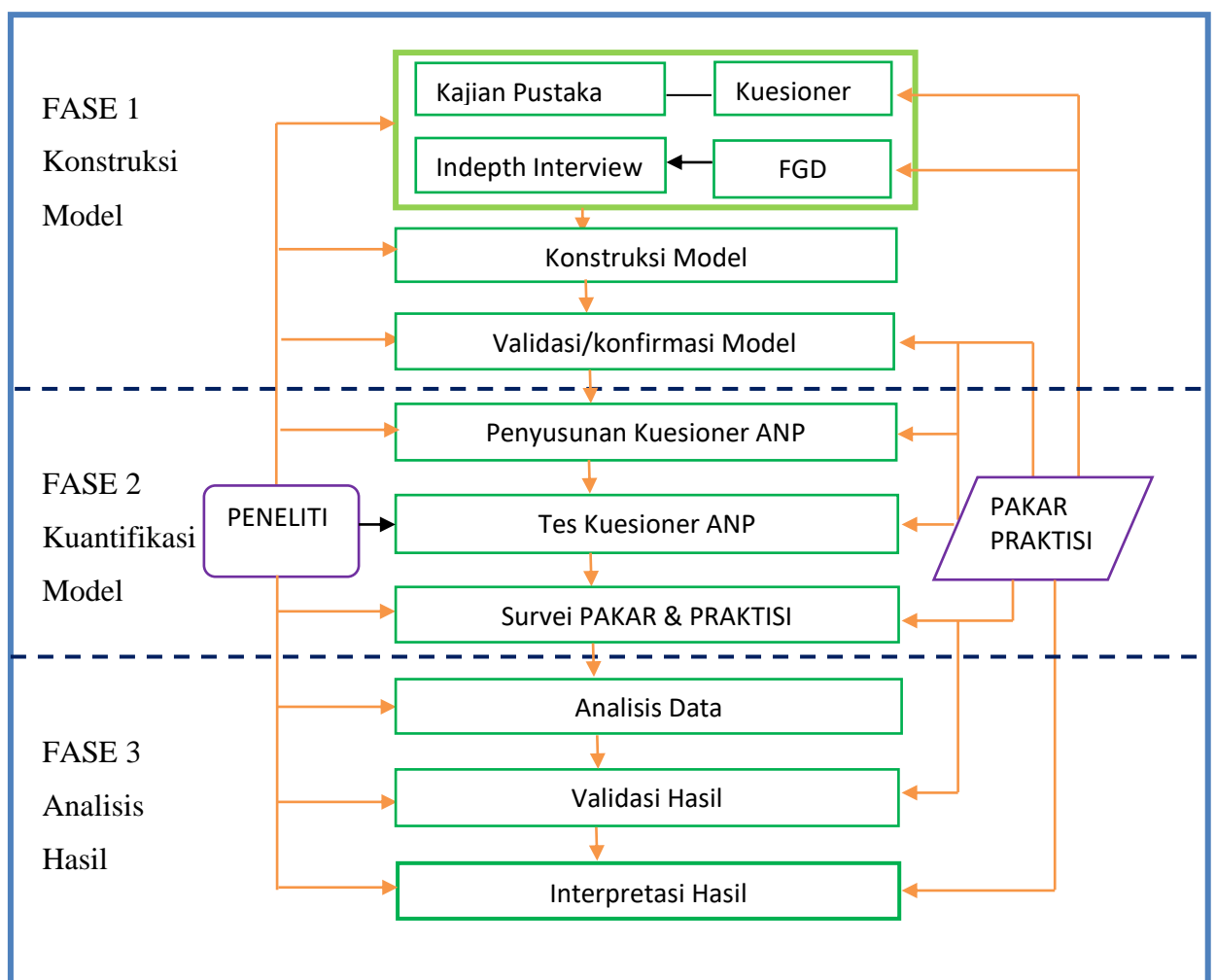
3. Struktur Hierarki (tidak berlaku untuk ANP)

Aksioma ini menyatakan bahwa *judgements* atau penilaian atau prioritas dari elemen-elemen tidak tergantung pada elemen-elemen pada level yang lebih rendah. Aksioma ini mengharuskan penerapan struktur yang hierarkis. Aksioma ini menyatakan bahwa mereka yang mempunyai alasan terhadap keyakinannya harus memastikan bahwa ide-ide mereka cukup terwakili dalam hasil agar sesuai dengan ekspektasinya. Pelonggaran aksioma ketiga tentang struktur hierarki yang menjadi tidak berlaku untuk ANP juga berimplikasi pada bentuk jaringan yang beragam dalam ANP yang menjadi sangat bervariasi dan tidak terbatas.

G. Tahapan Penelitian

Analytic Network Process (ANP) memiliki tiga tahapan kerja, yaitu : membuat kerangka kerja ANP atau konstruksi model, kuantifikasi model, dan sintesis dan analisis. Tiga tahapan tersebut dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut ini :

Gambar 3.1
Tahapan Penelitian pada metode ANP antara lain:



Sumber : (Ascarya, 2010)

Berikut tiga tahapan kerja yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yaitu membuat kerangka kerja ANP atau konstruksi model, kuantifikasi model, dan sintesis dan analisis

1. Konstruksi Model

Konstruksi model ANP disusun berdasarkan literature review secara teori maupun empiris dan memberikan pertanyaan pada pakar dan praktisi dan pelaku usaha wisata serta melalui *indepth interview* untuk mengkaji informasi secara lebih mendalam untuk memperoleh permasalahan yang sebenarnya yang menjadi masalah strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Setelah disusun kriteria masalah dan solusi terhadap permasalahan tersebut, maka akan dibuat strategi dengan penentuan model pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Kerangka yang telah tersusun dilakukan validasi oleh salah satu pakar dan praktisi supaya tidak terjadi ambiguitas dalam memahami maksud dan tujuan masing-masing komponen yang ada di kerangka ANP.

2. Kuantifikasi Model

Tahap kuantifikasi model menggunakan pertanyaan dalam kuesioner ANP berupa pairwise comparison (perbandingan pasangan) antar elemen dalam cluster untuk mengetahui mana diantara keduanya yang lebih besar pengaruhnya (lebih dominan) dan seberapa besar perbedaannya melalui skala numerik 1-9. Data hasil penilaian kemudian dikumpulkan dan diinput melalui *software super decision* untuk diproses sehingga menghasilkan output berbentuk prioritas dan supermatriks. Hasil dari setiap responden akan diinput pada jaringan ANP tersendiri.¹⁹⁸

Setelah kuesioner dibuat dan dilakukan uji coba, langkah selanjutnya adalah melakukan survey responden (pakar, praktisi, dan pelaku usaha yang berkaitan dengan wisata). Dimana responden diminta untuk menentukan prioritas utama atau yang paling berpengaruh terhadap

¹⁹⁸ Ascarya, The Persistence of Low Profit and Loss Sharing Financing in Islamic Banking: The Case of Indonesia”review of Indonesian economic and business studies vol.1 LIPI economic research center.2011

permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Contoh kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah : kriteria masalah, criteria solusi dan strategi dalam pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Kabupaten Aceh Tengah).

Setelah kuesioner diisi oleh responden, data diinput melalui *software super decision* untuk diproses sehingga menghasilkan output berbentuk prioritas super matrik. Hasil dari setiap responden akan diinput pada jaringan ANP tersendiri.

3. Sintesis dan Analisis Hasil

Fase analisis sintesis bertujuan menganalisa data yang telah ada diinput pada *software super decision*, kemudian dipindahkan dan diolah pada Microsoft excel. Hasil analisis sintesis ini bertujuan untuk menentukan *Geometric Mean* dan *Rater Aggrement*.

a. *Geometric Mean*

Untuk mengetahui hasil penilaian individu dari para responden dan menentukan hasil pendapat pada satu kelompok dilakukan penilaian dengan menghitung *geometric mean*¹⁹⁹. Pertanyaan berupa perbandingan (*Pairwise comparison*) dari responden akan dikombinasikan sehingga membentuk suatu konsensus. *Geometric mean* merupakan jenis penghitungan rata-rata yang menunjukkan tendensi atau nilai tertentu dimana memiliki formula sebagai berikut.²⁰⁰ (Ascarya, 2011) :

$$\left(\prod_{i=1}^n a_i\right)^{1/n} = \sqrt[n]{a_1 a_2 a_n} \quad (3.1)$$

¹⁹⁹ Saaty, Thomas L and Vargas, Louis G, *Decision Making with the Analytic Network Process. Economic, Political, Social and Technological Applications with Benefits, Opportunities, Costs and Risks*. Springer. RWS Publication, Pittsburgh. 2006

²⁰⁰ Ascarya dan Yumanita, Diana, *Determinan dan Persistensi Margin Perbankan Konvensional dan Syariah di Indonesia*” working paper series No.WP/10/04. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia. 2010

b. *Rater Agreement*

Rater agreement adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian (persetujuan) para responden (R1-Rn) terhadap suatu masalah dalam satu cluster. Adapun alat yang digunakan untuk mengukur rater agreement adalah Kendall's Coefficient of Concordance ($W; 0 < W \leq 1$). $W=1$ menunjukkan kesesuaian yang sempurna.

Untuk menghitung Kendall's (W), yang pertama adalah dengan memberikan ranking pada setiap jawaban kemudian menjumlahkannya.

$$R_i = \sum_i^m = 1r_{i,j} \quad (3.2)$$

Nilai rata-rata dari total ranking adalah:

$$R = R = \frac{1}{2}m(n+1) \quad (3.3)$$

Jumlah kuadrat deviasi (S), dihitung dengan formula:

$$S = \sum_i^n 1(R_i - R)^2 \quad (3.4)$$

Sehingga diperoleh Kendall's W , yaitu:

$$w = \frac{125}{m^2(n^2 - n)} \quad (3.5)$$

Bobot prioritas yang sudah memenuhi syarat dalam konsistensi, kemudian di cari nilai rata-rata dari jawaban setiap responden. Hasil yang sudah ada dihitung nilai *kendali'S Coefisient of Concordance* untuk menghitung nilai kesepakatan antara responden (*rater agreement*). *kendali'S Coefisient of Concordance* adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kesepakatan di antara beberapa pemberi nilai (*judges*) yang memeriksa atau menilai sekumpulan objek yang diberikan.

Jika nilai pengujian W sebesar 1 ($W=1$), dapat disimpulkan bahwa penilaian atau pendapat dari para responden memiliki kesesuaian yang sempurna. Sedangkan ketika nilai W sebesar 0 atau semakin mendekati 0,

maka menunjukkan adanya ketidaksesuaian antar jawaban responden atau jawaban bervariasi.²⁰¹

1. Transpose

Hasil kuesioner dari seluruh responden diinput ke dalam *pairwise comparasion* sehingga menghasilkan *Normalized by cluster* kemudian di copy melalui *priorities* dan dipindahkan ke dalam satu set, sedangkan nilai *limiting* tidak digunakan dalam perhitungan *Rater Agreement*. Selain itu nilai yang ada di *Normalized by Cluster* tersebut.

2. Ranking

Nilai yang telah di ranking dilakukan perangkingan kemudian di totalkan dapat dilihat.

3. Hitung W

Setelah dilakukan perangkingan selanjutnya dilakukan menghitung nilai W (*rater agreement*) dengan rumus sebagai berikut :

$$U = (T_1 + T_2 + \dots + T_p) / p$$

$$S = (T_1 - U)^2 + (T_2 - U)^2 + \dots + (T_p - U)^2$$

$$\text{MaxS} = (n - U)^2 + (2n - U)^2 + \dots + (pn - U)^2$$

$$W = S / \text{MaxS}$$

Dimana :

U : nilai-rata-rata dari total ranking

S : Jumlah kuadrat deviasi

P : Jumlah Node

N : Jumlah Responden

T : total ranking prioritas per *node*/ pernyataan dari seluruh responden

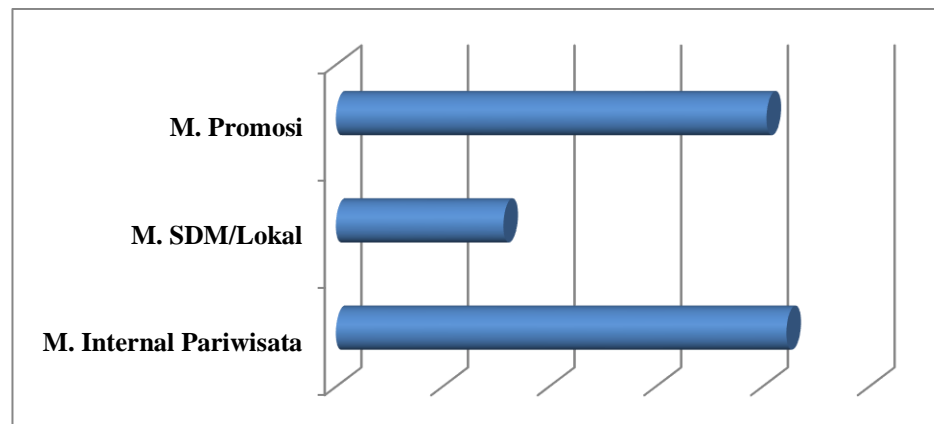
4. Membuat Grafik

Setelah menghitung *geometric Mean* dan *Agreement* maka langkah terakhir adalah membuat grafik. Tujuan membuat grafik adalah untuk

²⁰¹ Ascarya, "The persistence of Low and Profit and loss Sharing Financing in Islamic Banking. The Case of Indonesia". Review of Indonesian Economic and Business Studies, Vol LIPI Economic Research Center, 2011

memudahkan peneliti untuk menginterpretasikan hasil dari penelitian tersebut. Bentuk grafik dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 3.2
Contoh Grafik Hasil *Geometric Mean*



Dalam penelitian ini waktu yang digunakan untuk melakukan tiga tahapan penelitian di atas dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Tahapan dan Waktu Penelitian

Tahapan Penelitian	Kegiatan	Waktu
Konstruksi Model	Kajian Pustaka	2 Nov-Januari 2020
	<i>Indepth Interview</i>	03- 31-Maret 2020
	Konstruksi Model	2-15-April 2020
	Validasi Model	3-15 Mei 2020
Kuantifikasi Model	Penyusunan Kuesioner	16-31 Mei 2020
	Tes Kuisisioner	1-21 Juni 2020
	Survey Informan	22-30 Juni 2020
Sintesis dan Analisis	Validasi Data	04 Juli-September 2020

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum Aceh Tengah yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat dalam tiga aspek diantaranya adalah secara geografis dan kependudukan. Dalam aspek tersebut memiliki potensi untuk pengembangan destinasi pariwisata halal yang berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian (Aceh Tengah). Kedua aspek tersebut dapat di jabarkan dalam penjelasan berikut ini:

1. Geografis

Kabupaten Aceh Tengah terletak di antara $4^{\circ} 10' 33''$ – $5^{\circ} 57' 50''$ Lintang Utara dan di antara $95^{\circ} 15' 40''$ – $97^{\circ} 20' 25''$ Bujur Timur, dengan luas wilayah 4.318,39 km². Ibukota Kabupaten Aceh Tengah adalah Takengon. Secara administratif, Kabupaten Aceh Tengah berbatasan dengan beberapa kabupaten di Aceh, diantaranya yaitu;

Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah.
Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur
Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues
Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Kabupaten Nagan Raya.

Kabupaten Aceh Tengah berada pada ketinggian 200 – 2.600 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Aceh Tengah berada di kawasan Dataran Tinggi Gayo. Tiga kota utamanya yaitu Takengon, Blang Kejeren, dan Simpang Tiga Redelong. Kabupaten Aceh Tengah memiliki 14 kecamatan yang terdiri dari 295 kampung yaitu:

Tabel 4.1
Jumlah Kecamatan yang ada di Aceh Tengah

No	Kecamatan	Jumlah Kampung
1	Atu Lintang	11
2	Bebesen	28
3	Bies	12
4	Bintang	24
5	Celala	17
6	Jagong Jeget	10
7	Kebayakan	20
8	Ketol	25
9	Kute Panang	24
10	Linge	26
11	Lut tawar	18
12	Pegasing	31
13	Rusip antara	16
14	Silih Nara	33

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Tengah tahun 2015

2. Kependudukan (Demografi)

Sebagian besar penduduk Kabupaten Aceh Tengah berasal dari suku Gayo. Selain itu terdapat pula suku-suku lainnya, seperti Suku Aceh, Suku Jawa, Suku Minang, Suku Batak, Suku Tionghoa. Mayoritas masyarakat Aceh Tengah beragama Islam (99%). Penduduk Kabupaten Aceh Tengah mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, sehingga kenaikan dan penurunannya cukup signifikan karena aksesibilitas dan mobilitas penduduk dari dan ke daerah ini cukup tinggi. Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2015 tercatat sebanyak 192.204 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 96,869 jiwa dan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 95,335 jiwa. Rincian dari jumlah penduduk

dari tiap kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Rincian Jumlah Penduduk Setiap Kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total	Sex Ratio
1	Linge	4,747	4,842	9,589	98,04
2	Atu Lintang	3,161	4,842	6,354	99
3	Jagong Jeget	4,860	3,193	9,715	100.10
4	Bintang	4,633	4,855	9,312	99,02
5	Laut Tawar	10,034	4,679	19,667	104.18
6	Kebayakan	7,759	9,633	15,374	101-01
7	Pegasing	9,707	7,615	19,317	103.09
8	Bies	3,565	9,610	7,023	104.17
9	Bebesen	19,187	3,458	37,606	96.16
10	Kute Panang	3,658	18,419	22,493	103.10
11	Silih Nara	11,418	3,804	9,074	100
12	Ketol	6,210	11,075	12,420	99.02
13	Celala*	4,558	6,210	9,161	100.99
14	Rusip Antara*	3,372	4,603	6,711	101.61
Aceh Tengah 2014		96,869	3,339	192,204	102,71
Aceh Tengah 2013		94,108	95,335	185,733	102,71

Sumber : BPS Aceh Tengah. 2015

3. Kekayaan Ekologis Sebagai Potensi Pariwisata

Kabupaten Aceh Tengah selain dikenal dengan alamnya yang indah dan permai juga dikenal dengan kesuburan tanahnya. Hampir 95% masyarakat Negeri Seribu Gunung ini menggantungkan mata pencaharian disektor partanian khususnya Tanaman kopi dan horticultura. Hampir diseluruh Kecamatan di Kabupaten ini kita dapat menemukan hamparan kebun kopi yang di kelola oleh petani. Luas areal perkebunan kopi di Aceh Tengah mencapai + 70.000 hektar.

Kecamatan Kute Panang, Jagong Jeget dan Kecamatan Atu Lintang merupakan Kecamatan dimana wisatawan dapat menikmati hamparan perkebunan kopi rakyat dan aktifitas petani kopi yang sedang mengelola lahannya dengan cara tradisional.

Selain dapat menikmati lanskap hamparan tanaman kopi dan berbagai varietas hortikultura, wisatawan juga dapat membeli aneka buah – buahan seperti jeruk, markisa, alpukat, tomat, kentang dan lain-lain dengan harga lebih murah dari harga pasaran di lokasi perkebunan. Kondisi alam perbuitan dan lanskap Kabupaten Aceh Tengah yang indah sangat potensi untuk di jadikan objek wisata. Beberapa kekayaan ekologi dan lanskap yang dapat dijadikan atau sudah menjadi objek wisata diantaranya yaitu:

1. Agro Wisata (Kebun Nenas Pengasing) di Pegasing, Kec. Pegasing
2. Agro Wisata Ujung Paking di Kampung Kelitu, Kec. Bintang
3. Air Terjun Mangaya di Mangaya, Kec. Bintang
4. Atu Belah di Kampung Penarun, Kec. Linge
5. Atu Berukum / Atu Canang di Kampung Serule, Kec. Bintang
6. Atu Tamon Resort di Mepar, Kec. Kebayakan
7. Batur Teluk Mepar di Kampung Mandale, Kec. Kebayakan
8. Bur Gayo / Atu Tingok di Kampung Bale Hakim, Kec. Lut Tawar
9. Bur Gayo Highland di Kampung Dedalu, Kec. Lut Tawan
10. Cerug Mendale / Goa Gong Nabi Sulaiman di Kampung Mandele, Kec. Kebayakan
11. Pantan Terong di Kampung Bahgie, Kec. Bebesen
12. Pante Gemasih di Kampung Kelitu, Kec. Bintang
13. Pante Ketibung di Kampung Kelitu, Kec. Bintang
14. Pante Lung Toweren di Kampung Toweren, Kec. Lut Tawar
15. Pante Menye di Kampung Genuren, Kec. Bintang
16. Pante 1001 Ayanan di Kampung Gegarang, Kec. Bintang
17. Pesangrahan Singah Mata di Kampung Bukit Sama, Kec. Kebayakan
18. Sungai Merah Muyang di Kampung Merah Muyang, Kec. Atu Lintang

4. Kondisi Sosial Budaya Sebagai Potensi Pariwisata

Pada umumnya, orang Gayo dikenal dari sifat mereka yang sangat menentang segala bentuk penjajahan. Dahulu, daerah ini dikenal sebagai kawasan yang sangat menentang pemerintahan kolonial Belanda. Masyarakat Gayo adalah penganut Islam yang kuat. Masyarakat di Gayo banyak memelihara kerbau,

sehingga ada yang mengatakan jika melihat banyak kerbau di Aceh maka orang itu sedang berada di Gayo.

Masyarakat Aceh Tengah memiliki tradisi tahunan pada saat perayaan proklamasi Indonesia yaitu pacu kuda tradisional. Hal yang unik dari pacu kuda tradisional ini adalah penunggang kuda (joki) yang berumur antara 10-16 tahun. Joki kuda tidak menggunakan alas duduk, perayaan ini sudah dimulai sejak tahun 2011. Pacuan Kuda diselenggarakan 2 kali dalam setahun, di bulan Agustus pada saat perayaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, dan bulan Februari untuk memperingati hari ulang tahun kota Takengon yang jatuh pada tanggal 17 Februari setiap tahunnya. Selain itu, Aceh tengah juga memiliki Didong. Didong merupakan salah satu kesenian asli yang berasal dari daerah dataran tinggi ini. Sekelompok orang duduk bersila membentuk lingkaran. Salah seorang ceh akan mendendangkan syair-syair dalam bahasa Gayo dan anggota yang lain akan mengiringi dengan tepukan tangan dan tepukan bantal kecil dengan ritme yang harmonis. Selain Didong, masih banyak lagi hasil kebudayaan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah.

5. Kondisi Perekonomian Masyarakat Aceh Tengah

Sebagian besar masyarakat Aceh Tengah bekerja sebagai petani, selain bertani ada juga warga yang bekerja sebagai PNS, Buruh, Karyawan, Wiraswasta dan para pemuda yang masih menuntut ilmu sebagai pelajar atau mahasiswa. Pertanian dan peternakan merupakan sektor ekonomi yang cukup berkembang di Aceh Tengah. Lahan pertanian yang diusahakan di Aceh Tengah adalah lahan basah dan lahan kering.

Sebagian besar masyarakat Kabupaten Aceh Tengah berprofesi sebagai petani baik di sawah maupun di kebun. Kabupaten Aceh Tengah menghasilkan salah satu jenis kopi arabika terbaik di dunia dengan rata-rata produksi per hektare sebanyak 720 kilogram. Komoditas penting selain kopi adalah tebu dengan luas areal 8.000 Hektar, serta kakao seluas 2.322 hektare, kemudian terdapat pula tanaman sayur mayur dan palawija.

Kopi menjadi andalan utamanya. Perkebunan kopi mencapai 73.461 hektar yang tersebar di seluruh kecamatan dan umumnya merupakan perkebunan milik

rakyat. Sebanyak 53.902 keluarga petani kopi terlibat di usaha perkebunan ini. Penanaman kopi memang dikenal penduduk sejak zaman Belanda. Bahkan sebagian besar kebun kopi yang ada sekarang merupakan peninggalan perkebunan Belanda. Jenis kopi Arabica-lah yang banyak ditanam disini. Selain karena memang cocok tumbuh di daerah yang berhawa sejuk, harganya pun relatif lebih tinggi dibanding kopi jenis lain. Tahun 2000, kopi daerah ini bisa menghasilkan 27.105 ton kopi. Hasil itu sebagian ada yang diekspor ke Amerika, Jepang dan Belanda, dan sebagian dikirim ke Medan kemudian baru diekspor ke negara tujuan, nilai ekspor kopi bisa mencapai 10 juta dollar AS lebih dalam setahun.

Lain halnya dengan tanaman sayur-sayuran, palawija dan hortikultura yang dapat tumbuh subur di daerah ini. Tanaman sayur-sayuran seperti kentang, tomat, cabai dan kubis banyak dibudidayakan petani. Tahun 2000 luas areal tanaman kentang 1.930 hektar, menghasilkan 37.617 ton. Produksi kentang yang dipasarkan di tingkat lokal, ke beberapa kota seperti Medan, Banda Aceh, bahkan sudah ada yang diekspor ke Malaysia. Komoditas kentang juga sudah mulai diolah menjadi makanan ringan dalam bentuk keripik oleh beberapa industri rumah tangga.

B. Perkembangan Pariwisata di kabupaten Aceh Tengah

Disebelah Timur kota Takengon terdapat sebuah Danau yang bernama Danau Laut Tawar dengan luas \pm 5.472 Ha, dan dengan kedalaman rata rata 51,13 m, merupakan satu – satunya danau di Provinsi Aceh atau danau kedua terbesar di Pulau Sumatra. Di Aceh Tengah terdapat beberapa daya tarik wisata alam yang tersebar di Kabupaten Aceh Tengah, diantaranya adalah wisata alam, Wisata Sejarah dan Budaya, dan wisata buatan. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Wisata Alam

1. Danau Lut Tawar

Gambar 4.1



Danau Lut Tawar terletak disebelah timur Kota Takengon, merupakan danau terbesar di Provinsi Aceh. Panorama di seputaran danau yang merupakan ikon Kepariwisata Aceh Tengah, menyuguhkan landscape dan pemandangan yang sangat indah nan dan eksotis yang tidak terdapat di danau lainnya. Danau yang memiliki luas sekitar 5.472 Ha. Panjang rata – rata 17 Km dengan lebar rata – rata 3,219 Km, dan kedalam jarak dari pinggir 35 m kedalaman 8,9, jarak 100 m kedalaman 19,27 dan jarak dari pinggir 1.620 m kedalamannya 51,13. Didalamnya terdapat ikan endemik Danau Lut Tawar, ikan Depik. Ikan Depik “*Rosbora Tawarensis*” hanya dapat berkembang biak di Danau ini dan berbagai species ikan lainnya seperti ikan bawal/ emas, mujahir, kepras, lele, nila, bado dan species lainnya. Disekeliling Danau terdapat empat gua yang sudah ditemukan; Gua Loyang Peteri Pukes atau di kenal dengan Gua loyang Sekam, Gua Loyang Koro, Gua Loyang Peteri Ijo. Gua Loyang Perupi atau Gua Ular. Gua – gua tersebut memiliki legenda dan karakteristik tersendiri. Di beberapa lokasi Danau Lut Tawar, seperti di desa Pedemun terdapat lokasi untuk panjat tebing hiking, tracking dan dengan latar belakang pemandangan Danau yang permai. Seiring dengan semakin berkembangnya kepariwisataan di Negeri penghasil kopi ini kita dapat mengunjungi beberapa resort/objek wisata baik yang di kelola oleh pemerintah daerah maupun swasta, diantaranya Objek Wisata Pante Menye, Air Terjun

Mengaya, Pante Mepar, Ujung Paking, Ujung Nunang, Ujung Sere, Pante Gamasih, Pante Ketibung dan sejumlah objek wisata lainnya.

2. Pantan Terong

Gambar 4.2



Terletak di perbukitan sebelah barat Kota Takengon, memiliki jarak sekitar 7 km dari pusat Kota Takengon. Berketinggian sekitar 1.800 mdpl dengan udara dingin khas Aceh Tengah. Lokasinya berada di sebuah perbukitan dengan panorama yang terbuka menghadap ke arah timur. Lokasi Pantan Terong sangat cocok untuk menikmati matahari terbit. Kota Takengon dan Danau Laut Tawar terlihat dikelilingi oleh perbukitan hijau di sekelilingnya.

Pantan Terong memiliki dua buah pelataran yang bisa digunakan untuk menikmati pemandangan dan suasana tenang. Selain pelataran yang cukup luas tersebut, ada juga sebuah rumah panggung dari kayu yang berada di atas pelataran kedua. Pantan Terong perpaduan antara Eko dan Agro wisata, merupakan salah satu Objek Wisata Unggulan di Kabupaten Aceh Tengah. Dari ketinggian ± 1.825 m di atas permukaan laut, puncak Al – Kahfi, nama lain Objek Wisata Pantan Terong dengan suhu udara yang sejuk kita dapat menikmati perpaduan harmonisasi suguhan panorama Danau Lut Tawar yang eksotis nan permai dengan hamparan perkebunan kopi rakyat didua kabupaten, Aceh Tengah dan Bener Meriah yang dinaungi Gunung Burni Telong, merefleksikan kesempurnan keagungan dan keindahan Maha Karya Sang Pencipta Allah SWT.

Di Puncak Pantan Terong terdapat sebuah pasenggrahan dengan pelataran yang di bangun mirip geladak kapal, para pengunjung dapat melepaskan pandangan kesegala penjuru. Di lokasi ini terdapat Mushola, Kanteen dan toilet dan areal parkir kendaraan yang cukup luas. Objek wisata ini sering dipergunakan sebagai tempat untuk pertemuan baik bersifat formal maupun informal. Objek yang jaraknya 5 Km dari Kota Takengon, dapat dicapai dengan mempergunakan kendaraan dengan waktu tempuh ± 15 menit.

3. Pante Menye

Gambar 4.3



Pante Menye (Pantai Manja) merupakan salah satu Objek Wisata Unggulan Aceh Tengah, memiliki bentangan hamparan pantai pasir terpanjang $\pm 1,5$ km, terletak disebelah Timur Danau Lut Tawar, membentang dari Utara Keselatan dengan latar belakang Kecamatan Bintang. Sejumlah even wisata diadakan di pantai ini seperti; Adu perahu tradisional, pacuan kuda pantai tradisional, pagelaran seni budaya Gayo dan sejumlah even kebudayaan lainnya.

Menuju lokasi Pante Menye dapat di tempuh dari sisi kiri Danau dengan jarak tempuh ± 29 km, dengan waktu tempuh 30 menit dari kota Takengon, dari sisi kanan Danau sepanjang 33 km dengan jarak tempuh ± 60 menit dengan menggunakan kendaraan.

4. Air Terjun Mengaya

Gambar 4.4



Air Terjun Mengaya salah satu Objek Wisata unggulan di Aceh Tengah, berlokasi di Desa Mengaya jaraknya + 24 Km dari Kota Takengon. Objek Wisata ini sering dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun Manca Negara. Terletak persis di kaki gunung Burni Klieten. Selain menikmati deburan air yang terjun menghempas bebatuan karang dari ketinggian 180 meter para wisatawan dapat menikmati segarnya udara dan kicauan burung yang berasal dari hutan yang ada di sekitar Air Terjun. Fasilitas yang tersedia di Objek Wisata Air terjun Mengaya adalah : Mushola, Mck, Kantin serta lokasi parkir yang luas.

5. Bur Telege

Gambar 4.5



Bur Telege dan Bur Gayo masih berada dalam satu lokasi, berada di salah satu bukit di selatan Kota Takengon. Lokasi Bur Telege dan Bur Gayo dapat dilihat dengan mudah dari Kota Takengon, terdapat sebuah tulisan besar “GAYO HIGHLAND, TANOAH GAYO”.

6. Ujung Paking

Gambar 4.6



Tepian Danau Laut Tawar yang menjorok ke tengah danau. Memiliki panorama yang terbuka dan luas. Bagian bawahnya terdapat tepian danau yang menyerupai pantai, sehingga bisa digunakan untuk bermain air danau. Lokasi yang strategis tersebut digunakan untuk membangun sebuah resort yang megah dan elegan. Dari pintu masuk ke dalam lokasi wisata, sudah terlihat berjajar pohon palm dan pohon bunga yang berderet hingga aula utama yang cukup besar. Mungkin bisa

menampung sekitar 250 orang di dalam aula tersebut. Selain menawarkan panorama, juga ada atraksi lainnya untuk pengunjung. Seperti berkeliling area Ujung Paking yang memiliki variasi kontur, turun ke tepian danau untuk bermain dengan air danau, atau juga duduk santai di hamparan rumput sembari menikmati suasana yang menenangkan

7. Galeri Kopi Indonesia

Gambar 4.7



Kedai kopi yang berlokasi di tengah perkebunan kopi, atraksi yang ada di area ini adalah minum kopi dengan langsung melihat kebun kopi. Selain minum kopi, di tempat ini kita juga bisa belajar mengenai seluk beluk kopi yang ada di Aceh Tengah. Konsep kedai kopi yang menggunakan ornamen dari kayu bekas membuat suasana semakin terasa lebih asri. Terdapat homestay sederhana yang bisa digunakan untuk bermalam ketika ada wisatawan yang ingin menginap. Ada juga kebun nanas yang bisa dijadikan sebagai alternatif agrowisata kebun buah.

8. Agrowisata Nanas

Gambar 4.8



Agrowisata nanas yang dikembangkan oleh masyarakat sekitar. Ukuran buah nanas yang besar dan memiliki rasa manis menjadikan nanas di Kecamatan Pegasing sering dijadikan buah tangan dari Aceh Tengah. Di sepanjang jalan Kecamatan Pegasing, ada banyak penjaja buah nanas yang masih segar. Banyak pembeli yang sengaja membelinya untuk oleh-oleh. Kebun buah nanas terletak tidak jauh dari jalan raya Pegasing - Takengon. Wisatawan bisa berkunjung ke lokasi perkebunan dan memetik serta memakan langsung di kebunnya.

Potensi daya tarik Wisata Sejarah dan Budaya

1. Umah Pitu Ruang

Gambar 4.9



Objek Wisata Umah Pitu Ruang merupakan Rumah Adat Suku Gayo memiliki arsitektur khas dengan berbagai ukiran dan pahatan bermotif kerawang Gayo sarat dengan makna dan simbol – simbol adat istiadat Suku Gayo. Rumah adat ini memiliki tujuh ruangan, setiap ruangan dihuni oleh satu Kepala Keluarga. Di kabupaten Aceh Tengah terdapat dua unit Umah Pitu Ruang yang merupakan reflika bentuk asli Umah Pitu Ruang, satu berada di Kampung Kemili Kecamatan Bebesen berjarak 1,5 km dari Kota Takengon dan satu lagi berada di Desa Linge Kecamatan Linge berjarak \pm 103 dengan jarak tempuh 2 jam perjalanan dengan kendaraan.

2. Loyang/Ceruk Mendale

Gambar 4.10



Lokasi ini merupakan tempat ditemukannya sejumlah bukti kehidupan pra sejarah di Dataran Tinggi Gayo, khususnya lembah kota Takengen dengan danau Lut Tawar. Hingga penelitian yang ketiga kalinya dilakukan oleh arkeolog dari Balai Arkeologi Medan Sumatera Utara telah ditemukan sejumlah bukti ilmiah kehidupan masa lalu di lokasi ini diantaranya berupa alat batu (batu petir), gerabah, cangkang molusca, sisa pembakaran dan kerangka manusia yang kesemuanya diperkirakan dipakai tidak kurang dari 3500 tahun lalu. Hingga menjelang awal tahun 2011, penelitian masih terus dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti lainnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah merencanakan akan menjadikan lokasi ini sebagai salah satu Cagar Budaya andalan di dataran tinggi Gayo. Menuju tempat ini sangat mudah karena posisinya yang sangat strategis yakni di pintu gerbang jalan lingkar danau Lut Tawar dari sisi bagian utara persisnya di Kampung Mendale Kecamatan Kebayakan dengan jarak tempuh sekitar 2 km dari pusat kota Takengen.

3. Gua Puteri Pukes

Gambar 4.11



Gua Loyang Peteri Pukes atau Gua Loyang Sekam merupakan gua terbesar ke dua setelah Loyang Gua Loyang Koro. Gua yang terletak di sebelah Utara Danau ini berjarak kira – kira 3 km dari pusat Kota Takengon dapat ditempuh 10 menit dengan menggunakan kendaraan. Masyarakat Dataran Tinggi Gayo memiliki kesan tersendiri terhadap Gua Loyang Sekam, nama lain untuk Loyang Pukes, menurut kisah di lokasi gua ini sepasang pengantin berubah wujud menjadi patung batu karena melanggar sumpah dan janji dan betentangan dengan adat Gayo. Dinding gua terdapat stalagmit dan stalagmit yang terbentuk dari proses sedimentasi air yang meresap dari bebukitan karang yang ada di sekitar gua. Selain menikmati Objek Wisata Loyang Sekam, pengunjung dapat menikmati pemandangan alam sekitar gua yang indah dengan latar belakang Danau Laut Tawar yang permai. Di Objek Wisata ini terdapat fasilitas seperti kios – kios menjual souvenir dan makanan dan minuman, Shelter, dan toilet dan areal parkir yang cukup luas.

4. Gua Loyang Datu

Gambar 4.12



Objek Wisata Gua loyang Datu berlokasi di Desa Isaq Kecamatan Linge berjarak kira kira 29 Km dari Kota Takengon. Gua yang lokasinya persis di pinggir sungai merupakan tempat tinggal Merah Mege, karena ditinggal oleh saudara saudaranya ketika sedang berburu, Merah Mege adalah salah seorang anak Reje Linge. Selain dapat menikmati lokasi Loyang Gua Datu yang penuh dengan suasana purba dan magis kita dapat menikmati keindahan pemandangan sekitar yang masih banyak di tumbuhi oleh pepohonan pinus. Sekembalinya dari Gua Loyang Datu, wisatawan dapat membeli tape dan gula aren sebagai buah tangan khas Kampung Isaq.

5. Atu Belah

Gambar 4.13



Objek Wisata Atu Belah terletak di sebelah Timur kira – kira 17 Km dari Isaq dan 23 Km dari kota Takengon. Atu Belah atau batu yang terbelah, merupakan salah satu Objek Wisata yang banyak di kunjungi oleh para wisatawan. Masyarakat

Dataran Tinggi Gayo masih menuturkan kisah Atu Belah yang penuh dengan pesan dan ajaran Moral ini. Menurut kisah, Karena tidak sanggup menahan penderitaan akibat kejahatan sang suami yang memotong payudaranya untuk lauk makan. Demi untuk menghilangkan rasa malu dan melepaskan penderitaannya ia rela meninggalkan kedua anaknya yang masih kecil dan merelakan tubuhnya ditelan Atu Belah.

6. Gua Loyang Koro

Gambar 4.14



Sebuah gua yang berlokasi tepat di tepian Danau Laut Tawar. Memiliki stalaktit dan stalagmit yang masih mengalami proses pertumbuhan, namun beberapa titik sudah terlihat tidak mengalami proses pertumbuhan. Proses pertumbuhan tersebut bisa dilihat dari kemunculan air pada masing-masing ujung stalaktit dan stalagmit. Untuk bisa masuk ke dalam gua, diperlukan penerangan tambahan. Kedalaman gua masih belum bisa dipastikan, wisatawan biasanya hanya masuk pada jarak 20 meter ke dalam dari mulut gua. Kondisi lantai gua yang masih berupa tanah seringkali membuat pengunjung mengalami kesulitan untuk bergerak di dalam gua. Beberapa area gua memaksa pengunjung untuk berjalan dengan cara jongkok, beberapa area juga menyajikan langit-langit yang tinggi. Selain kondisi fisiknya yang menarik, juga ada cerita rakyat yang menyebutkan bahwa Gua Loyang Koro pernah digunakan sebagai jalur rahasia untuk membawa kerbau ke Isak, yang merupakan daerah perbatasan Aceh Tengah dengan Gayo Lues. Gua

Loyang Koro jaraknya kira – kira 3 Km dari Kota Takengon, Gua yang lokasinya persis di pinggir sebelah selatan Danau Lut Tawar ini memiliki kontur yang spesifik, di dalam gua yang konon menurut kisah pada jaman dahulu dapat menembus sampai ke Kecamatan Linge ini, terdapat stalagmite dan stalagtit dengan aneka bentuk yang menawan hati, selain stalagmite dan stalagtit di dalam gua ini kita dapat melihat kelelawar dengan ukuran tubuhnya cukup besar bersarang di dinding bagian atas gua. Di lokasi sekitar Gua yang cukup rindang ini pengunjung dapat menikmati berbagai fasilitas seperti, café, gazebo, boat wisata, kolam terapung dan beberapa lokasi pemancingan yang cukup nyaman.

7. Masjid Tue Kebayakan

Gambar 4.15



Bangunan Masjid Tue Kebayakan terletak sekitar 1,5 Km dari pusat Kota Takengon dibangun tahun 1920 oleh masyarakat Aceh Tengah dengan Imam Masjid saat itu Tgk. Imem Aman Baram. Dalam proses pembangunannya sangat erat kaitan dengan sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia melawan penjajah Belanda. Salam upaya mengambil hati rakyat Gayo, Belanda menyumbangkan 100 Golden untuk dana pembangunan Masjid ini.

8. Rumah Adat Batulantara

Gambar 4.16



Baluntara adalah seorang Raja yang wilayah kekuasaannya di sebelah Selatan Danau Lut Tawar, konon wilayah kekuasaannya hingga ke sebagian Kerajaan Linge. Rumah adat Balontara yang berlokasi di sebelah Timur desa Toweren sekitar 7 km dari Kota Takengon ini masih terawat dengan baik disetiap tiang dan dindingnya terdapat pahatan ukiran khas Kerawang Gayo yang sarat dengan simbol – simbol yang penuh dengan makna. Rumah adat yang dibangun bercirikan khas Rumah Adat Gayo ini sering dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun manca Negara. Disamping menikmati keindahan Rumah adat Baluntara, kita dapat melihat masyarakat kampung Toweren yang masih menjalankan adat dan tradisi suku Gayo.

Potensi Daya Tarik Wisata Buatan

Terdapat beberapa daya tarik wisata buatan yang tersebar di Kabupaten Aceh Tengah, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Water Park Mimi Nawa, Pademun

Atraksi wisata air yang berada di tepian Danau Laut Tawar. Dikemas dengan konsep taman bermain air dengan beragam wahana untuk wisatawan. Lokasinya sangat strategis, sehingga wisatawan selain bisa bermain air juga bisa menikmati panorama Danau Laut Tawar. Waterpark Pademun dibagi menjadi 4 kolam dengan kedalaman dan wahananya masing-masing. Selain wahana air, terdapat juga resto sederhana yang berada di atas air. Sehingga suasana tenang dan asri akan terasa ketika bersantap menu makan di resto tersebut

2. Dermaga Wisata Lukup Penalan

Gambar 4.17



Dermaga yang berada di pinggir Kota Takengon, dipersiapkan sebagai pintu utama untuk wisatawan berkeliling Danau Laut Tawar. Sehingga wisatawan yang berkunjung ke Danau Laut Tawar mendapatkan pilihan lain untuk berkeliling danau. Berkeliling Danau Laut Tawar dengan menggunakan perahu wisata bisa menjadi salah satu atraksi yang akan mengesankan untuk wisatawan yang berkunjung ke Takengon. Kondisi dermaga masih terlihat sepi tanpa terlihat perahu wisata yang lalu-lalang di danau.

3. Arung Jeram Lukup Badak

Gambar 4.18



Potensi Daya Tarik Wisata Kuliner

1. Kawasan Kuliner Teluk One-one

Gambar 4.19



Sentra kuliner khas Aceh Tengah yang berada di tepian Danau Laut Tawar. Menyajikan beragam menu kuliner khas Gayo yang dimasak dengan bumbu kaya akan rempah. Semua bahan baku yang digunakan di kawasan One-one merupakan hasil bumi dari Takengon. Warung-warung tersebar memanjang di tepian jalan, sebagian besar menyajikan menu kuliner Asam Jing sebagai menu utama di lokasi tersebut.

2. Kopi Gayo

Gambar 4.20



Kopi adalah komoditi andalan Tanah Gayo, tentu suguhan kopi khas Gayo dari jenis Arabika dan Robusta sangat mudah ditemui di Takengon dan sekitarnya. Setiap warung dan cafe dipastikan menyuguhkan kopi Gayo dan paling spesial dapat

ditemui di Batas Kota Cafe Paya Tumpi yang menyuguhkan espresso kopi yang disuguhkan oleh barista terlatih. Bila anda ingin menikmati kopi sekaligus sambil menikmati atau memainkan musik silahkan berkunjung ke Central Coffee di Jalan Lebe Kader Takengen. Jika ingin pilihan lain, menikmati kopi dengan suguhan rujak dan renyah dan manisnya nenas, silahkan menuju ke Pegasing dengan jarak tempuh sekitar 6 km dari kota Takengen.²⁰² Kopi dengan jenis arabika ini telah menerima sertifikat IG (Indikasi Geografis) dari Menteri Hukum dan HAM Indonesia. Kopi Gayo memiliki rasa dan kekentalan yang kuat, sehingga mampu meninggalkan rasa yang nikmat bagi para pecinta kopi jenis arabika. Kopi Gayo sering dijadikan buah tangan oleh para pengunjung yang sedang berwisata ke tanah gayo.

3. Cendra Mata

Gambar 4.21



Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah dikenal dengan daya seni dan kreatifitas yang tinggi, hal ini dapat dilihat dari beberapa kerajinan tangan seperti

²⁰² Mahadin, S.Sos dan Khalisuddin, 2011, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tengah, Diterbitkan Oleh Media Online Lintas Gayo

tikar, kendi, gerabah, aneka bentuk produk industri rumah tangga bermotif kerawang Gayo seperti baju, tas, dompet, topi, kopiah dan lain-lain. Benda-benda ini dengan mudah didapatkan di toko souvenir yang ada di seputaran kota Takengon dengan harga yang terjangkau.

C. Temuan Penelitian

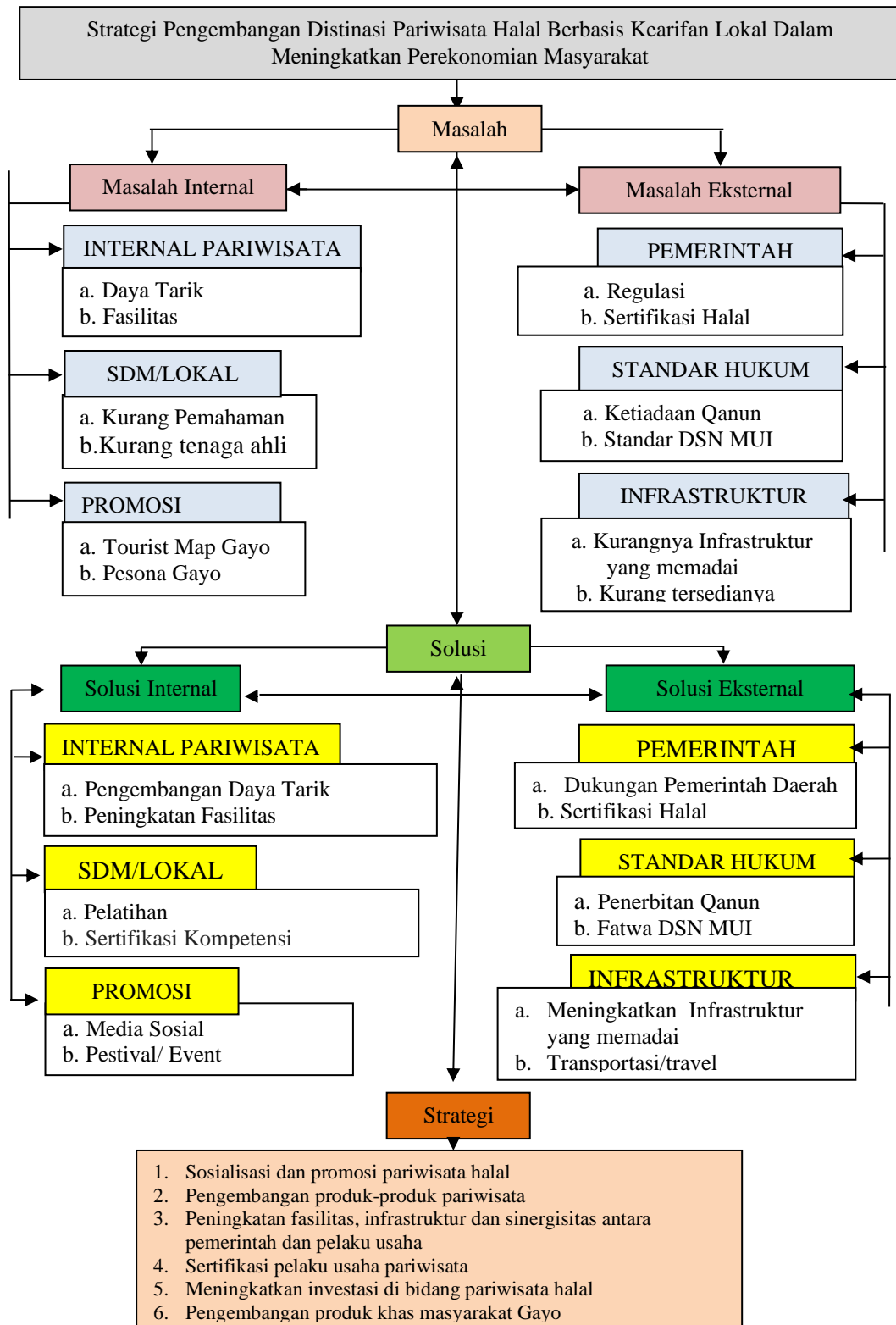
Setelah melakukan *indepth interview* (wawancara secara mendalam) dengan informan penelitian dan kajian kepustakaan melalui penelusuran literatur-literatur yang berhubungan dengan pembahasan penelitian, maka dibuat dekomposisi.²⁰³ Masalah yang dikonstruksikan dalam sebuah model agar dapat memberikan kemudahan bagi peneliti ataupun responden dalam memahami masalah strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah). Setelah dilakukan dekomposisi masalah, maka diperoleh kerangka umum. analisis masalah, solusi dan strategi memiliki 6 (enam) buah klaster, yaitu:

1. Aspek memiliki dua elemen, yaitu masalah internal dan masalah eksternal.
2. Masalah internal memiliki tiga elemen, yaitu masalah internal pariwisata, masalah Sumber Daya Manusia/lokal, dan masalah promosi.
3. Masalah eksternal memiliki tiga elemen, yaitu masalah pemerintah, masalah standar hukum, dan masalah infrastruktur.
4. Solusi internal memiliki tiga elemen, yaitu solusi internal pariwisata, solusi sumber daya manusia/lokal, dan solusi promosi.
5. Solusi eksternal memiliki tiga elemen, yaitu solusi pemerintah, solusi standar hukum, dan solusi infrastruktur.
6. Strategi memiliki enam elemen: yaitu sosialisasi dan promosi pariwisata halal, pengembangan produk-produk pariwisata halal, peningkatan fasilitas, infrastruktur, dan sinergisitas antara pemerintah dan pelaku usaha, sertifikasi

²⁰³ Dekomposisi merupakan perubahan menjadi bentuk yang lebih sederhana, dekomposisi masalah berarti mengguraikan masalah agar menjadi lebih sederhana sehingga mudah untuk dipahami

pelaku usaha pariwisata, meningkatkan investasi di bidang pariwisata halal, dan, pengembangan produk khas masyarakat Gayo.

Untuk lebih lengkapnya, kerangka kerja identifikasi masalah, solusi, dan strategi dalam pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah) dapat dilihat pada gambar 4.22 berikut ini :



Gambar 4.22 Kerangka Kerja Identifikasi Masalah, Solusi, Dan Strategi Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Berbasis Kearifan Lokal Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Aceh Tengah)

Berdasarkan pada gambar 4.22 di atas dapat dilihat bahwa untuk mengetahui strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah), maka perlu diketahui terlebih dahulu permasalahan yang berkaitan dengan destinasi pariwisata halal yang berbasis kearifan lokal dalam peningkatan perekonomian masyarakat dan solusi-solusi yang ditawarkan untuk mengatasinya. Setelah diinventarisir, ternyata permasalahan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu masalah internal dan eksternal. Masalah internal terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu internal pariwisata, sumber daya manusia/lokal, dan promosi. Adapun masalah eksternal terdiri dari (3) komponen yaitu pemerintah, standar hukum dan infrastruktur. Permasalahan internal pariwisata terbagi kepada 2 (dua) faktor, yaitu:

1. Daya tarik, Daya tarik alam dan budaya selalu menjadi alasan utama wisatawan melakukan kunjungan ke Aceh Tengah, karena Aceh Tengah salah satu daerah yang dikelilingi dan diapit oleh pegunungan. Bila dikembangkan akan dapat berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Selain itu Aceh Tengah memiliki beraneka ragam dan memiliki keunikan yang berbeda satu sama lain. Tidak dapat dipungkiri, daya tarik alam dan budaya memang menjadi daya tarik utama wisatawan yang datang ke Aceh Tengah.
2. Fasilitas, dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata halal maka harus ada sarana dan prasarana pendukung seperti tersedianya, hotel, café, spa, tempat makan/kuliner, fasilitas ibadah, toilet, dan lainnya) yang bisa memenuhi kebutuhan dan kenyamanan wisatawan muslim selama berlibur di sebuah destinasi wisata.

Berdasarkan hasil wawancara dan kajian literatur, sumber daya manusia/lokal yang menjadi masalah dalam pengembangan destinasi pariwisata halal masih kurangnya pemahaman tentang pariwisata halal dan kurangnya tenaga ahli tentang pariwisata. Dalam pengembangan destinasi pariwisata halal sumber daya manusia menjadi kunci dalam pengembangan pariwisata halal karena untuk mewujudkan industri pariwisata sumber daya manusia sangatlah penting guna

untuk mewujudkannya seperti menguasai Bahasa asing bagi wisatawan mancanegara dan kemampuan dalam manajerial mengelola destinasi pariwisata, dan kurangnya pemahaman terkait teknologi informasi.

Masalah internal juga bersumber dari sisi promosi dalam dunia pariwisata. Promosi merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Promosi bertujuan untuk mendatangkan wisatawan yang lebih banyak berkunjung. Dalam promosi yang menjadi kendala dalam mempromosikan wisata yang ada di Aceh Tengah yaitu melalui tourist map gayo dan pesona Gayo memfasilitasi dalam bentuk komunikasi antara orang yang menawarkan produk/jasanya kepada masyarakat. Karena tolak ukur sebuah keberhasilan dalam menarik minat wisatawan dilihat dari tingkat penggunaannya dan kunjungannya wisatawan serta memanfaatkan informasi oleh wisatawan. Promosi daerah merupakan suatu hal yang membutuhkan beberapa perencanaan khusus karena pada dasarnya promosi daerah sangat berbeda dengan jenis promosi produk/jasa yang dipromosikan dalam konteks Aceh Tengah promosi sangat diperlukan karena daerah Aceh Tengah banyak memiliki tempat dan tujuan untuk berpariwisata. Jika promosi daerah Aceh Tengah sudah dirancang dengan baik dan benar akan memberika peluang kontribusi pendapatan bagi masyarakat dan daerah tujuan wisata.

Selain masalah internal, untuk mengetahui strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah). Maka perlu juga diinventarisir masalah eksternal. Setelah dilakukan pengumpulan data, maka masalah eksternal yang dapat dijelaskan dalam ada tiga hal, yaitu terkait dengan pemerintah, standar hukum dan infrastruktur. Dari sisi pemerintah, masalah yang terjadi adalah regulasi untuk mengembangkan destinasi pariwisata halal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan kebersihan. Begitu juga dengan budaya dan kearifan lokal yang beraneka ragam dan memiliki keunikan yang berbeda satu sama lain. Selain itu permasalahanya adalah belum adanya sertifikasi halal, hal ini perlu dilakukan guna untuk mendukung perkembangnya pariwisata halal yang ada di Aceh tengah tidak

hanya terbatas pada Kuliner semata akan tetapi pada amenitas seperti perhotelan, penginapan yang mempunyai sertifikasi halal dimana tersedianya kebutuhan umat muslim seperti tersedianya musholla yang bersih dan nyaman serta terjaganya kebersihan.

Dari sisi standar hukum, dalam pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, maka yang menjadi permasalahannya adalah belum adanya qanun yang dibuat untuk mengembangkan destinasi pariwisata halal, pada hal qanun sangat mendukung dalam mewujudkan pariwisata halal. selain qanun belum adanya standar yang digunakan dalam pengembangan pariwisata halal seperti standar DSN MUI yang menjadi pegangan dalam mewujudkan pariwisata halal. masalah infrastruktur masih kurangnya infrastruktur yang tersedia dalam pengembangan pariwisata halal di Aceh Tengah dan masih kurangnya transportasi yang tersedia terlebih transportasi darat dan udara.

Dari hasil inventarisasi penelusuran literatur dan wawancara secara mendalam untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, maka solusi yang ditawarkan dapat dibagi menjadi dua yaitu solusi internal dan solusi eksternal. Solusi internal terdiri dari tiga yaitu solusi bagi internal pariwisata, solusi bagi sumber daya manusia, dan solusi bagi promosi. Demikian juga dengan solusi eksternal terbagi kepada tiga bagian yaitu solusi pemerintah, solusi bagi standar hukum, dan solusi bagi intrastruktur.

Solusi internal pariwisata terdiri dari dua komponen, yaitu pengembangan daya tarik wisata, terdiri dari wisata alam, wisata budaya dan buatan, dan tersedianya fasilitas ibadah yang layak dan bersih, tersedianya makanan dan minuman yang halal, para pengelola objek wisata harus berani berinovasi dalam menata objek wisata guna untuk menarik para pengunjung dan para pengunjung tidak cepat merasa bosan dan diperlukan tambahan daya tarik untuk anak-anak tempat bermain karena bagi pengunjung objek wisata pasti membawa keluarga

maka dibutuhkan tempat bermain untuk anak-anak. atraksi pertunjukkan seni dan atraksi budaya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, harus terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan. Solusi bagi sumber daya manusia (SDM) ada dua yaitu memberikan pelatihan untuk meningkatkan keahlian sumber daya insani, dan mempunyai sertifikasi kompetensi seperti melakukan workshop untuk menambah wawasan mereka tentang pariwisata halal. maka harus adanya sertifikasi kompetensi standarisasi bagi sumber daya manusia (SDM) untuk memenuhi criteria dalam pengembangan SDM untuk industri wisata halal seperti bagi pemandu wisata memahami ilmu pariwisata halal seperti maqasid syariah, dari sisi promosi perlu adanya media sosial untuk memasarkan dan memperkenalkan kepada hal layak tentang destinasi pariwisata halal dan juga sebagai media promosi. Selain media sosial sebagai alat promosi pariwisata maka perlu juga dilakukan dengan cara melakukan festival yang berbasis kearifan lokal masyarakat Gayo diantaranya adalah pacuan kuda yang sudah menjadi acara tahunan bagi masyarakat Gayo khususnya Aceh tengah, selain itu dilakukannya kesenian Gayo yaitu Didong (didong merupakan salah satu kesenian masyarakat Gayo dalam menarik wisatawan berkunjung).

Hasil komposisi masalah untuk solusi eksternal pemerintah ada 2 yaitu harus adanya dukungan pemerintah daerah dan sertifikasi halal, pariwisata tidak akan berhasil apabila diserahkan sepenuhnya kepada kemandirian masyarakat atau membiarkan pihak swasta yang bekerja. Akan tetapi adanya dukungan pemerintah daerah kepada industri pariwisata halal akan lebih mudah terwujud. dua sertifikasi halal, untuk mewujudkan adanya pariwisata halal tidak sepenuhnya tanggung jawab pemerintah daerah, justru peran para pihak swasta dan pelaku usaha menjadi aktor bahkan menjadi *champion* penting dalam menentukan keberhasilan pariwisata halal untuk menuju kesana maka sangat dibutuhkan sertifikasi halal bagi pelaku usaha sektor pariwisata. para pelaku usaha perhotelan tidak memiliki *brand* sebagai hotel syariah dengan segala ketentuannya.

Hasil komposisi masalah untuk solusi untuk standar hukum ada 2 yaitu penerbitan qanun wisata halal, tanda dasar hukum yang jelas dan tegas, maka sebuah gagasan akan sulit untuk diimplementasikan dengan maksimal. Padahal keberadaan qanun menjadi penting bagi pelaku usaha di sektor wisata sehingga mereka dapat mengacu kepada aturan yang jelas tentang konsep besar dan standarisasi wisata halal di Aceh Tengah seperti keberhasilan NTB dalam mewujudkan pariwisata halal karena adanya perda (peraturan daerah) tentang pariwisata halal. selain Qanun dalam pengembangan pariwisata halal maka harus berlandaskan kepada aturan yang telah dibuat oleh SDN MUI guna untuk memudahkan penerapannya berdasarkan prinsip Syariah.

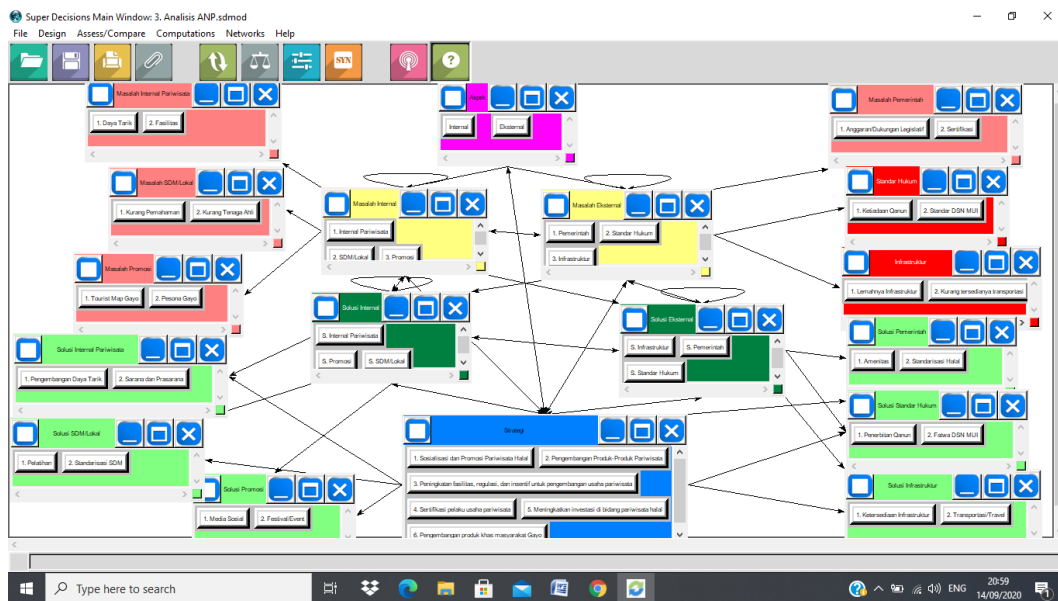
Solusi bagi infrastruktur, ada beberapa hal yang ditawarkan, yaitu meningkatkan infrastruktur yang memadai seperti jalan menuju objek wisata, tersedianya tempat parkir yang nyaman bagi para pengunjung, ini menjadi sangat penting dalam mendukung keberhasilan industri pariwisata halal, infrastruktur tidak hanya tersedianya fasilitas utama tetapi juga pasilitas pendukung seperti transportasi/travel yang ramah muslim dengan sentuhan arsitektur yang khas dan sarat dengan nilai-nilai Islam sebagai bagian yang integral dari konsep wisata halal. Bagaimanapun indahnya/bagusnya destinasi pariwisata halal yang ditawarkan kalau tidak didukung dengan transportasi/travel yang memadai akan menghambat berkembangnya sebuah destinasi pariwisata halal.

Setelah membahas masalah dan solusi yang berkaitan dengan pengembangan destinasi pariwisata halal yang berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, maka ada beberapa strategi yang ditawarkan, yaitu: Sosialisasi dan promosi pariwisata halal, Pengembangan produk-produk pariwisata, Peningkatan fasilitas, infrastruktur, dan sinergisitas antara pemerintah dan pelaku usaha, sertifikasi pelaku usaha pariwisata, meningkatkan investasi di bidang pariwisata halal, Pengembangan produk khas masyarakat Gayo.

Setelah Kerangka kerja identifikasi masalah, solusi, dan strategi dalam pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, maka kerangka kerja tersebut akan diolah

dengan metode model *Analytic Network Process* (ANP) dengan menggunakan *Software Super Decisions* tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 4.23
Kerang Model ANP Masalah, Solusi dan Strategi Pengembangan
Destinasi Pariwisata Halal Berbasis Kearifan Lokal Dalam Meningkatkan
Perekonomian Masyarakat



D. Analisis Hasil Sintesis Penelitian

Mengacu pada metodologi yang digunakan, yaitu *Analytic Network Process* (ANP) untuk melihat skala prioritas menurut kalangan pakar dan praktisi dan pelaku usaha pariwisata halal yang menjadi responden pada penelitian ini, maka hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3.
Hasil Sintesis Prioritas Responden tentang Strategi Pengembangan Destinasi
Pariwisata Halal Berbasis Kearifan Lokal Dalam Meningkatkan
Perekonomian Masyarakat (Aceh Tengah)

A. Masalah		Res 1	Res 2	Res 3	Res 4
1	Masalah Internal	0,37837	0,35709	0,70603	0,37067
2	Masalah Eksternal	0,62163	0,64291	0,29397	0,62933
A.1. Masalah Internal		Res 1	Res 2	Res 3	Res 4
1	M. Internal Pariwisata	0,44392	0,31607	0,40062	0,29092
2	M. SDM/Lokal	0,15616	0,12845	0,22556	0,19994

3	M. Promosi	0,39992	0,55548	0,37382	0,50915
A.1.1. Masalah Internal Pariwisata		Res 1	Res 2	Res 3	Res 4
1	Daya Tarik	0,38539	0,26071	0,33333	0,29088
2	Fasilitas	0,61461	0,73929	0,66667	0,70912
A.1.2. Masalah SDM/Lokal		Res 1	Res 2	Res 3	Res 4
1	Kurangnya Pemahaman	0,63151	0,66665	0,66667	0,70913
2	Kurang Tenaga Ahli	0,36849	0,33335	0,33333	0,29087
A.1.3 Masalah Promosi		Res 1	Res 2	Res 3	Res 4
1	Tourist Map Gayo	0,29817	0,20642	0,26880	0,61818
2	Pesona Gayo	0,70183	0,79358	0,73120	0,38182
A.2. Masalah Eksternal		Res 1	Res 2	Res 3	Res 4
1	M. Pemerintah	0,24590	0,28937	0,29018	0,29696
2	M. Standar Hukum	0,23318	0,17742	0,17592	0,16343
3	M. Infrastruktur	0,52092	0,53322	0,53389	0,53961
A.2.1. Masalah Pemerintah		Res 1	Res 2	Res 3	Res 4
1	Regulasi	0,54097	0,71110	0,79120	0,79184
2	Sertifikasi	0,45903	0,28890	0,20880	0,20816
A.2.2 Masalah Standar Hukum		Res 1	Res 2	Res 3	Res 4
1	Ketiadaan Qanun	0,62779	0,61844	0,73536	0,63944
2	Standar DSN MUI	0,37221	0,38156	0,26464	0,36056
A.2.3 Masalah Infrastruktur		Res 1	Res 2	Res 3	Res 4
1	Kurangnya Infrastruktur yang memadai	0,54098	0,63710	0,33335	0,66667
2	Kurang tersedianya Transportasi	0,45902	0,36290	0,66665	0,33333
B. Solusi		Res 1	Res 2	Res 3	Res 4
1	Solusi Internal	0,37837	0,35600	0,63569	0,33333
2	Solusi Eksternal	0,62163	0,64400	0,36431	0,66667
B.1. Solusi Internal		Res 1	Res 2	Res 3	Res 4
1	Solusi Internal Pariwisata	0,52565	0,30262	0,47322	0,53962
2	Solusi SDM/Lokal	0,15470	0,15308	0,23660	0,16342
3	Solusi Promosi	0,31965	0,54430	0,29017	0,29696
B.1.1. Solusi Internal Pariwisata		Res 1	Res 2	Res 3	Res 4
1	Pengembangan Daya Tarik	0,35912	0,44956	0,30916	0,36057
2	Peningkatan Fasilitas	0,64088	0,55044	0,69084	0,63943
B.1.2. Solusi SDM/Lokal		Res 1	Res 2	Res 3	Res 4
1	Pelatihan	0,66669	0,64110	0,33333	0,71161
2	Standarisasi SDM	0,33331	0,35890	0,66667	0,28839
B.1.3. Solusi Promosi		Res 1	Res 2	Res 3	Res 4

1	Media Sosial	0,64088	0,69188	0,75000	0,63943
2	Festival/Event	0,35912	0,30812	0,25000	0,36057
B.2. Solusi Eksternal		Res 1	Res 2	Res 3	Res 4
1	Solusi Pemerintah	0,22053	0,19729	0,16343	0,24127
2	Solusi Standar Hukum	0,26598	0,27288	0,29695	0,23027
3	Solusi Infrastruktur	0,51349	0,52983	0,53961	0,52846
B.2.1. Solusi Pemerintah		Res 1	Res 2	Res 3	Res 4
1	Adanya Regulasi	0,55511	0,66669	0,75000	0,73081
2	Standarisasi Halal	0,44489	0,33331	0,25000	0,26919
B.2.2. Solusi Standar Hukum		Res 1	Res 2	Res 3	Res 4
1	Penerbitan Qanun	0,66667	0,73356	0,63943	0,73080
2	Fatwa DSN MUI	0,33333	0,26644	0,36057	0,26920
B.2.3. Solusi Infrastruktur		Res 1	Res 2	Res 3	Res 4
1	Meningkatkan Infrastruktur	0,62234	0,73356	0,66667	0,33334
2	Transportasi/Travel	0,37766	0,26644	0,33333	0,66666
C. Strategi		Res 1	Res 2	Res 3	Res 4
1	Sosialisasi dan Promosi	0,19531	0,35872	0,18586	0,21838
2	Pengembangan Produk Pariwisata	0,12332	0,13605	0,15332	0,07819
3	Peningkatan Fasilitas, Infrastruktur, dan Sinergisitas antara Pemerintah dan Pelaku Usaha	0,31761	0,22257	0,28651	0,32186
4	Sertifikasi Pelaku Usaha	0,06801	0,08684	0,11332	0,09268
5	Peningkatan Investasi Bidang Pariwisata Halal	0,14685	0,05573	0,07513	0,14578
6	Pengembangan Produk Khas Masyarakat Gayo	0,14889	0,14009	0,18586	0,14311

Lanjutan.....

A. Masalah		Res 5	Res 6	Res 7
1	Masalah Internal	0,30970	0,53921	0,28774
2	Masalah Eksternal	0,69030	0,46079	0,71226
A.1. Masalah Internal		Res 5	Res 6	Res 7
1	M. Internal Pariwisata	0,52395	0,31465	0,28842
2	M. SDM/Lokal	0,25339	0,13103	0,53239
3	M. Promosi	0,22267	0,55431	0,17919
A.1.1. Masalah Internal Pariwisata		Res 5	Res 6	Res 7

1	Daya Tarik	0,37045	0,26091	0,31838
2	Fasilitas	0,62955	0,73909	0,68162
A.1.2. Masalah SDM/Lokal		Res 5	Res 6	Res 7
1	Kurangnya Pemahaman	0,71033	0,64483	0,73506
2	Kurang Tenaga Ahli	0,28967	0,35517	0,26494
A.1.3 Masalah Promosi		Res 5	Res 6	Res 7
1	Tourist Map Gayo	0,28967	0,33333	0,36322
2	Pesona Gayo	0,71033	0,66667	0,63678
A.2. Masalah Eksternal		Res 5	Res 6	Res 7
1	M. Pemerintah	0,31191	0,31971	0,28859
2	M. Standar Hukum	0,16872	0,17150	0,17887
3	M. Infrastruktur	0,51937	0,50879	0,53254
A.2.1. Masalah Pemerintah		Res 5	Res 6	Res 7
1	Regulasi	0,72401	0,70908	0,66667
2	Sertifikasi	0,27599	0,29092	0,33333
A.2.2 Masalah Standar Hukum		Res 5	Res 6	Res 7
1	Ketiadaan Qanun	0,66668	0,70763	0,71105
2	Standar DSN MUI	0,33332	0,29237	0,28895
A.2.3 Masalah Infrastruktur		Res 5	Res 6	Res 7
1	Kurangnya Infrastruktur yang memadai	0,33333	0,26428	0,54066
2	Kurang tersedianya Transportasi	0,66667	0,73572	0,45934
B. Solusi		Res 5	Res 6	Res 7
1	Solusi Internal	0,30970	0,58256	0,33333
2	Solusi Eksternal	0,69030	0,41744	0,66667
B.1. Solusi Internal		Res 5	Res 6	Res 7
1	Solusi Internal Pariwisata	0,55173	0,40951	0,53961
2	Solusi SDM/Lokal	0,13669	0,12196	0,16343
3	Solusi Promosi	0,31158	0,46853	0,29696
B.1.1. Solusi Internal Pariwisata		Res 5	Res 6	Res 7
1	Pengembangan Daya Tarik	0,33333	0,64634	0,38282
2	Peningkatan Fasilitas	0,66667	0,35366	0,61718
B.1.2. Solusi SDM/Lokal		Res 5	Res 6	Res 7
1	Pelatihan	0,66667	0,73985	0,63942
2	Standarisasi SDM	0,33333	0,26015	0,36058
B.1.3. Solusi Promosi		Res 5	Res 6	Res 7
1	Media Sosial	0,64387	0,35366	0,36057
2	Festival/Event	0,35613	0,64634	0,63943

B.2. Solusi Eksternal		Res 5	Res 6	Res 7
1	Solusi Pemerintah	0,27415	0,36102	0,23099
2	Solusi Standar Hukum	0,20149	0,18438	0,20406
3	Solusi Infrastruktur	0,52436	0,45460	0,56495
B.2.1. Solusi Pemerintah		Res 5	Res 6	Res 7
1	Adanya Regulasi	0,71035	0,69675	0,36735
2	Standarisasi Halal	0,28965	0,30325	0,63265
B.2.2. Solusi Standar Hukum		Res 5	Res 6	Res 7
1	Penerbitan Qanun	0,71037	0,40909	0,36735
2	Fatwa DSN MUI	0,28963	0,59091	0,63265
B.2.3. Solusi Infrastruktur		Res 5	Res 6	Res 7
1	Meningkatkan Infrastruktur	0,33333	0,73464	0,43127
2	Transportasi/Travel	0,66667	0,26536	0,56873
C. Strategi		Res 5	Res 6	Res 7
1	Sosialisasi dan Promosi	0,16171	0,16491	0,19791
2	Pengembangan Produk Pariwisata	0,10170	0,09917	0,12844
3	Peningkatan Fasilitas, Infrastruktur, dan Sinergisitas antara Pemerintah dan Pelaku Usaha	0,28359	0,25205	0,32457
4	Sertifikasi Pelaku Usaha	0,11700	0,24930	0,07576
5	Peningkatan Investasi Bidang Pariwisata Halal	0,17100	0,06367	0,19441
6	Pengembangan Produk Khas Masyarakat Gayo	0,16500	0,17090	0,07891

Lanjutan.....

A. Masalah		Res 8	Res 9
1	Masalah Internal	0,27405	0,27320
2	Masalah Eksternal	0,72595	0,72680
A.1. Masalah Internal		Res 8	Res 9
1	M. Internal Pariwisata	0,58352	0,61467
2	M. SDM/Lokal	0,14959	0,16829
3	M. Promosi	0,26689	0,21704
A.1.1. Masalah Internal Pariwisata		Res 8	Res 9
1	Daya Tarik	0,28471	0,28211
2	Fasilitas	0,71529	0,71789
A.1.2. Masalah SDM/Lokal		Res 8	Res 9

1	Kurangnya Pemahaman	0,71533	0,66667
2	Kurang Tenaga Ahli	0,28467	0,33333
A.1.3 Masalah Promosi		Res 8	Res 9
1	Tourist Map Gayo	0,28470	0,28211
2	Pesona Gayo	0,71530	0,71789
A.2. Masalah Eksternal		Res 8	Res 9
1	M. Pemerintah	0,30729	0,29697
2	M. Standar Hukum	0,15639	0,16341
3	M. Infrastruktur	0,53632	0,53962
A.2.1. Masalah Pemerintah		Res 8	Res 9
1	Regulasi	0,73698	0,75001
2	Sertifikasi	0,26302	0,24999
A.2.2 Masalah Standar Hukum		Res 8	Res 9
1	Ketiadaan Qanun	0,71136	0,73639
2	Standar DSN MUI	0,28864	0,26361
A.2.3 Masalah Infrastruktur		Res 8	Res 9
1	Kurangnya Infrastruktur yang memadai	0,73698	0,75001
2	Kurang tersedianya Transportasi	0,26302	0,24999
B. Solusi		Res 8	Res 9
1	Solusi Internal	0,34332	0,34344
2	Solusi Eksternal	0,65668	0,65656
B.1. Solusi Internal		Res 8	Res 9
1	Solusi Internal Pariwisata	0,54969	0,62501
2	Solusi SDM/Lokal	0,14120	0,13651
3	Solusi Promosi	0,30911	0,23848
B.1.1. Solusi Internal Pariwisata		Res 8	Res 9
1	Pengembangan Daya Tarik	0,26176	0,26137
2	Peningkatan Fasilitas	0,73824	0,73863
B.1.2. Solusi SDM/Lokal		Res 8	Res 9
1	Pelatihan	0,64312	0,73860
2	Standarisasi SDM	0,35688	0,26140
B.1.3. Solusi Promosi		Res 8	Res 9
1	Media Sosial	0,71248	0,26137
2	Festival/Event	0,28752	0,73863
B.2. Solusi Eksternal		Res 8	Res 9
1	Solusi Pemerintah	0,27013	0,21417
2	Solusi Standar Hukum	0,17741	0,18848
3	Solusi Infrastruktur	0,55247	0,59735

B.2.1. Solusi Pemerintah		Res 8	Res 9
1	Adanya Regulasi	0,36290	0,36475
2	Standarisasi Halal	0,63710	0,63525
B.2.2. Solusi Standar Hukum		Res 8	Res 9
1	Penerbitan Qanun	0,36290	0,36475
2	Fatwa DSN MUI	0,63710	0,63525
B.2.3. Solusi Infrastruktur		Res 8	Res 9
1	Meningkatkan Infrastruktur	0,73522	0,73430
2	Transportasi/Travel	0,26478	0,26570
C. Strategi		Res 8	Res 9
1	Sosialisasi dan Promosi	0,19489	0,13555
2	Pengembangan Produk Pariwisata	0,14414	0,20049
3	Peningkatan Fasilitas, Infrastruktur, dan Sinergisitas antara Pemerintah dan Pelaku Usaha	0,31994	0,32506
4	Sertifikasi Pelaku Usaha	0,05993	0,06065
5	Peningkatan Investasi Bidang Pariwisata Halal	0,19643	0,19597
6	Pengembangan Produk Khas Masyarakat Gayo	0,08467	0,08228

Sumber : Hasil Olahan (ANP)

Responden memiliki pendapat yang berbeda tentang prioritas masalah, solusi, dan strategi dalam pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah). Karena itu, setelah diperoleh prioritas masing-masing responden, maka dicari nilai rata-rata untuk menentukan urutan prioritas seluruh responden. Nilai rata-rata prioritas seluruh responden dapat dilihat dari hasil *geometric mean* pada tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4
Hasil Geometric Mean Responden tentang Strategi Pengembangan Destinasi
pariwisata Halal Berbasis Kearifan Lokal Dalam Meningkatkan
Perekonomian Masyarakat (Aceh Tengah)

A. Masalah		<i>Geometric Mean</i>
1	Masalah Internal	0,41165
2	Masalah Eksternal	0,58835
A.1. Masalah Internal		
1	M. Internal Pariwisata	0,42265
2	M. SDM/Lokal	0,15730
3	M. Promosi	0,40401
A.1.1. Masalah Internal Pariwisata		
1	Daya Tarik	0,35954
2	Fasilitas	0,64046
A.1.2. Masalah SDM/Lokal		
1	Kurangnya Pemahaman	0,64044
2	Kurang Tenaga Ahli	0,35956
A.1.3 Masalah Promosi		
1	Tourist Map Gayo	0,33333
2	Pesona Gayo	0,66667
A.2. Masalah Eksternal		
1	M. Pemerintah	0,28565
2	M. Standar Hukum	0,18427
3	M. Infrastruktur	0,53008
A.2.1. Masalah Pemerintah		
1	Regulasi	0,71084
2	Sertifikasi	0,28916
A.2.2 Masalah Standar Hukum		
1	Ketiadaan Qanun	0,61906
2	Standar DSN MUI	0,38094
A.2.3 Masalah Infrastruktur		
1	Kurangnya Infrastruktur yang memadai	0,63596
2	Kurang tersedianya Transportasi	0,36404
B. Solusi		
1	Solusi Internal	0,41165
2	Solusi Eksternal	0,58835

B.1. Solusi Internal		
1	Solusi Internal Pariwisata	0,55416
2	Solusi SDM/Lokal	0,13138
3	Solusi Promosi	0,31446
B.1.1. Solusi Internal Pariwisata		
1	Pengembangan Daya Tarik	0,35524
2	Peningkatan Fasilitas	0,64476
B.1.2. Solusi SDM/Lokal		
1	Pelatihan	0,64476
2	Standarisasi SDM	0,35524
B.1.3. Solusi Promosi		
1	Media Sosial	0,64476
2	Festival/Event	0,35524
B.2. Solusi Eksternal		
1	Adanya Regulasi	0,21641
2	Standarisasi Halal	0,22685
3	Solusi Infrastruktur	0,55673
B.2.1. Solusi Pemerintah		
1	Adanya Regulasi	0,62885
2	Standarisasi Halal	0,37115
B.2.2. Solusi Standar Hukum		
1	Penerbitan Qanun	0,50032
2	Fatwa DSN MUI	0,49968
B.2.3. Solusi Infrastruktur		
1	Meningkatkan Infrastruktur	0,62886
2	Transportasi/Travel	0,37114
C. Strategi		
1	Sosialisasi dan Promosi	0,21163
2	Pengembangan Produk Pariwisata	0,12814
3	Peningkatan Fasilitas, Infrastruktur, dan Sinergisitas antara Pemerintah dan Pelaku Usaha	0,31850
4	Sertifikasi Pelaku Usaha	0,07828
5	Peningkatan Investasi Bidang Pariwisata Halal	0,13184
6	Pengembangan Produk Khas Masyarakat Gayo	0,13160

Sumber : Hasil Olahan (ANP)

Tabel. 4.5
Hasil Rater Agreement Responden tentang Strategi Pengembangan Destinasi
Pariwisata Halal Berbasis Kearifan Lokal Dalam Meningkatkan
Perekonomian Masyarakat (Aceh Tengah)

No	Cluster	Rater Agreement (W)
1	Masalah	0,30864
2	Masalah Internal	0,38272
3	Masalah Internal Pariwisata	1,00000
4	Masalah SDM/Lokal	1,00000
5	Masalah Promosi	0,60494
6	Masalah Eksternal	1,00000
7	Masalah Pemerintah	1,00000
8	Masalah Standar Hukum	1,00000
9	Masalah Infrastruktur	0,30864
10	Solusi	0,30864
11	Solusi Internal	0,77778
12	Solusi Internal Pariwisata	0,60494
13	Solusi SDM/Lokal	0,60494
14	Solusi Promosi	0,11111
15	Solusi Eksternal	0,77778
16	Solusi Pemerintah	0,11111
17	Solusi Standar Hukum	0,01235
18	Solusi Infrastruktur	0,11111
19	Strategi	0,38710

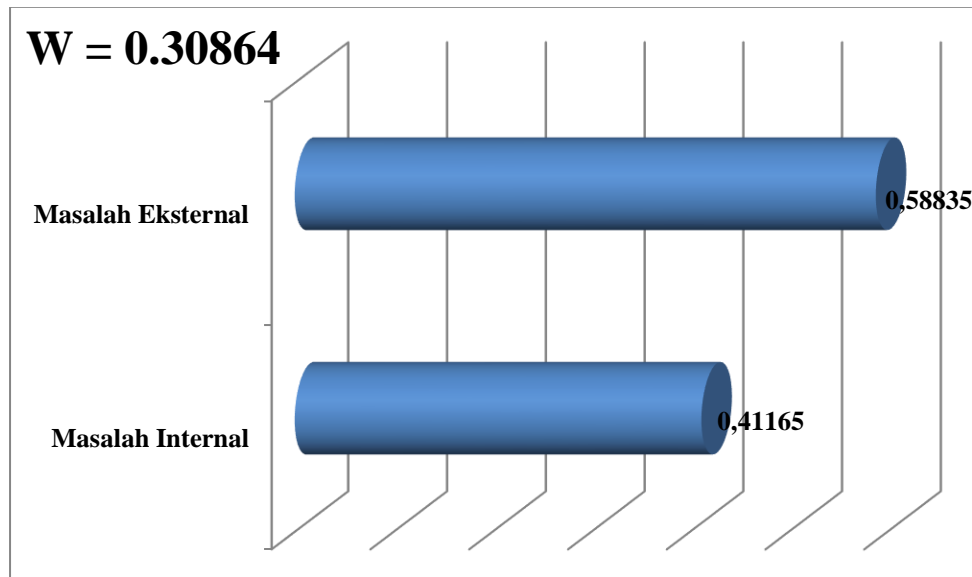
Sumber : Hasil Olahan (ANP)

1. Hasil Analisis Sintesis Masalah

a. Hasil analisis priritas masalah

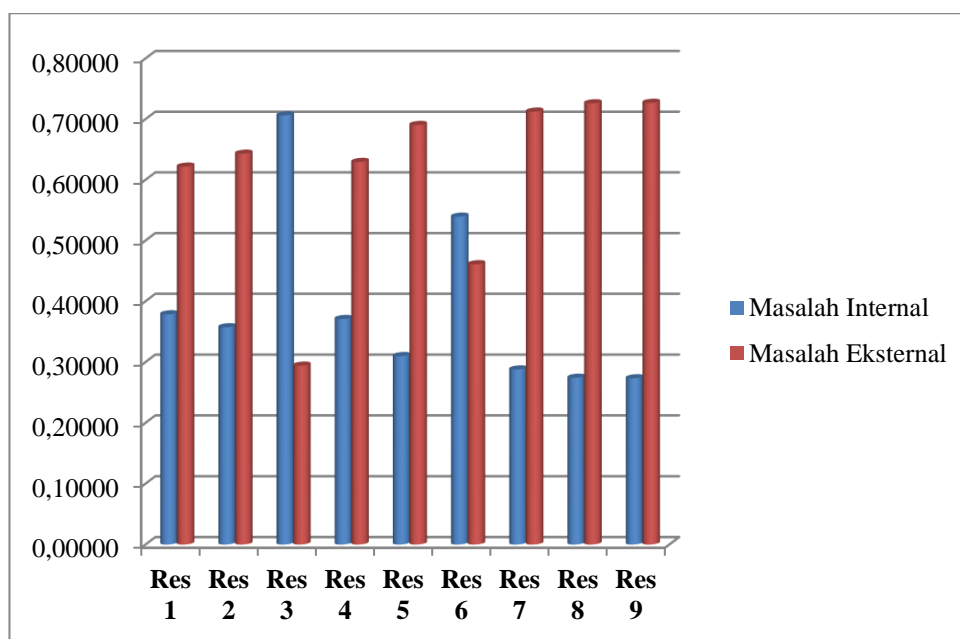
Pada pembahasan ini akan diuraikan hasil sintesis pada masalah dalam menentukan strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah) maka dapat dikelompokkan dalam dua masalah yaitu masalah internal dan masalah eksternal. Berdasarkan hasil pengolahan data melalui *Software Super Decision* diperoleh prioritas masalah internal dan

eksternal menurut pendapat seluruh responden sebagaimana terlihat pada gambar 4.24 berikut:



Gambar : 4.24
Hasil Sintesis Prioritas Masalah Berdasarkan Nilai Rata-Rata

Pada gambar 4.24 di atas menunjukkan bahwa pendapat gabungan para responden, tentang masalah yang paling prioritas dalam strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah) adalah masalah eksternal sebesar 0,58835, dan diikuti oleh masalah internal dengan nilai sebesar 0,41165. Namun bila dilihat dari tingkat kesepakatan responden (*rater agreement*) seluruh responden sebesar ($W:0,30864$). Artinya bahwa tingkat kesepakatan responden hanya 30 % yang berarti tingkat kesepakatannya sedang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 4.25 berikut ini:



Gambar 4.25
Hasil Sintesis Prioritas Masalah Internal Berdasarkan Nilai Setiap Responden

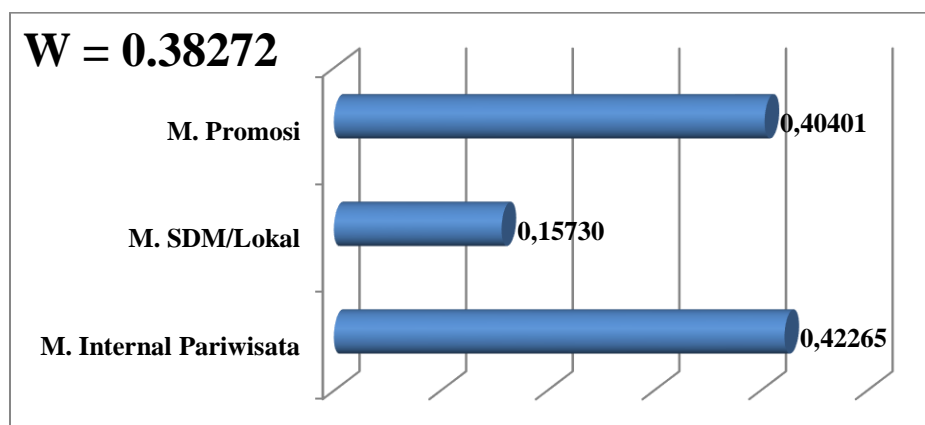
Berdasarkan jawaban per responden pada gambar 4.25. diatas menunjukkan bahwa hasil sintesis prioritas per responden dari 9 (Sembilan) responden, 7 (tujuh) orang responden menjawab bahwa masalah yang paling prioritas dalam menentukan strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah) adalah masalah eksternal, kemudian 2 (dua) orang menjawab masalah internal. Hal ini menunjukkan bahwa bervariasinya jawaban responden dalam menentukan prioritas masalah eksternal dan internal, hal ini dapat dilihat dengan angka *rater agreement*) yang diperoleh sebesar 30864.

Temuan diatas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Huda dkk (2019) dengan tema South Sulawesi Halal Tourism a Strategic Approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan model strategis berdasarkan masalah prioritas yang dihadapi oleh pariwisata halal di Sulawesi Selatan masalah prioritas dalam mengembangkan pariwisata halal

di Sulawesi Selatan dari segi pemerintahan adalah infrastruktur, informasi dari aspek komunitas, dan promosi dari aspek Hotel, Travel, dan Makanan Halal. Solusi prioritas dalam mengatasi masalah prioritas adalah meningkatkan infrastruktur dari aspek pemerintahan, meningkatkan informasi tentang lokasi dan media online dari komunitas, serta meningkatkan promosi makanan halal dari aspek hotel, travel, dan makanan halal. Model strategi yang dibentuk untuk pengembangan wisata halal di Sulawesi Selatan merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan infrastruktur dan sinergi antara pemerintah dan pengusaha.²⁰⁴

b. Analisis Klaster Masalah Internal

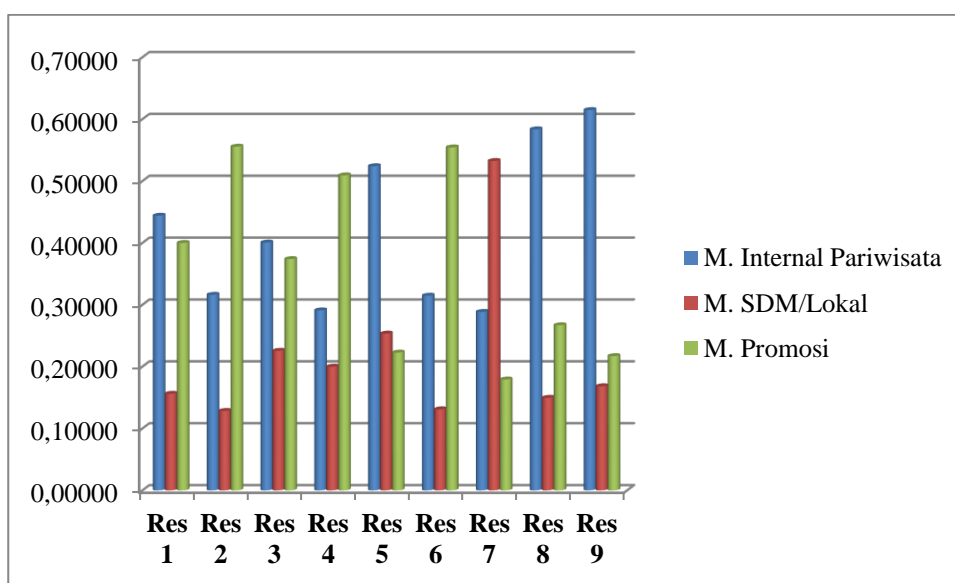
Pada pembahasan ini akan diuraikan hasil sintesis pada klaster masalah internal dalam menentukan strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah). Berdasarkan hasil pengolahan data melalui *Software Super Decision* diperoleh prioritas masalah internal menurut pendapat seluruh responden sebagaimana terlihat pada gambar 4.26 berikut:



Gambar 4.26
Hasil Sintesis Prioritas Masalah Internal Berdasarkan Nilai Rata-Rata

²⁰⁴Nurul Huda,dkk. South Sulawesi Halal Tourism a Strategic Approach. Advances in Economics, Business and Management Research, volume 143 2nd International Seminar on Business, Economics, Social Science and Technology (ISBEST 2019)

Pada gambar 4.26 di atas menunjukkan bahwa pendapat gabungan para responden, tentang masalah internal yang paling prioritas dalam strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah) yang paling prioritas adalah masalah internal pariwisata sebesar 0,42265, selanjutnya diikuti oleh masalah promosi sebesar 0,40401 dan yang menempati urutan terakhir adalah masalah sumber daya manusia/lokal (SDM/Lokal) sebesar 0,15730. Hasil perolehan nilai *rater agreement* seluruh responden sebesar 0,38272. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesepakatan responden sebesar 38 % artinya bahwa tingkat kesepakatan responden dalam menentukan prioritas masalah internal adalah sedang, untuk lebih jelasnya prioritas setiap responden dapat dilihat pada gambar 4.27 di bawah ini:



Gambar 4.27
Hasil Sintesis Prioritas Masalah Internal Berdasarkan Nilai Setiap Responden

Berdasarkan jawaban per responden pada gambar 4.27 diatas menunjukkan bahwa hasil sintesis prioritas per responden, dari 9 (Sembilan) responden, 5 (lima) orang responden menjawab bahwa masalah yang paling prioritas adalah masalah internal pariwisata yang paling prioritas dalam

menentukan strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah) dan diikuti oleh 3 (tiga) orang responden adalah masalah promosi, dan disusul oleh 1 (satu) orang responden menjawab masalah yang paling prioritas adalah masalah SDM/Lokal. Hal ini senada dengan angka angka *rater agreement*) yang diperoleh sebesar 0,38272.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Afifah Harashta (2020) menunjukkan bahwa Kampung Bandar Senapelan merupakan salah satu destinasi pariwisata yang memiliki peluang besar dalam penerapan Pariwisata Halal di Kota Pekanbaru. Kampung Bandar Senapelan memiliki potensi yang tidak dimiliki oleh destinasi wisata lainnya, yaitu adanya destinasi wisata religi, wisata konvensional, wisata bisnis dan juga wisata heritage di dalam satu daerah yang sangat mudah untuk diakses. Selain itu, Kampung Bandar Senapelan juga merupakan cikal bakal lahirnya Kota Pekanbaru. Namun, dalam proses pengembangan potensi Kampung Bandar Senapelan menjadi destinasi pariwisata halal di Kota Pekanbaru, diperlukan peningkatan atraksi, aksesibilitas dan amenitas serta pengelolaan yang serius oleh pemerintah dan bekerjasama dengan semua pihak terkait guna mewujudkan Pariwisata Halal di Kota Pekanbaru. dan mampu meningkatkan perekonomian sekitar dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru.²⁰⁵

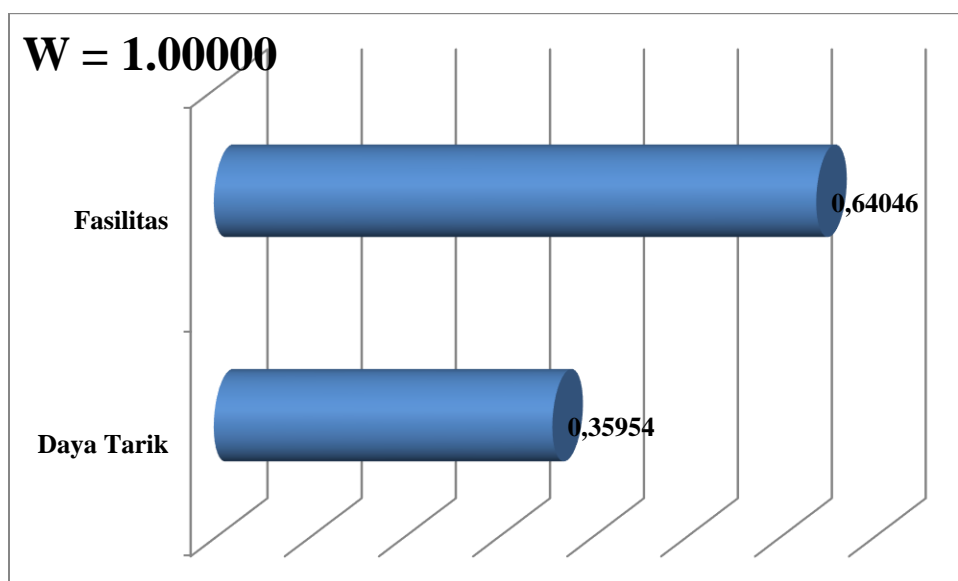
Hasil pembahasan diatas sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Asisten Deputi Pengembangan SDM Pariwisata Kementerian Pariwisata RI, Wisnu Bawa Tarunajaya mengatakan, Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengembangkan wisata halal di Indonesia saat ini masih belum memiliki standar. Karena itu, perlu meningkatkan sertifikasi kompetensi dan sertifikasi usaha Jasa perjalanan wisata halal. Beberapa daerah di Indonesia sendiri, mengutamakan sertifikasi kompeten dalam penerimaan tenaga kerja di bidang

²⁰⁵Afifah Harashta. Potensi Pengembangan Pariwisata Halal di Kota Pekanbaru. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekan Baru, 2020

wisata seperti Bali dan juga beberapa daerah lainnya. Standarisasi kompetensi sangat penting dilakukan, karena dengan adanya pelatihan sertifikasi maka dapat menunjang karir di masa yang akan datang. Sertifikasi ini juga penting bagi SDM yang ingin bekerja secara internasional. Selain sertifikasi kompetensi SDM juga harus memiliki pemahaman.

1. Analisis Masalah Internal: internal pariwisata

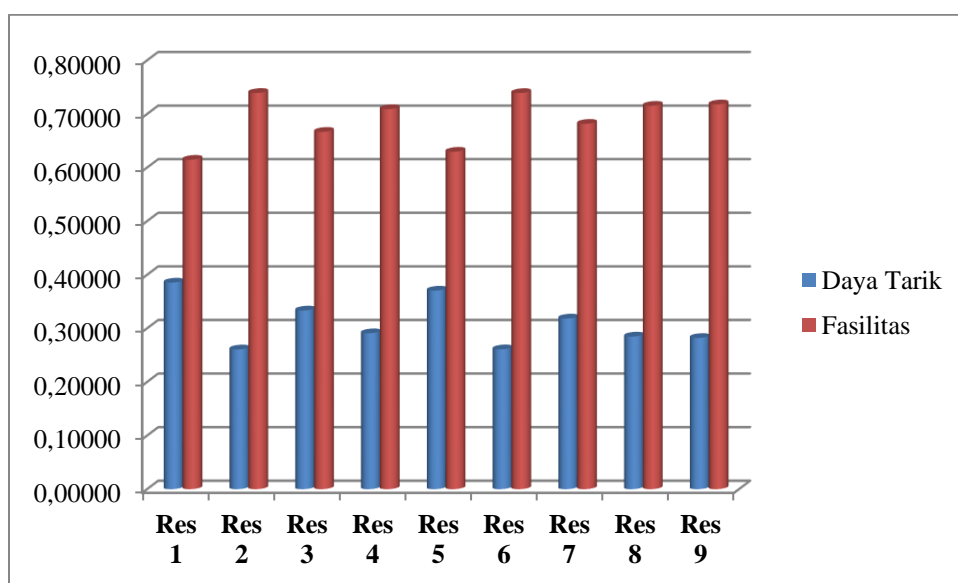
Pada pembahasan ini akan diuraikan hasil sintesis pada klaster sub masalah internal pariwisata dalam menentukan strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah), yaitu masalah internal pariwisata. Berdasarkan hasil pengolahan data melalui *Software Super Decision* diperoleh prioritas masalah internal pariwisata menurut pendapat seluruh responden sebagaimana terlihat pada gambar 4.28 berikut ini:



Gambar 4.28
Hasil Sintesis Prioritas Masalah Internal pariwisata Berdasarkan Nilai Rata-Rata

Pada gambar 4.28 di atas menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan para responden, masalah pariwisata yang paling prioritas dalam menentukan strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah), adalah masalah fasilitas sebesar 0,64046, dan diikuti oleh masalah daya tarik sebesar 0,35954. Hasil perolehan nilai *rater agreement* seluruh responden adalah 1,00000. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesepakatan responden hanya 1 % yang berarti tingkat kesepakatan responden dalam menentukan prioritas masalah internal cukup tinggi, untuk lebih jelasnya prioritas setiap responden dapat dilihat pada gambar 4.29 di bawah ini:

Untuk melihat hasil sintesis prioritas setiap responden dapat dilihat pada Gambar 4.29 pada berikut ini:



Gambar 4.29
Hasil Sintesis Prioritas Masalah Internal Pariwisata Berdasarkan Nilai Rata-Rata

Berdasarkan jawaban per responden pada gambar 4.29 diatas menunjukkan bahwa hasil sintesis prioritas per responden, dari 9 responden, 9 (sembilan) orang responden menjawab masalah yang paling prioritas dalam menentukan strategi pengembangan destinasi pariwisata halal

berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah) adalah masalah fasilitas. Hal ini senada dengan angka angka *rater agreement*) yang diperoleh sebesar 1,00000.

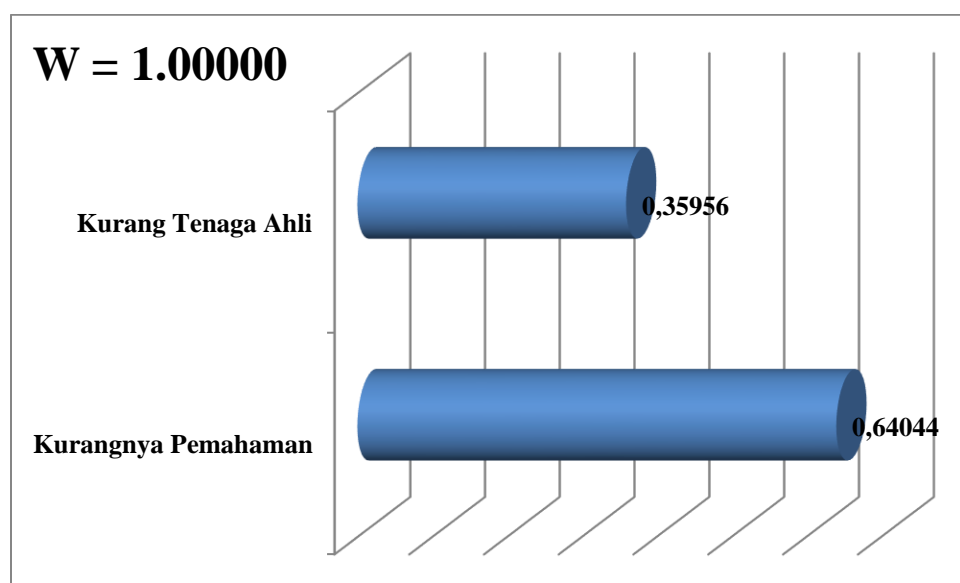
Temuan diatas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rijal Khaerani, Panji Pamungkas, dan Syintia Nur Aeni (2019) dengan judul Pengembangan Daya Tarik Wisata Daarus Sunnah Menjadi Wisata Halal. menyimpulkan bahwa aspek atraksi wisata sebagian besar wisatawan cenderung menyatakan dalam kondisi yang baik. Aspek aksesibilitas sebagian besar wisatawan cenderung menyatakan dalam kondisi yang kurang baik, Aspek amenitas untuk fasilitas wisata yang disediakan Daarus Sunnah sangat baik. Aspek jasa pendukung pariwisata sangat baik. Aspek pengembangan daya tarik wisata berbasis wisata halal sebagian besar wisatawan cenderung menyatakan dalam kondisi yang baik dan setuju jika Daarus Sunnah dijadikan sebagai wisata halal karena fasilitas ibadah, tempat wudhu antara laki-laki dan perempuan terpisah, makanan dan minuman halal, pertunjukkan yang diselenggarakan oleh pengelola Daarus Sunnah sama sekali tidak bertentangan dengan kaidah syariah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa daya tarik wisata Daarus Sunnah bisa dijadikan sebagai wisata halal²⁰⁶. selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Adrian Adi Hamzana (2017) Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal dalam Pengembangan Pariwisata Halal di Nusa Tenggara Barat. menyimpulkan bahwa pelaksanaan standarisasi pelayanan pariwisata halal di NTB pada destinasi dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB melalui pemenuhan fasilitas umum sesuai pariwisata halal. Standarisasi pada industri pariwisata halal dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Kesehatan, serta MUI-NTB sebagai lembaga non-pemerintah berwenang mengeluarkan sertifikat halal. Faktor-faktor yang

²⁰⁶ Rijal Khaerani dkk, Pengembangan Daya Tarik Wisata Daarus Sunnah Menjadi Wisata Halal. *Tourism Scientific Journal* Volume 3 Nomor 1 Desember 2017

mempengaruhi standarisasi pelayanan pariwisata halal di NTB adalah faktor hukum (peraturan perundang-undangan), struktur hukum (penegak hukum), faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.²⁰⁷

2. Analisis Masalah Internal: Sumber Daya Manusia/lokal

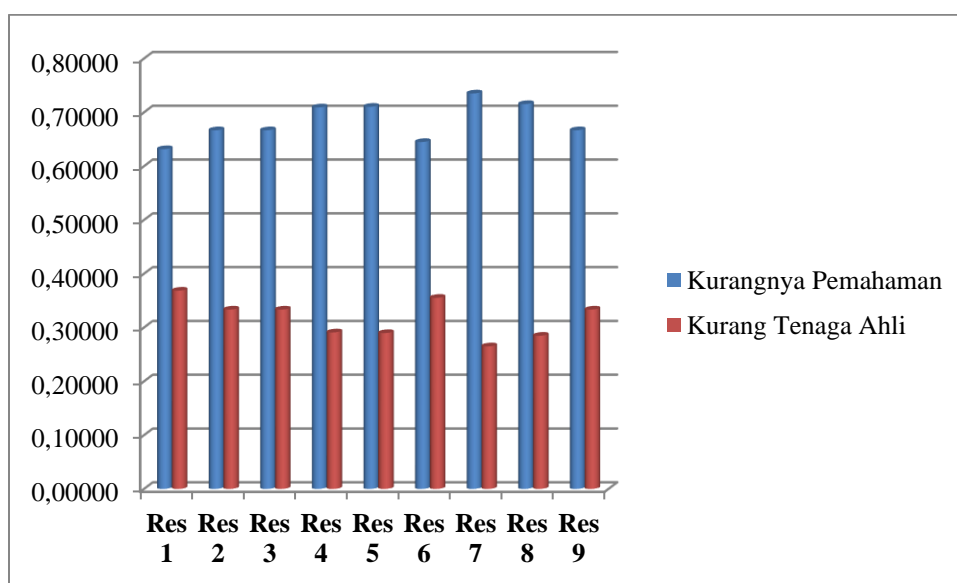
Pada pembahasan ini akan diuraikan hasil sintesis pada klaster sub masalah internal untuk menentukan strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah), yaitu masalah sumber daya manusia/lokal. Berdasarkan hasil pengolahan data melalui *Software Super Decision* diperoleh prioritas masalah sumber daya manusia menurut pendapat seluruh responden sebagaimana terlihat pada gambar 4.30 berikut ini :



Gambar 4.30
Hasil Sintesis Prioritas Masalah Sumber Daya Manusia/Lokal
Berdasarkan Nilai Rata-Rata

²⁰⁷Adrian Adi Hamzana Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal dalam Pengembangan Pariwisata Halal di Nusa Tenggara Barat. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 17, No. 2, 2017, 1-16

Pada gambar 4.30 di atas menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan para responden, masalah SDM/Lokal yang paling prioritas dalam menentukan strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah), adalah masalah kurang pemahaman tentang pariwisata halal sebesar 0,64044, selanjutnya diikuti oleh masalah kurang tenaga ahli sebesar 0,35956. Hasil perolehan nilai *rater agreement* seluruh responden sangat tinggi yaitu sebesar 1.00000. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesepakatan responden sangat tinggi yaitu 1 % yang berarti tingkat kesepakatan responden dalam menentukan prioritas masalah SDM/Lokal sangat tinggi, untuk lebih jelasnya prioritas setiap responden dapat dilihat pada gambar 4.31 di bawah ini:



Gambar 4.31
Hasil Sintesis Prioritas Masalah Sumber Daya Manusia/lokal
Berdasarkan Nilai Setiap Responden

Berdasarkan jawaban per responden pada gambar 4.31 diatas menunjukkan bahwa hasil sintesis prioritas per responden, dari 9 responden bahwa, 9 (sembilan) orang responden menjawab masalah yang paling prioritas dalam menentukan strategi pengembangan destinasi pariwisata

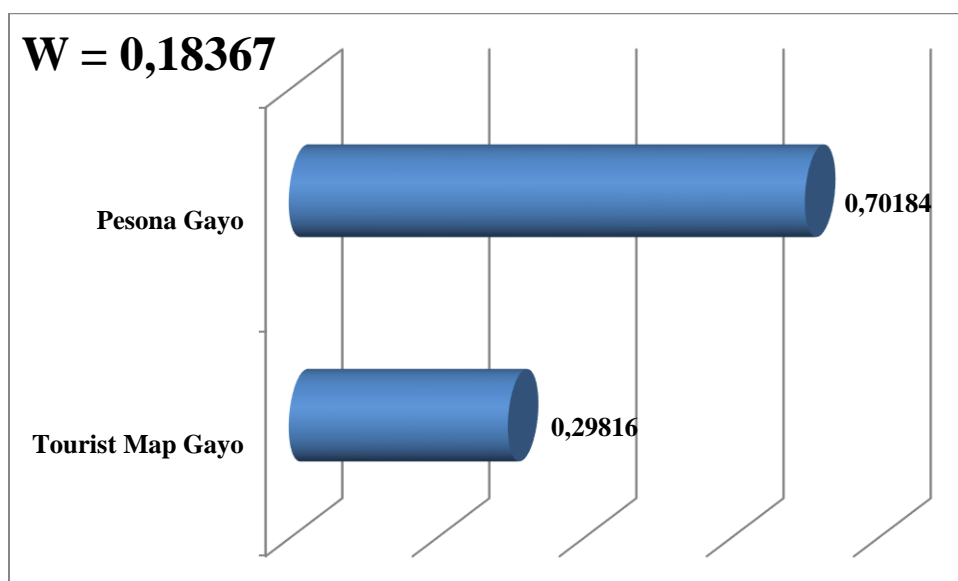
halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah) adalah masalah kurang pemahaman tentang pariwisata halal. Hal ini senada dengan angka *rater agreement* yang diperoleh yaitu sebesar 1.00000.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh M.Riadhussyah dan Alwafi Ridho Subarkah (2020) menyimpulkan bahwa wisata halal memiliki potensi besar, sehingga pengelolaan sumber daya manusia pada sektor wisata halal dalam menghadapi revolusi industri 4.0 harus melakukan fungsi manajerial yaitu dengan empat langkah: 1) Perencanaan, menentukan arah pengembangan wisata halal; 2) Pengorganisasian, menentukan lembaga yang berwenang menjalankannya; 3) Pengarahan, membuat instruksi, peraturan, atau sosialisasi agar sesuai dengan perencanaan; 4) Pengendalian, perlu adanya pengendalian dan pengawasan agar mencapai tujuan.²⁰⁸

3. Analisis Masalah Internal: Promosi

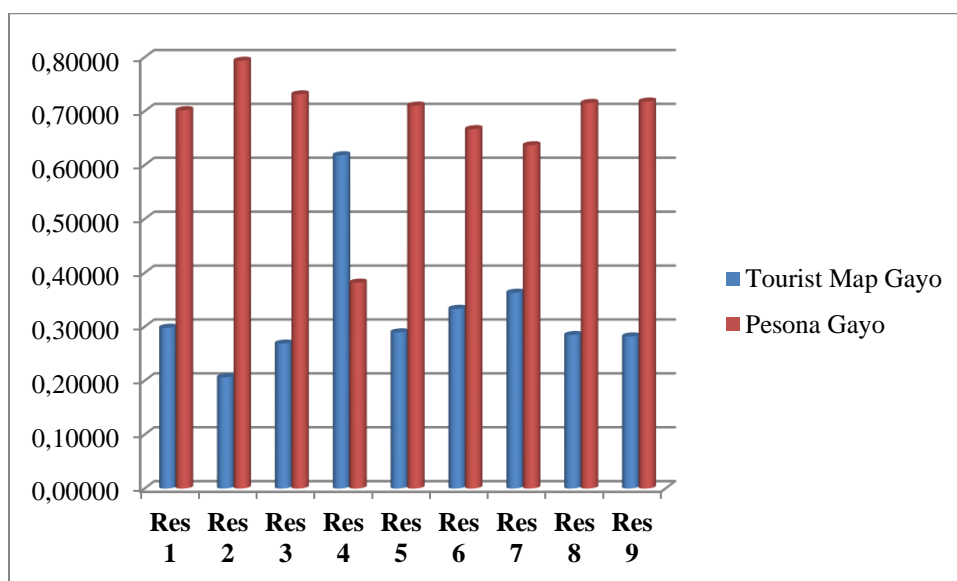
Pada pembahasan ini akan diuraikan hasil sintesis pada klaster sub masalah internal untuk menentukan strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah), yaitu masalah promosi. Berdasarkan hasil pengolahan data melalui *Software Super Decision* diperoleh prioritas masalah promosi menurut pendapat seluruh responden sebagaimana terlihat pada gambar 4.32 berikut:

²⁰⁸ M.Riadhussyah dan Alwafi Ridho Subarkah. Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Wisata Halal dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0. Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur) Vol 8, No. 1, 2020, pp. 1-13 Webiste : <http://ejournal.ipdn.ac.id/JMSDA/> DOI 10.33701/jmsda.v8i1.1164.



Gambar 4.32
Hasil Sintesis Prioritas Masalah Promosi Berdasarkan Nilai Rata-Rata

Pada gambar 4.32 di atas menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan para responden, masalah promosi yang paling prioritas dalam menentukan strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah), adalah peson Gayo yaitu sebesar 0,70184, selanjutnya diikuti oleh masalah tourist map Gayo sebesar 0,29816. Hasil perolehan nilai *rater agreement* seluruh responden cukup rendah sebesar 0,18367. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesepakatan responden hanya 18 % yang berarti tingkat kesepakatan responden dalam menentukan prioritas masalah SDM/Lokal cukup rendah, untuk lebih jelasnya prioritas setiap responden dapat dilihat pada gambar 4.33 di bawah ini:



Gambar 4.33
Hasil Sintesis Prioritas Masalah Promosi Berdasarkan Nilai Setiap Responden

Berdasarkan jawaban per responden pada gambar 4.33 diatas menunjukkan bahwa hasil sintesis prioritas per responden dari 9 (sembilan) orang responden, 8 (delapan) orang responden menganggap bahwa masalah pesona Gayo merupakan masalah promosi yang paling prioritas dalam menentukan strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah), dan akan diikuti oleh 1 (satu) orang responden bahwa masalah tourist map Gayo merupakan urutan prioritas dari masalah promosi yang kedua. Hal ini senada dengan angka rater agreement yang diperoleh yaitu sebesar 0,18367.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Raja Ela Safitri, dkk (2019) dengan judul promosi daerah dan e-marketing pariwisata halal terhadap keputusan berkunjung wisatawan di Yogyakarta menyimpulkan bahwa penggunaan E-Marketing dapat meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke pariwisata halal di Yogyakarta. Pada awalnya ketika

menggunakan promosi daerah hanya memperoleh sebesar 7% dan ketika menggunakan E-Marketing meningkat menjadi 67%.²⁰⁹

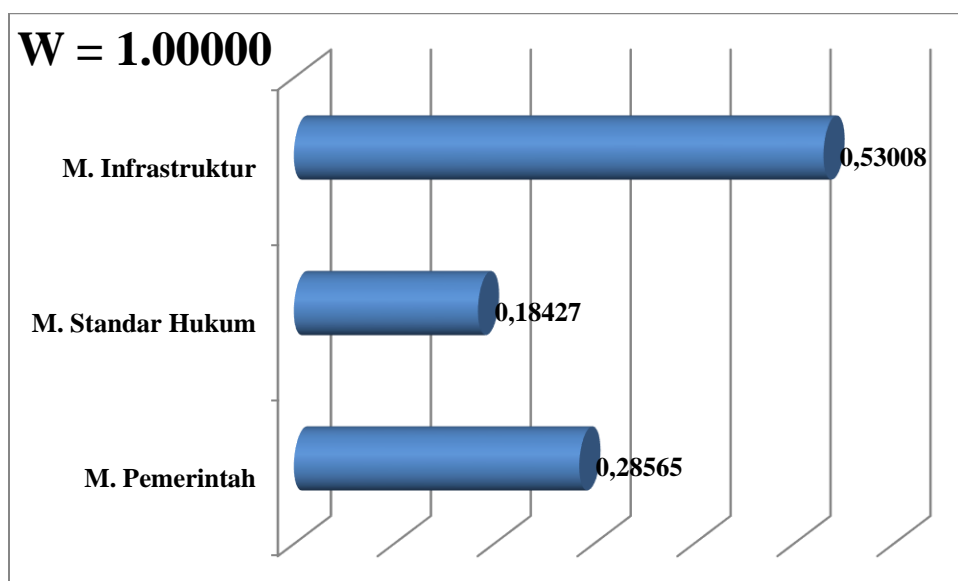
Mahardhika Ayuining Ratri (2018) dengan judul manajemen event jogja halal festival 2018 untuk memperkenalkan Yogyakarta sebagai kota wisata halal. menyatakan bahwa event Jogja Halal Festival 2018 merupakan bentuk organizational event yang memiliki tujuan dari sebuah organisasi kemudian dikemas menjadi sebuah event yang besar dan dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Manajemen event Jogja Halal Festival 2018 yang diterapkan adalah dengan melalui beberapa tahapan yaitu, planning, coordinating, staffing and motivating, dan evaluating. Tahapan manajemen event tersebut menghasilkan bahwa event Jogja Halal Festival 2018 belum dapat memperkenalkan Yogyakarta sebagai Kota Wisata Halal karena kurangnya partisipasi dari pihak tertentu seperti Dinas Pariwisata DIY maupun daerah serta tidak dirancang untuk memperkenalkan wisata halal di DIY secara khusus.²¹⁰

c. Analisis Klaster Masalah Eksternal

Pada pembahasan ini akan diuraikan hasil sintesis pada klaster masalah eksternal dalam menentukan strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah), berdasarkan hasil pengolahan data melalui *Software Super Decision* diperoleh prioritas masalah eksternal menurut pendapat seluruh responden sebagaimana terlihat pada gambar 4.34 berikut:

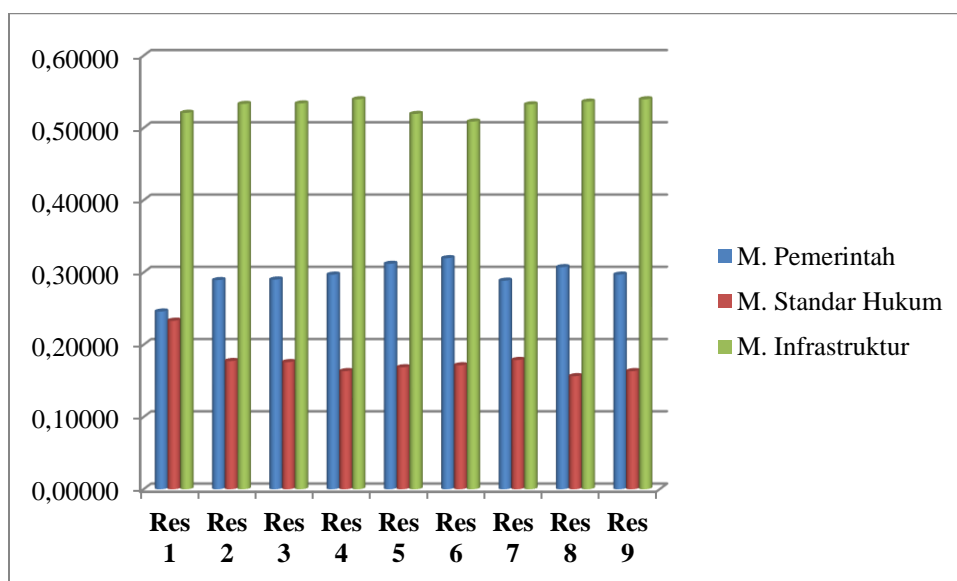
²⁰⁹ Raja Ela Safitri, dkk, Promosi daerah dan e-marketing pariwisata halal terhadap keputusan berkunjung wisatawan di Yogyakarta. *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam* Vol.10 No.1 Januari - Juni 2019

²¹⁰ Mahardhika Ayuining Ratri, Manajemen event jogja halal festival 2018 untuk memperkenalkan Yogyakarta sebagai kota wisata halal. skripsi universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2018



Gambar 4.34
Hasil Sintesis Prioritas Masalah Eksternal Berdasarkan Nilai Rata-Rata

Pada gambar 4.34 di atas menunjukkan bahwa pendapat gabungan para responden, tentang masalah eksternal yang paling prioritas dalam strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah), yang paling prioritas adalah masalah infrastruktur sebesar 0,53008, selanjutnya diikuti oleh masalah pemerintah sebesar 0,28565 dan yang menempati urutan terakhir adalah masalah standar hukum sebesar 0,18427. Hasil perolehan nilai *rater agreement* seluruh responden sebesar 1,00000. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesepakatan responden 1 % yang berarti kesepakatan responden dalam menentukan prioritas masalah eksternal sangat tinggi, untuk lebih jelasnya prioritas setiap responden dapat dilihat pada gambar 4.35 dibawah ini :



Gambar 4.35
Hasil Sintesis Prioritas Masalah Eksternal Berdasarkan Nilai
Setiap Responden

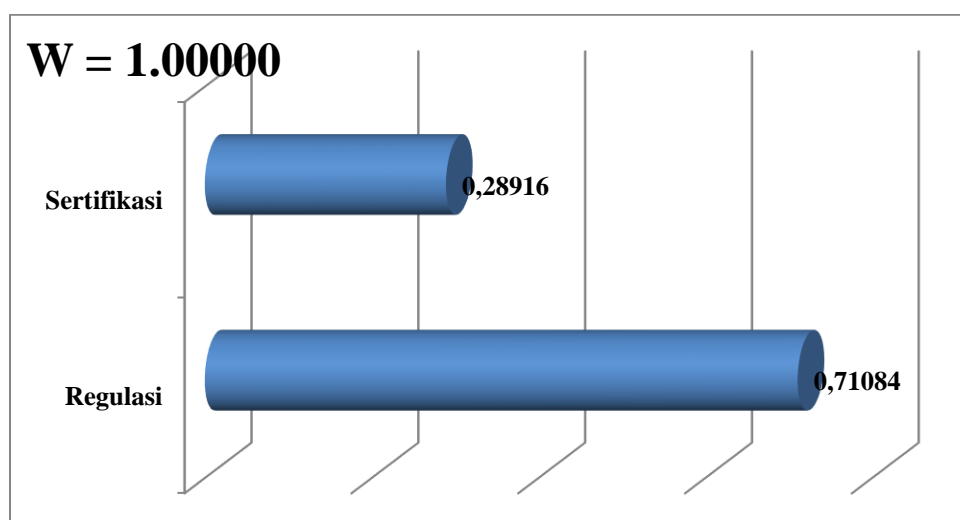
Berdasarkan jawaban per responden pada gambar 4.35 di atas menunjukkan bahwa hasil sintesis prioritas per responden dari 9 (sembilan) orang responden, 9 (sembilan) orang responden menjawab bahwa masalah eksternal yang paling prioritas dalam menentukan strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah), adalah masalah infrastruktur. Hal ini senada dengan angka rater agreement yang diperoleh sebesar 1.00000.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh dinas pariwisata dan olah raga Aceh Tengah (2017) menyimpulkan bahwa Kabupaten Aceh Tengah sebagai kabupaten daratan masih ditemukan beberapa hambatan pada aspek aksesibilitas (ketersediaan moda transportasi darat dan udara) serta konektivitas antar wilayah kecamatan dan desa masih sangat terbatas. Pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan dimaksudkan untuk meningkatkan aksesibilitas perhubungan serta mengurangi tingkat keterisolasian dan kesenjangan antar wilayah.

Pembangunan infrastruktur wilayah yang memadai pada gilirannya akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Di luar Kota Takengon, ketersediaan fasilitas infrastruktur belum cukup banyak, seperti listrik, air bersih (PDAM), telekomunikasi, jalan umum, jaringan informasi umum radio dan televisi.²¹¹

1. Analisis Masalah Eksternal : Pemerintah

Pada pembahasan ini akan diuraikan hasil sintesis pada klaster sub masalah eksternal dalam menentukan strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah). Berdasarkan hasil pengolahan data melalui *Software Super Decision* diperoleh prioritas masalah eksternal menurut pendapat seluruh responden sebagaimana terlihat pada gambar 4.36 berikut

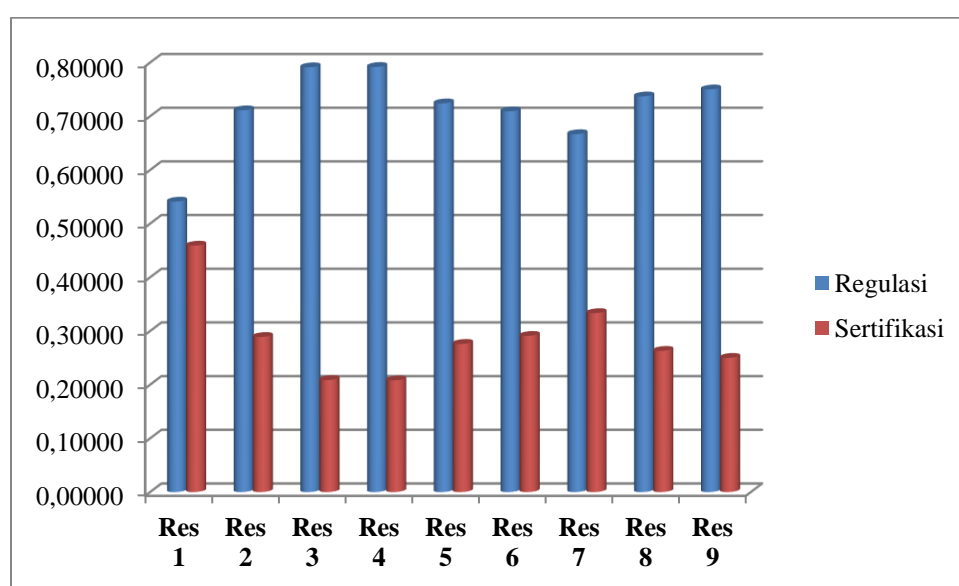


Gambar 4.36
Hasil Sintesis Prioritas Masalah Pemerintah Berdasarkan
Nilai Rata-Rata

Pada gambar 4.36 di atas menunjukkan bahwa pendapat gabungan para responden, tentang masalah pemerintah dalam menentukan strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam

²¹¹ Naskah Akademik Dan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten (Ripparkab) Aceh Tengah Tahun 2018-2025

meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah) yang paling prioritas adalah masalah regulasi, yaitu sebesar 0,71084, dan selanjutnya diikuti oleh masalah sertifikasi halal, sebesar 0,28916. Hasil perolehan nilai *rater agreement* seluruh responden adalah 1,00000 Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesepakatan responden 1 % yang berarti kesepakatan responden dalam menentukan prioritas sangat tinggi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.37 di bawah ini:



Gambar 4.37
Hasil Sintesis Prioritas Masalah pemerintah Berdasarkan Nilai Setiap Responden

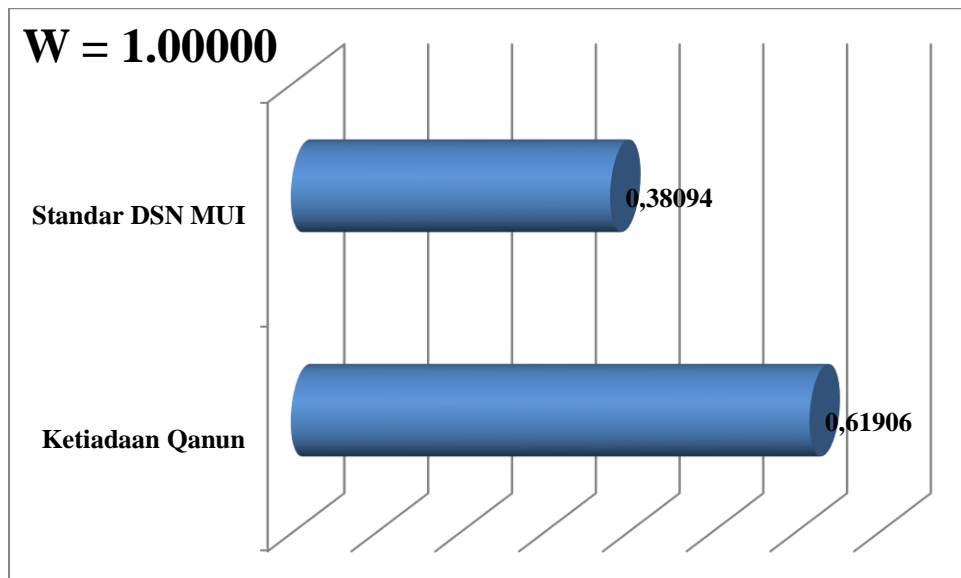
Berdasarkan jawaban per responden pada gambar 4.37 di atas menunjukkan bahwa hasil sintesis prioritas per responden dari 9 (sembilan) responden, 8 (delapan) orang responden menjawab masalah pemerintah yang paling prioritas dalam strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah) adalah masalah regulasi, dan selanjutnya akan diikuti oleh 1(satu) orang responden menjawab masalah standarisasi halal. Hal ini dapat dilihat dengan angka *rater agreement* sebesar 1 %.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mariska Ardilla Faza dengan judul Analisis SWOT Pariwisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat (2019) menyimpulkan bahwa, kuatnya dorongan pemerintah daerah, ketersediaan banyak destinasi wisata dan fasilitas ibadah, serta eratnya orientasi masyarakat NTB dengan Islam menjadi dasar kekuatannya. Kelemahannya yaitu kurangnya jumlah kegiatan usaha yang bersertifikasi halal dan masih belum optimalnya penyediaan layanan bagi wisatawan. Sedangkan peluangnya adalah akses yang relatif mudah bagi turis untuk berkunjung ke NTB dan adanya dukungan dari pemerintah pusat. Lalu ancamannya adalah negara-negara “pesaing” yang juga mengembangkan Pariwisata Halal, adanya kemungkinan masuknya budaya yang tak sejalan dan sikap negatif terkait kelestarian lingkungan dari wisatawan, dan bencana alam. Dengan menyusun dan menerapkan strategi berdasarkan hasil analisis, diharapkan NTB semakin baik dalam mengembangkan Pariwisata Halalnya demi memajukan kondisi perekonomian, serta bisa menjadi benchmark bagi provinsi lain dalam memajukan bidang ini.²¹²

2. Analisis Masalah Eksternal : Standar Hukum

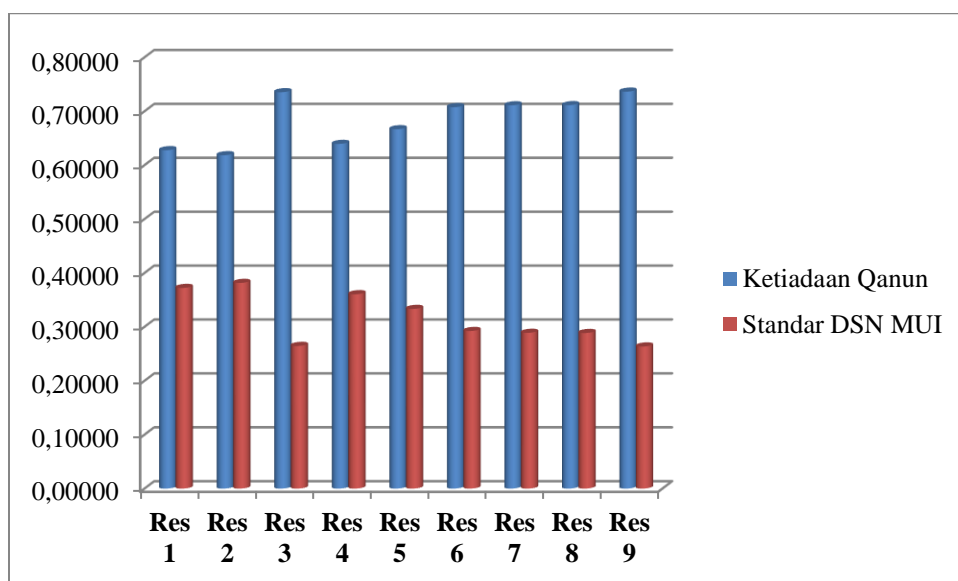
Pada pembahasan ini akan diuraikan hasil sintesis pada klaster sub masalah eksternal dalam menentukan strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah). Berdasarkan hasil pengolahan data melalui *Software Super Decision* diperoleh prioritas masalah standar hukum menurut pendapat seluruh responden sebagaimana terlihat pada gambar 4.38 berikut ini :

²¹² Mariska Ardilla Faza, Analisis SWOT Pariwisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Manajemen Indonesia* (Vol. 19(1), pp. 10-29, 2019)



Gambar.4.38
Hasil Sintesis Prioritas Masalah Otoritas Berdasarkan Nilai Rata-Rata

Pada gambar 4.38 di atas menunjukkan bahwa pendapat gabungan para responden, tentang masalah standar hukum yang paling prioritas dalam menentukan strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah) yang paling prioritas adalah masalah ketiadaan qanun, sebesar 0,61906, selanjutnya, diikuti oleh masalah standar hukum DSN MUI, sebesar 0,38094. Hasil perolehan nilai rater agreement seluruh responden sebesar 1,00000. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesepakatan responden sebesar 1 % yang berarti berarti bahwa kesepakatan responden dalam menentukan prioritas masalah standar hukum cukup tinggi, untuk lebih jelasnya prioritas setiap responden dapat dilihat pada gambar 4.39 di bawah ini:



Gambar. 4.39
Hasil Sintesis Prioritas Masalah Standar Hukum Berdasarkan Nilai Setiap Responden

Berdasarkan jawaban per responden pada gambar 4.39 di atas menunjukkan bahwa hasil sintesis prioritas per responden, bahwa dari 9 (sembilan) responden, 9 (sembilan) orang responden menjawab masalah standar hukum yang paling prioritas dalam menentukan strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah) adalah masalah qanun. Hal ini senada dengan angka rater agreement yang diperoleh, yaitu sebesar 1,00000.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diah Pitaloka, dengan judul Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Perspektif UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Di Kampung Coklat Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar) menunjukkan bahwa 1. Jaminan produk halal di Kampung Coklat sudah sesuai dengan undang-undang jaminan produk halal karena syarat-syarat sebagaimana

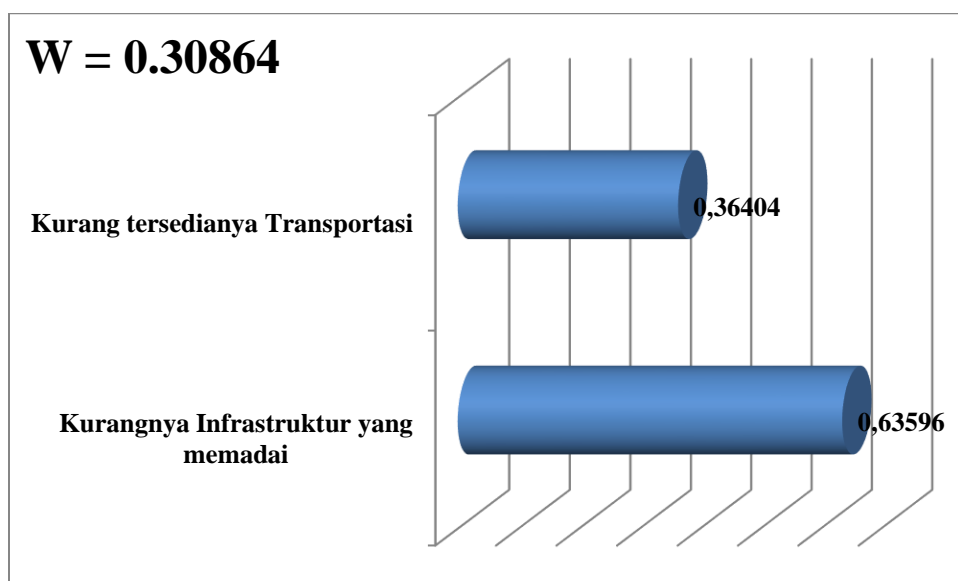
penyelenggaraan jaminan produk halal sudah terlaksana, hanya saja belum adanya pengawasan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terhadap pencantuman label halal pada produk yang dipasarkan.

2. Penyelenggaraan pariwisata di Kampung Coklat sebagaimana terdapat dalam Fatwa DSN-MUI terkait prinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah maka sudah sesuai, dengan menunjukkan ikhtiar untuk menciptakan kemashlahatan dan kemanfaatan dan mencegah kemafsadatan baik secara material maupun spiritual. Sedangkan untuk ketentuan terkait para pihak yang berakad juga sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yaitu menggunakan akad Ijarah. Kemudian terkait dengan ketentuan hotel syariah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, hanya saja Guest House Syariah di Kampung Coklat belum menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam pelayanannya. Hal ini dikarenakan perlu adanya pengembangan sistem pengelolaan untuk mencapai target.²¹³

3. Analisis Masalah Eksternal : Infrastruktur

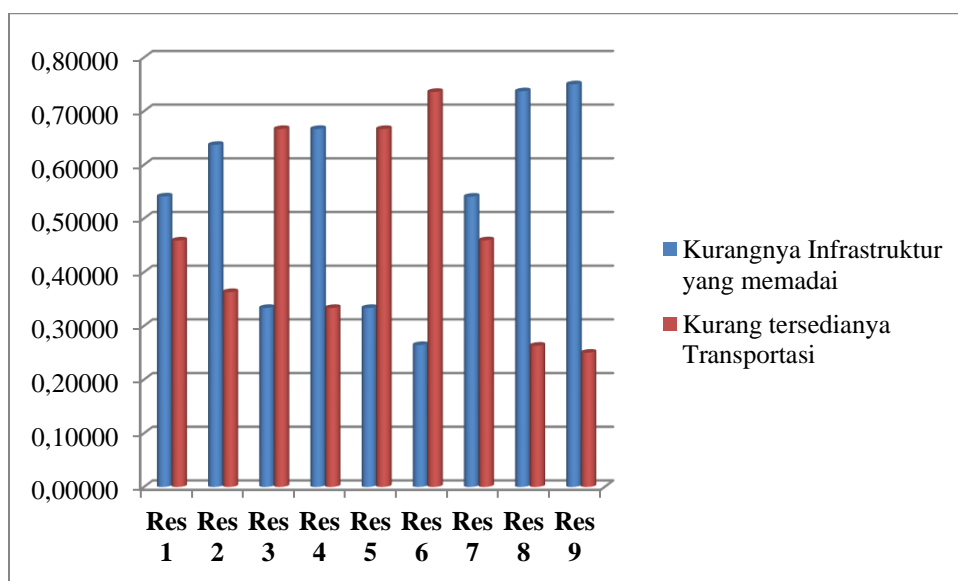
Pada pembahasan ini akan diuraikan hasil sintesis pada klaster sub masalah infrastruktur dalam menentukan strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah). Berdasarkan hasil pengolahan data melalui *Software Super Decision* diperoleh prioritas masalah infrastruktur menurut pendapat seluruh responden sebagaimana terlihat pada gambar 4.41 berikut:

²¹³ Diah Pitaloka, Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Perspektif UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Di Kampung Coklat Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar). Skripsi IAIN Tulungagung tidak dipublikasikan. 2018



Gambar. 4.40
Hasil Sintesis Prioritas Masalah Infrastruktur Berdasarkan Nilai Rata-Rata

Pada gambar 4.40 di atas menunjukkan bahwa pendapat gabungan para responden, tentang masalah infrastruktur yang paling prioritas dalam strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah) yang paling prioritas adalah masalah kurangnya infrastruktur yang memadai sebesar 0,63596. Selanjutnya diikuti oleh masalah kurang tersedianya transportasi sebesar 0,36404. Hasil perolehan nilai *rater agreement* seluruh responden adalah sebesar 0,30864. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesepakatan responden sebesar 30 % yang berarti tingkat kesepakatan responden dalam menentukan prioritas masalah infrastruktur sedang, untuk lebih jelasnya prioritas setiap responden dapat dilihat pada gambar 4.42 di bawah ini:



Gambar. 4.41
Hasil Sintesis Prioritas Masalah Infrastruktur Berdasarkan Nilai
Setiap Responden

Berdasarkan jawaban per responden pada gambar 4.41 di atas menunjukkan bahwa hasil sintesis prioritas per responden dari 9 (sembilan) orang responden, 6 (enam) orang responden menjawab masalah kurangnya infrastruktur yang memadai yang paling prioritas dalam menentukan strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah) dan diikuti oleh masalah kurang tersedianya transportasi. Hal ini sesuai dengan angka *rater agreement* yang diperoleh, yaitu sebesar 0,30864.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Khusnul Khotimah, Wilopo, dan Luchman Hakim (2017) dengan judul strategi pengembangan destinasi pariwisata (studi kasus pada Kawasan situs trowulan sebagai pariwisata budaya unggulan di kabupaten Mojokerto). Hasil dari penulisan ini adalah tersusunnya strategi yang dapat digunakan dalam pengembangan destinasi pariwisata budaya di kawasan situs Trowulan meliputi 1). Pengemasan produk daya tarik wisata melalui paket wisata minat khusus. 2). Pengembangan Destination Image. 3).

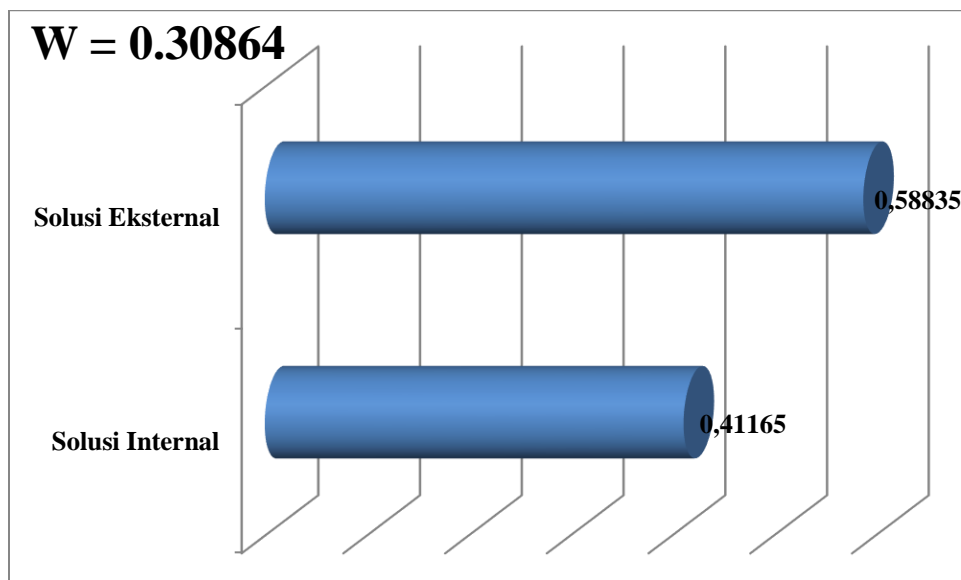
Pengembangan promosi melalui media cetak maupun elektronik dan mengikuti event-event nasional. 4). Pengembangan aksesibilitas jalan, transportasi, petunjuk arah. 5). Pengembangan amenities berupa hotel, homestay, pusat informasi pariwisata dan pusat seni kerajinan. 6). Penambahan fasilitas pendukung berupa klinik kesehatan, pos keamanan pariwisata, money changer, ATM. 7). Pembentukan badan pengelola kawasan situs Trowulan dan 8). Pengembangan SDM di bidang pariwisata.²¹⁴

2. Analisis Hasil Sintesis Solusi

a. Hasil Analisis Kluster Solusi

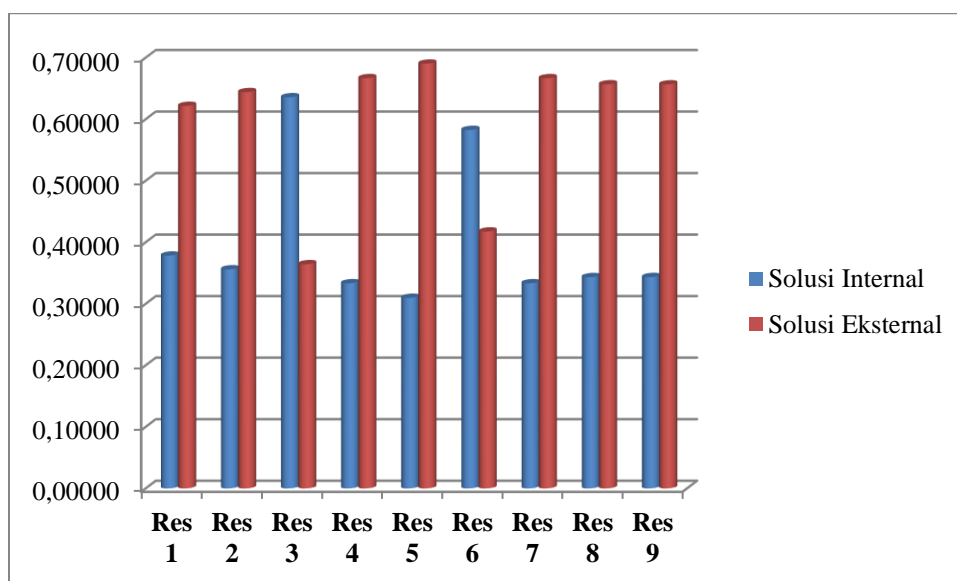
Pada pembahasan ini akan diuraikan hasil sintesis pada kluster solusi internal untuk menentukan strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah). Berdasarkan hasil pengolahan data melalui *Software Super Decision* diperoleh prioritas solusi internal menurut pendapat seluruh responden sebagaimana terlihat pada gambar 4.44 berikut:

²¹⁴ Khusnul Khotimah, Wilopo, dan Luchman Hakim. strategi pengembangan destinasi pariwisata (studi kasus pada Kawasan situs trowulan sebagai pariwisata budaya unggulan di kabupaten Mojokerto). Jurnal administrasi bisnis (JAB)vol.41 No.1 Januari 2017



Gambar 4.42
Hasil Sintesis Prioritas Solusi Internal Berdasarkan Nilai Rata-Rata

Pada gambar 4.42 di atas menunjukkan bahwa pendapat gabungan para responden, tentang solusi dalam menentukan strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah) yang paling prioritas adalah solusi eksternal sebesar 0,588335, selanjutnya diikuti oleh solusi internal sebesar 0,41165. Hasil perolehan nilai *rater agreement* seluruh responden sebesar 0,30864. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesepakatan responden sebesar 30 18 % yang berarti kesepakatan responden dalam menentukan prioritas solusi sedang, untuk lebih jelasnya prioritas setiap responden dapat dilihat pada gambar 4.43 di bawah ini :

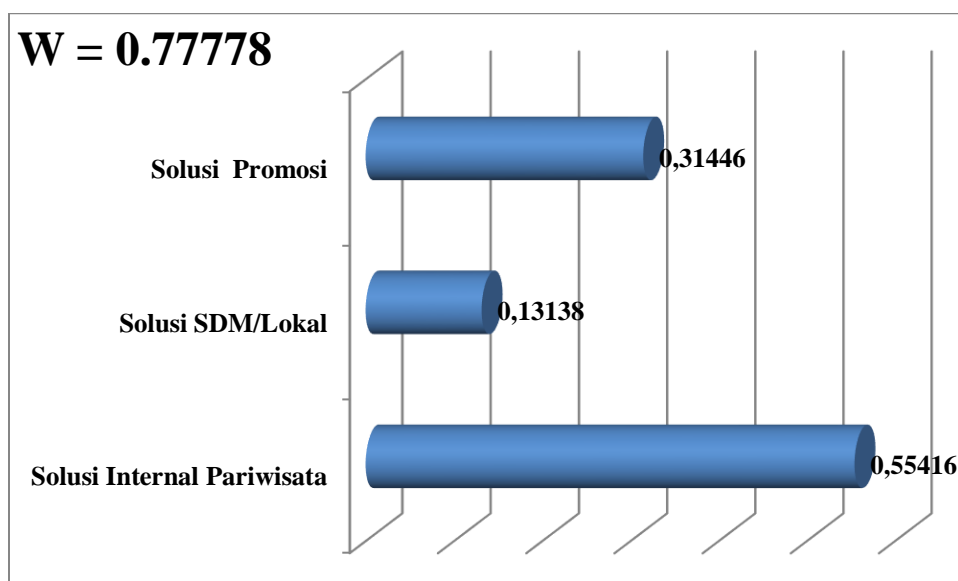


Gambar 4.43
Hasil Sintesis Prioritas Solusi Internal dan Solusi Eksternal
Berdasarkan Nilai Setiap Responden

Berdasarkan jawaban per responden pada gambar 4.43 di atas menunjukkan bahwa hasil sintesis prioritas per responden dari 9 (sembilan) orang responden, 7 (tujuh) orang responden menjawab bahwa solusi yang paling prioritas dalam menentukan strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah) adalah solusi eksternal kemudian, 2 (dua) orang responden menjawab solusi yang paling prioritas dalam pengembangan pariwisata halal yang berbasis kearifan lokal adalah solusi internal. Hal ini dapat dilihat dengan angka *rater agreement* yang diperoleh sebesar 0,30864.

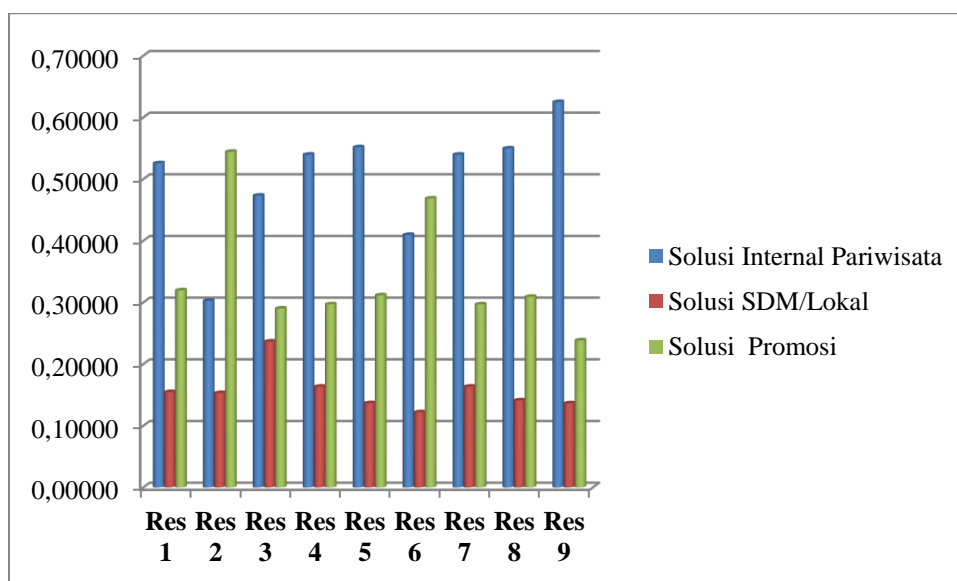
b. Analisis Kluster Solusi Internal

Pada pembahasan ini akan diuraikan hasil sintesis pada kluster sub solusi internal dalam menentukan strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah). Berdasarkan hasil pengolahan data melalui *Software Super Decision* diperoleh prioritas solusi internal menurut pendapat seluruh responden sebagaimana terlihat pada gambar 4.44 berikut



Gambar. 4.44
Hasil Sintesis Prioritas Solusi Internal Berdasarkan Nilai Rata-Rata

Pada gambar 4.44 di atas menunjukkan bahwa pendapat gabungan para responden, tentang solusi internal yang paling prioritas dalam strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah) yang paling prioritas adalah solusi internal pariwisata sebesar 0,55416, selanjutnya diikuti oleh solusi promosi sebesar 0,31446 dan yang menempati urutan terakhir adalah solusi SDM/Lokal sebesar 0,13138. Hasil perolehan nilai *rater agreement* seluruh responden adalah 0,77778. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesepakatan responden 77 % yang berarti kesepakatan responden dalam menentukan prioritas solusi internal cukup tinggi untuk lebih jelasnya prioritas setiap responden dapat dilihat pada gambar 4.45 berikut ini :

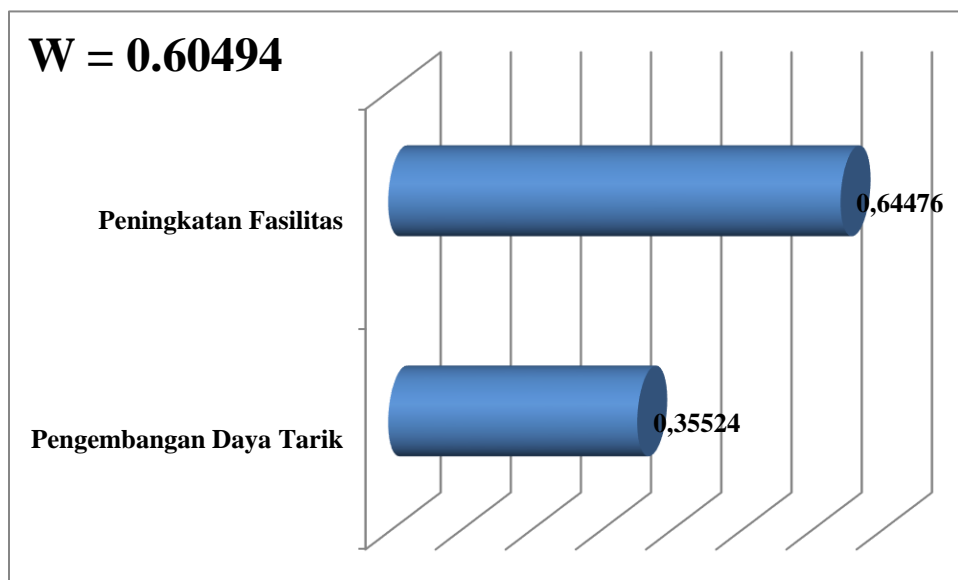


Gambar 4.45
Hasil Sintesis Prioritas Solusi Internal Pariwisata Berdasarkan Nilai
Setiap Responden

Berdasarkan jawaban per responden Pada gambar 4.45 di atas menunjukkan bahwa hasil sintesis prioritas per responden dari 9 (sembilan) orang responden, 6 (enam) orang responden menjawab solusi internal yang paling prioritas dalam menentukan strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah) adalah solusi pariwisata, kemudian 2 (dua) orang menjawab solusi promosi. Dan kemudian diikuti oleh 1 (satu) orang responden tentang solusi SDM/lokal. Hal ini senada dengan angka *rater agreement* yang diperoleh, yaitu sebesar 0,77778.

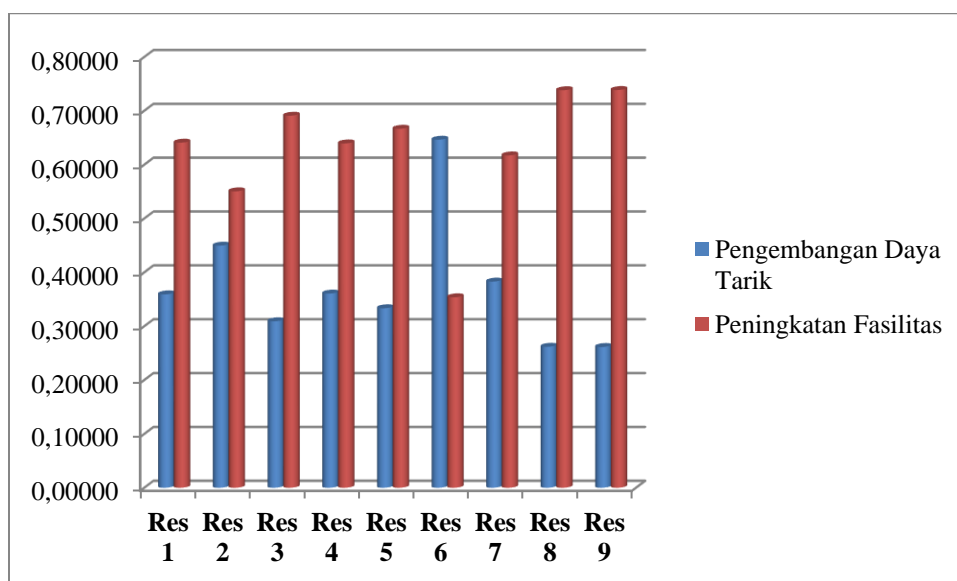
1. Analisis Solusi Internal : Internal Pariwisata

Pada pembahasan ini akan diuraikan hasil sintesis pada kluster sub solusi pariwisata dalam menentukan strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah). Berdasarkan hasil pengolahan data melalui *Software Super Decision* diperoleh prioritas solusi pariwisata menurut pendapat seluruh responden sebagaimana terlihat pada gambar 4.46 berikut:



Gambar 4.46
Hasil Sintesis Prioritas Solusi Pariwisata Berdasarkan Nilai Rata-Rata

Pada gambar 4.46 di atas menunjukkan bahwa pendapat gabungan para responden, tentang solusi pariwisata yang paling prioritas dalam strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah) yang paling prioritas adalah peningkatan pasilitas wisata sebesar 0,64476, dan kemudian akan diikuti oleh solusi pengembangan daya Tarik wisata sebesar 0,35524. Namun bila kita lihat dari tingkat dari tingkat kesepakatan responden *rater agreement* seluruh responden sebesar 0,60494. Artinya bahwa tingkat kesepakatan responden sebesar 60 % yang berarti bahwa tingkat kesepakatan responden tinggi dalam menentukan prioritas solusi pariwisata. Untuk lebih jelasnya prioritas setiap responden dapat dilihat pada gambar 4.46 berikut ini :



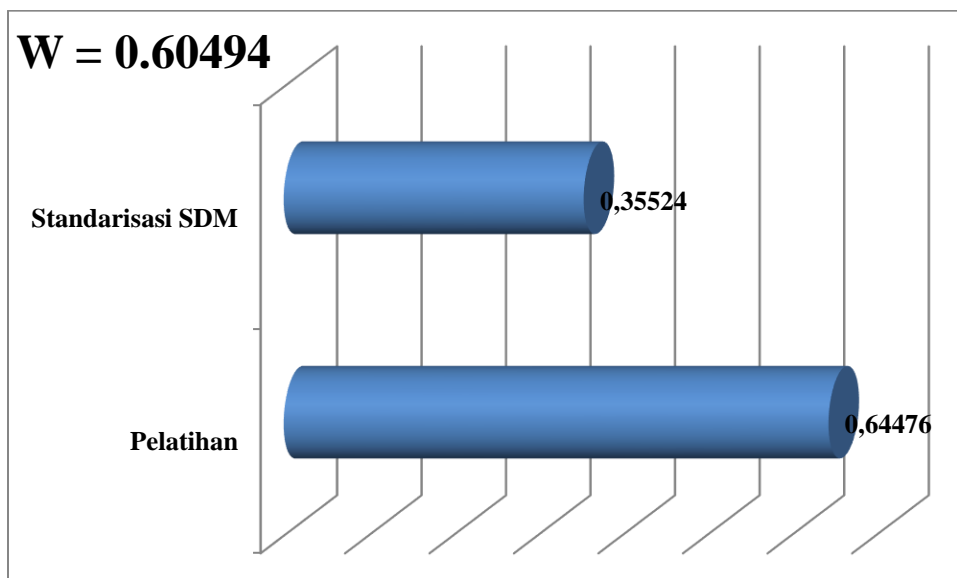
Gambar 4.47
Hasil Sintesis Prioritas Solusi Internal Pariwisata Berdasarkan Nilai Setiap Responden

Berdasarkan jawaban per responden pada gambar 4.47 di atas menunjukkan bahwa hasil sintesis prioritas per responden, dari 9 (sembilan) orang responden, 7 (tujuh) orang responden menjawab solusi internal pariwisata yang paling prioritas dalam menentukan strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah) adalah solusi peningkatan kapasitas pariwisata, kemudian 2 (dua) orang menjawab solusi yang paling prioritas adalah pengembangan daya Tarik wisata. Hal ini dapat dilihat dengan angka *rater agreement* yang diperoleh sebesar 0,60494.

2. Analisis Solusi Internal : Sumber Daya Manusia/Lokal

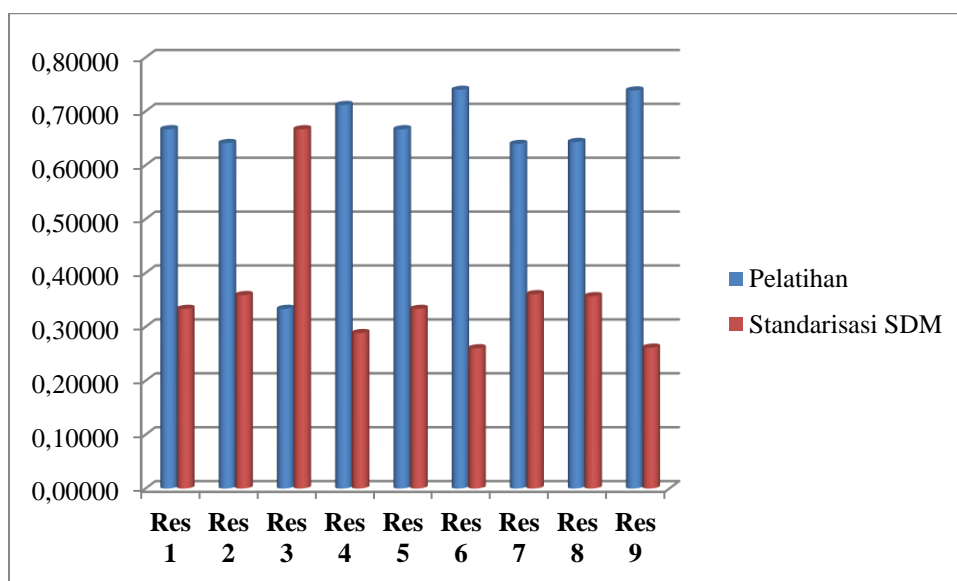
Pada pembahasan ini akan diuraikan hasil sintesis pada kluster sub solusi Sumber Daya Manusia dalam menentukan strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah). Berdasarkan hasil pengolahan data melalui *Software Super Decision* diperoleh prioritas solusi sumber daya

manusia/lokal (SDM) menurut pendapat seluruh responden sebagaimana terlihat pada gambar 4.48 berikut ini :



Gambar 4.48
Hasil sintesis prioritas solusi sumber daya manusia/lokal
berdasarkan nilai rata-rata

Pada gambar 4.4.9 di atas menunjukkan bahwa pendapat gabungan para responden, tentang solusi yang paling prioritas dalam strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah) yang paling prioritas adalah pelatihan sebesar 0,64476, dan diikuti oleh standarisasi SDM sebesar 0,35524. Tingkat kesepakatan responden *rater agreement* seluruh responden sebesar 0,60494. Maksudnya bahwa tingkat kesepakatan responden sebesar 60 % yang berarti bahwa tingkat kesepakatan responden tinggi dalam menentukan prioritas solusi SDM/Lokal untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.49 di bawah ini :



Gambar 4.49
Hasil Sintesis Prioritas Solusi Sumber Daya Manusia/Lokal
Berdasarkan Nilai Rata-Rata

Berdasarkan jawaban per responden pada gambar 4.49 di atas menunjukkan bahwa hasil sintesis prioritas per responden dari 9 (sembilan) orang responden, 8 (delapan) orang responden menjawab bahwa solusi yang paling prioritas dalam strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah) adalah pelatihan, kemudian 1 (satu) orang menjawab solusi yang paling prioritas yaitu standarisasi SDM. Hal ini dapat dilihat dengan angka *rater agreement* yang diperoleh sebesar 0,60494.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azhar (2015) dengan judul peningkatan SDM pariwisata melalui sertifikasi kompetensi dalam menghadapi MEA: peluang dan tantangan. Menyimpulkan bahwa pentingnya sertifikasi kompetensi bagi insan pariwisata sumber daya dalam menghadapi MEA. Skema sertifikasi kompetensi ini memberikan persamaan peluang antara tenaga kerja pariwisata yang memiliki pendidikan rendah dan pendidikan tinggi. Kompetensi seseorang yang diperoleh melalui pelatihan atau pengalaman kerja, dapat dibandingkan

dengan pendidikan yang lebih tinggi. Konsep Kerangka Kualifikasi Indonesia (KKNI) yang dapat mewujudkan hal tersebut serta didukung Standar Kompetensi Nasional Indonesia (SKKNI) dan berbasis Kompetensi Pelatihan (PBK) sebagai komponennya. KKNI juga digunakan sebagai perjanjian pengakuan bersama (MRA) kualifikasi negara-negara anggota ASEAN lainnya. MRA telah dibentuk di bidang pariwisata adalah CACT, ACCSTP, dan AQRF. Namun Indonesia memiliki tantangan dalam pelaksanaannya sertifikasi kompetensi. Saat ini terdapat 375 ribu pekerja dan pariwisata memiliki a sertifikasi kompetensi 121 ribu orang. SKKNI dan KKNI belum sepenuhnya diterapkan di dunia kerja, selain jumlah LSP dan asesor yang masih rendah untuk rasio pekerja yang belum memiliki sertifikat kompetensi di bidang pariwisata.²¹⁵

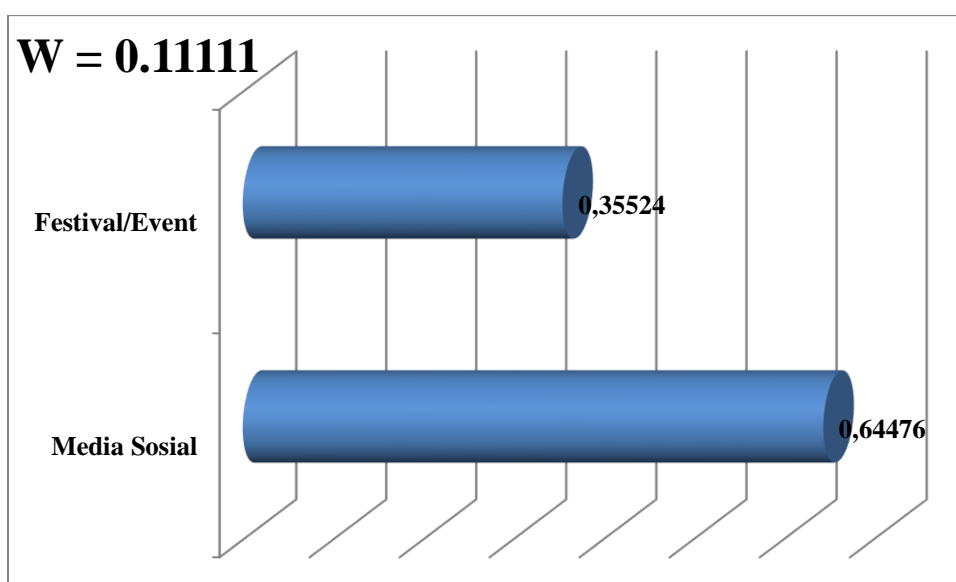
Seperti yang dilakukan oleh dinas kebudayaan dan pariwisata Aceh (2019) pelaku pariwisata dibekali pelatihan SDM pendukung wisata halal. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Jamaluddin saat membuka kegiatan Pelatihan SDM Pendukung Wisata Halal. Mewujudkan Aceh sebagai Destinasi Wisata Halal Unggulan” yang dihadiri oleh sejumlah peserta dari aparat pemerintah dan pelaku pariwisata. “Adanya pelatihan ini menjadi bagian untuk mendorong adanya peningkatan jumlah amenities halal di Aceh. Dalam pelatihan ini, ekonomi kreatif serta bagaimana branding wisata halal di Aceh, seperti Adnan Iskandar dan M Arief Budiman. “Kita berharap para pelaku usaha pariwisata dapat menerapkan wisata halal dalam kegiatan kepariwisataan, untuk penguatan kelembagaan, mendukung pertumbuhan industri. Tak hanya itu, dengan adanya pelatihan, pelaku pariwisata juga ikut nantinya

²¹⁵Azhar Peningkatan SDM pariwisata melalui sertifikasi kompetensi dalam menghadapi MEA: peluang dan tantangan. Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka UTCC, 26 Agustus 2015

mempromosikan usaha atau produknya ke tingkat nasional, sehingga mendukung terealisasinya wisata halal di Aceh.²¹⁶

3. Analisis Solusi Internal : solusi Promosi

Pada pembahasan ini akan diuraikan hasil sintesis pada kluster sub solusi promosi dalam menentukan strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah). Berdasarkan hasil pengolahan data melalui *Software Super Decision* diperoleh prioritas solusi promosi menurut pendapat seluruh responden sebagaimana terlihat pada gambar 4.50 berikut:

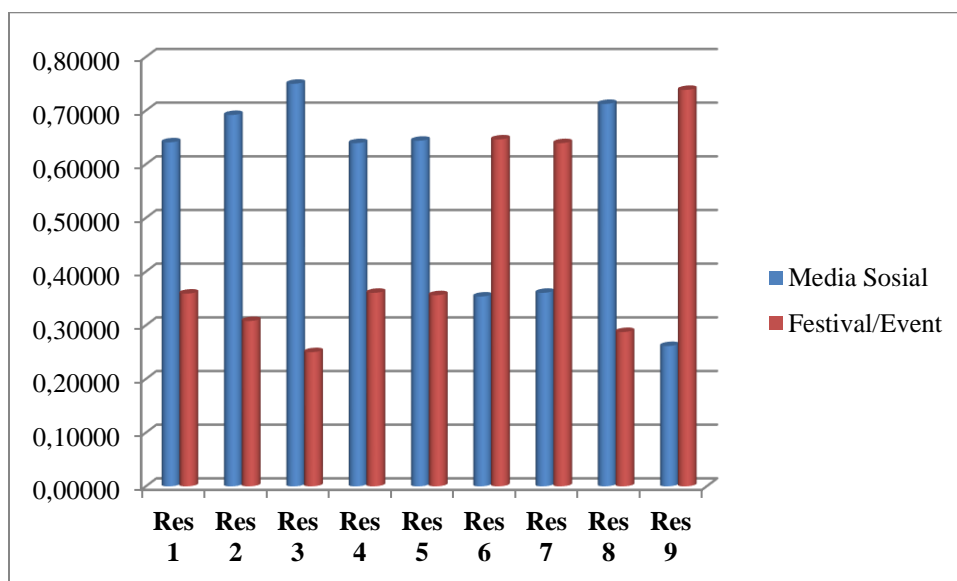


Gambar 4.50
Hasil Sintesis Analisis prioritas Solusi Promosi berdasarkan nilai Rata-Rata

Pada gambar 4.50 di atas menunjukkan bahwa pendapat gabungan para responden tentang solusi promosi yang paling prioritas dalam strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah) yang paling prioritas adalah solusi media sosial sebesar 0,64476, dan diikuti oleh festival/Event sebesar 0,35524. Namun bila dilihat dari tingkat kesepakatan

²¹⁶Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Aceh. 2019

responden *rater agreement* seluruh responden sebesar 1,00000, artinya bahwa tingkat kesepakatan responden sangat tinggi sebesar 1% yang bermakna bahwa tingkat kesepakatannya sangat tinggi dalam menentukan prioritas solusi primosi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.51 berikut ini:



Gambar 4.51
Hasil Sintesis Prioritas Solusi Promosi Berdasarkan Nilai Setiap Responden

Berdasarkan jawaban per responden pada gambar 4.51 di atas menunjukkan bahwa hasil sintesis prioritas per responden dari 9 (sembilan) orang responden, 6 (enam) orang responden menjawab solusi yang paling prioritas dalam menentukan strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah) adalah solusi media sosial kemudian 3 (tiga) orang responden menjawab solusi yang paling prioritas adalah festival/event. Ini dapat dilihat dengan angka *rater agreement* yang diperoleh sebesar 1,00000.

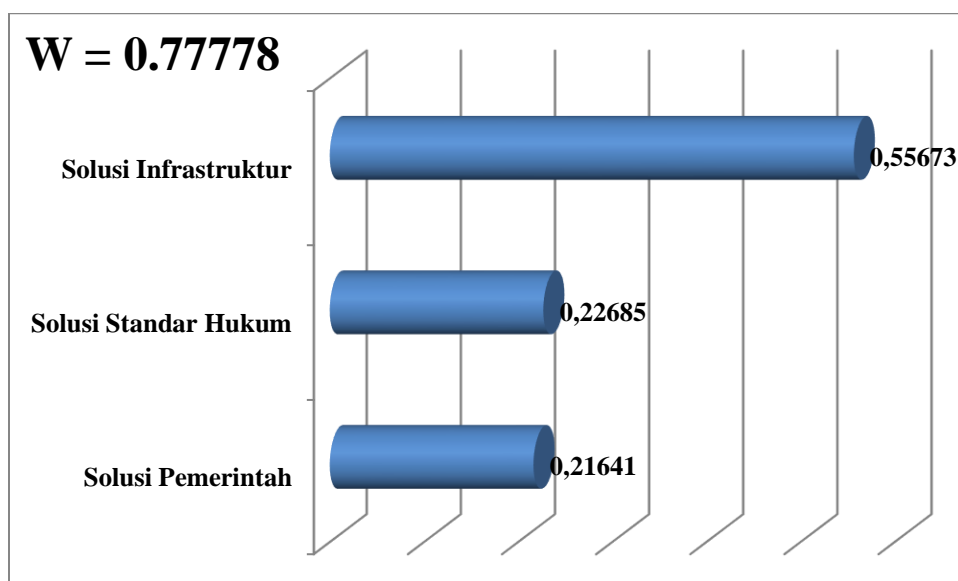
Hasil tersebut sesuai dengan Penelitian yang dilakukan oleh yudhi Martha Nugraha (2018) dengan judul Analisis Potensi Promosi pariwisata

halal Melalui E-marketing Di Kepulauan Riau menyimpulkan bahwa Pengaruh Promosi Pariwisata Halal Berbasis E-Marketing Terhadap Keputusan Berkunjung Wisatawan di Yogyakarta. Promosi merupakan hal penting yang perlu dilakukan dan diperhatikan dalam menarik minat wisatawan. Di era milenial ini teknologi sangat berkembang dengan pesat, sehingga banyak aktivitas yang dilakukan menggunakan teknologi. Dengan demikian penggunaan E-Marketing dinilai cocok untuk meningkatkan wisatawan. Metode pengujian adalah dengan menggunakan metode regresi linier berganda dengan variabel moderating untuk menunjukkan hasil dari penelitian pengaruh Promosi Pariwisata Halal Berbasis EMarketing Terhadap Keputusan Berkunjung Wisatawan di Yogyakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan kuesioner dan observasi. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa penggunaan E-Marketing dapat meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke pariwisata halal di Yogyakarta. Pada awalnya ketika menggunakan promosi daerah hanya memperoleh sebesar 7% dan ketika menggunakan E-Marketing meningkat menjadi 67%.²¹⁷

c. Analisis Klaster Solusi Eksternal

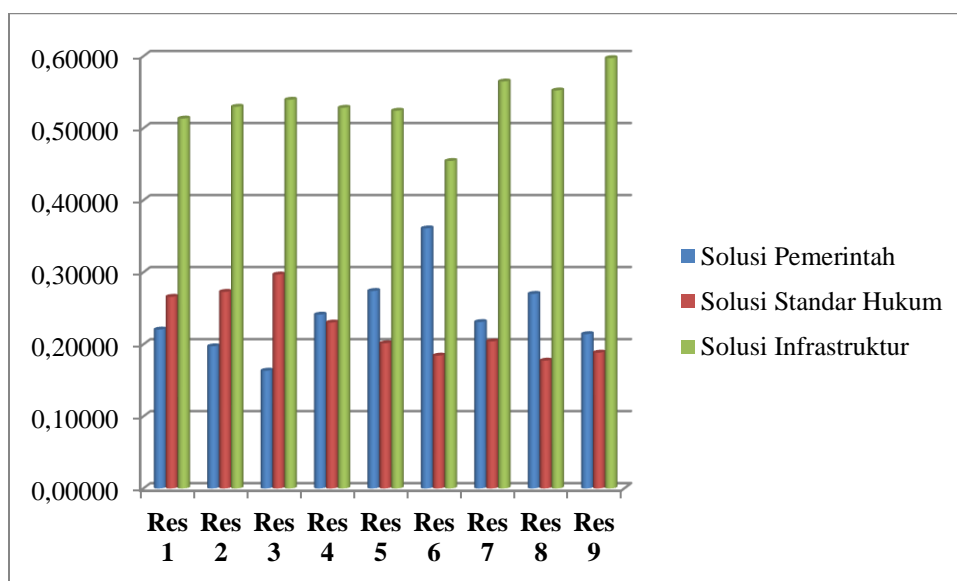
Pada pembahasan ini akan diuraikan hasil sintesis pada klaster solusi eksternal dalam menentukan strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah). Berdasarkan hasil pengolahan data melalui *Software Super Decision* diperoleh prioritas solusi eksternal menurut pendapat seluruh responden sebagaimana terlihat pada gambar 4.52 berikut:

²¹⁷ Yudhi Martha Nugraha, Analisis Potensi Promosi pariwisata halal Melalui E-marketing Di Kepulauan Riau. Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti Vol. 3, No. 2, Juli 2018, ISSN (p) : 0853-7720, ISSN (e) : 2541-4275



Gambar 4.52
Hasil Sintesis Analisis prioritas Solusi Eksternal berdasarkan nilai Rata-Rata

Pada gambar 4.52 di atas menunjukkan bahwa pendapat gabungan para responden, tentang solusi eksternal yang paling prioritas dalam menentukan strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah) yang paling prioritas adalah solusi infrastruktur sebesar 0,55673. Selanjutnya diikuti oleh solusi standar hukum sebesar 0,22685 dan yang menempati urutan terakhir solusi pemerintah sebesar 0,21641. Namun bila dilihat dari tingkat kesepakatan responden *rater agreement* seluruh responden sebesar 0,77778. Artinya bahwa tingkat kesepakatan responden sebesar 77 % yang berarti tingkat kesepakatan responden tinggi dalam menentukan prioritas solusi eksternal. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 4.53 berikut ini :



Gambar 4.53
Hasil Sintesis Prioritas Solusi Eksternal Berdasarkan Nilai Setiap Responden

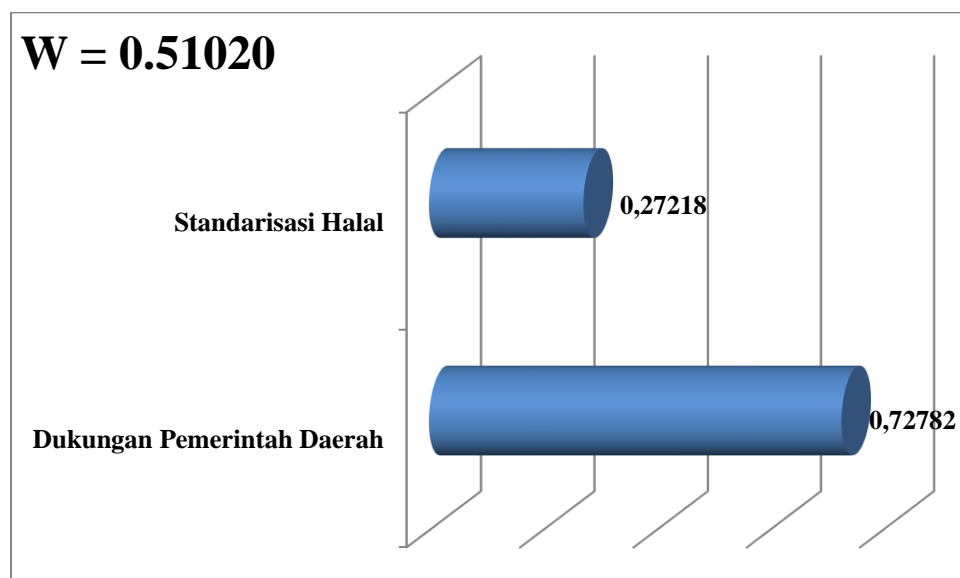
Berdasarkan jawaban per responden pada gambar 4.53 di atas menunjukkan bahwa hasil sintesis prioritas per responden dari 9 (sembilan) orang responden, 8 (delapan) orang responden menjawab bahwa solusi eksternal yang paling prioritas dalam menentukan strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah) adalah solusi infrastruktur. kemudian, 1 (satu) orang responden menjawab yang adalah solusi pemerintah. Hal ini dapat dilihat dengan angka *rater agreement* yang diperoleh sebesar 0.77778.

Hal ini sesuai dengan penelitian Andi Triyawan & Riska Carolina. Analisis pengembangan pariwisata halal di Provinsi Jawa Timur (2018) Hasil penelitian ini menunjukkan jika terjadi peningkatan di Indonesia khususnya di provinsi Jawa Timur belum berkembang dengan baik. Hal ini disebabkan oleh fasilitas atau fasilitas di tempat yang sempurna. Selain itu, berbagai teknologi dan aspek untuk mengembangkan halal masih belum

bersinergi dengan baik. Oleh karena itu, yang sesuai dibutuhkan strategi untuk mengembangkan halal, khususnya di Jawa Timur.²¹⁸

1. *Analisis Solusi Eksternal: Pemerintah*

Pada pembahasan ini akan diuraikan hasil sintesis pada klaster sub solusi pemerintah dalam menentukan strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah). Berdasarkan hasil pengolahan data melalui *Software Super Decision* diperoleh prioritas solusi pemerintah menurut pendapat seluruh responden sebagaimana terlihat pada gambar 4.54 berikut :

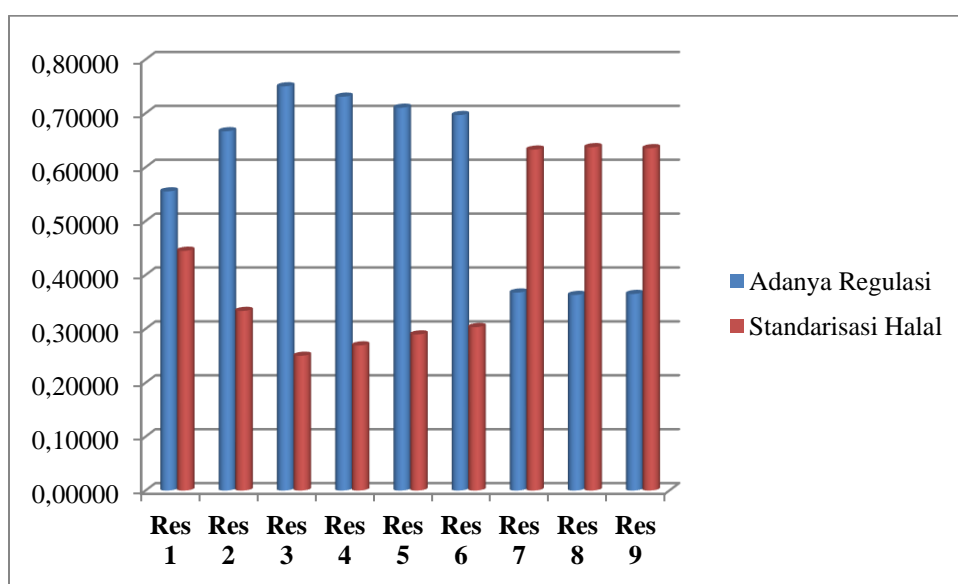


Gambar 4.54
Hasil Sintesis Analisis prioritas Solusi Pemerintah berdasarkan nilai Rata-Rata

Pada gambar 4.54 di atas menunjukkan bahwa pendapat gabungan para responden tentang solusi pemerintah yang paling prioritas dalam menentukan strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh

²¹⁸ Andi Triyawan & Riska Carolina Journal of Islamic Economics Lariba (2018). vol.4. iss. 1, pp. 27-35

Tengah) yang paling prioritas adalah solusi dukungan pemerintah daerah sebesar 0,72782 selanjutnya diikuti oleh standarisasi halal sebesar 0,27218. Namun bila dilihat dari tingkat kesepakatan responden nilai *rater agreement* seluruh responden sebesar 0.51020. artinya bahwa tingkat kesepakatan responden sebesar 51 % yang berarti tingkat kesepakatan responden tinggi dalam menentukan prioritas solusi pemerintah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 4.55 berikut ini.



Gambar 4.55
Hasil Sintesis Prioritas Solusi pemerintah Berdasarkan Nilai Setiap Responden

Berdasarkan jawaban per responden pada gambar 4.55 di atas menunjukkan bahwa hasil sintesis prioritas per responden dari 9 (sembilan) orang responden 6 (enam) orang responden menjawab solusi pemerintah yang paling prioritas dalam menentukan strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah) adalah adanya regulasi, kemudian diikuti 3 (tiga) orang menjawab solusi standarisasi halal. hal ini dapat dilihat dengan angka *rater agreement* yang diperoleh sebesar 0.51020.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rimet (2019) Strategi pengembangan wisata syariah di Sumatera Barat : Analisis SWOT. Menyatakan bahwa Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa strategi pengembangan wisata syariah di Sumatera Barat adalah menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan, diimplementasikan melalui suatu Gerakan terpadu pengembangan kepariwisataan, Rapat-Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Stakeholder terkait, kesepakatan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota menjadikan Sumatera Barat sebagai Destinasi Wisata Halal, terpilihnya Sumbar sebagai Destinasi Halal Terbaik Nasional, terpilihnya Sumbar sebagai Destinasi Kuliner Halal Terbaik Nasional, terpilihnya Sumbar sebagai World's Best Halal Destination, terpilihnya Sumbar sebagai World's Best Halal Culinary Destination, Sosialisasi Wisata Halal bagi Stakeholder Pariwisata, memberikan subsidi untuk pengurusan Sertifikasi Halal untuk industri (rumah makan/restoran), menyusun Ranperda Pariwisata Halal.²¹⁹

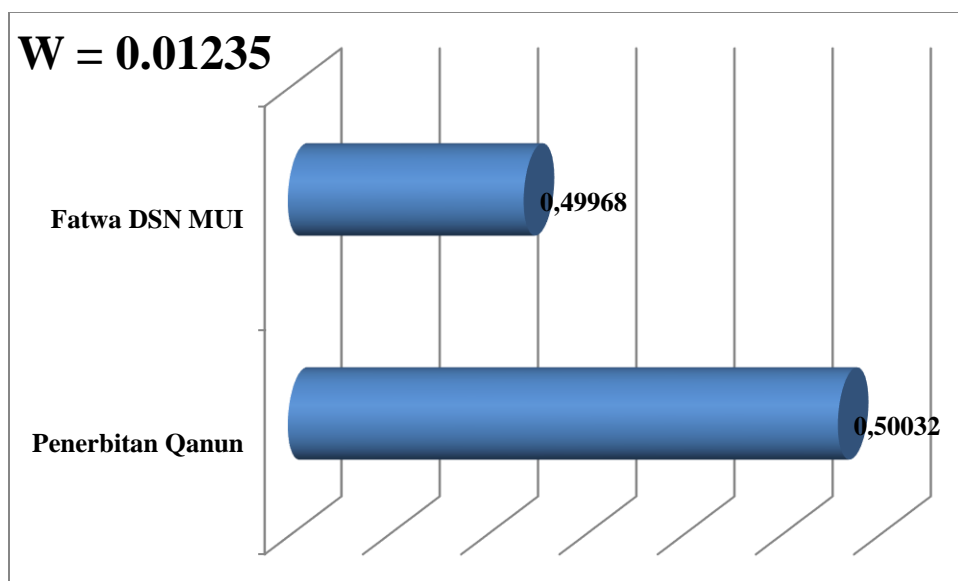
Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Antoni (2018) Sertifikasi Halal Pada Perhotelan Sebagai Strategi Pengembangan Halal Tourism di Indonesia Perspektif Maqashid Al-Syariah menyatakan bahwa salah satu bukti kebangkitan sistem ekonomi Islam pada era milenial ini adalah peningkatan sektor halal industri yang dimotori oleh halal tourism dengan capaian segmen pasar yang cukup besar, mengacu pada data GMTI. Walaupun secara teoritis masih menjadi perdebatan apakah halal tourism memiliki pondasi teoritis yang kuat. Namun prakteknya halal industri terus mengalami peningkatan. Perlu kajian yang lebih holistik dan detail berkaitan dengan formulasi teoritis dan proposisi-proposisi yang bersifat

²¹⁹ Rimet Strategi pengembangan wisata syariah di Sumatera Barat : Analisis SWOT. Jurnal rumpun ekonomi Syariah vol 2 no.1 2019.

ontologis, sehingga halal tourism memiliki pijakan teoritis yang kuat. Salah satu langkah yang ingin disuguhkan bagaimana pandangan maqashid al-syariah dalam terhadap praktek-praktek dalam bisnis jasa pariwisata terutama dikaitkan dengan urgensi dan relevansi sertifikasi halal pada produk-produk pariwisata berbasis ajaran Islam.²²⁰

2. Analisis Solusi Eksternal: Solusi Standar Hukum

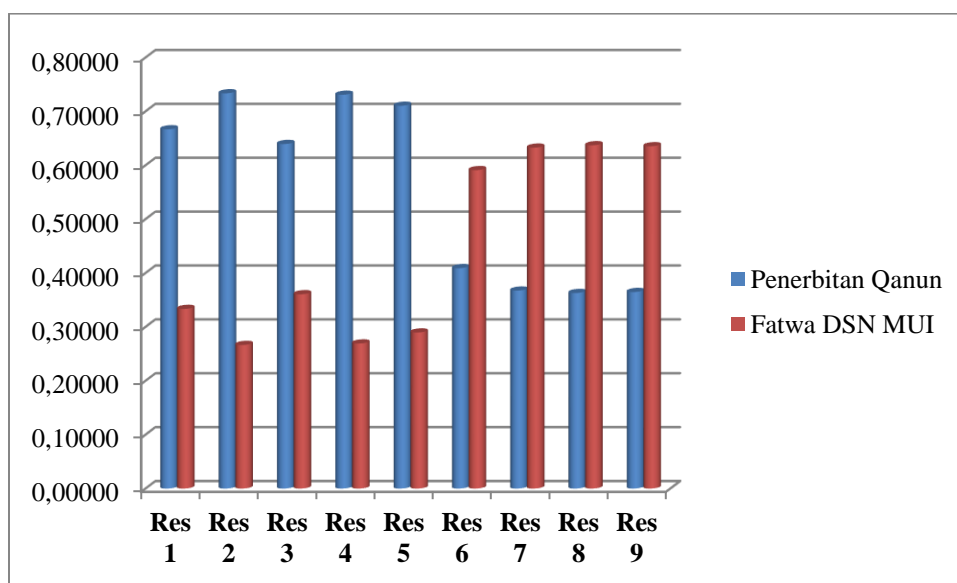
Pada pembahasan ini akan diuraikan hasil sintesis pada klaster sub solusi standar hukum dalam menentukan strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah). Berdasarkan hasil pengolahan data melalui *Software Super Decision* diperoleh prioritas solusi standar hukum menurut pendapat seluruh responden sebagaimana terlihat pada gambar 4.56 berikut:



Gambar 4.56
Hasil Sintesis Analisis prioritas Solusi Standar Hukum Berdasarkan Nilai Rata-Rata

²²⁰ Antoni, Sertifikasi Halal Pada Perhotelan Sebagai Strategi Pengembangan Halal Tourism di Indonesia Perspektif Maqashid Al-Syariah. Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan 2 (2) 2018. P: 1-17

Pada gambar 4.56 di atas menunjukkan bahwa pendapat gabungan para responden tentang solusi yang paling prioritas dalam strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah) yang paling prioritas adalah solusi penerbitan qanun sebesar 0,50032 kemudian diikuti oleh solusi fatwa SDN MUI sebesar 0,49968. Hasil perolehan nilai *rater agreement* seluruh responden sebesar 0.01235. Hal ini berarti tingkat kesepakatan responden sebesar 0,1 % yang berarti kesepakatan responden dalam menentukan prioritas solusi standar hukum sangat rendah, untuk lebih jelasnya prioritas setiap responden dapat dilihat pada gambar 4.57 berikut ini :



Gambar 4.57
Hasil Sintesis Prioritas Solusi Standar Hukum Berdasarkan Nilai Setiap Responden

Berdasarkan pada gambar 4.57 di atas menunjukkan bahwa hasil sintesis prioritas per responden menunjukkan bahwa dari 9 (sembilan) orang responden, 5 (lima) orang responden menjawab bahwa solusi standar hukum yang paling prioritas dalam menentukan strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan

perekonomian masyarakat (Aceh Tengah) adalah penerbitan qanun, kemudian 4 (empat) orang menjawab solusi fatwa DSN MUI. Ini sesuai dengan angka *rater agreement* yang diperoleh dari seluruh responden, yaitu sebesar 0,01235.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfi Khairuni Ramdhan, Asep Ramdan Hidayat, Eva Misfah Bayuni, (2018) Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dan Persepsi Konsumen Tentang Hotel Syariah Kawasan Wisata di Lembang. Menyatakan bahwa bahwa kriteria hotel Syariah yang tercantum dalam fatwa tersebut ada tujuh kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap pebisnis hotel Syariah dilihat dari aspek pengelolaan dan pelayanan. Sedangkan persepsi konsumen secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Hotel Rumah Kayu Syariah dan sangat kecil pengaruhnya yaitu hanya 5% dan sisanya disebabkan oleh faktor lain. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hotel Rumah Kayu Syariah hanya memenuhi 2 dari 7 kriteria yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI dan sejalan dengan persepsi konsumen hanya sekitar 5 % dari jumlah pengunjung selama dua tahun terakhir yang beranggapan hotel tersebut sesuai dengan prinsip Syariah. Yang artinya Hotel Rumah Kayu Syariah belum sesuai dengan prinsip Syariah dalam fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X1/2016 point kelima.²²¹

Abdul kader Jailani (2018) Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Pada Era Otonomi Luas Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, latar belakang lahirnya Perda tentang Pariwisata Halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat berlandaskan

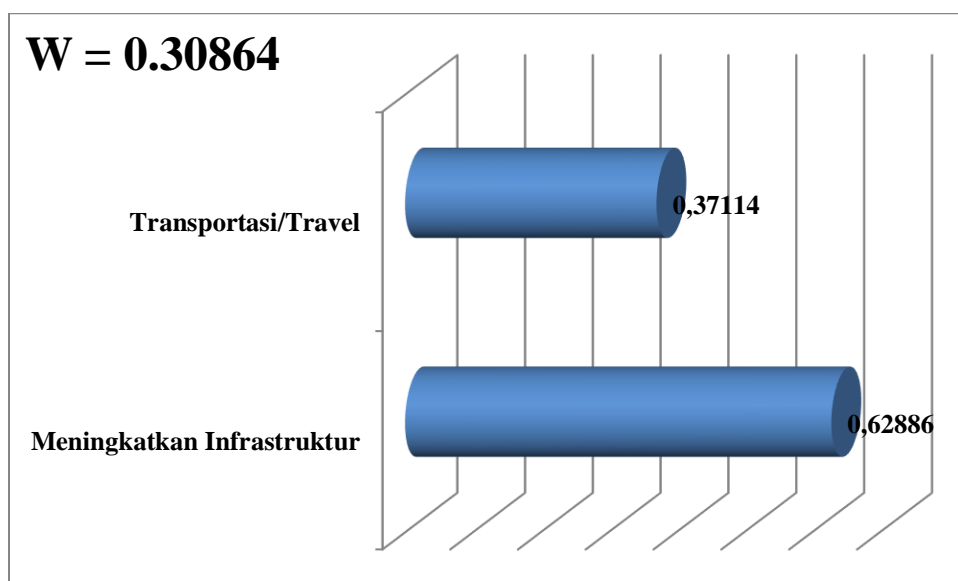
²²¹ Alfi Khairuni Ramdhan, Asep Ramdan Hidayat, Eva Misfah Bayuni, Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dan Persepsi Konsumen Tentang Hotel Syariah Kawasan Wisata di Lembang. Prosiding Hukum Ekonomi Syariah 2018

pada tiga hal yaitu, *pertama*, landasan filosofisnya adalah pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka mendukung terwujudnya percepatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesempatan berusaha, memperoleh manfaat dan mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan dengan tetap memperhatikan sistem nilai budaya yang berlaku di masyarakat sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. *Kedua*, landasan sosiologis pengembangan Pariwisata halal adalah aspek demografis dan geografis Provinsi Nusa Tenggara Barat sangat menunjang pelaksanaan pariwisata. *Ketiga*, landasan yuridis pengembangan Pariwisata halal adalah atribusi dan delegasi dari Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Pasal 9 UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 12 ayat (3) huruf b dan Pasal 236 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 Permenparekreat No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.²²²

3. *Analisis Solusi Eksternal: Solusi Infrastruktur*

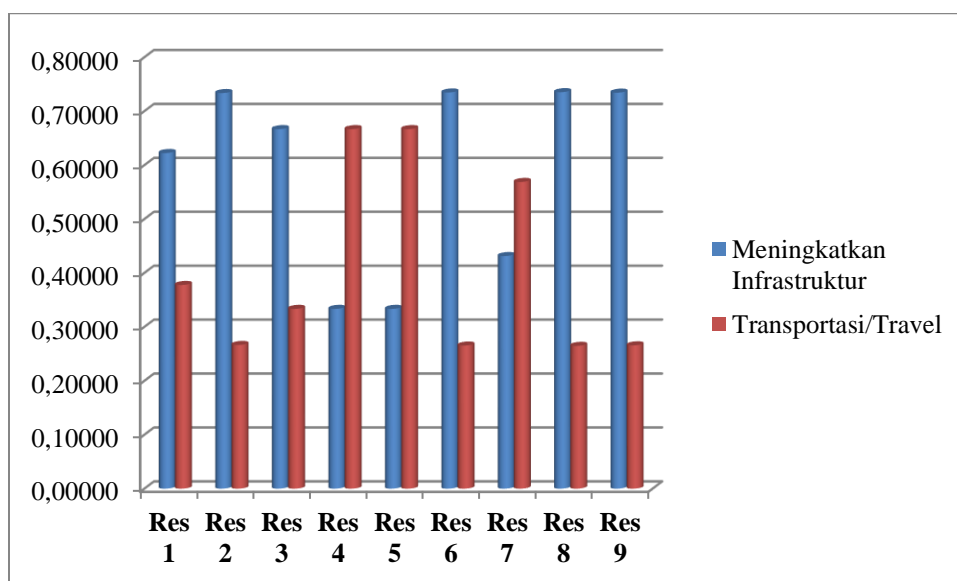
Pada pembahasan ini akan diuraikan hasil sintesis pada kluster sub solusi infrastruktur dalam menentukan strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah). Berdasarkan hasil pengolahan data melalui *Software Super Decision* diperoleh prioritas solusi Infrastruktur menurut pendapat seluruh responden sebagaimana terlihat pada gambar 4.58 berikut:

²²² Abdul kader Jailani, Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Pada Era Otonomi Luas Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Pariwisata*, Vol. 5 No. 1 April 2018



Gambar 4.58
Hasil Sintesis Analisis prioritas Solusi Infrastruktur Berdasarkan Nilai Rata-Rata

Pada gambar 4.58 di atas menunjukkan bahwa pendapat gabungan para responden tentang solusi infrastruktur yang paling prioritas dalam menentukan strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah) yang paling prioritas adalah solusi meningkatkan infrastruktur sebesar 0,62886, dan selanjutnya diikuti oleh solusi transportasi/travel sebesar 0,37114. Hasil perolehan nilai *rater agreement* seluruh responden sebesar 0.30864. Hal ini berarti tingkat kesepakatan responden sebesar 30 % yang berarti kesepakatan responden dalam menentukan prioritas solusi infrastruktur sedang, untuk lebih jelasnya prioritas setiap responden dapat dilihat pada gambar 4.59 berikut ini :



Gambar 4.59
Hasil Sintesis Prioritas Solusi infrastruktur Berdasarkan Nilai Setiap Responden

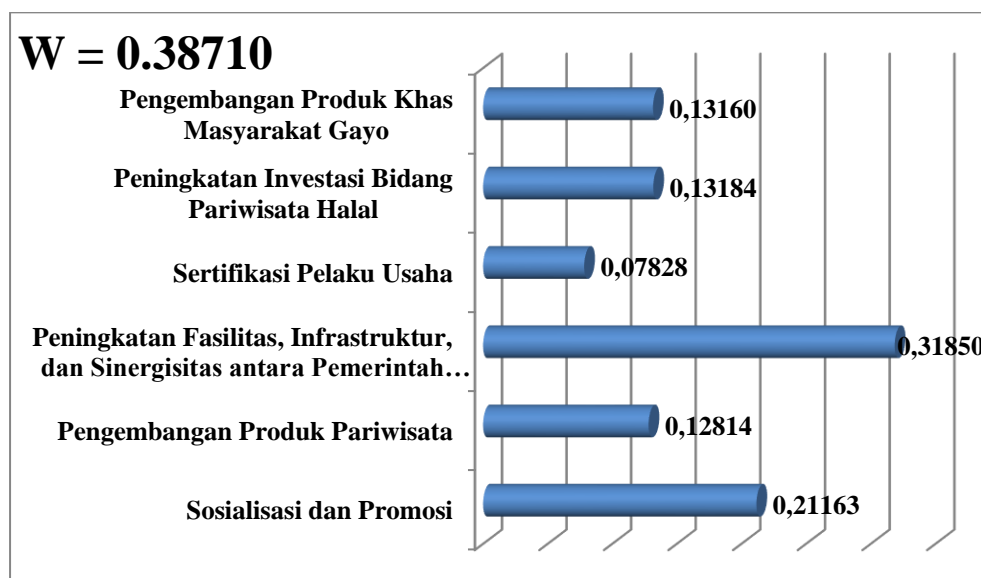
Berdasarkan jawaban per responden pada gambar 4.59 di atas menunjukkan bahwa hasil sintesis prioritas per responden bahwa dari 9 (sembilan) orang responden, 6 (enam) orang responden menjawab solusi infrastruktur yang paling prioritas dalam menentukan strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah) adalah meningkatkan infrastruktur, kemudian 3 (tiga) orang menjawab solusi yang paling prioritas adalah transportasi/travel. Hal ini sesuai dengan angka *rater agreement* yang diperoleh dari seluruh responden sebesar 0.30864.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Adgyl Richardy (2014) Analisis Kesesuaian Permintaan (Demand) Wisatawan Dan Penawaran (Supply) Obyek Wisata Pantai Walengka bola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa obyek wisata pantai Walengkabola memiliki potensi dan keunikan atraksi untuk di kembangkan. Namun, terjadi ketidaksesuaian antara permintaan (demand) wisatawan dan penawaran (supply) obyek wisata pantai Walengkabola disebabkan oleh

belum ada travel agent, belum didukung ketersediaan fasilitas penginapan, kurangnya angkutan wisata untuk menuju ke Obyek wisata, buruknya kondisi jalan, buruknya kondisi fasilitas.²²³

3. Analisis Hasil Sintesis Strategi

Pada pembahasan ini akan diuraikan hasil sintesis pada kluster strategi dalam menentukan strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah). Berdasarkan hasil pengolahan data melalui *Software Super Decision* diperoleh prioritas kluster strategi menurut pendapat seluruh responden sebagaimana terlihat pada gambar 4.60 berikut :

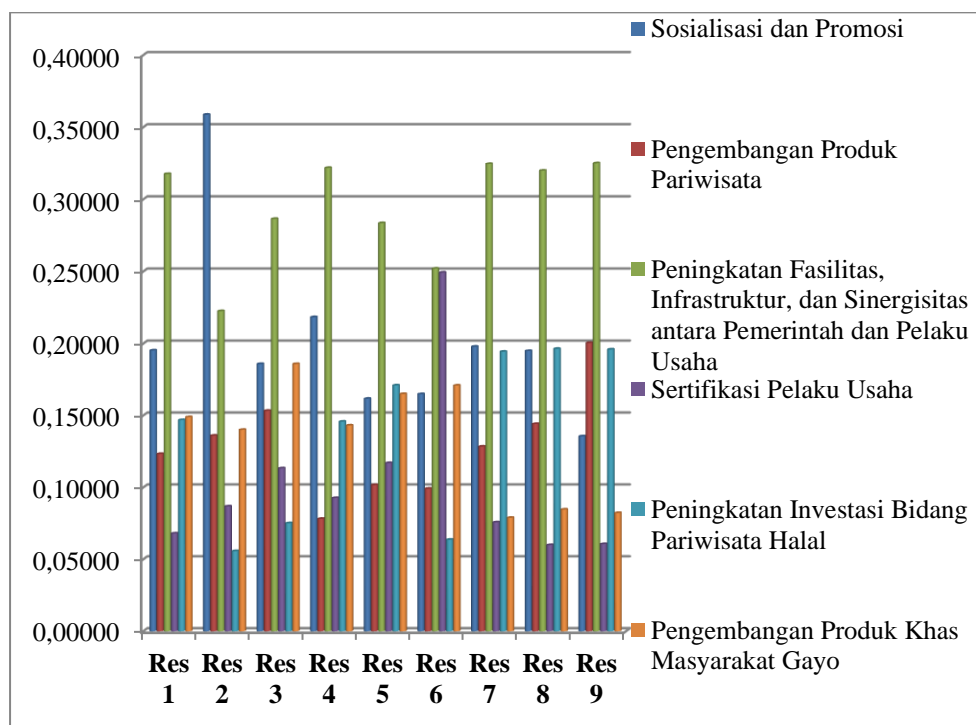


Gambar 4.60
Hasil Sintesis Prioritas Solusi Strategi Berdasarkan Nilai Rata-Rata

Pada gambar 4.60 di atas menunjukkan bahwa pendapat gabungan para responden tentang strategi yang paling prioritas dalam menentukan strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah) yang paling

²²³ Adgyl Richardy. Analisis Kesesuaian Permintaan (Demand) Wisatawan Dan Penawaran (Supply) Obyek Wisata Pantai Walengka bola. Jurnal Teknik PWK Volume 1 Nomor 1 2014 Online : <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/pwk>

prioritas adalah peningkatan fasilitas, infrastruktur, dan sinergisitas antara pemerintah dan pelaku usaha sebesar 0,31850, kemudian diikuti oleh sosialisasi dan promosi sebesar 0,21163, Peningkatan investasi bidang pariwisata halal sebesar 0,13184, pengembangan produk khas masyarakat Gayo sebesar 0,13160, pengembangan produk pariwisata sebesar 0,12814, dan sertifikasi pelaku usaha sebesar 0,07828. Hasil perolehan nilai *rater agreement* seluruh responden sebesar 0,38710. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesepakatan responden sebesar 38 % yang berarti kesepakatan responden dalam menentukan prioritas strategi sedang, untuk lebih jelasnya prioritas setiap responden dapat dilihat pada gambar 4.61 berikut ini :



Gambar 4.61
Hasil Sintesis Prioritas Strategi Berdasarkan Nilai Setiap Responden

Berdasarkan jawaban per responden pada gambar 4.61 di atas menunjukkan bahwa hasil sintesis prioritas per responden dari 9 (sembilan) orang responden, 7 (tujuh) orang responden menjawab strategi yang paling prioritas dalam menentukan pengembangan destinasi pariwisata halal

berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah) adalah peningkatan pasilitas, infrastruktur, dan sinergisitas antara pemerintah dan pelaku usaha, kemudian 2 (dua) orang peningkatan investasi di bidang pariwisata halal, dan 3 (tiga) orang menjawab peningkatan sertifikasi pelaku usaha. Hal ini dapat dilihat dengan angka *rater agreement* yang diperoleh sebesar 0.32069.

E. Pembahasan Hasil Penelitian

Analisis data diatas menghasilkan kesimpulan penelitian. Pembahasan terdiri dari masalah, solusi dan strategi. Temuan pembahasan adalah sebagai berikut :

1. Masalah pada pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini mengenai strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah), maka dapat dikelompokkan ke dalam dua masalah yaitu masalah internal dan masalah eksternal. Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan melalui *Software Super Decision* diperoleh prioritas masalah internal dan eksternal menurut pendapat seluruh responden bahwa masalah yang paling prioritas dalam strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah) adalah masalah eksternal sebesar 0,58835 dan diikuti oleh masalah internal sebesar 0,41165. Namun bila kita lihat dari tingkat kesepakatan responden (*rater agreement*) seluruh responden sebesar (W:0,30864) artinya bahwa tingkat kesepakan responden hanya 30% yang bermakna tingkat kesepakatannya sedang.

Menurut hasil penelitian ini infrastruktur menjadi masalah dalam strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah), hal ini disebabkan oleh 2 hal yang pertama masih lemahnya infrastruktur yang tersedia dan yang kedua yang masih kurang tersedianya infrastruktur yang mendukung

berkembangnya pariwisata yang ada di Aceh Tengah, seperti akses untuk menuju sebuah destinasi wisata sangat terbatas bahkan tidak tersedianya transportasi untuk menuju objek wisata dan masih kurangnya petunjuk jalan ke tempat objek wisata. Banyak orang-orang yang datang dari luar daerah tidak tau tempat-tempat wisata bahkan para pengunjung bertanya kepada masyarakat yang ada dipingir jalan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh dinas pariwisata dan olah raga Aceh Tengah (2017) menyimpulkan bahwa Kabupaten Aceh Tengah sebagai kabupaten daratan masih ditemukan beberapa hambatan pada aspek aksesibilitas (ketersediaan moda transportasi darat dan udara) serta konektivitas antar wilayah kecamatan dan desa masih sangat terbatas. Pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan dimaksudkan untuk meningkatkan aksesibilitas perhubungan serta mengurangi tingkat keterisolasian dan kesenjangan antar wilayah. Pembangunan infrastruktur wilayah yang memadai pada gilirannya akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Di luar Kota Takengon, ketersediaan fasilitas infrastruktur belum cukup banyak, seperti arah menunjuk jalan menuju objek wisata, kurang di peliharanya objek-objek wisata peninggalan sejarah penjajahan belanda dulu, listrik, air bersih (PDAM), telekomunikasi, jalan umum, jaringan informasi umum radio dan televisi.²²⁴

Menurut M Ikhsan pembangunan infrastruktur merupakan persyaratan mutlak sebelum membuat yang lain, dan bahkan lebih penting dibandingkan dengan promosi.²²⁵ Arief Yahya juga setuju dengan adanya pembangunan infrastruktur karena akan sangat mendukung peningkatan sektor pariwisata. Infrastruktur ini juga tidak hanya sebatas jalan tol, tetapi juga bandara dan pelabuhan. Dengan semakin lengkapnya fasilitas bandara dan pelabuhan, akses

²²⁴ Naskah Akademik Dan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten (Ripparkab) Aceh Tengah Tahun 2018-2025

²²⁵ I Made Asdhiana, Infrastruktur Jadi Syarat Mutlak Kembangkan Pariwisata, amp. kompas.com, pada Rabu 27 Januari 2021, 22 WIB

destinasi wisata pun akan semakin terbuka.²²⁶ Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hada Sucahyono mengatakan, pihaknya akan melanjutkan pembangunan dan penataan sejumlah sarana dan fasilitas penunjang kawasan wisata mencakup semua sektor mulai dari pembangunan perumahan, bandara, jalan tol, penyediaan air bersih hingga sanitasi.²²⁷ Dan tentu saja untuk destinasi wisata halal, infrastruktur yang diprioritaskan adalah infrastruktur yang ramah muslim.

Akses yang cepat karena infrastruktur yang nyambung, membuat berwisata semakin fresh, semakin sering piknik, buat orang-orang kreatif, akan semakin produktif. Berwisata pun lebih berkualitas, tidak habis energi di perjalanan, tetapi punya stok energi yang dioptimalkan untuk mengeksplorasi atraksi di destinasi. Wisatawan, bisa lebih lama, lebih detail, lebih longgar dalam mengeksplorasi destinasi, baik alam, budaya maupun buatan. Karena akses ke sejumlah destinasi menjadi sangat lancar. Waktu tempuh otomatis menjadi berkurang. Kemudahan ini sekaligus mempertegas pariwisata sebagai leading.²²⁸

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eka Dewi Satriana, Hayyun Durrotul Faridah yang menemukan bahwa wisatawan yang diminta untuk menggambarkan pengalaman mereka terhadap beberapa indikator seperti keberadaan masyarakat transportasi, atraksi, fasilitas, akses, layanan tambahan, dan pengalaman menunjukkan bahwa Jember berhasil minat wisatawan dengan memanfaatkan daya tarik daerahnya.²²⁹

²²⁶ Anissa Dea Widiarini, Infrastruktur Berperan Penting Untuk Kemajuan Pariwisata, amp. kompas.com, pada senin 24 Juni 2019, 11:36 WIB

²²⁷ Rizka Gusti Anggraini, Pemerintah Genjot Pembangunan Infrastruktur Kawasan Wisata Prioritas, google.com, pada sabtu 16 Februari 2019, 09:22 WIB

²²⁸ Tety Yuliaty, Model Wisata Halal Sustainable di Indonesia, Disertasi Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2020

²²⁹ Eka Dewi Satriana, Hayyun Durrotul Faridah, Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, Dan Tantangan, Journal of Halal Product and Research (JHPR) Vol. 01 No.02, Mei-November 2018
© Copyright by Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal Universitas Airlangga | e-ISSN: 2654-9778

Permasalahan infrastruktur menjadi permasalahan dan salah satu faktor yang utama dalam pengembangan destinasi pariwisata halal yang ada di Aceh Tengah. Karena Aceh Tengah berada dalam daerah dataran tinggi dan dikelilingi dan diapit oleh pegunungan yang membentang maka infrastruktur menjadi salah satu penghambat dalam pengembangan pariwisata halal yang ada di Aceh Tengah karena para wisatawan akan sulit untuk menjangkau destinasi pariwisata tanpa adanya infrastruktur akses yang baik maka akan banyak memakan waktu untuk mengunjungi objek-objek wisata yang ada di Aceh Tengah.

Kondisi sebahagian objek-wisata yang ada di Aceh Tengah yang kita jumpai masih banyaknya tempat-tempat wisata yang tidak menyediakan tempat-tempat ibadah seperti tersedianya mushalla ini menjadi masalah yang sangat krusial karena sebagai umat muslim kita akan melaksanakan kewajiban kita yaitu shalat, dan masalah selanjutnya mengenai belum tersedianya toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan seharusnya dimana ada objek-objek wisata hal tersebut diatas harusnya sudah ada dengan tujuan supaya para pengunjung merasa nyaman dan tentram tanpa meninggalkan kewajiban kita sebagai umat muslim dan terjaganya kebersihan pada suatu daerah bahkan pada suatu objek wisata.

Selain permasalahan infrastruktur, masalah pemerintah dalam pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yaitu regulasi dan sertifikasi menjadi masalah dalam pengembangan destinasi pariwisata halal Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mariska Ardilla Faza dengan judul Analisis SWOT Pariwisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat (2019) menyimpulkan bahwa, kuatnya dorongan pemerintah daerah, ketersediaan banyak destinasi wisata dan fasilitas ibadah, serta eratnya orientasi masyarakat NTB dengan Islam menjadi dasar kekuatannya. Kelemahannya yaitu kurangnya jumlah kegiatan usaha yang bersertifikasi halal dan masih belum optimalnya penyediaan layanan bagi wisatawan. Sedangkan peluangnya adalah akses yang

relatif mudah bagi turis untuk berkunjung ke NTB dan adanya dukungan dari pemerintah pusat. Lalu ancamannya adalah negara-negara “pesaing” yang juga mengembangkan Pariwisata Halal, adanya kemungkinan masuknya budaya yang tak sejalan dan sikap negatif terkait kelestarian lingkungan dari wisatawan, dan bencana alam. Dengan menyusun dan menerapkan strategi berdasarkan hasil analisis, diharapkan NTB semakin baik dalam mengembangkan Pariwisata Halalnya demi memajukan kondisi perekonomian, serta bisa menjadi benchmark bagi provinsi lain dalam memajukan bidang ini.²³⁰ Senada dengan itu Arief Yahya mengatakan sertifikasi adalah investasi yang harus dilalui, semakin disertifikasi semakin bagus bisnisnya. Sertifikasi halal baik untuk restoran maupun hotel akan memberikan rasa aman pada wisatawan muslim yang datang. Sertifikasi merupakan garansi, tanpa ada sertifikasi maka tidak ada jaminan bagi wisatawan.²³¹

Kondisi masalah tentang sertifikasi dan regulasi mengenai sertifikasi halal pada rumah makan dan hotel yang berada di daerah Aceh Tengah belum ada yang membuat sertifikasi halal yang menjadi permasalahannya adalah tentang persepsi masyarakat bahwa Aceh adalah daerah syariat islam pasti segala sesuatu yang berada di Aceh khususnya Aceh Tengah sudah halal padahal sertifikasi halal itu sangat penting untuk memajukan pariwisata halal yang ada di Aceh Tengah dengan sasaran adalah para pendatang/pelancong dari luar negeri baik dari negara muslim maupun negara non muslim bahwa dengan adanya sertifikasi halal mereka tidak merasakan keraguan lagi terhadap produk yang ditawarkan. Permasalahan pada sertifikasi halal tidak hanya terbatas pada halalnya saja akan tetapi harus bergizi.

Masalah standar hukum dalam pengembangan destinasi pariwisata halal juga menjadi masalah dalam hal ini belum adanya qanun yang dikeluarkan oleh

²³⁰ Mariska Ardilla Faza dengan judul Analisis SWOT Pariwisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Manajemen Indonesia* (Vol. 19(1), pp. 10-29, 2019)

²³¹ Viva, Pentingnya Label Halal Untuk Dunia Pariwisata Indonesia, viva.co.id. pada Selasa 2 Januari 2021, 17:55 WIB

pemerintah dalam pengembangan destinasi pariwisata halal yang ada di Aceh tengah, karena dengan adanya standar hukum yang dibuat akan dapat mengembangkan destinasi pariwisata halal yang ada di Aceh Tengah, seperti keberhasilan NTB dalam pengembangan destinasi pariwisata halal karena adanya standar hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah daerahnya yang berupa penerbitan perda yang berkaitan dengan pariwisata halal yang di NTB.

2. Solusi dalam strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini mengenai strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah), maka dapat dikelompokkan ke dalam dua solusi yaitu solusi internal dan solusi eksternal. Berdasarkan hasil pengolahan data melalui *Software Super Decision* diperoleh bahwa solusi yang paling prioritas adalah solusi eksternal sebesar 0,58835, selanjutnya diikuti oleh solusi internal sebesar 0,41165. Hasil perolehan nilai *rater agreement* seluruh responden sebesar 0,30864. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesepakatan responden sebesar 30 18 % yang berarti kesepakatan responden dalam menentukan prioritas solusi sedang.

Berdasarkan hasil sintesis pada kluster solusi eksternal menunjukkan bahwa pendapat gabungan para responden, tentang solusi eksternal yang paling prioritas dalam menentukan strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah) yang paling prioritas adalah solusi infrastruktur sebesar 0,55673. Selanjutnya diikuti oleh solusi standar hukum sebesar 0,22685 dan yang menempati urutan terakhir solusi pemerintah sebesar 0,21641. Namun bila dilihat dari tingkat kesepakatan responden *rater agreement* seluruh responden sebesar 0,77778. Artinya bahwa tingkat kesepakatan responden sebesar 77 % yang berarti tingkat kesepakatan responden tinggi dalam menentukan prioritas solusi eksternal.

Dalam dunia kepariwisataan masalah kemudahan informasi dan transportasi merupakan salah satu infrastruktur yang tidak kalah pentingnya dengan faktor pendukung yang lain. Tanpa adanya sarana dan prasarana travel (biro perjalanan) yang memadai mustahil rasanya sebuah destinasi wisata akan banyak diminati oleh para wisatawan, karena sulitnya informasi segala sesuatunya yang terkait dengan destinasi yang akan dituju. Tanpa kecuali kemudahan sarana transportasi untuk menjamin keterjangkauan dari tempat asal wisatawan menuju ke arah tujuan wisata.

Karena itu ketercukupan sarana pemandu dan transportasi tentu merupakan keniscayaan guna mendukung pembangunan dan keberlanjutan sebuah destinasi wisata, terlebih lagi bagi destinasi yang baru dibangun atau baru dipasarkan di tengah masyarakat. Baik dalam skala regional, nasional maupun internasional. Tentang hal ini kiranya terkait dengan tugas kehumasan atau bagian pemasaran dalam mengiklankan dengan tujuan untuk meyakinkan masyarakat bahwa destinasi wisata yang dijual telah didukung oleh infrastruktur yang memadai sehingga mudah dijangkau.

Untuk itu, tentu saja ketersediaan biro perjalanan merupakan peluang, sekaligus tantangan bagi para pengusaha di bidang travel untuk memperkuat usahanya atau sebagai lahan usaha baru bagi pengusaha baru.²³² Karena bagaimanapun mereka harus masuk ke arena persaingan usaha jasa dalam menangkap peluang, sekaligus merebut hati masyarakat pengguna. Untuk dapat memenangkan persaingan di era kemajuan teknologi saat ini, agar mampu memenangkan persaingan, tentu bagi seorang pengusaha selain mampu memanfaatkan jasa teknologi juga dituntut kemampuan membangun strategi baru, inovasi baru, kreasi baru dan lain sebagainya. Kiranya hal ini merupakan prasyarat (prakondisi) yang harus disadari dan dipersiapkan oleh para pengusaha travel, terlebih lagi bagi pemain baru.

²³² Ronny Anggrianto, *Revolusi Gila Bisnis Tour & Travel* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo). 2012

Akan tetapi kesemua prasyarat itu belumlah cukup dalam menghadapi kerasnya persaingan, karena pada hakikatnya usaha transportasi adalah terkait dengan masalah pelayanan dalam menjual jasa kepada konsumen. Ini berarti pengguna jasa belumlah cukup disuguhi indahnya kendaraan secara fisik, namun di balik itu perlu ada kepatuhan dan keterbukaan dalam transaksi antara pengusaha dengan pengguna. Perusahaan, harus jujur antara apa yang diiklankan dengan praktik di lapangan. Katakan saja yang berkaitan dengan masalah harga, ketepatan waktu, kelayakan kendaraan, dan keramahan pelayanan. Demikian pula dalam kaitan dengan suguhan konsumsi (snack misalnya) harus benar-benar halal, dan lain sebagainya.

Atau untuk wisata halal ada perjanjian khusus yang membedakan dari wisata konvensional yakni, selama dalam menempuh perjalanan ada titik-titik tertentu untuk memberi kesempatan kepada wisatawan melakukan rehat, makan, menunaikan shalat dan lain sebagainya. Rumah makan sebagai tempat rehat, makan dan shalat haruslah rumah makan yang hanya menyuguhkan makanan halal.²³³ Kiranya hal ini merupakan salah satu kiat untuk memanjakan konsumen sebagai salah satu bentuk pelayanan excellent dari sebuah usaha transportasi. Karena bagaimanapun perusahaan harus mampu melayani kepentingan konsumen agar terbangun kesan bahwa perusahaan yang digunakan mengedepankan nilai-nilai syariah.

Infrastruktur yang dibutuhkan dalam mengembangkan pariwisata syariah tidak sebatas pada ketersediaan terminal, atau layanan transportasi semata. Ketersediaan restoran halal, pemandu wisata yang memiliki pemahaman yang baik tentang informasi pariwisata syariah, serta ketersediaan fasilitas untuk beribadah adalah termasuk pada infrastruktur pariwisata syariah²³⁴. Lebih luas lagi infrastruktur transportasi tidak hanya sekedar fokus pada memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Bahkan,

²³³ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia N0, 108/DSNMUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

²³⁴ Aan Jaelani. *Industriwisata halal di Indonesia: Potensi dan prospek*. 2017 h. 17

infrastruktur transportasi yang baik merupakan salah satu strategi untuk dapat menarik investasi asing secara langsung.²³⁵

Aceh Tengah masih belum adanya usaha travel yang khusus untuk menjemput dan mengantar para pengunjung untuk menuju ke tempat-tempat objek wisata yang ada di Aceh Tengah, bahkan alat transportasi darat seperti angkutan dan sejenisnya yang menjujua ke tempat objek-objek wisata, oleh sebab itulah para stakeholder pariwisata di Aceh Tengah perlu mengkaji lebih dalam lagi peluang-peluang infrastruktur yang dapat dibangun serta dikembangkan di daerah Aceh Tengah. Dengan demikian, kebutuhan para wisatawan akan infrastruktur yang nyaman dan layak dapat terpenuhi. Pemerintah juga perlu memfasilitas aktifitas perdagangan melalui kelayakan ketersediaan infrastruktur dan transportasi yang baik agar dapat terjadinya aktifitas perdagangan yang lebih luas lagi, atau dengan kata lain, produk-produk lokal dapat dipasarkan secara luas. Hal ini juga dapat menjadi peluang investasi yang baik bagi pemerintah Aceh Tengah untuk dapat menarik investasi baik lokal maupun asing dalam mengembangkan pariwisata halal.

Temuan ini memperkuat temuan penelitian yang dilakukan oleh Herry Akbar, et.al Tentang Infrastruktur Prioritas Pada Zona Pariwisata Di Kota Sabang Dengan Menggunakan Metode Location Quotient (LQ) Dan Analytic Network Proses (ANP yang menemukan pentingnya pembangunan infrastruktur Teupin Layeu dan Gapang serta Pulau Rebiah memiliki prioritas tertinggi untuk dikembangkannya infrastruktur penginapan/akomodasi. Kemudian disusul dengan infrastruktur parkir di Teupin Layeu dan akses jalan menuju km 0.²³⁶

²³⁵ Saidi, S. and Hammami, S. (2011), "The role of transport and logistics to attract foreign direct investment in the developing countries", Logistics (LOGISTIQUA), 2011 4th International Conference in Hammamet, Tunisia, h. 484-489

²³⁶ Herry Akbar dkk, Infrastruktur prioritas pada zona pariwisata di kota sabang dengan menggunakan metode location quotient (LQ) dan analytic network proses (ANP). Jurnal Teknik Sipil Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. 2017

Hal ini sama juga ditemukan oleh Nurul Huda, dkk bahwa infrastruktur sangat penting untuk mengembangkan wisata halal bahwa yang paling prioritas dalam pengembangan pariwisata halal adalah meningkatkan infrastruktur dari aspek pemerintahan, meningkatkan informasi tentang lokasi dan media online dari komunitas, serta meningkatkan promosi makanan halal dari aspek hotel, travel, dan makanan halal.²³⁷

Temuan ini memberikan implikasi bagi seluruh stakeholder mulai dari pemerintah, praktisi, dan akademisi saling bersinergi dalam meningkatkan infrastruktur dan kesediaan travel untuk para pengunjung dengan tujuan untuk menjadikan destinasi pariwisata Aceh Tengah menjadi salah satu destinasi wisata halal yang dapat diperhitungkan tidak hanya pada level lokal akan tetapi pada tingkat global. Seharusnya para stekholder dan pengusaha lokal dapat mewujudkan model transportasi dan travel dengan tujuan untuk meningkatkan para pengunjung untuk datang ke daerah Aceh Tengah.

3. Strategi dalam pengembangan destinasi pariwisata halal yang berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan hasil sintesis pada kluster strategi dalam pengembangan destinasi pariwisata halal yang berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Aceh Tengah), berdasarkan hasil pengolahan data melalui *software Super Decision* diperoleh kluster yang paling prioritas adalah peningkatan fasilitas, infrastruktur, dan sinergisitas antara pemerintah dan pelaku usaha yang berkaitan dengan pariwisata sebesar 0,31850, sosialisasi dan promosi sebesar 0,21163, peningkatan investasi bidang pariwisata halal sebesar 0,13184, pengembangan produk khas masyarakat Gayo sebesar 0,13160, dan sertifikasi pelaku usaha sebesar 0,07828.

Menarik untuk melihat bahwa kearifan lokal masyarakat Gayo seperti pengembangan produk khas masyarakat Gayo hanya sebesar 0.131. Tentang hal ini dapat dilihat dari beberapa hal, misalnya tradisi lokal masyarakat Gayo

²³⁷ Nurul Huda dkk, South Sulawesi Halal Tourism a Strategic Approach. *Advances in Economics, Business and Management Research*, volume 143.2019

sudah sangat kuat, sehingga responden melihat persoalan utamanya adalah infrastuktur. Meskipun wisatawan sangat meminati wisata budaya yang berbasis keunikan dari tradisi dan kearifan lokal masyarakat Gayo yang sangat menarik dan mempunyai nilai ekonomis yang dapat mengerakkan perekonomian masyarakat lokal oleh karena itu dibutuhkan infrastruktur yang memadai dengan tujuan untuk memudahkan para pengunjung untuk melihat secara langsung budaya dan kearifan lokal masyarakat Gayo.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh gubernur Bali bahwa meskipun Bali telah dikenal sebagai daerah wisata, namun pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata masih belum maksimal. Bali sebagai destinasi wisata dunia yang terbaik, masih sangat membutuhkan infrastruktur secara integrasi dan terkoneksi sebagai destinasi wisata karena kekayaan dan keunikan budayannya.²³⁸

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, antara pemerintah dan dunia usaha, serta antar daerah sangat diperlukan dalam meningkatkan potensi keberhasilan pembangunan pariwisata berbasis kearifan lokal. Kunci utama untuk menciptakan sebuah daerah dengan industri pariwisata yang baik adalah terwujudnya kenyamanan pengunjung. Kenyamanan pengunjung akan bisa terlaksana jika dua variabel berikut terpenuhi yakni adanya budaya dan perilaku masyarakat yang ramah pariwisata dan adanya infrastruktur yang saling berkesinambungan antar destinasi pariwisata. Untuk itu pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama mewujudkan adanya peningkatan infrastruktur kepariwisataan di Aceh Tengah. Walaupun kaya akan budaya dan kondisi alamnya nan cantik, tidak membuat Aceh Tengah kebanjiran kunjungan wisatawan. Untuk itu promosi dan peningkatan infrastruktur pariwisata harus terus dilakukan. Untuk mewujudkan hal diatas, perlu kiranya untuk mengetahui kapasitas infrastruktur di Aceh Tengah saat ini dalam rangka mendukung industri pariwisata halal. Ini dimaksudkan untuk mendapatkan benchamarking

²³⁸ <https://kumparan.com/kumparan-travel/gubernur-bali-focus-bangun-infrastruktur-untuk-kembangkan-pariwisata-bali-1sqLfWXptw7/full>. di akses 12 Januari 2021 jam 14.30 WIB

atau titik patok bagi pengembangan infrastruktur kedepannya dalam rangka peningkatan aksesibilitas pariwisata Aceh Tengah.²³⁹

Untuk mewujudkan pariwisata halal yang ada di Aceh Tengah Dari hasil penelitian ini dan pendapat para pelaku wisata halal bahwa untuk keberhasilan sebuah strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal maka perlu kerja sama dan melibatkan semua pihak guna untuk dapat dilaksanakan maknanya sinergitas stakeholders tidak bisa ditawar. Seperti yang dikembangkan pemerintah RI tentang pembangunan pariwisata sustainable secara umum dapat diketahui indikatornya adalah.²⁴⁰

1. Kesadaran tentang tanggungjawab terhadap lingkungan, bahwa strategi pembangunan pariwisata sustainable harus menempatkan pariwisata sebagai green industry (industri yang ramah lingkungan), yang menjadi tanggungjawab pemerintah, industri pariwisata, masyarakat dan wisatawan.
2. Peningkatan peran pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata
3. Kemantaban/keberdayaan industri pariwisata yaitu mampu menciptakan produk pariwisata yang bisa bersaing secara internasional, dan mensejahterakan masyarakat di tempat tujuan wisata,
4. Kemitraan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata yang bertujuan menghapus/meminimalisir perbedaan tingkat kesejahteraan wisatawan dan masyarakat di daerah tujuan wisata untuk menghindari konflik dan dominasi satu sama lain. Hal ini juga didukung dengan memberi perhatian/pengembangan usaha skala kecil oleh masyarakat lokal.

Selain itu, pemerintah Aceh Tengah seharusnya memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan wisata halal, apalagi hasil bebeapa kajian di atas telah membuktikan bahwa Aceh Tengah sangat potensial dalam mengembangkan wisata halal. Jadi sudah selayaknya wisata halal menjadi prioritas utama untuk benar-benar

²³⁹ Yervi Hesnaa dkk. Kajian Kapasitas Infrastruktur : Suatu Upaya Peningkatan Pariwisata Sumatera Barat. Simposium I Jaringan Perguruan Tinggi untuk Pembangunan Infrastruktur Indonesia. 2016

²⁴⁰ Pan, B., & Turner, G.B. Tourist information search and acquisition: An extended framework. Annual Conference of Atlantic Marketing Association, Charleston, SC, USA 2006

ditangani dengan serius, salah satunya regulasi tentang wisata halal harus segera diterbitkan termasuk juga sertifikasi halal. Selanjutnya keberlangsungan wisata halal bukan saja tanggung jawab pemerintah tetapi juga semua pemangku kepentingan lainnya harus memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan wisata halal. Para pelaku bisnis dan mitra terkait, seluruh masyarakat termasuk tokoh masyarakat, akademisi dan media, organisasi Islam khususnya MUI Dan DSN, dan pemerintah terkait juga perlu mendorong berkembangnya wisata halal. Karena memang kerja sama antar pemangku kepentingan itu yang bisa mempercepat berkembangnya wisata halal. Jika kerja sendiri-sendiri maka wisata halal Indonesia akan tertinggal dari negara tetangga.²⁴¹

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Penelitian Terdahulu yaitu Krishna Anugrah, Asminar Mokodongan, Ade Pebriani S, Pulmodoyo.²⁴² Pariwisata halal agar dapat berjalan dengan baik maka diperlukan kerjasama yang baik seluruh pemegang kepentingan dalam kepariwisataan. Kerjasama yang erat antar lembaga, usaha-usaha bidang pariwisata dan juga dukungan masyarakat.

Khusnul Khotimah, dkk.²⁴³ Ketersediaan aspek aksesibilitas, amenities dan ancillary service sudah cukup memadai namun masih perlu perbaikan dalam penyediaan transportasi khusus Trowulan, penyediaan homestay, pos informasi pariwisata, Money changer, gedung pertunjukan, fasilitas ATM, pos kesehatan dan pos keamanan. Kesiapan dan peran kelembagaan dalam kegiatan pariwisata perlu diperbaiki lagi terutama dalam hal kerjasama antara lembaga dari unsur pemerintah, swasta dan masyarakat.

²⁴¹ Elba damhuri, Potensi Wisata Syairah kita sangat besar sapta nirwandar penasihat kehormatan Menteri pariwisata. 2015

²⁴² Krishna Anugrah, Asminar Mokodongan, Ade Pebriani S, Pulmodoyo, Potensi Pengembangan Wisata Halal dalam Perspektif Dukungan Ketersediaan Restoran Halal Lokal (Non Waralaba) di Kota Gorontalo, Potensi Pengembangan Wisata Halal ISSN (print) : 1410 – 7252 ISSN (electronic): 2541 – 5859 Vol. 2 No. 02 Desember 2017

²⁴³ Khusnul Khotimah, dkk, Potensi Pengembangan Wisata Halal dalam Perspektif Dukungan Ketersediaan Restoran Halal Lokal (Non Waralaba) di Kota Gorontalo, Potensi Pengembangan Wisata Halal ISSN (print) : 1410 – 7252 ISSN (electronic): 2541-5859 Vol. 2 No. 02 Desember 2017

Demikian juga peran pemerintah perlu ditingkatkan untuk mendukung mempromosikan dan menggarap wisata halal ini. Pemerintah dan pelaku usaha, serta stakeholder yang terkait harus bahu-membahu untuk menjadikan Aceh Tengah sebagai destinasi wisata halal. Ini berarti sinergitas para stakeholders ini perlu dilakukan untuk menuju wisata yang idam-idamkan oleh umat.

A Muchaddam Fahham.²⁴⁴ Pemda NTB masih menghadapi berbagai tantangan, di antara tantangannya adalah pertama, meyakinkan warganya tentang urgensi pengembangan wisata halal di NTB, kedua, penyiapan sumber daya manusia yang kompeten, ketiga, percepatan sertifikasi halal bagi hotel dan restoran. Keempat, sinergi antarpemangku kepentingan dalam proses sertifikasi halal. Dan kelima, wisata halal perlu didukung oleh seperangkat peraturan perundangan yang dapat mensinergikan antarpemangku kepentingan yang terlibat dalam proses serifikasi halal.

Asep Ahmad Saefuloh, Dwi Resti Pratiwi.²⁴⁵ Dengan mayoritas penduduk muslim, menjadikan Indonesia berpotensi mengembangkan wisata halal. Namun hal itu tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan wisata halal. Perlu adanya kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan pelaku wisata untuk meghidupi tantangan tersebut.

Halal diharapkan dapat menjadikan Aceh Tengah sebagai destinasi yang ramah untuk wisatawan Muslim dan memerlukan standarisasi baik terhadap layanan wisata maupun produk-produk wisata serta sertifikasi para SDMnya. Dengan demikian arah dari bisnis pariwisata di Aceh Tengah memiliki paradigma yang jelas dan berkontribusi sangat besar terhadap pengembangan ekonomi secara komprehensif dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Demikian juga peran pemerintah perlu ditingkatkan untuk mendukung mempromosikan dan menggarap wisata halal ini. Pemerintah dan pelaku usaha,

²⁴⁴ A. Muchaddam Fahham, Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara. 2017

²⁴⁵ Asep Ahmad Saefuloh, Dwi Resti Pratiwi, *Delegated Act : Dampak dan Alternatif Kebijakan Potensi dan Tantangan Wisata Halla Indonesia*, Buletin APBN Vol. IV, Edisi 9, Mei 2019

serta stakeholder yang terkait harus bahu-membahu untuk menjadikan Aceh Tengah sebagai destinasi wisata halal. Ini berarti sinergitas para stakeholders ini perlu dilakukan untuk menuju wisata yang berkelanjutan (sustainable). Dan pada akhirnya wisata halal diharapkan dapat menjadikan Aceh Tengah sebagai destinasi yang ramah untuk wisatawan Muslim dan memerlukan standarisasi baik terhadap layanan wisata maupun produk-produk wisata serta sertifikasi para SDMnya. Dengan demikian arah dari bisnis pariwisata yang ada di Aceh Tengah memiliki paradigma yang jelas dan berkontribusi sangat besar terhadap pengembangan ekonomi secara komprehensif dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat lokal

Kaitan hasil penelitian ini tentang pariwisata halal dengan *Maqashid al-Syari'ah* bahwa para wisatawan yang berkunjung pada daerah wisata dapat merasakan kenyamanan dan pada saat mereka tinggal di daerah wisata yang mereka kunjungi. seperti, pada aspek makanan seharusnya dijamin halal sekaligus *thoyyib*, karenanya semua makanan minuman yang disediakan harus senantiasa steril dari makanan dan minuman yang diharamkan. Pada saat yang sama penyediaan peralatan ibadah harus terisi, seperti penyediaan alat shalat, arah kiblat untuk memenuhi nilai elemen *maqashid al-Syari'ah* berupa *hifzh al-Din* (pemeliharaan agama). Tapi yang paling penting bagaimana para tamu berinvestasi dalam bentuk apa saja, sehingga mereka tidak hanya datang tetapi mereka akan selalu datang untuk menjadi tamu dan pemilik. Bahkan dengan adanya investasi itu, lapangan kerja semakin terbuka bagi masyarakat dan akan mengurangi pengangguran.

Pariwisata halal yang berhubungan dengan *Maqashid al-Syari'ah* mesti meliputi 5 bagian diantaranya pertama dalam pariwisata halal harus tersedianya infrastruktur yang mendukung dalam konsep masalah, hal ini untuk memudahkan seseorang untuk melakukan ibadah karena tersedianya sarana untuk melaksanakan ibadah misalnya *hifzh al-Din*. Kedua, *hifzh al-Nasal* yaitu pada penduduk leluasa berfaedah bagi penyedia hotel pengunjung serta masyarakat menjadi penduduk area wisata dapat mempersembahkan ketenangan bagi pamili dan privasi dapat merasakan dengan terpelihara kemuliaan mereka pada saat berpariwisata. Ketika

berada pada objek wisata pada umumnya menyampaikan keleluasaan jarak pria dan wanita yang tidak *mahram*, bahwa terang maksud serta dan pendirian pariwisata perspektif halal melarang hal itu, dengan tujuan untuk menjaga kehormatan antara pria dan wanita yang sedang melancong datang untuk bertandang.

Ketiga, *hifzh al-Mal*, maknanya bagaimana usaha rakyat, baik para pengelola dan sebagainya bisa membagikan keternteraman dengan tidak berjual beli yang dapat memicu kemudaratn yang abnormal, seperti menjual barang-barang yang diharamkan dan sebagainya. Keempat, *hifz al-Nafs*, artinya bagaimana upaya pengelola dan masyarakat luas dapat menjaga situasi dan kondisi sehingga dapat terjaga keamanan dan kenyamanan dalam menghabiskan waktu dalam berpariwisata.

Kelima *al-Aql*, adalah bagaimana upaya masyarakat luas, baik pengelola dan lainnya dapat menjaga kondisi dan situai dengan menjauhi segala bentuk yang merusak akal, seperti penyalahgunaan narkoba, minuman keras dan sebagaimana ketentuan-ketentuan pariwisata halal yang dibingkai dengan konsep *maqashid al-syari'ah*, khususnya *Maqasid Al-Dharuriyyat* (tujuan-tujuan niscaya/primer) wajib terpenuhi, sehingga disebut dengan istilah pariwisata halal.

Dalam dunia pariwisata halal ada *Maqasid Al-Hajiyyat* (tujuan-tujuan sekunder) dapat dijelaskan umpama, sungguh dalam rencana melindungi agama (*hifz al-din*) maka para pelancong harus menjalankan anjuran agama diantaranya sholat, bahwa kelompok penyelenggara wisata halal bertanggung jawab mempersiapkan mushalla. Tanpa tersedianya mushalla, para pengunjung sebenarnya dapat hanya sholat di samping tepi laut, di kerikil batu, dan lain-lain, akan namun keberadaan mushalla kemudian menjadi penting dan diperlukan (arti dari *hajiyyat*) akan memperlancar para pengunjung untuk melindungi amanat agama dalam melaksanakan kewajipan umat muslim yaitu ibadah sholat.

Persis Sama situasi ketika dalam melindungi nyawa serta jiwa (*hifz al-nafs*), para penyelenggara objek wisata halal bisa saja cuma mempersiapkan santapan halal ala kadarnya serta apa adanya diantaranya beras serta sayur-sayuran hijau. Akan tetapi, kehadiran konsumsi yang halal juga tak memadai, melainkan mesti

thoyyib, yakni enak, nikmat, sedap, bergizi akan tetapi simpel juga tidak merepotkan sehingga kehadiran cafe dan kedai santap menjadi berarti ataupun dibutuhkan. Selanjutnya dalam rencana melindungi kemuliaan/keturunan (*hifz al-hurmah/al-nasal*), pada kawasan wisata dapat pula dilaksanakan karena tidak silih memperhatikan serta berhubungan karena orang yang tidak mahram, pemisahan diantara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya sangat penting dibutuhkan untuk menjaga penglihatan karena diperlukan (*hajiyyat*) untuk memperlancar memelihara penglihatan serta aurat. Persis sama, dalam rencana memelihara kekayaan (*hifz al-maal*), pengelola wisata halal dapat memfasilitasi loker atau *safety box* untuk para pelancong, akan tapi kehadiran loker khusus dan *safety box* jelas benar-benar sangat perlu serta diperlukan untuk menjaga harta dari perbuatan-perbuatan manusia yang tak bertanggung jawab.

Novelty dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Dalam penelitian ini yang paling prioritas dalam pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dari sisi masalah yang paling prioritas adalah infrastruktur yaitu masih lemahnya infrastruktur yang tersedia serta kurang tersedianya alat transportasi menuju daerah wisata, dari sisi solusi infrastruktur menjadi solusi yang sangat penting dalam pengembangan pariwisata halal yang ada di Aceh Tengah yaitu tersedianya infrastruktur yang memadai dan tersedianya transportasi/trevel hal ini sangat penting bagaimana pun bagus dan indah nya daya Tarik wisata kalau tidak adanya transportasi dan travel hal ini akan sulit untuk berkembang, dari aspek strategi yang paling penting adalah adanya sinergisitas dalam pengembangan pariwisata halal. Selain itu yang menjadi pembeda dalam penelitian ini dalam pengembangan destinasi pariwisata halal yang ada di Aceh Tengah yang dibingkai dengan kearifan lokal masyarakat setempat. Kearifan lokal masyarakat Aceh Tengah yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat menggerakkan perekonomian masyarakat salah satunya adalah kerajinan kerawang Gayo yang sudah menjadi mata pencarian masyarakat Aceh Tengah yang dikemas dengan berbagai macam produk dan souvenir yang ditawarkan kepada masyarakat yang berkunjung ke Aceh

Tengah. Selain kerawang Gayo ada tradisi yang menjadi ikon dalam pengembangan pariwisata yang ada di Aceh Tengah yaitu pacuan kuda yang diselenggarakan setahun 2 kali ini juga menjadi daya Tarik tersendiri, yang tidak kalah menariknya adalah dari sisi kopi Gayonya yang telah mendunia dan menjadi sumber pendapatan masyarakat lokal.

Penelitian yang dilakukan oleh Surya elfi desi 2018 dengan judul analisis pemasaran pariwisata halal di provinsi sumatera barat hasil penelitiannya menunjukkan yang paling prioritas adalah produk wisata, brand image destinasi dan sumber daya manusia yang sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan dengan menggunakan metode. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Tety Yulianti 2020 dengan judul wisata halal sustainable di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek regulasi yang sangat penting dalam penerapan wisata halal walaupun daerah memiliki aspek regulasi sendiri tetapi aspek regulasi dari pusat tentang pariwisata halal yang paling utama dan aspek sertifikasi halal yang paling prioritas.

Penelitian yang dilakukan oleh Hefriansyah 2020 dengan judul analisis problematika pengembangan potensi pariwisata halal kota Pematang Siantar sebagai penyangga destinasi danau toba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang paling prioritas adalah pengembangan ekosistem, lalu diikuti oleh penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan, pengembangan aksesibilitas dan konektivitas, pengembangan investasi pariwisata, pengembangan amenities, strategi dan pengembangan atraksi.

Penelitian yang dilakukan oleh Murah Syahrial, 2020 Model Penta Helix Dalam Pengembangan Pariwisata Halal di Sumatera Barat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa paktor pendukung dari masyarakat kepada stakeholders dan penghambat dalam dalam pengembangan pariwisata halal di Sumatera Barat sangat tinggi sekali yang menjadi penghambat adalah belum adanya payung hukum yang jelas tentang pariwisata halal. maka perlu adanya Kerjasama antar unsur penta Helix pariwisata Sumatera Barat bahwa stakeholder selama ini masih jalan sendiri-

sendiri. Inilah Posisi penelitian ini bagaimana dibandingkan dengan beberapa penelitian yang yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data, maka penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Permasalahan yang dihadapi dalam strategi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, dapat dilihat dari dua aspek yaitu masalah internal dan eksternal. Berdasarkan hasil dari penilaian responden menunjukkan bahwa permasalahan yang paling prioritas adalah masalah eksternal yaitu masalah infrastruktur yaitu lemahnya infrastruktur dan kurang tersedianya transportasi.
2. Solusi dalam pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat juga dilihat dari dua aspek yaitu solusi internal dan solusi eksternal. Berdasarkan hasil penilaian responden menunjukkan bahwa prioritas dan solusi yang paling prioritas adalah solusi eksternal yaitu solusi infrastruktur yaitu tersedianya infrastruktur yang memadai dan adanya transportasi atau travel.
3. Strategi dalam pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang paling prioritas adalah peningkatan fasilitas, infrastruktur, dan sinergisitas antara pemerintah dan pelaku usaha, sosialisasi dan promosi, peningkatan investasi bidang pariwisata halal, pengembangan produk khas masyarakat Gayo, pengembangan produk pariwisata, dan sertifikasi pelaku usaha.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan pengembangan destinasi pariwisata halal yang berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh Tengah, kepada pemerintah daerah (Aceh Tengah) harus memperhatikan infrastruktur yang tersedia seperti tersedianya transportasi yang sesuai dengan kebutuhan pengunjung, daya Tarik wisata serta fasilitas yang tersedia.
2. Agar terwujudnya pariwisata halal, maka yang harus di diperhatikan diantaranya adalah Regulasi dan dukungan dari pemerintah daerah dengan menerbitkan qanun tentang pariwisata halal dan tersedianya infrastruktur yang memadai guna untuk mempermudah akses untuk menuju daerah wisata.
3. Dalam pengembangan destinasi pariwisata halal yang ada di Aceh Tengah maka ada beberapa strategi yang paling prioritas yang ditawarkan agar terwujudnya pariwisata halal yang ada di Aceh Tengah diantaranya harus adanya peningkatan fasilitas, infrastruktur dan sinergisitas dalam pengembangan pariwisata halal, sosialisasi dan promosi, pengembangan produk khas masyarakat Gayo, sertifikasi pelaku usaha, pengembangan produk pariwisata, dan peningkatan investasi dalam bidang pariwisata halal.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muchaddam Fahham, 2017, *Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara*. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA
- A.R. Hakim Aman Pinan, 2001, *Daur Hidup Masyarakat Gayo*, Takengon: ICMI Orsat Aceh Tengah
- Abidah, 2019, *Rekonstruksi Transferable Skill Mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) STAIN GAJAH PUTIH TAKENGON Berkearifan Lokal Gayo*. Disertasi Tidak Dipublikasikan.
- Adrian Adi Hamzana, 2017, *Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal dalam Pengembangan Pariwisata di Nusa Tenggara Barat*, Jurnal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 17, No. 2, 2017, 1-16
- Ahmad Qorib, Isnaini, Harahap, 2016, *Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam*. Jurnal Analytica Islamica, Vol. 5, No. 1, 2016: 55-80
- Ahsani Taqwiem, Ahmad Rofiq Zakaria, 2020, *Wisata Halal untuk Mencapai Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa dan Tujuan Maqashid Syariah (Studi Kasus pada Desa Wisata Pujon Kidul, Kabupaten Malang, Jawa Timur)*. Jurnal El-Aswaq Volume 1 Nomor 1 Tahun 2020
- Ali Hasan, 2015, *Green Tourism Marketing model*. Jurnal Media Wisata, Volume 13, Nomor 2, Nov 2015
- Al-Qur'an al-Karim*
- Anang Sutoyo, 2019, *Ketua Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal, detikTravel, Ini 10 Destinasi Wisata Halal Unggulan Indonesia*, Feb B, Travel News.
- Anissa Dea Widiarini, 2021, *Infrastruktur Berperan Penting Untuk Kemajuan Pariwisata*, amp.kompas.com, pada minggu 31 januari 2021, 11:36 WIB
- Ascarya, 2005, *Analytic Network Proses (ANP): Pendekatan Baru Studi Kualitatif*, Seminar inter Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Trisaksi, Jakarta.

Asep Ahmad Saefuloh, Dwi Resti Pratiwi, 2019, *Delegated Act : Dampak dan Alternatif Kebijakan Potensi dan Tantangan Wisata Halal Indonesia*. Buletin APBN Vol. IV, Edisi 9, Mei 2019

Badan Pusat Statistik Aceh Tengah 2019

Comcec, 2016, *Muslim Friendly Tourism: Understanding the Demand and Supply Sides In the OIC Member Countries (Turkey: Comcec Coordination Office, 2016)*, h. 2.

Danar Widiyanto, *50 Persen Wisatawan Dunia*, Generasi Millennial, asitajogja.org, pada tanggal 31 januari, pukul 17:15

Dawud Kusuma Dwjayadi, 2016, *Businiss As Usual Atau Business For political Purpose? Motif Pengembangan Pariwisata Halal di Thailand*. Jurnal Hubungan Internasional Universitas Airlangga

Eka Dewi Satriana, Hayyun Durrotul Faridah, 2018, *Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, Dan Tantangan*, Journal of Halal Product and Research (JHPR) Vol. 01 No.02, Mei-November 2018 © Copyright by Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal Universitas Airlangga | e-ISSN: 2654- 9778

Elba damhuri, 2015, *Potensi Wisata Syairah kita sangat besar -sapta nirwandar-penasihat kehormatan-menteri-pariwisata*

Endro Priherdityo, *Jaminan Halal Dari Luar Negeri Sama Dengan Halal Dari MUI?*, cnn indonesia.com

Fahadil Amin Al Hasan, 2017, *Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2016, No: 1 08/Dsn-Mui 1 6 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Gamal Suwanto, *Dasar-Dasar Pariwisata*, (Yogyakarta: Andi Publishing, 1997), 19

H.Bakry, 2003, *Fiqh & Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

Herry Akbar dkk, 2017, *infrastruktur prioritas pada zona pariwisata di kota sabang dengan menggunakan metode location quotient (lq) dan analytic*

- network proses (anp. Jurnal Teknik Sipil Universitas Syiah Kuala Banda Aceh*
- Hefriansyah, 2020, *Analisis Problematika Pengembangan Potensi Pariwisata Halal Kota Pematang Siantar Sebagai Penyangga Destinasi Prioritas Danau Toba*. Disertasi UINSU
- Hendri Hermawan Adinugraha, Mila Sartika, Ana Kadarningsih, 2018, *Desa Wisata Halal: Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia*. Human Falah Volume 5. No. 1 Januari – Juni 2018.
- Hendri Tanjung, 2013, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Penerbit Publisher Gramata Pub.
- Hendry Ferdiansyah, Cipta Endyana, Heryadi Rachmat, Ute Lies Siti Khadijah, 2020, *Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia Melalui Konsep Smart Tourism*. jurnal unpad
- Henky Hermantoro, 2011, *Creative-Based Tourism Dari Wisata Rekreatif Menuju Wisata Kreatif*, Depok: Penerbit Aditri
- Hendry Ferdiansyah, Jurnal, *Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia Melalui Konsep Smart Tourism* . Vol. 2, No. 1, Januari 2020, 34
- H. Oka. A. Yoeti, *Industri Pariwisata dan Peluang Kesempatan Kerja*, Jakarta, Pertja, 1999, 66
- [https:// kumparan .com/kumparan travel/gubernur bali focus bangun infrastruktur untuk kembangkan pariwisata-bali-1sqLfWXptw7/full](https://kumparan.com/kumparan-travel/gubernur-bali-focus-bangun-infrastruktur-untuk-kembangkan-pariwisata-bali-1sqLfWXptw7/full)
- I Made Asdhiana, 2021, *Infrastruktur Jadi Syarat Mutlak Kembangkan Pariwisata* amp.kompas.com, pada Rabu 27 Januari 2021, 22 WIB
- I Gde Pitana, *Pengantar Ilmu Pariwisata..* (Jakarta: andi, 2009). 147
- Ida bagus & edriana, *Pengaruh Pengemabngan Komponen Destinasi Wisata terhadap kepuasan Pengunjung*. Jurnal Adminstrasi Bisnis (JAB) Vol. 55 No.3 februari 2017, 85-86
- Irfaina Rohana Salma dan Edi Eskak, 2016, *Ukiran Kerawang Aceh Gayo Sebagai Inspirasi Penciptaan Motif Batik Khas Aceh Gayo*. Dinamika Kerajinan Dan Batik Vol. 33, No. 2, Desember 2016 121-132, Hal 122.

- Irwan Kelana dan Rahmat Fajar, 2017, *Tiga Jurusan Majukan Wisata Halal* dalam Republika, edisi 18 Agustus, 16. Bandingkan dengan Qardhawi, Dawr al-Qiyam.
- Jaelani, Aan, 2016, *Islamic Tourism Development in Cirebon: The Study Heritage Tourism in Islamic Economic Perspective* Journal of Economics, Vol. 3
- Jaelani, Aan, 2017, *Industri Wisata Halal Di Indonesia: Potensi Dan Prospek (Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects)*, MPRA Paper, 429.27 (2017), 884–921
- Joni, 2017, *Kerawang Gayo ; Tingkis Ulak Ku Bide, Sesat Ulak Ku Dene* Tangerang ; Mahara Publishing.
- Kadir H. Din, 1989, *Islam And Tourism Patterns, Issues, And Options*. Ann& of Toururn Research, Vol. 16, pp. 542-563, 1989
- Krishna Anugrah, Asminar Mokodongan, Ade Pebriani S, Pulmodoyo, 2017, *Potensi Pengembangn Wisata Halal dalam Perspektif Dukungan Ketersediaan Restoran Halal Lokal (Non Waralaba) di Kota Gorontalo, Potensi Pengembangan Wisata Halal* ISSN (print) : 1410 – 7252 ISSN (electronic): 2541 – 5859 Vol. 2 No. 02 Desember 2017
- Kurniawan Gilang Widagdyo, 2015, *Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia*. The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1 (2015): 73-80
- Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia PEM, 2018, *Kajian Dampak Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Indonesia*
- Lina Munirah Kamarudin and Hairul Nizam Ismail, 2016, *Muslim Tourism: The Tendency of Islamic Traveling Attributes from Malaysia Perspective*. Conference Paper · April 2016
- Lufi Wahidati , Eska Nia Sarinastiti, 2018, *Perkembangan Wisata Halal Di Jepang* Jurnal Gama Societa, Vol. 1 No. 1, Januari 2018, 9-19
- M.Quraish Shihab, 2002, *Tafsir al-Misbah pesan, kesan, dan keserasian al-Quran, Volume 10* Jakarta. Lentera hati

- Mariska Ardilla Faza, 2019, *Analisis SWOT Pariwisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Jurnal Manajemen Indonesia
- Mochammad Arif Budiman, 2019, *Opportunity and Threat of Developing Halal Tourism Destinations: A Case of Banjarmasin, Indonesia*. International Journal of Economic Behavior and Organization
- Mohamed Battour, Mohd nazari Ismail, 2015, Toward a Halal Tourism Market. Concepts, Practices, Challenges and Future”, <http://dx.doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008>, 2
- Mohamed Battoura,b, Mohd Nazari, 2015 *Ismailc, Moustafa Battora,d and Muhammad Awaise Islamic tourism: an empirical examination of travel motivation and satisfaction in Malaysia*. Current Issues in Tourism.
- Mohammed Shunnaq, William A. Schwab and Margaret F. Reid, 2008, *Community Development Using a Sustainable Tourism Strategy: a Case Study of the Jordan River Valley Touristway*. International Journal Of Tourism Research Int. J. Tourism Res. 10, 1–14.
- Muhammad Djakfar, 2017, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia*. UIN MALIKI Press.
- Muhammad Riadhussyah, Alwafi Ridho Subarkah, 2020, *Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Wisata Halal dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0*. Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur) 8, 1 (2020): 1-13
- Muis, 2020, *Perkembangan Peluang dan Tantangan Wisata Halal di Aceh*. ADABIYA, Volume 22 No. 1 Februari
- Murah Syahrial, 2020, *Model Penta Helix Dalam Pengembangan Pariwisata Halal Di Sumatera Barat*. Disertasi UINSU Medan
- Murah Syahrial, 2020, *Model Penta Helix Dalam Pengembangan Pariwisata Halal Di Sumatera Barat*. Disertasi UINSU Medan
- Muslim Friendly Tourism, 2016, *Understanding the Demand and Supply Sides in the OIC Member Countries’, Standing Committee for Economic and*

Commercial Cooperation of The Organization of Islamic Cooperation (COMCEC) Coordination Office, 28.

Nurul Huda dkk 2019. *South Sulawesi Halal Tourism a Strategic Approach*. Advances in Economics, Business and Management Research, volume 143

Oka. A Yoeti, *Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi, dan Implementasi*. Penerbit Kompas. Jakarta. 2008

Pahrudin, L Liub , S Muzayyanaha , Kamilc. 2020, *A Tourism Models Based on Local Wisdom as A Strategy for Poverty Alleviation (A Case from the Village in Indonesia)*. This is an open access article under the CC BY-NC license (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0>).

Pan, B., & Turner, G.B, 2006, *Tourist information search and acquisition: An extended framework*. *Annual Conference of Atlantic Marketing Association, Charleston, SC, USA*

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Aceh Tengah Takengon, 2017. Dinas pariwisata dan Olah raga

Perbawasari, S.Sjuchro, D.W. Setianti, Y., Nugrahar, A.R., & Muda, I, 2019, *Halal Tourism Communication Formation Model In West Java, Indonesia*. *GeoJournal of Tourism and Geosites*, 25(2), 309–320. <https://doi.org/10.30892/gtg.25203-361>

Priyadi, Unggul, *Pariwisata Syariah (prospek dan perkembangan)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2016

Pitana dan Diarta. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Jakarta. Andi, 2009. 145

Piyachat Puangniyom dkk, 2017, *Halal Tourism Strategy to Promote Sustainable Cultural Tourism in Thailand*, 2017 CEBU International Conference on Studies in Arts, Social Sciences and Humanities (SASSH-17) Jan. 26-27, 2017, Cebu (Philippines), h. 197.

Rahmat Saleh And Nur Anisah, 2018, *Pariwisata Halal Di Aceh: Gagasan Dan Realitas Di Lapangan*. *Sahafa Journal Of Islamic Communication*, 1.2 79–92 <<https://doi.org/10.21111/Sjic.V1i2.2849>>.

- Rahmat Yanidin, Muhammad Bin Abubakar, M. Akmal, 2020, *The Local Government Strategies in Building Halal Tourism in Bener Meriah Regency*. Malikussaleh Social & Political Reviews
- Rijal Khaerani, Panji Pamungkas, 2018, *Pengembangan Daya Tarik Wisata Daarus Sunnah Menjadi Wisata Halal*. Tourism Scientific Journal Volume 3 Nomor 1 Desember 2017
- Rimet, 2019, Strategi Pengembangan Wisata Syariah Di Sumatera Barat: Analisis Swot (Strength, Weakness, Opportunity, Threat). Syarikat : Jurnal rumpun ekonomi syariah
- Rizka Gusti Anggraini, 2019, *Pemerintah Genjot Pembangunan Infrastruktur Kawasan Wisata Prioritas*. google.com, pada sabtu 16 Februari 2019, 09:22 WIB
- Ronny Anggrianto, 2012, *Revolusi Gila Bisnis Tour & Travel* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012)
- Saaty, Thomas L and Vargas, Louis G, 2006, *Decision Making with the Analytic Network Process. Economic, Political, Social and Technological Applications with Benefits, Opportunities, Costs and Risks*. Springer. RWS Publication, Pittsburgh
- Saidi, S. and Hammami, S, 2011, *The role of transport and logistics to attract foreign direct investment in the developing countries*. Logistics (LOGISTIQUA), 2011 4th International Conference in Hammamet, Tunisia, h. 484-489
- Samori, Zakiah, Nor Zafir Md Salleh, and Mohammad Mahyuddin Khalid, 2016, *Current Trends on Halal Tourism: Cases on Selected Asian Countries, Tourism Management Perspectives*, 19, 131–36
- Siti Daulah Khoiriati, dkk, 2016, *Debating Halal Tourism Between Values and Branding: A Case Study of Lombok, Indonesia*. The 1st International Conference on South East Asia Studies
- Sofyan, 2012, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*. Cetakan 1, Jakarta: Republika

- Suesilowati, Rina Ekawati, 2016, *Halal Tourism Development Strategy Program in Indonesia*. International Conference on Tourism Gastronomy and Tourist Destination (ICTGTD)
- Surya Elfitra Desy, 2018, *Analisis Pemasaran Pariwisata Halal di Propinsi Sumatera Barat*. Disertasi Universitas Sumatera Utara.
- Suwanto. Dasar-dasar Pariwisata. Yogyakarta. Andi, 1997. 22
- Tetty Yuliaty, 2020, *Model Wisata Halal Sustainable Di Indonesia*. Disertasi UINSU Medan
- Ujang Suyatman, Ruminda, Ika Yatmikasari, 2018, *Pulau Lombok: Pengembangan Pariwisata Halal Dalam Bingkai Keraifan Lokal*. Lembaga Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati
- Umer Chapra, 2008, *The Islamic Vision of Development in The Light of Maqashid Syariah* (London: IIIT, 2008), Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*
- Umni Sakinah, Rosmala Dewi, and Irsanti, 2016, *Kajian Visual Kerawang Gayo Pada Upuh Ulen-Ulen*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, 1.1 (2016), 74–82.
- Undang-Undang Tahun, 2009, *Tentang Kepariwisataan*
- Viva, 2021, *Pentingnya Label Halal Untuk Dunia Pariwisata Indonesia*. viva.co.id. pada selasa 2 Januari 2021, 17:55 WIB
- Wiendu Nuryanti, 2009, *Sinergi Arsitektur dan Pariwisata Dalam Membangun Indonesia Kreatif* Universitas Gajah Mada.
- Yasin, Mohammad Nur, 2018, *Islamic economic law principles and the development of Malang Raya as international halal tourism destination*. The Social Sciences, 13 (2). pp. 296-304. ISSN 1993-6125
- Yervi Hesnaa dkk, 2016, *Kajian Kapasitas Infrastruktur : Suatu Upaya Peningkatan Pariwisata Sumatera Barat*. Simposium I Jaringan Perguruan Tinggi untuk Pembangunan Infrastruktur Indonesia.
- Yoeti, Oka A, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita. 1979

Yoeti Oka A, Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung. Angkasa. 1991, 103

Yudhi Martha Nugraha, 2018, *Analisis Potensi Promosi Pariwisata Halal Melalui E-Marketing Di Kepulauan Riau*. Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti